



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, *juncto* Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dengan
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah Kota yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program pembangunan Daerah periode Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam penyusunan:
 - a. RPJMD; dan
 - b. RKPD.

Pasal 3

Periodesasi RPJPD dibagi dalam tahapan pembangunan jangka menengah Daerah dengan tahun perencanaan yang disesuaikan masa jabatan Wali Kota.

BAB III SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 4

RPJPD disusun dengan distematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
- BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
- BAB VI : PENUTUP

Pasal 5

Isi dan uraian RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Wali Kota yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya, menyusun RKPD untuk tahun pertama periode jabatan Wali Kota berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode jabatan Wali Kota berikutnya.

Pasal 8

Ketentuan peraturan pelaksanaan mengenai perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 14 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 15 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

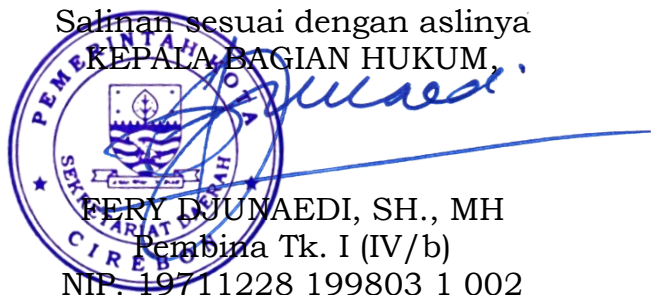
ttd,

IING DAIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(8/200/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Sistem Perencanaan Nasional adalah suatu kesatuan proses perencanaan pembangunan untuk menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan ini memiliki periode yang dibagi menjadi beberapa dokumen perencanaan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan perencanaan 20 (dua puluh) tahun, yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Rencana pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan perencanaan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Rencana Strategis yang merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun Kementerian/Lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah;
5. Rencana Kerja yang merupakan perencanaan tahunan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah.

Kelima dokumen perencanaan tersebut tidak hanya disusun oleh Pemerintah Pusat, melainkan juga oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 juga menjelaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses dan substansi. Dokumen perencanaan yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045, dijabarkan “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.” Negara Nusantara sendiri dimaknai sebagai negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Terdapat lima sasaran yang ditetapkan dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, meliputi:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat;
5. Intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju *net zero emission*.

RPJPD Kota Cirebon disusun berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJP Nasional, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah Kota Cirebon. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar dan arahan secara garis besar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan.

Pembangunan jangka panjang daerah Kota Cirebon Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya. Dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Kota Cirebon untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaan, sehingga dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tingkat regional dan nasional.

Kurun waktu RPJP Daerah Kota Cirebon adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJPD 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam tiap-tiap tahap RPJPD yaitu: RPJPD tahap pertama, RPJPD tahap kedua, RPJPD tahap ketiga, dan RPJPD tahap keempat. Dalam penyusunan RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, serta kebijakan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan pertimbangan di atas, disusun rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cirebon Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud adalah Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026, sampai dengan ditetapkannya RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 9

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Cirebon memiliki peran strategis dalam perkembangan ekonomi wilayah sekitarnya. Di wilayah Ciayumajakuning, Kota Cirebon menjadi pusat kegiatan perdagangan jasa, layanan kesehatan dan Pendidikan. Kota Cirebon juga memiliki serta peran strategis dalam pembangunan ekonomi di Jawa Barat. Salah satunya karena letak geografisnya yang sangat strategis. Kota Cirebon berada di jalur perlintasan barang dan jasa melalui pantai utara (pantura), yang menghubungkan wilayah barat, seperti DKI Jakarta dan Bandung, dengan wilayah timur, seperti daerah-daerah di Jawa Tengah dan Sumatera. Hal ini menjadikan Kota Cirebon menjadi salah satu pusat aglomerasi penduduk, aktivitas ekonomi, dan sosial masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Peran strategis dalam jalur perlintasan barang dan jasa ini turut mewarnai peran Kota Cirebon dalam pengembangan kawasan Rebana. Adapun dalam pembangunan nasional, Kota Cirebon merupakan pusat kegiatan nasional.

Peran penting Kota Cirebon tentunya tidak terlepas dari potensi yang dimiliki kota ini. Segala potensi yang ada, seperti potensi pengembangan wilayah, potensi sumber daya manusia, serta ketersediaan infrastruktur yang relatif lengkap, menjadikan Kota Cirebon menarik untuk dijadikan tujuan investasi yang dapat mengungkit performa perekonomian kota. Dalam konteks pembangunan daerah, hal ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon yang diupayakan melalui pembiayaan seluruh program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Optimalisasi peran dan potensi yang dimiliki Kota Cirebon terus diupayakan dalam pembangunan kota. Dalam perkembangannya, Kota Cirebon saat ini dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa yang memiliki daya tarik pariwisata budaya dan sejarah.

Perkembangan Kota Cirebon tidak terlepas dari sejarahnya di masa lalu. Sejarah Kota Cirebon diawali dari kepemimpinan Prabu Siliwangi yang memiliki putra bernama Pangeran Walasungsang. Dalam perjalanan hidupnya, Pangeran Walasungsang memutuskan untuk melepaskan haknya atas keduniawian dan memilih memeluk Agama Islam. Makam Pangeran Walangsungsang meninggalkan Pajajaran masuk hutan belantara menuju ke arah pantai utara Pulau Jawa untuk mencari guru Agama Islam. Kemudian, Pangeran Walangsungsang dikawinkan dengan Nyai Endang Geulis oleh Ki Danuwarsih.

Pangeran Walangsungsang bersama istri dan adiknya meneruskan perjalanan sampai ke puncak Gunung Amparan Jati yang menjadi tempat kediaman Syekh Catuk Kahfi.

Dalam perjalanannya saat mempelajari Agama Islam, Pangeran Walangsungsang diperintahkan oleh Gurunya untuk membuka pemukiman di sebelah selatan Gunung Amparan Jati yang dikenal Kebon Pesisir. Maka pada tanggal 1 Asyura 1445 Saka atau 1 Muharam 849 Hijriah, Walangsungsang melaksanakan perintah Guru menjadikan Kebon Pesisir untuk pedukuhan yang diberi nama witana sebagai lokasi dimana Keraton Kesultanan Kanoman berdiri, yang nantinya berkembang menjadi Kota Cirebon.

Saat di Tanah Suci Mekah, Nyai Mas Ratu Rara Santang bertemu dan menikah dengan Sultan Khut Abdullah dari Mesir. Pasangan ini memiliki keturunan Syekh Syarif Hidayatullah dengan gelar Waliyullah yang dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati dan adiknya Syekh Nurullah tetap menetap di tempat tinggal ayahnya. Sunan Gunung Jati inilah yang kemudian menurunkan Kesultanan Cirebon dan Banten.

Pada Perkembangan selanjutnya, Pangeran Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi ditunjuk sebagai Adipati Cirebon dengan Gelar Cakrabumi. Pangeran inilah yang mendirikan Kerajaan Cirebon, diawali dengan tidak mengirimkan upeti kepada Raja Galuh. Oleh karena itu Raja Galuh mengirimkan utusan ke Cirebon Untuk menanyakan upeti rebon dan terasi ke Adipati Cirebon, namun ternyata Adipati Cirebon berhasil meyakinkan para utusan atas kemerdekaan wilayah cirebon.

Dengan demikian berdirilah daerah otonomi baru di Cirebon dengan Pangeran yang menjabat sebagai adipati dengan gelar Cakrabuana. Berdirinya daerah Cirebon menandai diawalinya Kerajaan Islam Cirebon dengan pelabuhan Muara Jati yang aktivitasnya berkembang sampai kawasan Asia Tenggara.

Pada masa kolonial pemerintah Hindia Belanda, tahun 1906 Cirebon disahkan menjadi Gemeente Cheribon dengan luas 1.100 ha dan berpenduduk 20.000 jiwa (Stlb. 1906 No. 122 dan Stlb. 1926 No. 370). Kemudian pada tahun 1942, Kota Cirebon diperluas menjadi 2.450 ha dan tahun 1957 status pemerintahannya menjadi Kotapraja dengan luas 3.300 ha, setelah ditetapkan menjadi Kotamadya tahun 1965 luas wilayahnya menjadi 3.600 ha.

Setelah berstatus Gemeente Cirebon pada tahun 1906, kota ini baru dipimpin oleh seorang Burgermeester (wali kota) pada tahun 1920 dengan wali kota pertamanya adalah J.H. Johan. Kemudian dilanjutkan oleh R.A. Scotman pada tahun 1925. Pada tahun 1926 Gemeente Cirebon ditingkatkan statusnya oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi stadgemeente, dengan otonomi yang lebih luas untuk mengatur pengembangan kotanya. Selanjutnya pada tahun 1928 dipilih J.M. Van Oostrom Soede sebagai wali kota berikutnya.

Pada masa pendudukan tentara Jepang ditunjuk Asikin Nataatmaja sebagai Shitjo (wali kota) yang memerintah antara tahun 1942-1943. Kemudian dilanjutkan oleh Muhiran Suria sampai tahun 1949, sebelum digantikan oleh Prinata Kusuma.

Kota Cirebon ditetapkan secara resmi melalui peraturan pembentukan kota di Jawa Barat yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun penetapan pembentukan kota berdasarkan peraturan pada tahun 1950, namun perhitungan usia Kota Cirebon mengacu pada awal terbentuknya kesultanan Cirebon pada tahun 1445 Masehi/849 Hijriah. Dalam perkembangannya ketetapan terkait usia Kota Cirebon saat ini mengacu pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 24 Tahun 1996 tentang Hari Jadi Cirebon yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 4 tahun 2024 tentang Hari Jadi Cirebon.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Kota Cirebon harus mendukung tujuan nasional dalam mencapai sasaran Indonesia Emas dengan Visi Indonesia Tahun 2045 yaitu: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi Indonesia Tahun 2045 akan diraih dengan 5 (Lima) sasaran utama, yaitu: Pendapatan per kapita; Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang; Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission* serta juga 8 (delapan) agenda transformasi, yaitu: Transformasi Sosial; Transformasi Ekonomi; Transformasi Tata Kelola; Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan Kestinambungan Pembangunan.

Agenda transformasi nasional tersebut dibagi dalam 17 (tujuh belas) arah pembangunan melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan. Kota Cirebon, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu memberikan sumbangsih pada pencapaian target nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tidak hanya itu, Kota Cirebon perlu memberikan respons yang tepat terhadap mega-trends global berdasarkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki, hal ini guna memanfaatkan peluang-peluang yang muncul di tingkat global bagi pembangunan sosial, ekonomi, industri, teknologi dan hal lainnya bagi Kota Cirebon.

Permasalahan dan potensi yang ada di Kota Cirebon merupakan kekuatan dan kekurangan yang harus dikelola dalam melakukan pembangunan untuk mendukung mewujudkan tujuan Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat maupun tujuan Nasional melalui strategi yang digunakan agar sasaran yang diharapkan dapat tercapai. Hal inilah yang diupayakan dapat dituangkan secara sistematis dalam dokumen rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cirebon yang tengah disusun ini demi terwujudnya tujuan besar pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat Kota Cirebon. Lebih jauhnya, penyusunan RPJPD 2025-2045 Kota Cirebon ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Pembangunan yang berkelanjutan menjadi komitmen dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Cirebon, disamping sebagai salah satu upaya mendukung pencapaian tujuan

pembangunan Provinsi Jawa Barat, juga untuk mendukung pembangunan Nasional dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon periode 2025-2045 dibuat sebagai lanjutan perencanaan jangka panjang dokumen RPJPD sebelumnya yaitu periode 2005-2025. RPJPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, daerah perlu mempersiapkan RPJPD yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN. Perencanaan pembangunan jangka panjang yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan Kota Cirebon perlu dirumuskan dalam penyusunan dokumen RPJPD Kota Cirebon 2025-2045, harus sinergi dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045 dan RPJPN 2025-2045. Penyusunan dokumen RPJPD, melalui penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan seperti aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, serta mempertimbangkan isu eksternal dan isu internal. Proses perencanaan pembangunan ini mengambil pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah atas dan harus bersifat Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (THIS).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045 memperhatikan beberapa peraturan terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 88);
25. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 75).

1.3 Maksud dan Tujuan

RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan dan sinergitas pembangunan dalam rangka mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kota Cirebon yang pada akhirnya memberikan dukungan agregasi terhadap pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045.

Adapun tujuan dari penyusunan RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045, yaitu:

- a. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun atau 4 (empat) periode dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Cirebon;
- b. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon;
- c. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan nasional dengan provinsi.

1.4 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

1.4.1 Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045

RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahun yang mengacu kepada RPJPN 2025-2045, RPJPN digunakan sebagai langkah penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dengan Kota Cirebon.

Dalam rangka mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sesuai dengan pembukaan UUD 1945, maka disusun Visi Indonesia 2045, yaitu tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dengan kualitas manusia yang tinggi, ekonomi Indonesia yang meningkat menjadi negara pendapatan tinggi dan negara maju serta salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia, serta pemerataan yang berkeadilan, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan demokratis. Terdapat empat pilar pembangunan untuk mencapai Visi Indonesia 2045, yaitu:

1.4.1.1 Pembangunan manusia serta penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Strategi pembangunan pendidikan terdiri dari peningkatan kualitas dan layanan pendidikan merata, melibatkan masyarakat dalam pembangunan pendidikan, peningkatan profesionalisme guru dan perubahan metode pembelajaran, menciptakan budaya sekolah dan baca, serta peningkatan pendidikan vokasi, jiwa kewirausahaan, dan karakter. Target dari pembangunan pendidikan yang ingin dicapai tahun 2045 adalah rata-rata lama sekolah 12 tahun, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) 60%, serta angka kerja lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat dan PT sebesar 90%. Sementara itu, strategi pembangunan kesehatan terdiri dari penguasaan teknologi kesehatan, pemahaman perilaku hidup sehat, pencegahan dan pengendalian penyakit yang responsif, serta fasilitas dan jaminan kesehatan nasional tertata dan berkelanjutan. Target yang ingin dicapai adalah usia harapan hidup mencapai 75,5 tahun, penyakit HIV/AIDS, tuberkulosis, dan penyakit tidak menular lainnya menurun, malaria tereliminasi di seluruh kabupaten/kota, dan balita stunting menurun menjadi 5%.

Strategi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri dari adopsi dan penerapan iptek, kemampuan dan kemandirian iptek, pengembangan dan inovasi, serta kolaborasi perguruan tinggi, swasta, dan pemerintah. Sementara itu, reformasi ketenagakerjaan diarahkan dalam tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap 1 (2016-2025) diarahkan reformasi menuju pasar tenaga kerja yang fleksibel dan adaptif melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dengan penguatan relevansi kebutuhan industri;
2. Tahap 2 (2026-2035) diarahkan penguatan transisi lapangan kerja dan pelatihan berbasis kompetensi melalui penguatan relevansi terutama di bidang keteknikan dan teknologi informasi; serta
3. Tahap 3 (2036-2045) diarahkan pemantapan sistem pelatihan dan sertifikasi di seluruh sektor ekonomi dan transisi lapangan kerja melalui perluasan cakupan SJSN Ketenagakerjaan secara universal.
4. Target yang ingin dicapai tahun 2045 adalah tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 78%, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 65%, angkatan kerja sebesar 197,2 juta jiwa, tingkat pengangguran terbuka 3-4% porsi tenaga kerja sektor pertanian 13%, serta angkatan kerja dengan pendidikan SMA ke atas sebesar 90%.

1.4.1.2 Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Tahun 2045 ekonomi Indonesia digerakkan oleh investasi dan perdagangan, industri, pariwisata, maritim, dan jasa, serta didukung infrastruktur yang andal dan ketahanan pangan, energi dan air yang kuat. Meskipun begitu, terdapat komitmen untuk tetap menjaga lingkungan hidup demi keberlanjutan ekonomi.

- Strategi peningkatan iklim investasi dibagi menjadi tiga, yaitu:
 1. penguatan sektor padat karya berorientasi ekspor, dan bernilai tambah;
 2. percepatan investasi pada sektor teknologi maju dan inovasi tinggi; serta
 3. investasi yang berkelanjutan dan perlindungan investasi di luar negeri.
- Strategi pembangunan industri pengolahan terdiri dari :
 1. penguatan pilar pertumbuhan industri;
 2. diversifikasi dan peningkatan nilai tambah;
 3. penguatan basis industri maju;
 4. penguatan inovasi dan peran global;
 5. peningkatan adaptasi industri; serta
 6. penguatan keberlanjutan industri.
- Strategi pembangunan maritim yaitu:
 1. mewujudkan kemampuan pertahanan keamanan maritim yang kuat dan andal menghadapi tantangan regional dan global;
 2. meningkatkan peranan ekonomi maritim dengan fokus pembangunan konektivitas laut yang efisien dan efektif, industrialisasi perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta pariwisata bahari yang inklusi dan maritim; serta
 3. menciptakan kualitas SDM maritim yang unggul, inovasi, teknologi kemaritiman, dan budaya maritim yang kuat sebagai basis peradaban bahari.
- Strategi pemantapan ketahanan pangan terdiri dari
 1. pengembangan pusat pendidikan dan teknologi pertanian,
 2. peningkatan produktivitas, pengendalian konversi lahan pertanian, dan pengembangan pertanian maritim,

3. peningkatan kualitas petani dan SDM pertanian,
4. integrasi kebijakan hulu sampai hilir serta keterkaitan sektor pertanian dengan industri dan jasa.
5. penguatan kelembagaan dan kewirausahaan petani, serta
6. peningkatan investasi dan infrastruktur penunjang pertanian.

Ketahanan air diarahkan untuk memantapkan kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan aksesibilitas sumber daya air untuk mendukung sektor strategis, pencegahan bencana, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sementara itu ketahanan energi ditingkatkan dengan energi baru dan terbarukan diantaranya bioenergi, air, geothermal, surya, dan lainnya. Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2045 juga diharapkan meningkat menjadi lebih dari 80 yang didukung oleh penerapan pembangunan rendah karbon. Penurunan emisi karbon dilakukan melalui pengembangan EBT, perlindungan hutan dan lahan gambut, peningkatan produktivitas, lahan, dan penanganan limbah terpadu.

1.4.2 Pemerataan Pembangunan

Tahun 2045 diharapkan pendapatan semakin merata bagi seluruh lapisan masyarakat, kesenjangan antar wilayah yang semakin kecil, infrastruktur yang terintegrasi dan merata, serta kemiskinan akut berhasil dituntaskan. Harapannya pada tahun 2040 Indonesia bebas dari kemiskinan akut. Strategi pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan mencakup 6 langkah, yaitu

1. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar bagi seluruh penduduk;
2. memperluas perlindungan sosial termasuk SJSN berkelanjutan;
3. mempermudah kepemilikan aset dan mendorong inklusi keuangan;
4. memperluas kesempatan usaha dan akses terhadap sumber daya produktif;
5. mempertajam kebijakan fiskal baik belanja maupun pendapatan yang berkeadilan; serta
6. memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi.

Untuk mencapai pemerataan pembangunan daerah, wilayah luar Jawa dan KTI didorong tumbuh lebih tinggi dari Jawa dan KBI dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah Jawa. Jawa diarahkan sebagai basis perdagangan dan jasa. Sementara itu, pembangunan infrastruktur ke depan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas fisik dan virtual, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, memenuhi prasarana dasar, mendukung pembangunan perkotaan dan pedesaan, serta antisipasi bencana alam dan perubahan iklim termasuk kenaikan muka air laut.

1.4.2.1 Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

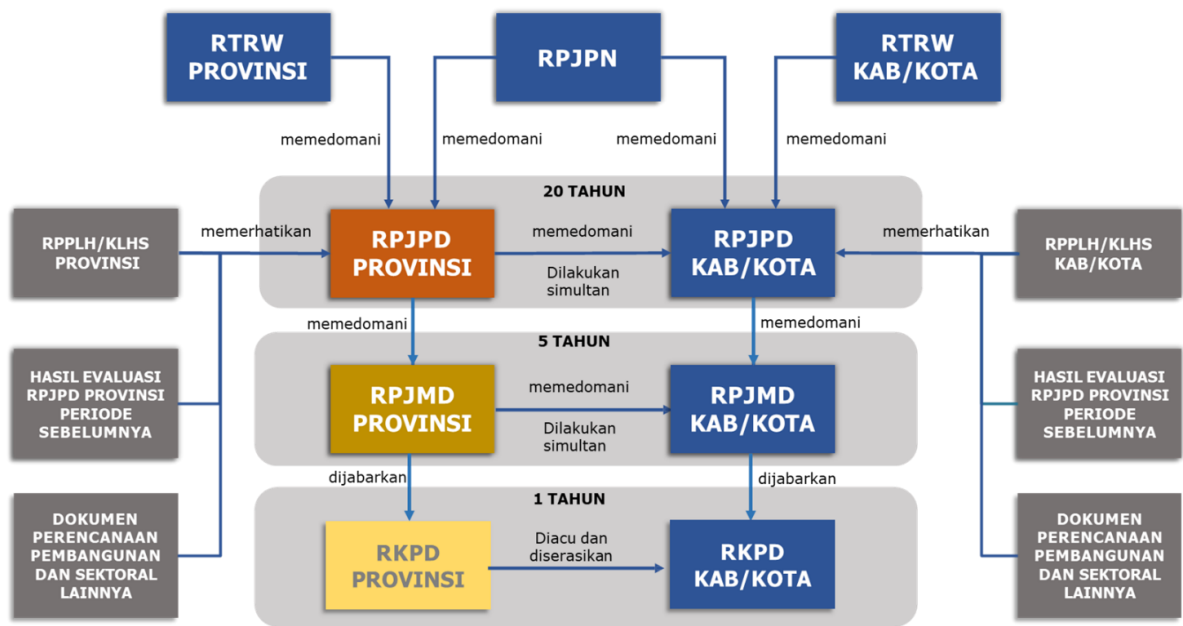
Untuk mencapai Visi Indonesia 2045, maka kualitas demokrasi terus ditingkatkan dan diarahkan pada demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat. Reformasi birokrasi dan kelembagaan diperkuat dengan tiga arah, yaitu:

1. kelembagaan yang adaptif, berbasis isu/tematik, lintas sektor, people driven, dan locally empowered, serta responsif terhadap isu;
2. tata kelola yang inklusif dan berbasis TIK; serta
3. SDM ASN yang berpikir kreatif, sistemik, berwawasan global, inklusif, beretos kerja tinggi, produktif, dan pelayanan proaktif. Selain itu, pembangunan juga diarahkan untuk mewujudkan masyarakat berbudaya hukum dan anti korupsi.

1.4.3 Telaahan Dokumen Perencanaan

Dokumen perencanaan yang dikaji diantaranya rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan sektoral. Rencana pembangunan daerah antara lain Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045.

Gambar I-1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Bappelitbangda 2024

1.4.3.1 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025

Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 250 ayat 3 mengamanatkan bahwa hasil evaluasi RPJPD Kota (RPJPD 2005-2025) perlu digunakan sebagai bahan basis data bagi penyusunan RPJPD Kota untuk periode berikutnya (RPJPD 2025-2045). Hasil penelaahan terhadap dokumen evaluasi RPJPD ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis selain sumber-sumber lainnya. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya, tantangan bagi daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

1.4.3.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tidak segera dijabarkan dalam Rencana Detil Tata Ruang yang baru ditetapkan pada tahun 2021, sehingga masalah keselarasan pada kedua dokumen tersebut harus dibenahi dengan merubah peraturan mengenai

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana detil Tata Ruang. Disamping itu perencanaan yang targetnya belum terealisasi perlu direvisi, untuk itu Perubahan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 sedang dalam proses penetapannya menjadi Peraturan Daerah Kota Cirebon yang baru tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pusat Kegiatan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon diarahkan pada lokasi meliputi 3 (tiga) kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan;
- b. Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan; dan
- c. Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan.

Penataan Struktur Ruang pada Skala Kota dengan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat serta sumber lain yang sah akan dikembangkan

Pusat Pemerintahan Skala Kota, Pusat Distribusi Regional, Sistem Angkutan Umum Skala Regional, Pembangunan Pusat Kebudayaan, Hunian Vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum), Sarana Pelayanan Umum, Peningkatan cakupan sistem pelayanan air bersih dan air limbah, Penyediaan RTH Publik 20% dan RTH Privat 10%, Pengembangan *meetings, incentives, conventions and exhibitions* (MICE).

Pengembangan Struktur Ruang pada Skala Kota akan dilaksanakan oleh bidang urusan Perindustrian dan Perdagangan, Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata, Perumahan dan Permukiman, Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan dan Lingkungan Hidup serta bekerja sama dengan Pengembang Swasta.

1.4.3.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045

Dokumen RPJPD Kota Cirebon merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun untuk tahun 2025 sampai tahun 2045. Dokumen RPJPD Kota Cirebon merupakan acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi, Misi, Arah, dan Program Kepala Daerah terpilih dan sebagai pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Cirebon selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang.

Hal yang perlu diperhatikan dalam kajian ini adalah perihal Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.146 Tahun 2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. Analisis yang dilakukan dalam kajian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan Daya dukung lingkungan hidup meliputi daya dukung lahan terbangun, daya dukung air permukaan, daya dukung pangan dan daya dukung fungsi lindung.

- (2) Pemetaan Jasa Ekosistem (JE) melalui data dan informasi yang tersedia di Kota Cirebon yaitu:
 - a. JE penyedia pangan;
 - b. JE penyedia air;
 - c. JE pengaturan pemurnian air;
 - d. JE pengaturan pengolahan dan penguraian limbah;
 - e. JE tata kelola air dan banjir;
 - f. JE pencegahan dan perlindungan dari bencana alam;
 - g. JE pengaturan iklim, JE pemeliharaan kualitas udara;
 - h. JE pengaturan pengolahan dan penguraian limbah; serta
 - i. JE biodiversity.
- (3) Analisis dalam kapasitas dan kerentanan perubahan iklim menggunakan dua alat analisis yaitu:
 - a. Tingkat Kapasitas dan Kerentanan Perubahan Iklim dengan memperkirakan dampak pada masa akan datang menggunakan proyeksi perubahan iklim yang dihasilkan Bappenas pada 2010 melalui *Integrated Climate Change Strategic Roadmap* yang membahas proyeksi iklim sampai dengan 2100 di seluruh wilayah Indonesia.
 - b. Emisi GRK merupakan perubahan iklim berkaitan dengan emisi yang ditimbulkan atas penggunaan lahan. Emisi GRK adalah gas buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang menghasilkan jenis Gas Rumah Kaca yang meliputi sektor energi, lahan dan limbah.

Salah satu indikator yang digunakan dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan pada tahun 2030 adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terdiri dari 17 tujuan dengan capaian yang terukur dan terarah. dalam TPB terdapat empat pilar, yaitu: pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Kondisi lingkungan dengan daya dukung kehidupan yang baik akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mencapai kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Keterkaitan antar pilar tersebut digambarkan dalam gambar berikut. TPB memiliki peranan sebagai salah satu instrumen dalam merumuskan isu strategis untuk penyempurnaan arah kebijakan dan strategi pembangunan.

Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau Kebijakan Rencana Program (KRP) menjadi kunci efektivitas penyelenggaraan KLHS. Hasil akhir yang diperoleh dari rekomendasi diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan, rencana, dan/atau KRP. Pokok-pokok pengintegrasian hasil KLHS dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau KRP dan ketua kelompok kerja KLHS. Berita Acara pengintegrasian hasil KLHS disusun dengan muatan berikut:

- a. Ditandatangani secara bersama-sama oleh Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program atau pejabat yang ditunjuk, dan Ketua Kelompok kerja KLHS; dan
- b. Menyatakan telah dilaksanakannya proses pengintegrasian hasil KLHS terhadap Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dijelaskan nama dan jenisnya.

Pemerintah Kota Cirebon melakukan evaluasi untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon. Evaluasi oleh Pemerintah Kota Cirebon meliputi: penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dan menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala OPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. Disamping itu perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antar dokumen perencanaan (RPJM dengan RPJP dan RTRW, dan RKPD dengan RPJM), dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

1.4.4 Perencanaan Wilayah Sekitar Kawasan Rebana

Pada Peraturan Presiden RI Nomor 87 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan yang dalam hal ini Kota Cirebon merupakan bagian dari Kawasan Rebana sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN yang berperan melayani kegiatan skala internasional. Dengan potensi yang dimiliki Kawasan Rebana meliputi 7 (tujuh) Pemerintah Daerah yaitu: Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan.

Potensi yang dimiliki Kawasan Rebana adalah Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang kompetitif, Konektivitas Kawasan Tinggi, Sumber Daya Identik dan Melimpah, Potensi Pengembangan Tenaga Kerja Tinggi.

UMK Kawasan Rebana yang cukup kompetitif yaitu memiliki UMK rata-rata lebih rendah daripada kawasan wilayah lainnya di Provinsi Jawa Barat. Kawasan Rebana memiliki infrastruktur perhubungan yaitu Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati. Potensi sumber daya yang identik dan melimpah, meliputi hasil pertambangan, bahan galian non logam, komoditas hasil hutan, Komoditas hasil pertanian dan perkebunan serta komoditas hasil laut. Terdapat bahan galian non logam di dalam Kawasan Rebana meliputi andesit, batu gamping, batu lempung, batu kapur, tanah liat, dan tras terutama di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon. Kawasan Rebana juga memiliki hutan produksi meliputi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kuningan, KPH Majalengka, KPH Indramayu, KPH Sumedang, dan KPH Purwakarta. Komoditas utama yang dihasilkan berupa kayu putih, jati, mahoni, pinus, karet, dan rotan. Terdapat potensi komoditas hasil pertanian terutama padi, jagung, ubi jalar, bawang merah, tomat, cabai, jamur, kacang panjang dan mentimun. Komoditas hasil perkebunan pada kawasan ini di antaranya mangga agrimania, mangga gedong gincu, pepaya california, nanas, jambu biji merah, sawo citali, ubi cilembu, nangka, kopi, teh dan pisang. Garis pantai Kawasan Rebana yang panjang memiliki potensi komoditas perikanan yang melimpah di antaranya ikan, udang, bandeng, kerang hijau, dan rumput laut. Potensi pengembangan ini juga didukung jumlah angkatan kerja yang terdidik dari perguruan tinggi, sekolah vokasi, sekolah menengah kejuruan, dan *teaching factory school*.

Terdapat 13 (tiga belas) titik pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Terdapat 3 (tiga) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Subang, 6 (enam) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Indramayu, 2 (dua) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Majalengka, 1 (satu) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Sumedang, dan 1 (satu) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Cirebon. Kota Cirebon sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) didukung oleh Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berperan untuk melayani kegiatan skala nasional dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan wilayah pelayanan kabupaten/kota sekitarnya.

Pembagian fungsional kawasan yang terletak di Kawasan Rebana terdiri atas:

- a. Kota Cirebon, Kota Patimban, dan Kertajati *Aerocity* sebagai kawasan perkotaan inti; dan
- b. KPI Patimban, KPI Cipali Subang Barat, KPI Cipali Subang Timur, KPI Cipali Indramayu, KPI Patrol, KPI Losarang, KPI Balongan, KPI Krangkeng, KPI Tukdana, KPI Kertajati, KPI Jatiwangi, KPI Butom, dan KPI Cirebon sebagai kawasan aktivitas utama.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Aspek Geografi dan Demografi

1. Geografi

Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

2. Demografi

Menjelaskan karakteristik demografi daerah.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan Ekonomi

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi.

2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.

C. Aspek Daya Saing

1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.

2. Daya Saing SDM

Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah.

3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah.

4. Daya Saing Iklim Investasi

Menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.

D. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

E. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua.
- b. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan.

F. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

A. Permasalahan

Menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

B. Isu strategis daerah

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

A. Visi daerah Tahun 2025-2045 yang merupakan kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045.

B. Misi daerah Tahun 2025-2045 yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

A. Arah kebijakan

Arah kebijakan ini merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah meliputi:

1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029;
2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034;
3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039;
4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045.

Selain itu akan dijelaskan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas Tahun 2045, sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah.

B. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 memuat 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama

Pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten/kota Tahun 2025-2045 memuat Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator Utama Pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

BAB VI PENUTUP

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi dan Demografi menggambarkan kondisi Kota Cirebon dari sisi letak kota dengan batas wilayahnya. Kemudian digambarkan juga luas dan dimensi wilayah dengan komposisi penduduknya. Kondisi air, tanah dan udara mempengaruhi potensi kota dalam mendukung kehidupan sehari-harinya dengan risiko terhadap bencana alam.

2.1.1 Aspek Geografi

Karakteristik geografis Kota Cirebon berupa informasi terkait Lokasi, Wilayah, Geologi, Topografi, Klimatologi dan Hidrologi yang dapat menjadi potensi dan risiko bagi suatu daerah. Informasi lain terkait geografis juga akan disajikan seperti Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW, persentase Alih Fungsi Lahan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Risiko Bencana, Indeks Ketahanan Daerah (IKD), Indeks Ketahanan Pangan, Indeks Ketahanan Energi, Indeks Ketahanan Air, dan indikator lainnya.

2.1.1.1 Wilayah Administrasi

Kota Cirebon merupakan kota di wilayah pesisir Pulau Jawa yang berada pada bagian timur laut Jawa Barat yang mendekati perbatasan dengan Jawa Tengah. Sebelum dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah 2011-2031 Kota Cirebon yang ditetapkan pada tahun 2012 dengan luas wilayah Kota Cirebon sejumlah 38,1 km², luas wilayah Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 3 tahun 1989 adalah 37,35 km². Selanjutnya Peraturan Menteri dalam Negeri RI nomor 18 tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, ditetapkan wilayah administrasi Kota Cirebon seluas 37,36 km². Dengan adanya Peraturan Menteri dalam Negeri RI nomor 75 tahun 2018 mengakhiri permasalahan batas wilayah Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon, dampak dari penetapan batas wilayah terbaru adalah luas wilayah Kota Cirebon menjadi bertambah.

Keputusan Menteri dalam Negeri RI nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, menetapkan luas wilayah administratif Kota Cirebon menjadi 39,44 km². Luas wilayah tersebut belum termasuk wilayah Pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia Regional II Cirebon dengan luas ±0,03 km² sehingga usulan perubahan Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 8 tahun 2012 tentang RTRW untuk luas wilayah Kota Cirebon menjadi seluas 39,47 km². Pada Keputusan Menteri dalam Negeri RI nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau terbaru sehingga sejak peraturan tersebut ditetapkan, luas wilayah Kota Cirebon menjadi 39,466 km².

Gambar II-1 Peta Wilayah Kota Cirebon



Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon 2024.

Wilayah administrasi Kota Cirebon terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 22 (dua puluh dua) Kelurahan, berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sisi bagian Timur Laut dan berada ditengah Kabupaten Cirebon. Berikut adalah rincian untuk 22 kelurahan per kecamatan dengan 249 total Rukun Warga (RW) dan 1.385 Rukun Tetangga (RT).

Tabel II-1 Kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT di Kota Cirebon Tahun 2024

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Harjamukti	Argasunya	11	59
		Kalijaga	15	121
		Harjamukti	13	59

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
		Kecapi	19	116
		Larangan	19	116
2.	Lemahwungkuk	Pegambiran	17	83
		Kesepuhan	9	63
		Lemahwungkuk	6	44
		Panjunan	10	42
3.	Pekalipan	Jagasatru	10	51
		Pulasaren	8	40
		Pekalipan	12	50
		Pekalangan	9	45
4.	Kesambi	Karyamulya	18	92
		Sunyaragi	11	55
		Drajat	9	62
		Kesambi	7	47
		Pekiringan	11	57
5.	Kejaksan	Kejaksan	7	40
		Sukapura	10	58
		Kebonbaru	7	37
		Kesenden	11	48
Jumlah		22	249	1.385

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Cirebon, 2024

2.1.1.2 Karakteristik Geografis

Secara geografis, titik nol Kota Cirebon terletak pada koordinat 6° 43’ 10.5” Lintang Selatan dan 108° 34’ 18.7” Bujur Timur. Bentuk wilayah Kota Cirebon memanjang dari Barat pada koordinat 108° 31’ 05.63105” Bujur Timur ±7,96 kilometer ke arah timur hingga koordinat 108°35’ 24.04215” Bujur Timur dan dari utara dimulai dari koordinat 06° 47’ 46.99245” Lintang Selatan ke arah selatan ±11,9 kilometer hingga koordinat 06°41’27.17520” Lintang Selatan.

2.1.1.2.1 Geologi

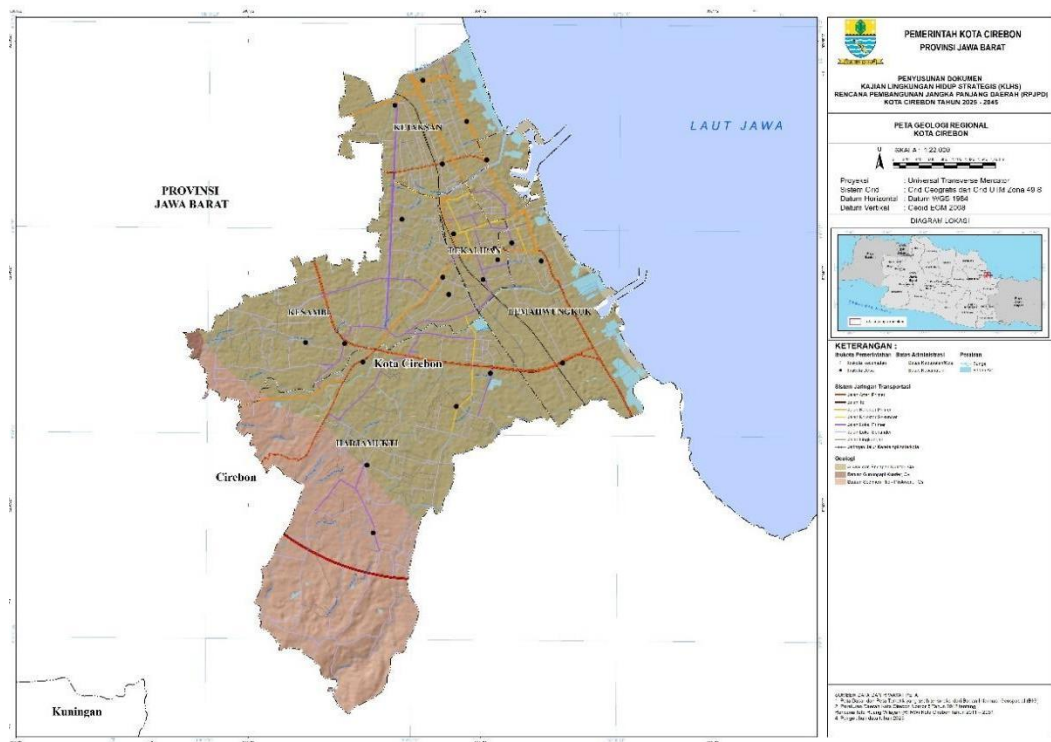
Hasil kajian Peta Geologi Regional¹, di wilayah pesisir Cirebon dan sekitarnya merupakan endapan aluvium (Qa) terdiri atas kerikil, pasir dan lempung yang berwarna kelabu. Sedangkan endapan di daerah pantai (Qac) terdiri atas lumpur hasil endapan rawa, lanau serta lempung kelabu dengan kandungan cangkang moluska yang memiliki ketebalan beberapa meter. Untuk geologi wilayah pantai pelabuhan Cirebon mempunyai litologi endapan aluvial pantai yang terdiri dari selang seling endapan lempung dan pasir. Morfologi dasar laut perairan pelabuhan Cirebon sangat landai dan hingga tinggi yang diduga erat kaitannya dengan aktivitas pasang surut di perairan tersebut. Endapan aluvium itu sendiri terdiri dari kerikil, pasir dan lempung berwarna kelabu yaitu hasil endapan dengan ketebalan ±5 m di sepanjang dataran banjir sungai. Endapan permukaan ini menyebar di bagian utara dan bagian timur.

Kelompok Batuan Gunung Api disusun oleh hasil erupsi Gunung Api Muda Ciremai (Qvr) yang terdiri atas lahar, breksi dan batupasir tufan. Hasil gunung api tua Ciremai (QTvr) mempunyai karakter morfologi yang lebih menonjol daripada morfologi batuan gunung api muda dengan batuan sekitarnya. Secara umum terdiri atas lahar, batupasir tufan, dan konglomerat tersisipi oleh lapisan lava, breksi aliran dan tuf yang tersebar di sebelah selatan yang penyebarannya sangat terbatas. Kelompok batuan ini berasal dari gunung api yang kemudian dapat dipisah-pisah yang dikontrol oleh tingkat erosi dan pengaruh dari

¹ Silitonga, P.H., Masria, M., dan Suwarna, N., 1996, Peta Geologi Regional

mekanisme pembentukannya. Berikut adalah Peta Geologi Kota Cirebon berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kota Cirebon 2025-2045.

Gambar II-2 Peta Geologi Kota Cirebon

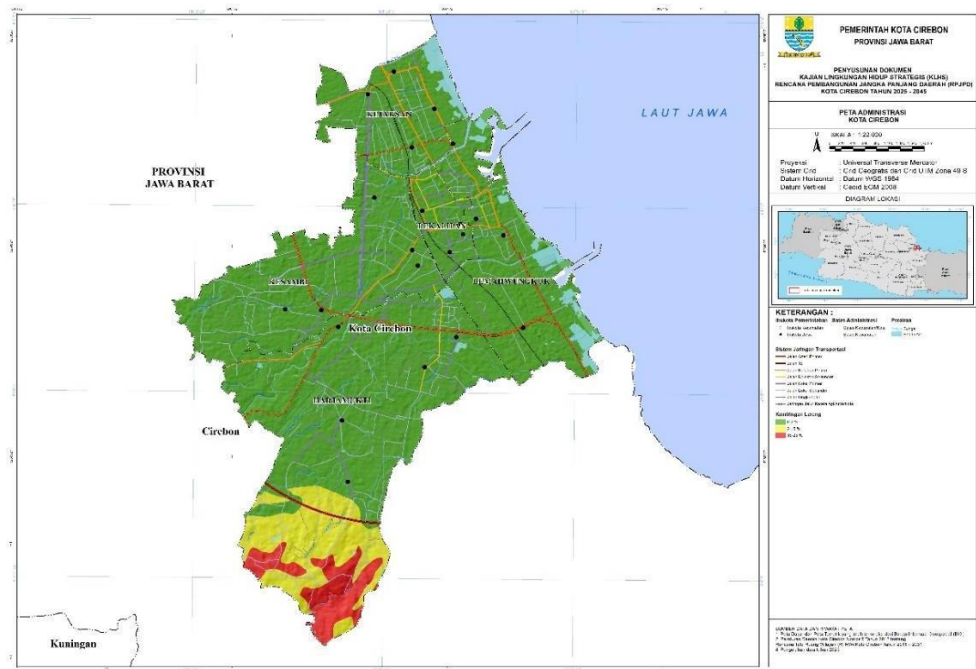


Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon 2025-2045.

2.1.1.2.2 Topografi

Wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dengan ketinggian bervariasi antara 0-136 meter di atas permukaan laut. Peningkatan ketinggian mulai dari daerah pantai menuju ke arah Selatan dengan ketinggian ±136 meter di atas permukaan laut, yaitu di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. Sebagian besar wilayah kota merupakan dataran rendah ±5 meter dan dataran tinggi pada wilayah selatannya hingga ±136 meter di atas permukaan laut.

Gambar II-3 Peta Kemiringan Lereng Kota Cirebon



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon 2025-2045.

Gambar di atas merupakan Peta Topografi Kota Cirebon berdasarkan Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon 2025-2045.

Klasifikasi kemiringan² lahan di wilayah Kota Cirebon:

- Kemiringan 0-3% terdapat di sebagian besar wilayah Kota Cirebon, kecuali sebagian kecil wilayah di Kecamatan Harjamukti
- Kemiringan 3-8% terdapat di sebagian besar wilayah Kelurahan Kalijaga, sebagian kecil di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti
- Kemiringan 8-15% terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti
- Kemiringan 15-30% terdapat di sebagian wilayah kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti.

2.1.1.2.3 Klimatologi

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi fluktuasi curah hujan yang disebabkan fenomena *El Nino* dan *La Nina*. *El Nino* merupakan fenomena yang berdampak kekeringan pada wilayah di Indonesia. Sedangkan fenomena *La Nina* akan berdampak pada curah hujan yang lebih banyak dari biasanya.

Untuk suhu udara di Kota Cirebon memiliki temperatur udara yang cukup tinggi dikarenakan lokasinya yang berada di pantai utara pulau Jawa yaitu suhu udara rata-rata tahun 2023 antara 26,4°C hingga 30,6°C. Sedangkan suhu udara minimum terjadi pada bulan dan maksimum rata-rata 28,3°C. Pada tabel berikut disajikan data fluktuasi suhu udara di Kota Cirebon yang bersumber dari Pos Meteorologi Penggung.

Tabel II-2 Rata-rata Suhu Udara per Bulan di Kota Cirebon (°C)

No	Bulan	2019			2020			2021			2022			2023		
		Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks
1.	Januari	23,0	27,5	34,4	23,6	27,8	35,2	23,2	26,5	33,0	23,0	27,3	34,4	22,8	26,9	35,5
2.	Februari	23,0	27,2	34,2	23,0	27,2	33,8	22,8	26,5	33,8	23,0	26,9	34,6	22,8	26,4	33,6
3.	Maret	22,8	27,1	34,2	21,4	27,7	34,4	22,2	27,3	34,6	22,6	27,4	34,5	22,2	27,3	34,8
4.	April	23,8	28,2	34,4	23,2	28,0	34,8	22,8	28,1	35,0	22,8	27,9	34,8	22,8	27,8	34,6
5.	Mei	22,6	28,3	34,6	23,8	28,3	34,8	22,9	28,4	34,8	22,8	28,1	34,4	22,7	28,6	34,2
6.	Juni	19,0	27,8	34,8	22,8	27,8	34,6	23,0	27,3	34,4	22,4	27,2	33,6	21,9	28,4	35,6
7.	Juli	20,6	27,7	34,2	21,0	28,0	34,0	21,2	27,7	34,6	21,0	27,5	34,0	22,0	28,1	34,4
8.	Agustus	21,6	27,8	34,8	22,4	28,5	35,6	22,8	28,6	36,4	22,8	28,2	35,2	19,0	28,1	36,2
9.	September	21,6	28,3	36,4	23,2	29,7	36,4	22,6	28,9	35,8	22,8	29,0	36,0	20,6	29,3	36,8
10	Oktober	23,2	30,3	38,6	23,2	29,2	37,0	23,0	29,5	37,0	22,6	28,0	35,4	21,5	30,6	38,4
11	Nopember	24,8	30,5	38,2	23,6	28,6	35,4	22,2	27,6	35,0	22,0	27,5	35,0	24,2	30,2	37,4
12	Desember	23,6	29,0	37,0	22,9	26,9	34,0	22,8	27,4	34,4	22,4	27,2	34,0	23,8	29,4	36,4
Rata-rata		22,5	28,3	35,5	22,8	28,1	35,0	22,6	27,8	34,9	22,5	27,7	34,7	34,09	22,19	28,43

Sumber: Posmet BMKG Penggung Cirebon.

Sedangkan untuk curah hujan umumnya terjadi mulai bulan Oktober hingga bulan Juni dan pada bulan Agustus hingga September tidak terjadi curah hujan. Sepanjang tahun 2023 terjadi hujan selama 121 hari dan curah hujan sebesar 2.190,7 mm. Peningkatan jumlah intensitas curah hujan tidak berbanding lurus dengan hujan yang turun dalam setiap periodenya. Hal ini terlihat pada tahun 2022 bahwa jumlah curah hujan mencapai puncak tertinggi dalam periode 2019-2023 sebesar 2.725 mm dan turun rata-rata sebanyak 15,67 hari pada setiap bulannya. Tingginya curah hujan yang terjadi ditengarai turut berpengaruh pada tingginya intensitas kejadian banjir di beberapa titik wilayah Kota Cirebon yang kemungkinan disebabkan daya tampung drainase

² Arsyad, S. 2010. Konservasi tanah dan air, Institut Pertanian Bogor

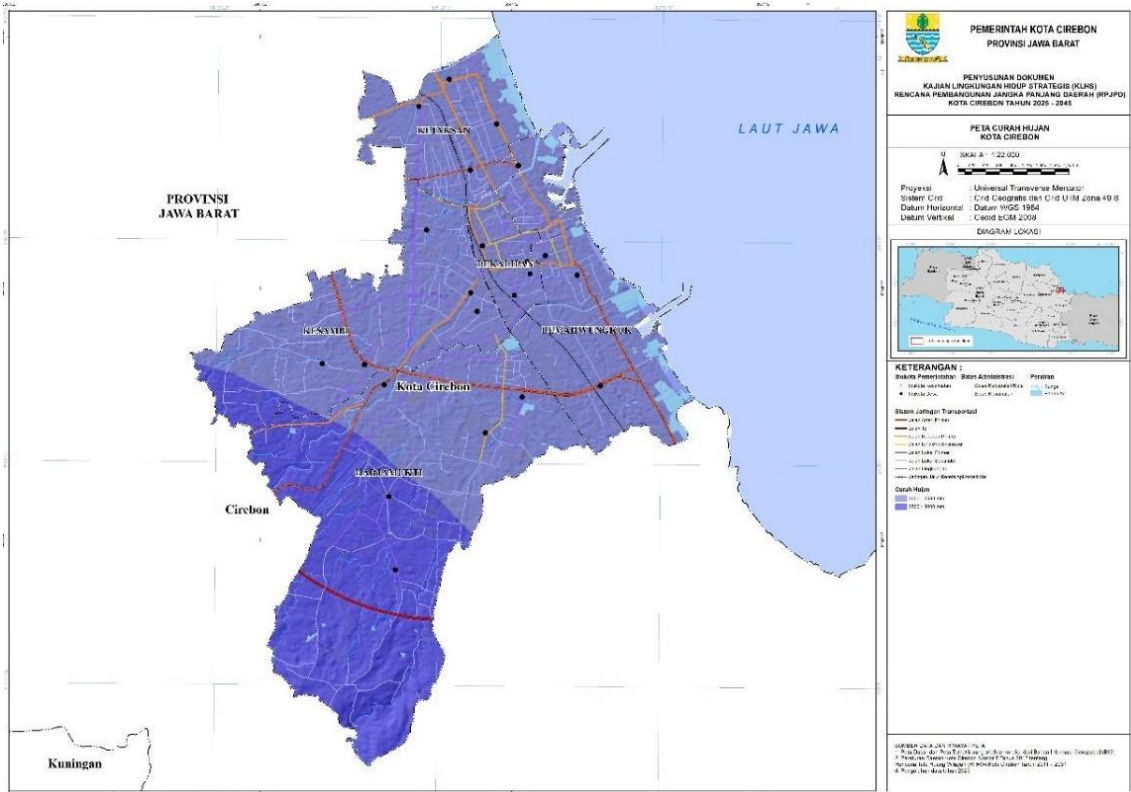
yang kurang mencukupi serta adanya pembangunan yang berdampak pada berkurangnya daya serap air karena tutupan lahan karena. Berikut ilustrasi curah hujan dan peta sebaran hujan berdasarkan Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon 2025-2045.

Tabel II-3 Curah Hujan dan Hari Hujan di Kota Cirebon (mm)

No	Bulan	2019		2020		2021		2022		2023	
		Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan
1.	Januari	229,8	22	550	24	437,5	25	490,1	26	409,8	18
2.	Februari	465,9	23	588,3	25	540,5	21	242,9	22	396,1	23
3.	Maret	305	23	370,5	25	261,7	19	242,9	22	204,8	10
4.	April	285,4	17	176,5	16	134,6	11	293,5	15	207,3	20
5.	Mei	162	11	240,1	17	55	7	168,3	16	86,5	10
6.	Juni	3	1	92,6	7	159,4	14	126,6	14	62,3	3
7.	Juli	0	1	50,9	5	20,4	5	212,1	10	11	3
8.	Agustus	0	0	8,3	6	16,5	4	1,7	2	0	0
9.	September	0	0	18,6	4	118,1	7	27,1	7	0	0
10.	Oktober	<0,5	3	137,7	9	67,8	5	327,6	16	5	4
11.	Nopember	5,7	3	212,8	14	302,5	23	182,2	20	82,5	11
12.	Desember	319,5	17	212,8	22	418,3	27	409,8	18	114,7	14
Jumlah		1776,3	121	2659,1	172	2532,3	168	2725	188	1580	116
Rata-rata		161,48	10,08	221,59	14,33	211,03	14	227,1	15,67	131,67	9,67

Sumber: Posmet BMKG Penggung Cirebon.

Gambar II-4 Peta Curah Hujan Kota Cirebon



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon 2025-2045.

Kecepatan angin di Kota Cirebon cukup kencang, hal ini disebabkan lokasi Kota Cirebon yang berada di pesisir utara pulau jawa. Dalam tahun 2023, kecepatan tertinggi dari arah selatan terjadi pada bulan Agustus dan bulan September sebesar 56 km/jam. Sedangkan kecepatan rata-rata tertinggi terjadi pada bulan september antara 11-43 km/jam. Kecepatan angin 2 meter per detik (7,2 km/jam) memiliki potensi untuk menjadi sumber energi yang

menghasilkan listrik melalui turbin³. Berikut data BMKG untuk kecepatan angin yang bersumber dari Stasiun Pos Penggung Kota Cirebon.

Tabel II-4 Kecepatan Angin di Kota Cirebon (km/jam)

Bulan	2020			2021			2022			2023		
	Maks	Rata ²	Dari arah	Maks	Rata ²	Dari arah	Maks	Rata ²	Dari arah	Maks	Rata ²	Dari arah
Januari	26	n.a	Barat	30	5-15	Barat	46	5-20	Timur Laut	46	7-18	Barat
Februari	35	n.a	Barat	37	n.a	Barat	46	6-16	Barat	48	7-28	Barat
Maret	26	n.a	Barat	37	n.a	Barat	72	6-18	Barat	46	6-24	Barat
April	22	n.a	Timur Laut	39	7-13	Timur Laut	44	6-8	Timur	31	7-20	Barat laut
Mei	24	n.a	Timur	24	13-24	Timur	43	6-16	Timur	46	8-28	Selatan
Juni	22	n.a	Timur	26	9-26	Timur	41	4-25	Selatan	33	9-23	Selatan
Juli	37	n.a	Selatan	35	8-35	Selatan	35	6-24	Selatan	52	10-38	Selatan
Agustus	33	n.a	Timur	37	8-37	Selatan	43	8-33	Selatan	56	9-41	Selatan
September	37	n.a	Selatan	37	8-37	Selatan	37	8-25	Selatan	56	12-43	Selatan
Oktober	46	n.a	Selatan	33	7-33	Selatan	30	5-19	Selatan	21	11-26	Timur laut
November	41	n.a	Timur	33	5-11	Timur Laut	41	6-15	Timur Laut	33	8-24	Timur laut
Desember	52	n.a	Barat	26	4-26	Timur Laut	46	7-18	Barat	37	4-16	Timur laut

Sumber: Posmet BMKG Penggung Cirebon.

Disamping angin yang cukup kencang karena lokasinya sebagai kota di pesisir Pulau Jawa, potensi intensitas mataharinya maksimal sepanjang tahun walaupun terjadi anomali pada tahun 2022 karena curah hujan yang tinggi dan hujan selama 188 hari. Intensitas matahari yang cukup menjadi sumber energi yang sangat potensial untuk memenuhi kebutuhan di Kota Cirebon. Untuk itu diperlukan upaya pemerintah dalam mendorong pengembangannya sebagai sumber energi terbarukan yang dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik. Tabel berikut ini disajikan data BMKG untuk potensi intensitas sinar matahari dengan sumber data Stasiun Meteorologi Kertajati:

Tabel II-5 Intensitas Matahari di Stamet Kertajati (%)

Bulan	2020			2021			2022			2023		
	Max	min	Rata ²	Max	min	Rata ²	Max	min	Rata ²	Max	min	Rata ²
Januari	100	55	91,5	100	68	89	100	64	85	100	49	78
Februari	100	67,5	92,8	100	3	83	100	54	81	100	43	88
Maret	100	62,5	93,8	100	60	89	n.a	n.a	n.a	100	25	89
April	100	45	93	100	74	93	100	63	90	100	2,5	83,2
Mei	100	56,3	95	100	78	97	100	13	84	100	16,3	89,43
Juni	100	91	98	100	56	92	100	63	88,3	100	51	95
Juli	100	88	98.8	100	34	88	100	41	79	100	70	97
Agustus	100	88	99	100	12	86	100	75	91	100	88	96
September	100	73	96	100	56	96	75	13	56	100	90	100
Oktober	100	59	93	100	63	94	100	34	76	100	37,5	96,2
November	100	62,5	92,7	100	13	80	93	41	68	100	73	93
Desember	100	3	87	100	16	82	100	49	82	100	12,5	86,8

Sumber: Stamet Kertajati

2.1.1.2.4 Hidrologi

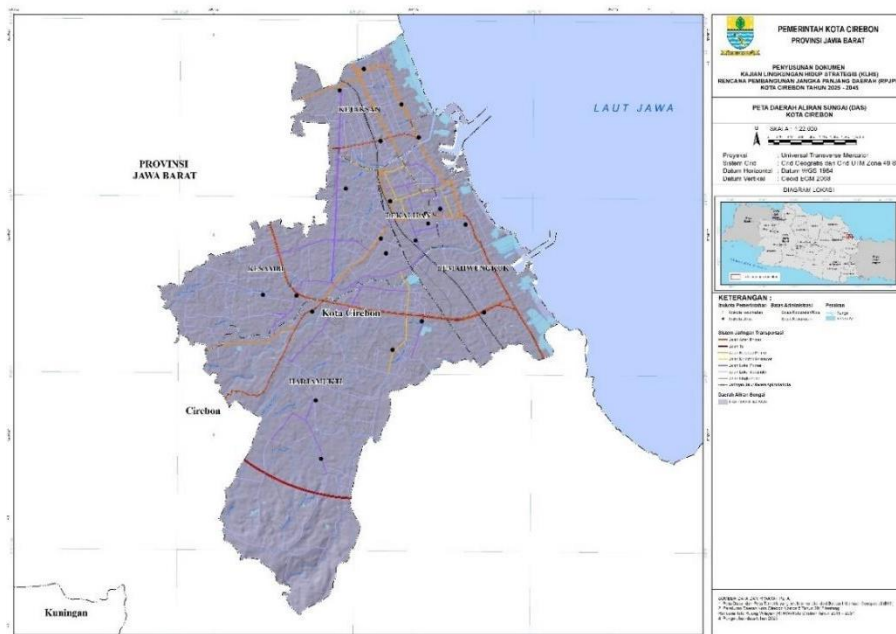
Potensi air Kota Cirebon meliputi air tanah dangkal, air tanah dalam, air permukaan, dan air laut. Kondisi air tanah relatif baik dengan kedalaman 5-10 meter untuk dataran rendah dan mencapai 20-30 meter untuk dataran tinggi (di Wilayah Argasunya). Sementara untuk air tanah di Kawasan pantai pada umumnya sudah terkena intrusi air laut.

³ Suandi, Andi, et al. "Analisis Pengaruh Kecepatan Angin Pada Pembangkit Listrik Tenaga Angin." Teknobiz: Jurnal Ilmiah Program Studi Magister Teknik Mesin 12.3 (2022): 168-173.

Air bersih sebagai konsumsi rumah tangga sebagian besar bersumber dari pasokan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Giri Nata Kota Cirebon, yang sumber mata airnya berasal dari Cipaniis Kabupaten Kuningan. Sedangkan untuk keperluan lainnya sebagian besar diperoleh dari sumur dengan kedalaman antara 2 (dua) meter sampai dengan 6 (enam) meter, di samping itu ada beberapa daerah/wilayah yang kondisi air tanahnya relatif sangat rendah dan rasanya asin karena intrusi air laut dan tidak dapat digunakan untuk keperluan air minum.

Kondisi air permukaan berupa air yang mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai. Di Kota Cirebon terdapat 4 (empat) sistem sungai yang tersebar merata di seluruh wilayah yaitu Sungai Kedung Pane, Sungai Sukalila (penyatuan dari Sungai Sicemplung dan Sungai Sijarak), Sungai Kesunean (Kriyan) dan Sungai Kalijaga (penyatuan dari Sungai Cikalong, Sungai Cideng, dan Kali Lunyu). Sungai juga berfungsi sebagai batas wilayah antara Kabupaten Cirebon dan sebagai saluran pembuangan air. Berikut adalah Peta Daerah Aliran Sungai Kota Cirebon berdasarkan Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon 2025-2045.

Gambar II-5 Peta Daerah Aliran Sungai Kota Cirebon



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045

2.1.1.2.5 Penggunaan Lahan

Lahan merupakan salah satu elemen utama pembentuk ruang perkotaan dimana aktivitas kota berlangsung sehingga lahan menjadi sumber daya yang sangat penting bagi sebuah kota. Sebagai elemen penting dalam kegiatan perkotaan, penggunaan lahan menjadi harus dikelola untuk dapat memberikan manfaat optimal bagi perkembangan kota. Dari sudut pandang ekonomi, lahan merupakan sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam produksi (Lichrield dan Drabkin, 1980).

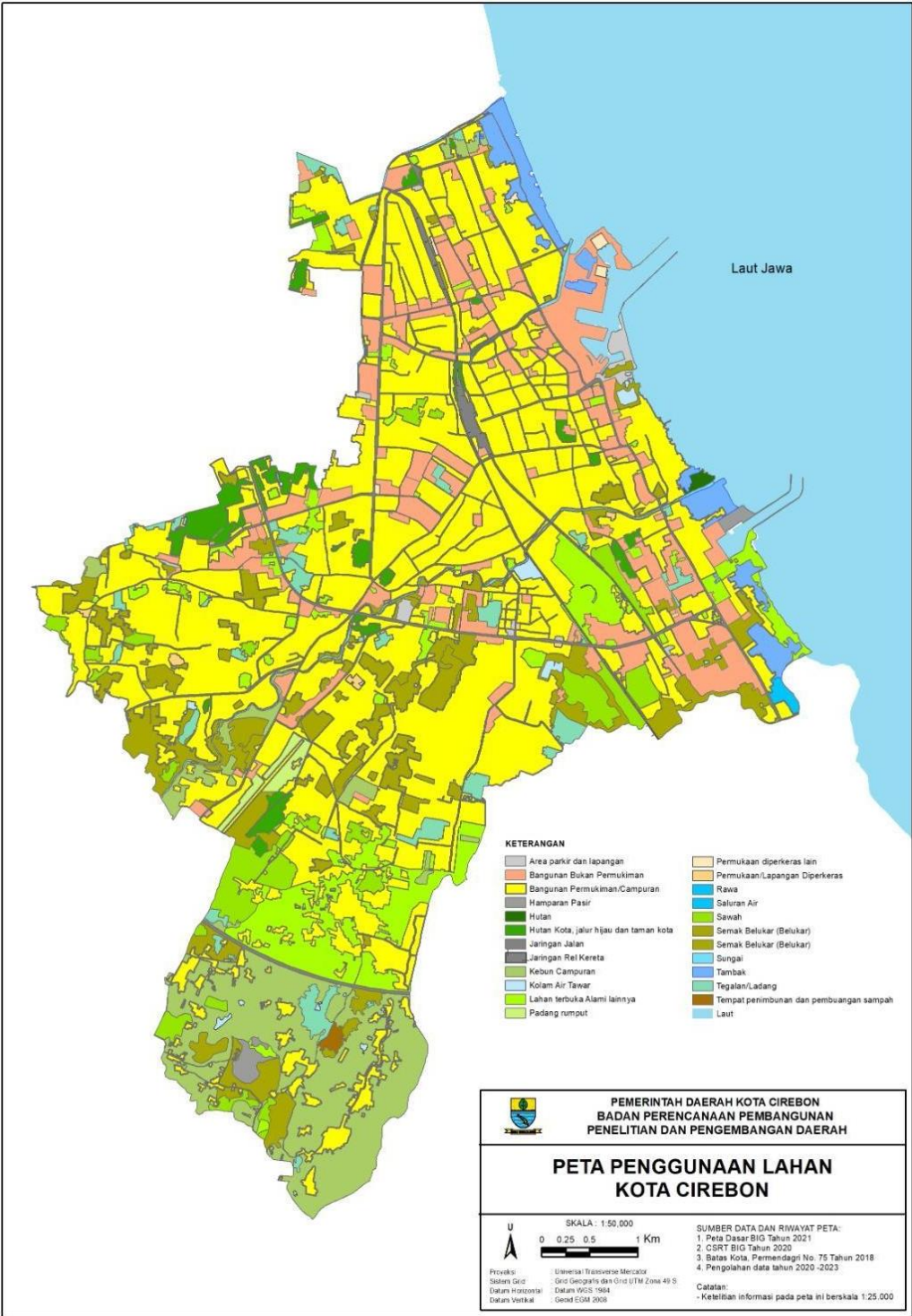
Penggunaan lahan dapat dipahami sebagai wujud atau bentuk usaha kegiatan, pemanfaatan suatu bidang tanah pada suatu waktu (Jayadinata, 1992). Secara garis besar, penggunaan lahan dapat dilihat dari proporsi lahan terbangun dibandingkan dengan lahan tidak terbangun. Dalam periode tahun

Berdasarkan hasil kajian penggunaan lahan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Cirebon pada tahun 2009, diperoleh proporsi lahan terbangun Kota Cirebon sebesar 53,25% dan lahan tidak terbangun 46,75%. Sementara itu, berdasarkan peta penggunaan lahan tahun 2022, proporsi lahan terbangun sebesar 63,41% dan lahan tidak terbangun sebesar 36,59%. Terlihat adanya

kenaikan proporsi luas lahan terbangun sebesar 10,16% di Kota Cirebon dalam kurun waktu 13 tahun.

Selanjutnya adalah peta penggunaan lahan Kota Cirebon tahun 2023 sebagai perbandingan perubahan pola ruang dalam kurun waktu lebih dari satu dekade. Perubahan pola ruang untuk guna lahan ruang terbuka berkurang cukup signifikan, hal ini merupakan konsekuensi terhadap perkembangan kota dan penambahan jumlah penduduk dalam pemanfaatan ruang. Peta berikut adalah proporsi penggunaan lahan Kota Cirebon tahun 2023 dengan dengan 24 jenis lahan.

Gambar II-7 Penggunaan Lahan Kota Cirebon 2023



Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon 2024

Sebagai kota dengan wilayah yang relatif kecil dan karakter kawasan urban, tak heran jika penggunaan lahan di wilayah Kota Cirebon didominasi oleh lahan

terbangun. Hal ini berkorelasi erat dengan dinamika pembangunan sektor perdagangan dan jasa yang menjadi penggerak pembangunan Kota Cirebon dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Berikut ini merupakan grafik data primer untuk guna lahan Kota Cirebon.

Tabel II-6 Proporsi Penggunaan Lahan di Kota Cirebon 2022

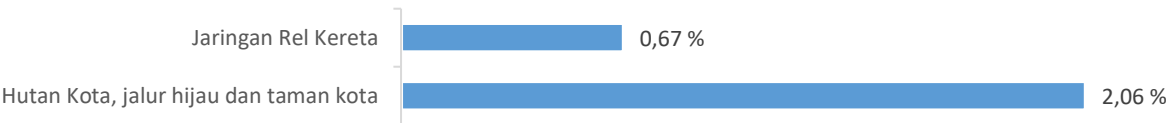
No.	Jenis	Proporsi
1	Bangunan Permukiman/Campuran	48,84 %
2	Bangunan Bukan Permukiman	10,24 %
3	Semak Belukar (Belukar)	9,25 %
4	Kebun Campuran	8,97 %
5	Lahan terbuka Alami lainnya	6,45 %
6	Sawah	3,45 %
7	Jaringan Jalan	2,80 %
8	Tegalan/Ladang	2,20 %
9	Tambak	2,13 %
10	Hutan Kota, jalur hijau dan taman kota	2,06 %
11	Jaringan Rel Kereta	0,67 %
12	Sungai	0,54 %
13	Padang rumput	0,46 %
14	Area parkir dan lapangan	0,43 %
15	Hamparan Pasir	0,40 %
16	Kolam Air Tawar	0,37 %
17	Permukaan/Lapangan Diperkeras	0,19 %
18	Rawa	0,15 %
19	Permukaan diperkeras lain	0,12 %
20	Tempat penimbunan dan pembuangan sampah	0,12 %
21	Hutan	0,09 %
22	Saluran Air	0,06 %

Sumber:Bappelitbangda,2024

Pengendalian penggunaan lahan perkotaan telah diupayakan melalui penyusunan Rencana Tata Ruang. Berdasarkan hasil penilaian terhadap pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon 2011-2031, Kawasan Lindung yang ditetapkan seluas 372,98 Ha, diperoleh hasil penilaian perwujudan rencana pola ruang kawasan lindung dalam RTRW Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

- Nilai pemanfaatan ruang yang tidak mendukung fungsi lindung adalah seluas 27,96 Ha atau 7,49 % dari luas kawasan lindung yang ditetapkan;
- Nilai perwujudan yang sudah terwujud adalah seluas 345,03 Ha atau 92,51% dari luas kawasan lindung yang ditetapkan.

Gambar II-8 Proporsi perwujudan rencana pola ruang kawasan lindung (Ha)



Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon 2024

Sementara itu, Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya yang ditetapkan adalah seluas 3.489,44 Ha, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

- Nilai perwujudan rencana pola ruang kawasan budidaya adalah seluas 1.987,64 Hektar atau 56,96 % dari kawasan budidaya yang ditetapkan.
- Nilai pemanfaatan ruang yang belum terwujud adalah seluas 1.475,81 Ha atau 42,29 % dari luas kawasan budidaya yang ditetapkan.

- Nilai pemanfaatan ruang yang tidak sesuai adalah seluas 25,99 Ha atau 0,74 % dari luas kawasan budidaya yang ditetapkan.

Terdapat banyak tantangan dalam upaya perwujudan rencana tata ruang. Dalam perwujudan kawasan lindung, lebih dari 90% rencana telah terwujud. Hal ini menunjukkan berhasilnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang telah dilakukan, antara lain melalui mekanisme perizinan yang selama ini berlangsung. Selain itu, terdapat regulasi yang mendukung upaya perlindungan terhadap kawasan lindung yang umumnya merupakan ruang-ruang hijau, baik regulasi di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Gambar II-9 Proporsi perwujudan rencana pola ruang kawasan budidaya (Ha)



Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon 2024

Sementara itu, tantangan yang lebih besar dihadapi dalam upaya perwujudan kawasan budidaya. Nilai perwujudan kawasan budidaya diperoleh sekitar 57% atau dapat dikatakan perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya belum terwujud. Dalam realitasnya, tidak mudah menaklukkan kondisi eksisting di lapangan yang berbeda dengan rencana karena berbenturan dengan kepentingan pemilik bangunan maupun pemilik lahan. Upaya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan seringkali menemui kondisi deadlock karena konsekuensi membongkar bangunan memiliki konsekuensi biaya yang tidak sedikit. Di luar itu, masih terhadap beberapa kelemahan pada sistem pengendalian yang melibatkan banyak pihak, kelembagaan maupun dukungan regulasi.

2.1.1.3 Lingkungan Hidup

2.1.1.3.1 Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum lingkungan adalah upaya preventif maupun represif dalam menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Hal tersebut perlu dilakukan dalam proses pembangunan guna meminimalisir dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan terhadap makhluk hidup. Berikut data terkait sistem pengelolaan limbah yang harus dimiliki oleh perusahaan di Kota Cirebon dan penegakan hukum lingkungan hidup:

Tabel II-7 Kepemilikan Pengolahan Limbah oleh Perusahaan

No.	Jumlah Perusahaan Industri/Pabrik	2020	2021
1.	Memiliki Pengolahan Limbah (Perusahaan)	56	66
2.	Tidak Memiliki Pengolahan Limbah (Perusahaan)	241	1.257

Sumber: Cirebon Satu Data, 2023

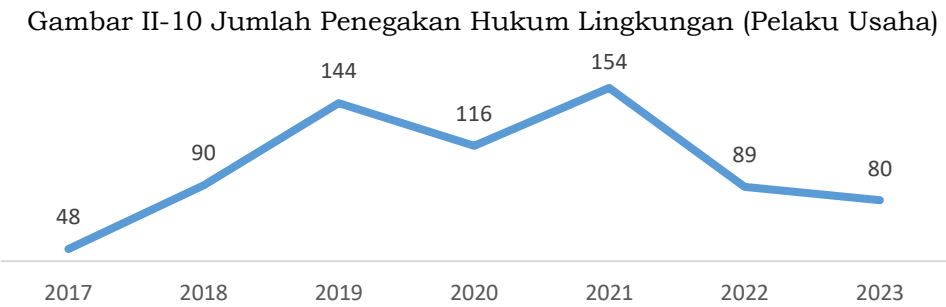
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa masih banyak perusahaan di Kota Cirebon yang belum memiliki pengolahan limbah. Hal ini sangat riskan adanya kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan. Limbah yang tidak diolah dengan baik dapat mencemari air, udara, dan tanah, menyebabkan

kerusakan pada lingkungan sekitarnya. Ini dapat membahayakan kehidupan hewan dan tanaman, serta mengganggu kesehatan manusia. Selain itu, industri wajib memiliki Izin lingkungan yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berikut jumlah industri wajib izin lingkungan di Kota Cirebon sebagai berikut:

Tabel II-8Jumlah Industri Wajib Izin Lingkungan

Jumlah Industri	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Memiliki SPPL	198	235	213	169	144	158
Memiliki UKL-UPLD atau PLH	23	24	28	19	9	47
Izin Lingkungan Yang Memiliki Amdal	n.a	2	n.a	2	1	2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, 2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, 2023

Sanksi administrasi diperlukan dalam penegakan hukum yaitu berupa sanksi yang ringan, seperti teguran tertulis, peringatan hingga kepada perintah penghentian sementara atau penghentian permanen untuk sebagian kegiatan atau seluruhnya. Dalam Penegakan hukum lingkungan, diperlukan pengawasan oleh aparaturnya Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan dan terlatih untuk menegakkan peraturan di bidang lingkungan, namun hal ini masih terhambat dengan keterbatasan aparaturnya yang telah mengikuti pelatihan pengawasan lingkungan dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada di Kota Cirebon. Untuk itu diperlukan instrumen elektronik berupa sensor yang harus dimiliki oleh perusahaan guna memantau pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Berikut merupakan pelaku usaha yang diawasi pelaksanaan perizinannya dan diberikan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

2.1.1.3.2 Kualitas Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang IKLH yang merupakan nilai yang dapat menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada periode tertentu. Dalam mengukur capaian IKLH, dilakukan klasifikasi penilaian menjadi 5 kategori yaitu:

- 1. Sangat baik ($IKLH \geq 90$);
- 2. Baik ($70 \leq IKLH < 90$);
- 3. Sedang ($50 \leq IKLH < 70$);
- 4. Buruk ($25 \leq IKLH < 50$); dan
- 5. Sangat buruk ($IKLH < 25$).

Indeks ini mencakup sejumlah parameter yang mencerminkan keadaan lingkungan, baik dari segi biologis, fisik, maupun kimia. Indikator kualitas lingkungan mulai tahun 2020 terdiri dari 4 indikator yaitu Indeks Kualitas Air

(IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Pada Tahun 2021, berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor S.318/PPKLH/SET/REN.O/12/2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 tertanggal 4 Desember 2020, Perhitungan IKLH mengalami perubahan dimana sebelumnya rumus perhitungan IKLH adalah $(30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ dan sejak tahun 2021 rumus perhitungan IKLH menjadi $(0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$. Salah satu metode untuk menghitung status mutu air untuk menentukan IKA digunakan metode Indeks Pencemar dengan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tahun 2022 dilakukan pengambilan sampel pada 13 titik pengamatan yang mewakili sungai-sungai utama di Kota Cirebon. Sebanyak 11 titik sampling diantaranya dalam kategori tercemar ringan dan 2 titik sampling dalam kategori tercemar sedang. Sedangkan pada periode 2 tahun 2022 dapat dilihat bahwa 12 titik sampling dalam kategori tercemar ringan dan 1 titik sampling dalam kategori tercemar sedang.

IKU di Kota Cirebon dihitung berdasarkan kualitas udara ambien di wilayah permukiman, perkantoran, kawasan industri, dan transportasi. Pada Tahun 2022 dilakukan pengujian kualitas udara hasil pengukuran pada 12 titik pengamatan di Kota Cirebon. Berdasarkan analisis laboratorium hasil pengukuran pada 12 titik pengamatan, kandungan Nitrogen Dioksida (NO_2) pada tahun 2022 yang terkecil terdapat di kawasan pemukiman sedangkan nilai kandungan yang terbesar terdapat berada di wilayah perkantoran dan transportasi. Sedangkan untuk kandungan rata-rata Sulfur dioksida (SO_2) yang terkecil terdapat di wilayah perkantoran, sedangkan nilai kandungan yang terbesar terdapat kawasan industri.

Sedangkan, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dihitung dengan menjumlahkan luas tutupan hutan yang ada di Kota Cirebon. Tutupan hutan tersebut terbagi menjadi beberapa kategori yaitu hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, semak/belukar, semak/belukar rawa, dan ruang terbuka hijau.

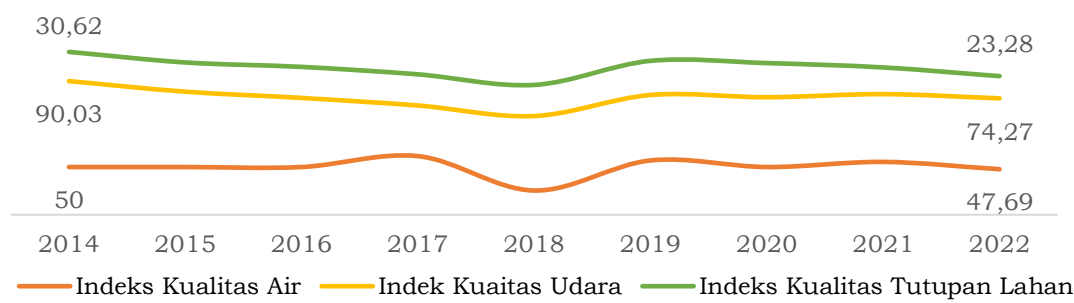
IKLH di Kota Cirebon yang mengalami fluktuasi pada nilai indeksnya. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah adanya beberapa kali perubahan dalam metode yang digunakan terutama yang terlihat sangat signifikan penurunan di tahun 2018. Di tahun 2022 nilai IKA berada pada nilai 47,69 menurun dibandingkan tahun 2021 yaitu 55,38 dan 50 di tahun 2020. Adapun penyebab penurunan IKA ini bisa termasuk karena adanya peningkatan pencemaran industri, perubahan pola penggunaan lahan, atau masalah lain yang mempengaruhi kualitas air.

IKU selama 9 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Perubahan dalam metode yang digunakan dalam kurun waktu tersebut menjadi salah satu penyebab naik turunnya angka IKU. Pada tahun 2018, terjadi kenaikan signifikan dalam nilai IKU, mencapai 78,03. Namun, selanjutnya, terjadi penurunan pada tahun 2019

dan 2021, meskipun terjadi sedikit peningkatan kembali pada tahun 2022 menjadi 74,27 (Kategori Baik) dengan nilai rerata hasil pengukuran NO₂ sebesar 15,05 µg/m³ dan SO₂ 12,86 µg/m³.

Sedangkan, selama periode tahun 2014-2020 nilai indeks kualitasutupan lahan di Kota Cirebon cenderung stabil dan mengalami peningkatan. Namun di tahun 2021-2022 terjadi penurunan cukup signifikan dimana pada tahun 2020 nilai IKTL mencapai 35,78, sedangkan di tahun 2021 turun menjadi 27,96 dan kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2022 menjadi 23,28. Terjadinya alih fungsi lahan di Kota Cirebon menjadi salah satu penyebab terjadinya penurunan nilai IKTL.

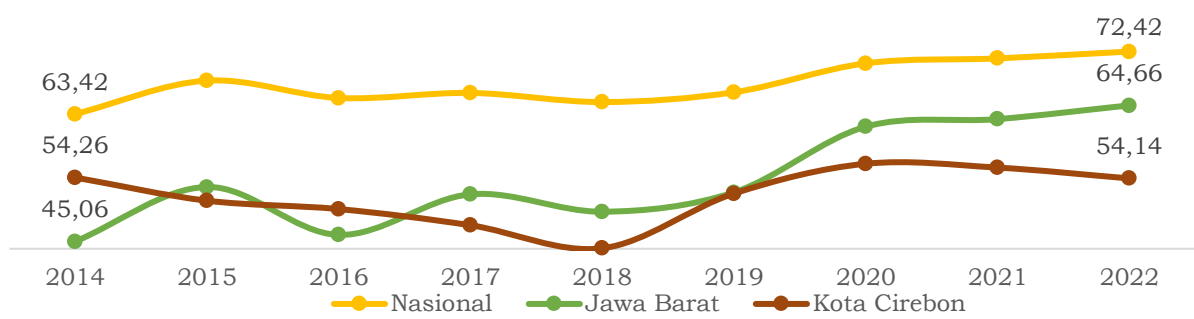
Gambar II-11 Indikator IKA, IKU dan IKTL Kota Cirebon



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, 2023

IKLH dapat memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup yang sebenarnya di Kota Cirebon. Kondisi lingkungan hidup ini menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara dan tutupan lahan sebagai indikator seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berikut merupakan nilai IKLH Kota Cirebon.

Gambar II-12 IKLH Nasional, Jawa Barat dan Kota Cirebon



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, 2023

Perhitungan IKLH tahun 2018 Kota Cirebon berada pada angka 44,07. Jika dimasukkan pada rentang nilai IKLH maka nilai IKLH Kota Cirebon tergolong dalam kategori “Kurang”. Sedangkan dari perhitungan IKLH tahun 2019, dapat diketahui bahwa IKLH Kota Cirebon berada pada angka 51,96 tergolong dalam kategori “Sedang”. Sedangkan dari perhitungan IKLH tahun 2020, dapat diketahui bahwa IKLH Kota Cirebon berada pada angka 56,25 tergolong dalam kategori “Sedang”. Selanjutnya untuk tahun 2021, nilai IKLH Kota Cirebon tergolong dalam kategori “Sedang”, dimana maka nilai IKLH Kota Cirebon berada pada angka 55,70. Secara umum, jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya nilai IKLH Kota Cirebon pada tahun 2022 mengalami penurunan

yang cukup signifikan walaupun kategorinya masih sama yaitu dalam kategori “Sedang”. Data tersebut juga menunjukkan bahwa nilai IKLH Kota Cirebon masih ada dibawah nilai IKLH Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

2.1.1.3.3 Hasil Kajian Lingkungan Hidup

A. Ekoregion

Wilayah Kota Cirebon terdiri dari 4 Jenis Dataran dan 1 Perbukitan, yang terdiri atas Dataran Fluvial Berombak-Bergelombang sebanyak 35,83% wilayah, Dataran Vulkanik Berombak-bergelombang sebesar 36,60%, Perbukitan Struktural dengan lipatan sebesar 14,57%, dataran fluvial bermaterial alluvium 0,06% dan dataran fluvio marin bermaterial alluvium sebesar 12,95%.

B. Perkiraan Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

1. Potensi Timbulan Sampah : potensi timbulan sampah pada tahun 2045 dinyatakan bahwa jumlah penduduk Kota Cirebon adalah sebanyak 454182 jiwa. Potensi timbulan sampah yang dihasilkan sekitar 1.135.455,00 Liter/tahun.
2. Potensi Timbulan Tinja : potensi timbulan lumpur tinja pada tahun 2045 dinyatakan bahwa jumlah Penduduk Kota Cirebon Sekitar 454182 Jiwa. Potensi lumpur tinja yang dihasilkan sekitar 227.091,00 liter/hari.
3. Potensi Resiko Bencana : Kajian risiko bencana diperoleh dari hasil analisis bahaya, analisis kerentanan (kerentanan penduduk terpapar, kelompok rentan, penduduk miskin, disabilitas, kerugian fisik dan kerugian ekonomi) dan analisis kapasitas sehingga dihasilkan sebaran nilai risiko yang terdiri dari nilai rendah, sedang, dan nilai risiko tinggi berdasarkan masing-masing kecamatan.
 - a. Risiko Banjir
 - b. Cuaca Ekstrim

C. Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem

1. Jasa Ekosistem Penyedia Air : Jasa ekosistem penyedia air paling besar berada di Kecamatan Harjamukti, dengan kategori Tinggi memiliki luasan sebesar 837,76 ha dan kategori sangat tinggi sebesar 99,77 ha. Kemudian di Kecamatan Pekalipan mempunyai Jasa ekosistem penyedia air paling rendah hanya memiliki total luasan sebesar 159,76 ha, dan didominasi oleh kategori rendah dengan luasan sebesar 147,62 ha.
2. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan : Jasa ekosistem penyedia pangan di Kota Cirebon didominasi oleh Kategori sangat Rendah dengan persentase terhadap total sebesar 59%, diikuti oleh kategori tinggi sebesar 34%. Berdasarkan hasil Analisis GIS didapat kesimpulan bahwa kategori paling tinggi terdapat di wilayah Harjamukti, sedangkan kategori rendah berada di daerah kejaksan dengan luasan sebesar 20,12 ha.
3. Jasa Ekosistem Penyedia Serat : Jasa Ekosistem Penyedia Serat di Kota Cirebon didominasi oleh kategori tinggi dengan nilai 59,3% diikuti kategori sangat tinggi 25,6%, kategori sedang 8,6%, kategori sangat rendah 4,5%, dan kategori rendah 2,1%. Berdasarkan hasil Analisis GIS disimpulkan bahwa jasa ekosistem penyedia serat kategori sangat tinggi ada di Kecamatan Harjamukti dengan luasan sebesar 545,92 ha.

4. Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Bakar : Kota Cirebon didominasi oleh jasa ekosistem penyedia bahan bakar kategori sedang dengan persentase sebesar 57,95%, diikuti kategori tinggi 17,36%, kategori rendah 11,91%, kategori sangat tinggi 8,20%, dan kategori sangat rendah 4,55%. Kategori sangat tinggi tersedia di Kecamatan Harjamukti dengan luasan sebesar 122,70 ha diikuti oleh Kecamatan Kesambi dengan luasan sebesar 108,79 ha, sedangkan kategori sangat rendah paling rendah adalah Kecamatan Kejaksan dengan luasan sebesar 24,42 ha.
5. Jasa Ekosistem Penyedia Sumber Daya Genetik : Kota Cirebon didominasi oleh kategori sedang dengan persentase sebesar 56,05%, diikuti dengan kategori sangat tinggi sebesar 28,36%, kategori Rendah sebesar 11,55%, sangat rendah 4%, dan tinggi 0,04%.
6. Jasa Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana : Kota Cirebon didominasi oleh kategori sedang sebesar 64,64%, diikuti sangat tinggi sebesar 25,52%, sangat rendah 4,48%, tinggi 2,88% dan rendah sebesar 2,49%. Kategori sedang terbesar berada di wilayah Kecamatan Harjamukti dengan luasan 998,77 ha, sedangkan kategori sangat rendah paling sedikit di Kecamatan Kejaksan sebesar 21,41 ha.
7. Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air : Kota Cirebon didominasi oleh kategori Sedang sebesar 58,88%, diikuti dengan kategori tinggi sebesar 14,95%, kategori rendah 11,56%, sangat tinggi 6,53%, dan sangat rendah 6,53%.

D. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Luas daerah terhadap pemanfaatan sumber daya alam Penyedia Pangan Kota Cirebon daerah yang memiliki efisiensi 0-10% seluas 3.550,91 Ha, efisiensi 10-20% seluas 235,07 Ha, efisiensi >20% seluas 39,24 Ha. Luas Daerah Pemanfaatan Sumber Daya Alam Penyedia Air Kota Cirebon yang memiliki efisiensi 0-10% seluas 3.575,70 Ha, efisiensi 10-20% seluas 192,20 Ha, efisiensi >20% seluas 57,32 Ha. Luas Daerah Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pengaturan Tata Air dan Banjir Kota Cirebon yang memiliki efisiensi 0-10% seluas 3.690,53 Ha, efisiensi 10-20% seluas 78,08 Ha, efisiensi >20% seluas 56,61 Ha.

E. Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim

Besar kecilnya tingkat kerentanan terhadap dampak perubahan iklim pada suatu daerah ditentukan oleh tingkat keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi dari suatu daerah. Indeks kerentanan menunjukkan besar kecilnya selang toleransi terhadap perubahan iklim. Indek kerentanan disusun dengan mengkombinasikan indeks keterpaparan, sensitivitas dan indeks kapasitas adaptasi.

F. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Pendukung Keanekaragaman Hayati di Kota Cirebon Tergolong pada kategori rendah sebesar 62%, berada pada kategori sangat tinggi sebesar 26% luasan, dan rendah sebesar 2%. Kecamatan Harjamukti memiliki Jasa Ekosistem Pendukung paling tinggi dengan luasan daerah kategori Sangat Tinggi sebesar 556,79 Ha. Adapun Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim Kota Cirebon memiliki Risiko Kerentanan 3 (Sedang)

serta indeks Adaptasi dalam rentang 0,51-0,57 (sedang) maupun Indek Kerentanan Sensitivitas dalam rentang 0,28- 0,58 (sedang).

2.1.1.3.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam menghitung atau menentukan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diperlukan beberapa pertimbangan ruang dan sifatnya, tipe pemanfaatan ruang, ukuran produk lingkungan hidup utama (udara dan air), penggunaan atau penutupan lahan mendukung publik (hutan), dan penggunaan tertentu untuk keperluan pribadi.

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat dimodelkan dengan jasa ekosistem penyediaan pangan dan jasa ekosistem penyediaan air bersih.

A. Daya Dukung Penyedia Pangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Bencana, pandemi, serta kerusakan dapat membuat kondisi pangan menjadi rentan akan kelangkaan karena terjadi kekurangan produksi dan akses, serta faktor lain dapat menghalangi manusia untuk memperolehnya.

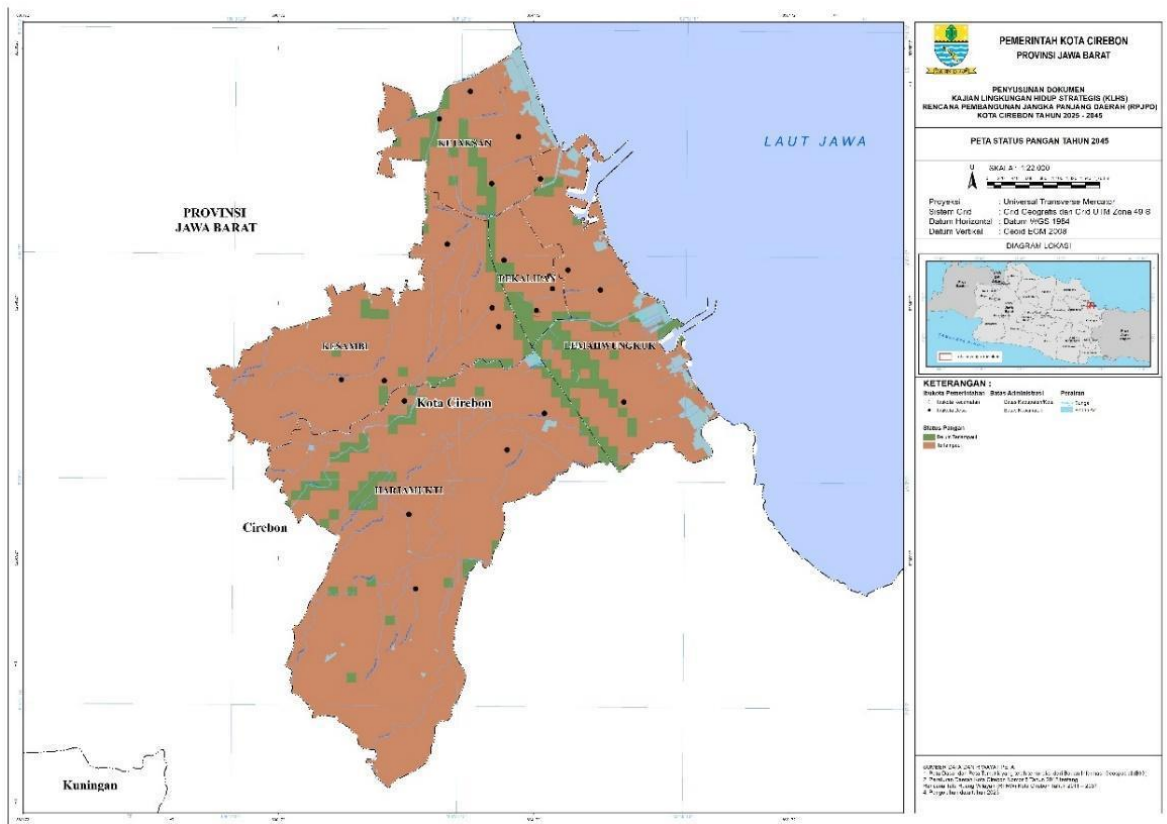
Tabel II-9 Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Kota Cirebon Tahun 2023 & 2045

Kecamatan	Ketersediaan Pangan (*10^6 kkal/tahun)	Kebutuhan Pangan (*10^6 kkal/tahun)		Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan (*10^6 kkal/tahun)	
	2023	2023	2045	2023	2045
Harjamukti	903,65	100.188,25	133.350,21	-99.284,60	-132.446,56
Kejaksan	105,94	36.673,72	48.812,23	-35.770,07	-47.908,59
Kesambi	340,63	61.549,51	81.922,41	-60.645,86	-81.018,76
Lemahwungkuk	210,79	45.896,10	61.087,29	-44.992,46	-60.183,65
Pekalipan	30,2	23.476,58	31.247,18	-22.572,93	-30.343,53
KOTA CIREBON	1.591,20	267.784,17	356.419,32	-266.880,52	-355.515,68

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045

Perhitungan daya dukung pangan dihitung dari ketersediaan dan kebutuhan pangan. Sisi ketersediaan dengan melihat karakteristik wilayah potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Ketersediaan pangan per tahun dihitung dari produksi pangan dan identifikasi jenis serta luasan tutupan lahan pada di kawasan perencanaan. Berdasarkan data ketersediaan dan kebutuhan pangan Kota Cirebon pada tahun 2023 dan 2045, terdapat selisih kebutuhan pangan di seluruh Kecamatan Kota Cirebon yang menunjukkan nilai defisit hingga 20 tahun mendatang.

Gambar II-13 Peta Status Pangan Tahun 2045

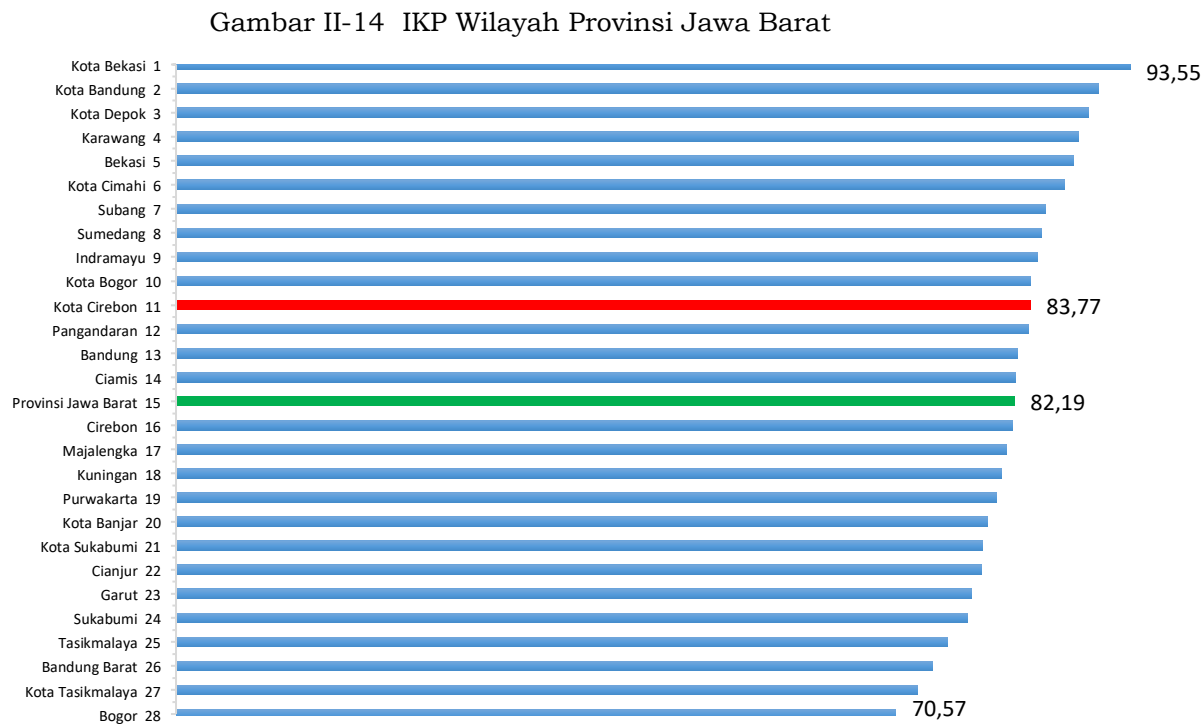


Sumber Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045

Peta di atas merupakan status pangan berdasarkan Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon 2025-2045. Dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan, tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro, meso dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai IKP. Nilai IKP ini mengukur sejauh mana suatu wilayah dapat memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi bagi penduduknya.

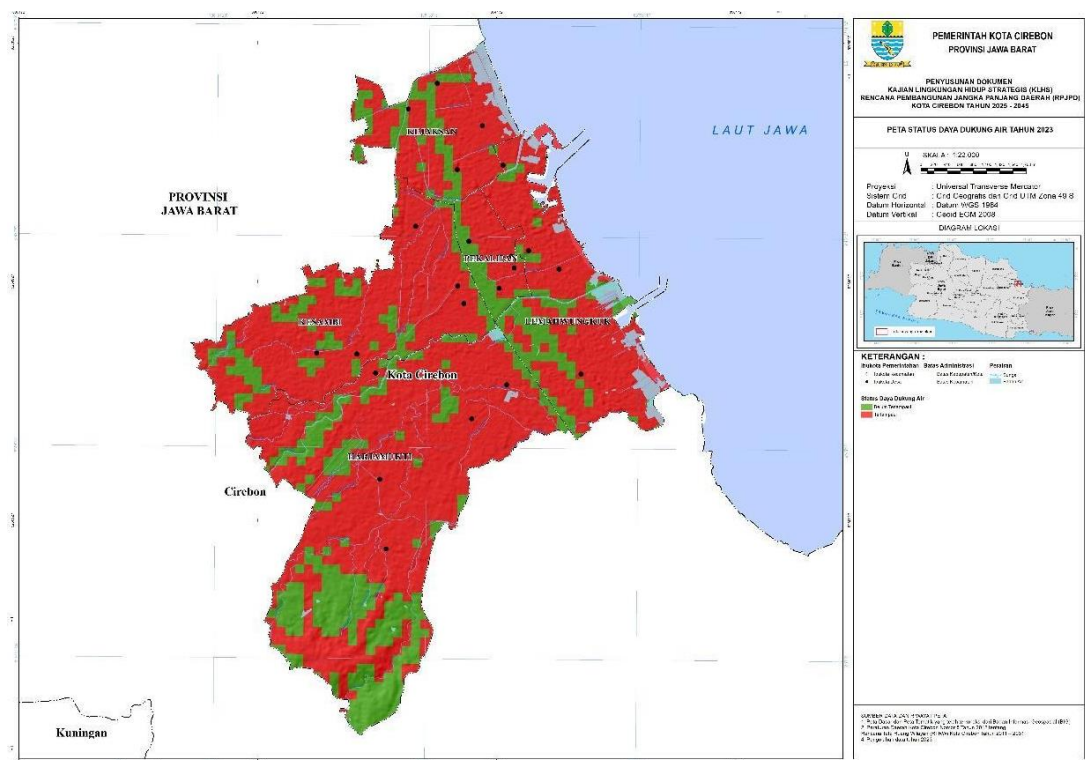
Kota Cirebon berada pada urutan 23 nilai IKP tertinggi di Provinsi Jawa Barat dengan nilai 70,28 walaupun masih dibawah nilai IKP Provinsi Jawa Barat. Penurunan indeks keterjangkauan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2021 nilai Indeks Keterjangkauan Kota Cirebon sebesar 74,01 turun menjadi 69,75 di tahun 2022. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya inflasi harga pangan di tahun 2022 atau penurunan daya beli masyarakat. Sama halnya dengan indeks keterjangkauan yang menurun, indeks pemanfaatan juga mengalami penurunan di tahun 2022. Dimana di tahun 2022 nilai indeks pemanfaatan Kota Cirebon sebesar 70,71 turun dibandingkan dengan tahun 2021. Penurunan indeks pemanfaatan ini bisa mengindikasikan kurangnya akses terhadap sumber daya gizi atau kekurangan pengetahuan tentang gizi yang baik pada masyarakat.



Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan, 2023

Hubungan antara indeks ketahanan pangan dengan indeks ketersediaan, indeks keterjangkauan, dan indeks pemanfaatan adalah korelasional, di mana peningkatan pada satu atau beberapa aspek dapat berkontribusi pada peningkatan keseluruhan ketahanan pangan. Di tahun 2023 Indeks Ketahanan Pangan Kota Cirebon meningkat yang terjadi ke-3 aspeknya. Dalam menghadapi risiko ketidakpastian pangan dan kelemahan dalam sistem pangan lokal karena adanya penurunan nilai IKP, perlu diidentifikasi penyebab penurunan dan merumuskan strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Gambar II-15 Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan IKP Kota Cirebon



Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon 2025-2045

Tabel II-10 Kondisi Air Bersih Kota Cirebon

Kecamatan	Status Air 2023 (m ³ /tahun)		Ketersediaan Air (Ha)	Kebutuhan Air (Ha)
	Belum Terlampaui	Terlampaui		
Harjamukti	519,94	1.316,96	36.295.290,78	209.998.387,08
Kejaksan	110,85	362,42	7.833.221,38	75.673.923,85
Kesambi	157,78	661,56	14.007.539,58	125.498.970,90
Lemahwungkuk	137,80	572,09	12.361.389,09	94.045.580,90
Pekalipan	24,73	83,17	1.786.575,62	47.865.600,00
Grand Total	951,09	2.996,20	72.284.016,44	553.082.462,74

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon 2025-2045

Ilustrasi hasil analisa GIS berdasarkan data pada tabel di atas akan disajikan dalam bentuk peta sebaran kebutuhan dan ketersediaan serta status air bersih untuk beberapa tahun mendatang.

Berdasarkan hasil Analisis dalam Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon 2025-2045, Kota Cirebon memiliki selisih atau kekurangan penyediaan air pada tahun 2023 sebesar 173.703.096,30 m³/tahun. Untuk itu pemerintah Daerah Kota Cirebon harus mengantisipasi defisit kebutuhan air minum dengan konservasi air tanah dari pencemaran dan mencegah eksploitasi air tanah secara berlebihan oleh gedung perkantoran, rumah sakit, pusat perbelanjaan, hotel. Pengendalian terhadap eksploitasi air tanah dapat dicegah melalui pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah

2.1.1.3.5 Perubahan Iklim

A. Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim

Kenaikan suhu yang terjadi di bumi berdampak besar bagi iklim dunia yang dikenal dengan istilah perubahan iklim. Perubahan iklim kini telah dilihat sebagai isu global yang mungkin menjadi ancaman manusia. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang

menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Perubahan iklim dapat ditunjukkan oleh beberapa hal diantaranya peningkatan suhu rata-rata, perubahan rata-rata curah hujan, kenaikan suhu dan Tinggi Muka Laut (TML), terjadinya pergeseran musim, dan sebagainya (Hairiah K., dkk., 2016).

Tabel II-11 Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim Kota Cirebon

Kecamatan	IKA	IKS	Kerentanan	Risiko Banjir	Risiko Kering
Harjamukti	0,54014	0,3839	3	3	3
Lemahwungkuk	0,577705	0,3534	3	3	3
Pekalipan	0,57989	0,5874	3	3	3
Kesambi	0,513375	0,2859	3	3	3
Kejaksan	0,57985	0,4099	3	3	3

Sumber : sidik.menlhk, 2023

Berikut merupakan contoh dampak dari perubahan iklim:

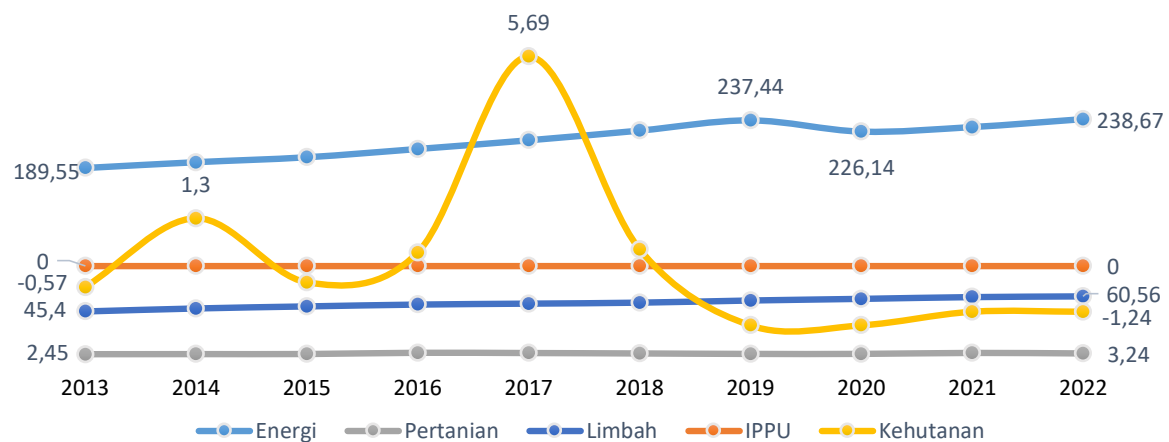
- Dampak dari peningkatan suhu bumi dapat meningkatkan konsumsi energi dan ancaman kelaparan akibat penurunan produksi tanaman, serta meningkatnya beberapa serangan wabah penyakit seperti malaria, demam berdarah, diare, dan gangguan pernafasan.
- Dampak dari perubahan curah hujan dapat menyebabkan banjir dan longsor jika curah hujan meningkat di musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau mengalami kekeringan yang berkepanjangan.
- Dampak dari kenaikan suhu dan TML diantaranya dapat merusak terumbu karang, berpengaruh terhadap pola migrasi ikan sehingga berdampak besar terhadap penghasilan nelayan, dan sebagainya.

B. Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi gas yang dilepaskan ke atmosfer dari berbagai aktivitas manusia di bumi menimbulkan efek rumah kaca di atmosfer. Gas rumah kaca itu adalah karbon dioksida (CO₂), belerang dioksida (SO₂), nitrogen monoksida (NO), nitrogen dioksida (NO₂), gas metana (CH₄), dan klorofluorokarbon (CFC). Gas karbon sebagai pencemar utama dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lain. Gas karbon terakumulasi di lapisan atmosfer karena tidak terserap tumbuhan di darat dan padang lamun serta rumput laut di perairan. Sementara paparan panas matahari, terutama radiasi inframerah, tidak bisa terpantul keluar atmosfer karena tertahan lapisan gas rumah kaca (GRK) yang menebal di lapisan udara atas, sehingga suhu bumi naik.

Menurut *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) akibat aktivitas manusia itu menjadi penyebab utama naiknya suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20. Model iklim yang dijadikan acuan oleh IPCC menunjukkan suhu permukaan global akan meningkat 1,1 hingga 6,4 derajat celcius antara tahun 1990 dan 2100. Penurunan emisi GRK menjadi komitmen internasional untuk secara bersama menahan laju pemanasan global. Indonesia pun telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030.

Gambar II-18 Emisi Kota Cirebon Sektor Limbah, Sektor Energi, Sektor IPPU, Sektor AFOLU

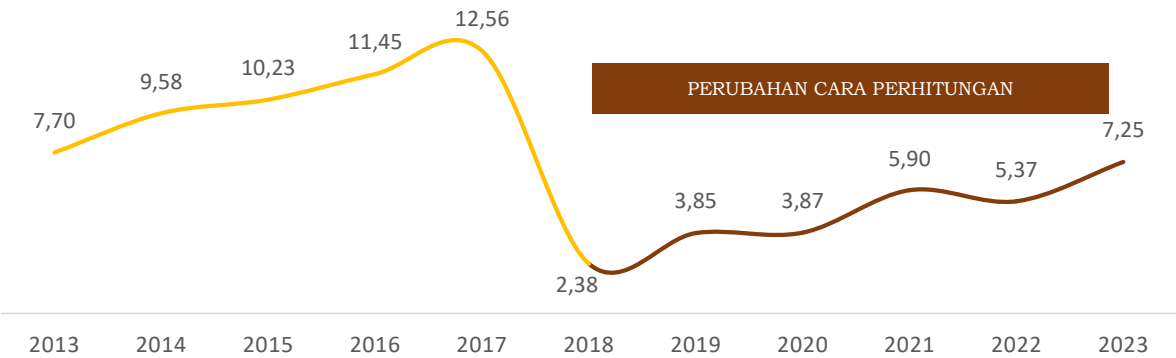


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, 2023

Kota Cirebon sendiri dalam berupaya ikut berkontribusi dalam upaya penurunan emisi GRK. Di tahun 2023 Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen dengan menyusun *Climate Action Plan* sebagai upaya dalam mengurangi emisi GRK sekaligus mencegah dan mengurangi dampak perubahan iklim terhadap pembangunan perkotaan. Inventarisasi emisi gas rumah kaca di Kota Cirebon dilakukan dengan analisis dan evaluasi data rentan dari 2012-2021 meliputi sektor limbah, sektor *Industrial Process and Production Use* (IPPU), sektor energi dan sektor *Agriculture, Forestry, and Other Land Use* (AFOLU).

Penyumbang Emisi GRK tertinggi berasal dari sektor energi pada sub sektor transportasi dimana di tahun 2022 nilai emisi sektor energi sebesar 238,67 GG CO₂. Kecenderungan persentase emisi gas rumah kaca tampaknya meningkat dari tahun ke tahun, 2,38% pada tahun 2018 menjadi 5,37% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya efektivitas kebijakan dalam upaya mengurangi emisi. Penurunan yang cukup besar terjadi (5,90%) karena adanya kebijakan PPKM Covid-19, yang mengakibatkan aktivitas masyarakat di luar rumah terbatas sehingga faktor penyebab Emisi GRK menjadi berkurang.

Gambar II-19 persentase Penurunan Emisi GRK Kota Cirebon



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, 2023

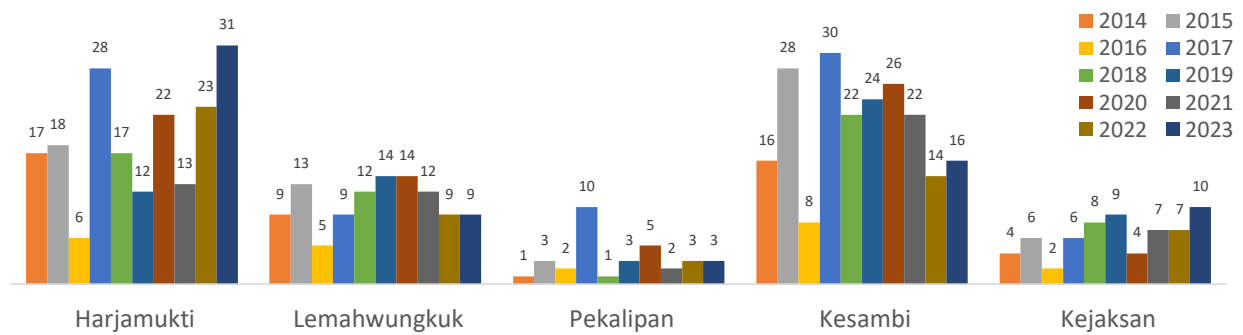
2.1.1.3.6 Ketahanan Bencana

A. Kebakaran

Bencana alam yang disebabkan oleh perilaku manusia berarti tindakan atau aktivitas yang dilakukan manusia dapat menimbulkan bencana atau dampak buruk bagi lingkungan dan makhluk hidup lain. Pada saat musim kemarau biasanya terjadi kecenderungan peningkatan kebakaran di Kota Cirebon dan meningkat pada sekitar bulan Juli-September untuk setiap tahunnya, hal ini

terjadi dampak dari *El Nino*. Kecenderungan peningkatan kebakaran ini terjadi saat kemarau dan biasanya akan turun ketika memasuki musim hujan, namun kecenderungan kejadian kebakaran pada bulan September 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar II-20 Kejadian Kebakaran di Kecamatan Kota Cirebon

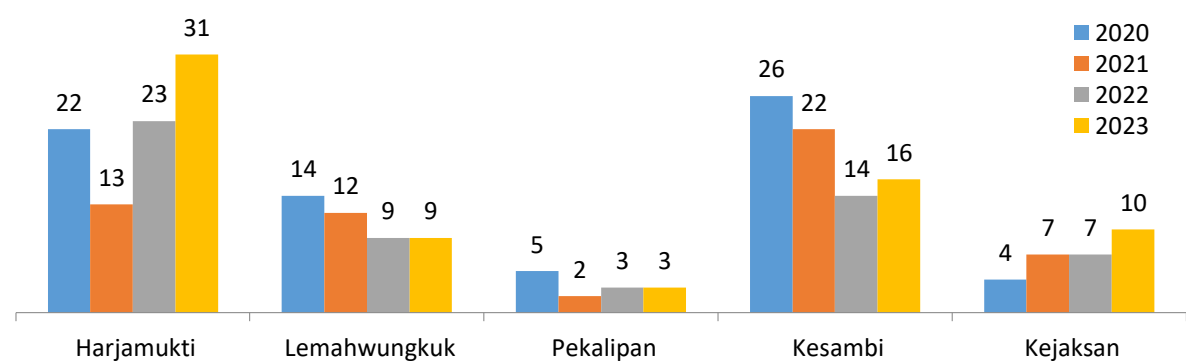


Sumber: Open data Cirebon, 2023

Kecenderungan kebakaran terjadi di lahan kosong/sampah, Selain fenomena *El Nino*, kejadian kebakaran di Kota Cirebon juga tidak lepas dari faktor kelalaian manusia. Seperti di antaranya, karena warga bakar sampah dan ilalang di lahan terbuka serta disebabkan oleh kelalaian penggunaan kompor dan korsleting listrik.

Standar Pelayanan merupakan salah satu faktor penilaian penyelenggaraan pelayanan kepada Masyarakat dapat mempengaruhi terhambatnya proses pelayanan yang berdampak pada mutu pelayanan dan akan menimbulkan ketidakpuasan dari Masyarakat. Kurangnya fasilitas mobil pemadam kebakaran yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah armada 9 (Sembilan) Unit belum mampu mengefektifkan pelayanan pemadaman kebakaran di Kota Cirebon, karena hanya 3 unit kendaraan operasional yang masih layak.

Gambar II-21 Kejadian Kebakaran di Kota Cirebon

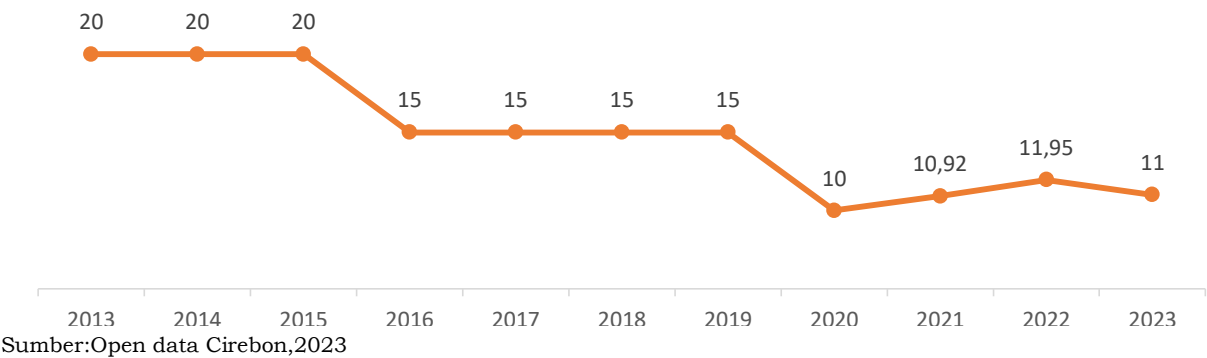


Sumber: Damkar 2023.

Permasalahannya adalah belum efektifnya Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) 15 menit yaitu waktu yang dibutuhkan oleh petugas pemadam kebakaran dimulai saat setelah petugas menerima laporan informasi kejadian kebakaran sampai ke tempat/lokasi terjadinya kebakaran, hal ini dikarenakan walaupun jarak Kota Cirebon tidak berjauhan antar Kecamatan akan tetapi bila jadwal kereta api bertepatan dengan kejadian kebakaran yang bisa menyebabkan kurang efektifnya pelayanan. Kurang efektifnya pelayanan pemadam kebakaran di Kota Cirebon, diduga disebabkan oleh Kurangnya pos WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Pembentukan pos WMK pemadam

kebakaran guna meningkatkan efektivitas pelayanan sehingga respon time rate bisa tercapai dengan maksimal yang saat ini telah tercapai 11,95 menit.

Gambar II-22 Tingkat Waktu Tanggap Manajemen Kebakaran di Kota Cirebon

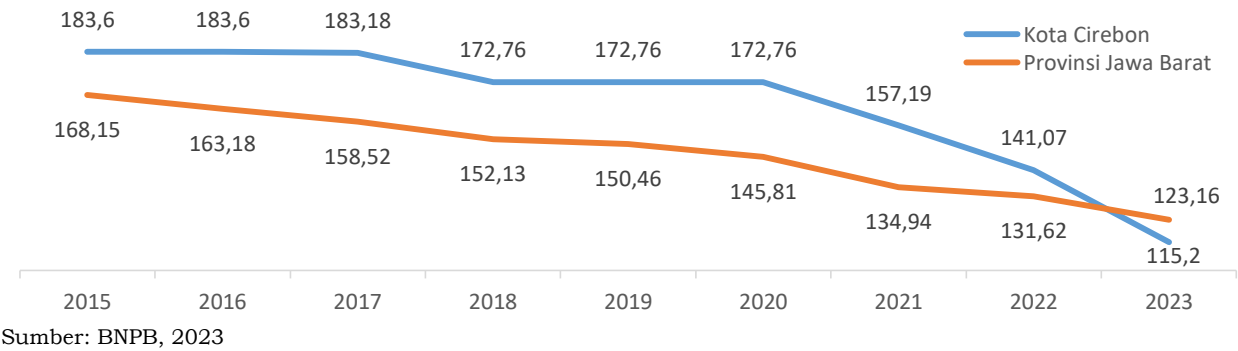


B. Bencana

Berdasarkan Peraturan RTRW Kota Cirebon, wilayah rawan bencana terdiri dari beberapa kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang memiliki kecenderungan terjadi rawan gelombang pasang, genangan banjir, rawan kebakaran dan pergerakan tanah.

Pelayanan penanggulangan bencana di Kota Cirebon dilakukan antara lain dengan mengupayakan turunnya angka resiko bencana yang dapat mengancam masyarakat di wilayah Kota Cirebon. Dalam periode 2015-2023, IRB Kota Cirebon cenderung menurun dari 183,60 (kategori tinggi) pada tahun 2015 menjadi 115,2 (kategori sedang) pada tahun 2023. Dalam kurun waktu delapan tahun ini, Nilai IRB Kota Cirebon lebih tinggi dari Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat. Jika pada tahun sebelumnya Nilai IRB Kota Cirebon lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2023 Nilai IRB Kota Cirebon lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat.

Gambar II-23 Indeks Risiko Bencana di Kota Cirebon & di Provinsi Jawa Barat



Nilai IRB ini diperoleh berdasarkan Kajian Risiko Bencana yang dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (*Hazard*), kerentanan (*Vulnerability*), dan kapasitas (*Capacity*). Dalam upaya pelayanan penanggulangan bencana, intervensi terhadap komponen kapasitas terus dilakukan untuk memperkecil resiko bencana.

Sebagai salah satu komponen penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB), komponen penilaian kapasitas dapat direpresentasikan oleh Indikator Ketahanan Daerah dari seluruh stakeholder penanggulangan bencana. Dalam hal ini, IKD merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Perangkat perhitungan IKD menggunakan 71 indikator yang meliputi tujuh prioritas, yakni perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, serta pengembangan sistem pemulihan bencana.

Tabel II-12 IKD Kota Cirebon

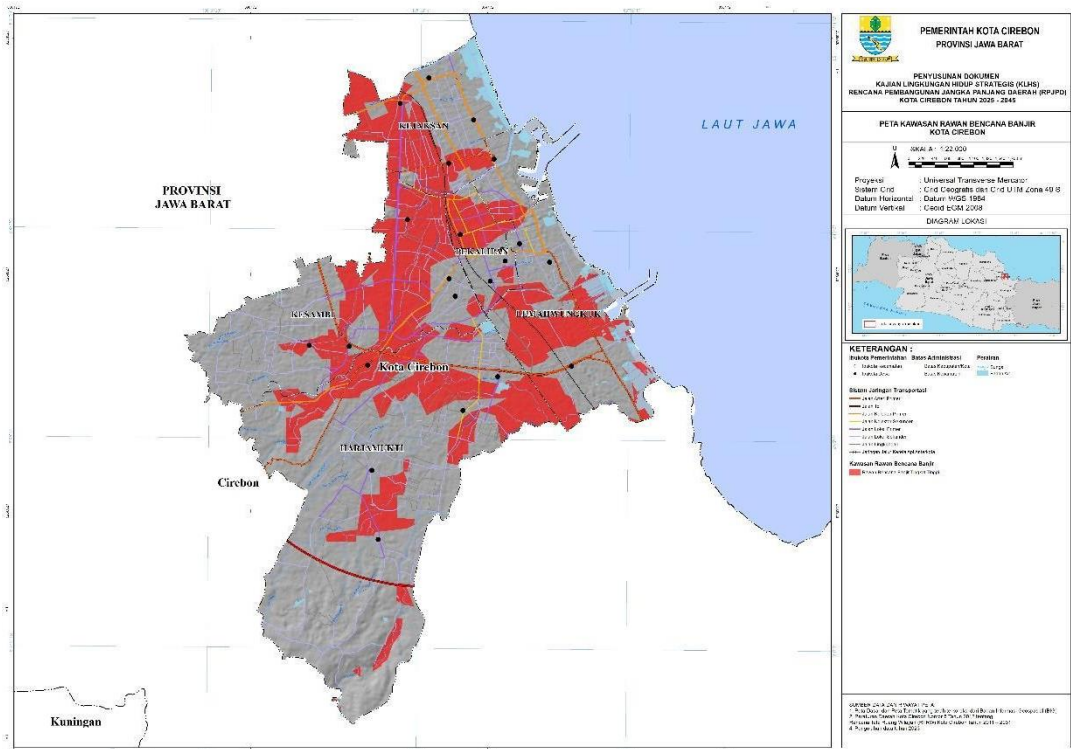
No	Prioritas	2021	2022	2023
1	Perkuatan kebijakan dan kelembagaan	0,38	0,57	0,67
2	Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu	0,47	0,50	0,80
3	Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik	0,43	0,62	0,79
4	Penanganan tematik kawasan rawan bencana	0,66	0,55	0,55
5	Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	0,56	0,62	0,73
6	Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	0,39	0,61	0,56
7	Pengembangan sistem pemulihan bencana	0,60	0,44	0,47
Indeks Kapasitas		0,49	0,57	0,62
Tingkat Kapasitas		Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat 2022-2026,
Hasil penilaian IKD 2023 yang dikeluarkan oleh BNPB.

Hasil perhitungan terhadap 71 indikator ini dapat menjadi rekomendasi sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga merupakan input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana kabupaten/kota. Pada tahun 2021, capaian IKD Kota Cirebon tahun 2021 sebesar 0,49 (tingkat kapasitas sedang). Angka ini masih jauh di bawah capaian IKD Provinsi Jawa Barat sebesar 0,67 sebagaimana dirilis dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat 2022-2026. Pada tahun 2022, IKD Kota Cirebon membaik menjadi 0,57.

Upaya perbaikan pada lima prioritas indikator yang terlihat pada kenaikan skor ke-5 prioritas tersebut. Namun, hal sebaliknya terlihat pada dua prioritas lainnya, yakni pada prioritas ke-4 (penanganan tematik kawasan rawan bencana) serta prioritas ke-7 (pengembangan sistem pemulihan bencana).

Gambar II-24 Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kota Cirebon



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon 2025-2045

Masih diperlukan penguatan kebijakan dan kelembagaan, pemutakhiran kajian risiko bencana dan rencana kontijensi untuk bencana beresiko tinggi, serta pembangunan sistem informasi yang mendukung penanggulangan bencana, yang di dalamnya termasuk *early warning system*. Saat ini, baru terdapat sistem peringatan dini berupa Gempa Bumi (*Accelerograph*). Diperlukan juga penguatan kesiapsiagaan, penanganan darurat bencana serta pengembangan sistem pemulihan bencana di Kota Cirebon. Keberadaan dengan sesar baribis kendeng (Cirebon-2) di Kota Cirebon, memiliki risiko gempa tektonik sehingga perlu juga dilakukan mitigasi dalam perencanaan. Risiko pergeseran tanah untuk daerah pesisir cukup rendah namun untuk daerah selatan Kota Cirebon khususnya daerah berbukit untuk wilayah sumurwuni dan sekitarnya masuk dalam kategori risiko tinggi walaupun areanya tidak terlalu luas. Daerah risiko pergerakan tanah tampak pada peta yang bersumber dari Badan Geologi, Kementerian ESDM. Disamping risiko banjir, kekeringan dan pergerakan tanah, Kota Cirebon yang berada di pesisir menjadi kawasan terhadap rawan gelombang pasang terutama untuk lokasi Kelurahan Kesenden, Kelurahan Lemahwungkuk dan Kelurahan Panjunan. Kawasan sepanjang pesisir pantai Kota Cirebon memiliki potensi bahaya rob dan juga akan memiliki risiko tertinggi ketika terjadi gelombang tsunami. Kerawanan bencana lainnya adalah kawasan untuk Kerawanan Kebakaran meliputi kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi, seperti di Kelurahan Pekalipan, Kelurahan Jagasatru, Kelurahan Panjunan, Kelurahan Kasepuhan, dan Kelurahan Kecapi, sebagaimana terlihat pada peta bahaya kebakaran dan peta kerentanan kebakaran.

Kondisi topografi sebagian besar wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dan sebagian kecil merupakan dataran tinggi yang berada di wilayah selatan kota. Kondisi wilayah kota yang sebagian besar berupa dataran rendah menjadi kendala tersendiri, karena kecepatan aliran air hujan yang terbuang ke laut menjadi lambat dan sangat berpotensi menimbulkan genangan banjir di beberapa lokasi. Karenanya di beberapa titik dibangun stasiun pompa yang berfungsi mempercepat pembuangan air hujan ke laut.

Cuaca ekstrim di Kota Cirebon yang menyebabkan banjir akibat curah hujan yang melebihi daya tampung drainase yang ada, kekeringan akibat musim kemarau yang berkepanjangan dan hujan lebat dengan angin kencang juga kadangkala disertai puting beliung yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang ada. Banjir yang disebabkan drainase yang buruk juga akibat curah hujan yang sangat lebat sehingga melampaui batas daya tampung drainase yang ada. Untuk dampak kekeringan di Kota Cirebon akan sangat terasa di wilayah selatan Kota Cirebon karena ada sebagian wilayah tersebut belum terjangkau oleh Jaringan Pipa PDAM.

Berdasarkan hasil Analisis GIS pada Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon 2025-2045, daerah rawan bencana banjir terdapat dalam luasan sebesar 1.3471,41 ha. Kecamatan Harjamukti memiliki luasan rawan bencana banjir paling besar yaitu 423,41 Ha, dan kecamatan pekalipan paling rendah, yaitu 88,46 Ha.

Tabel II-13 Luasan Daerah Rawan Banjir (Ha)

Kecamatan	Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	Grand Total
Harjamukti	423,41	423,41
Kejaksan	200,91	200,91
Kesambi	371,12	371,12
Lemahwungkuk	263,52	263,52
Pekalipan	88,46	88,46
Total	1.347,41	1.347,41

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat 2022-2026

2.1.1.3.7 Keanekaragaman Hayati

Pelestarian keanekaragaman hayati di Kota Cirebon dalam kawasan konservasi keanekaragaman ekosistem habitat asli yang merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya. Pemanfaatan sumber daya hayati untuk berbagai keperluan secara tidak seimbang ditandai dengan kerusakan ekosistem serta langkanya beberapa jenis flora dan fauna yang kehilangan habitatnya.

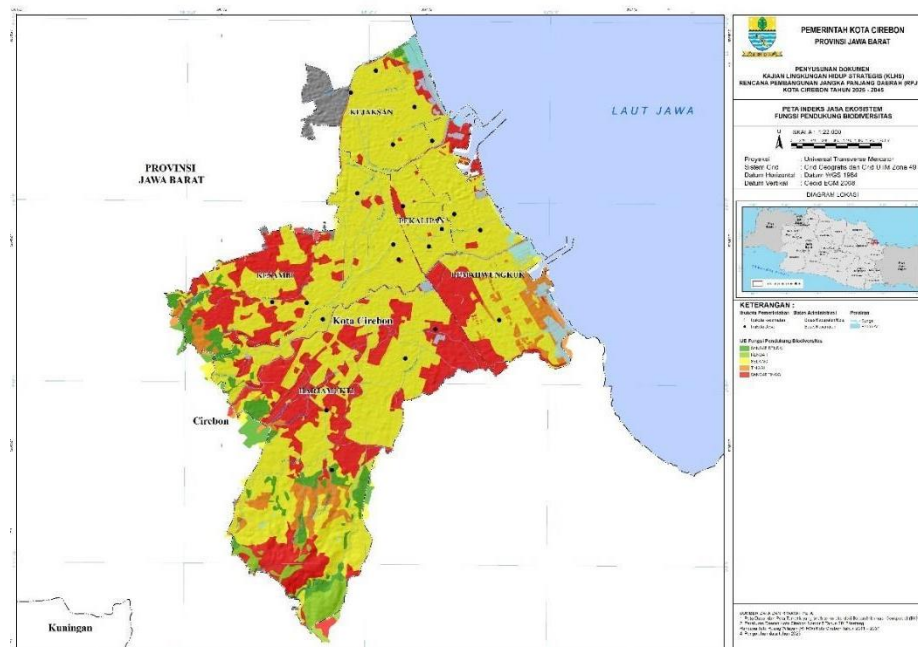
Tabel II-14 Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Kecamatan	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Harjamukti	75,50	106,73	929,10	85,95	556,80	1.754,07
Kejaksan	3,02	21,41	296,87	10,73	32,10	364,13
Kesambi	-	43,08	562,52	24,42	225,95	855,97
Lemahwungkuk	-	-	444,31	97,72	149,27	691,30
Pekalipan	-	-	147,56	-	12,20	159,76
Total	78,52	171,21	2.380,36	218,82	976,31	3.825,23

Sumber : Analisis GIS, 2023

Taman Keanekaragaman Hayati (KeHati) telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Keanekaragaman Hayati. Kebon Pelok merupakan lokasi Taman KeHati yang terletak di selatan Kota Cirebon, wilayah Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti. Taman tersebut merupakan RTH publik Kota Cirebon dengan luas ±4,7 Ha yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 660/Kep.143-DLH/2017 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Kota Cirebon pada tanggal 9 Maret 2017. Pada tahun 2021 di Taman Kehati terdapat 5 jenis serangga, 4 jenis burung dan 6 jenis pohon endemik, sedangkan pada tahun 2022 berkurang menjadi 4 jenis serangga, 4 jenis burung dan bertambahnya pohon endemik menjadi 8 jenis.

Gambar II-25 Peta Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati



Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045

2.1.1.4 Potensi Wilayah

2.1.1.4.1 Pertanian dan Perkebunan

A. Luas Panen, Produktivitas, dan Total Produksi Pertanian.

Luas panen, produktivitas, dan produksi Pertanian merupakan komponen yang saling berhubungan dan dapat saling mempengaruhi. Keseimbangan antara luas panen dan produktivitas sangat penting. Luas panen yang besar tanpa produktivitas yang memadai dapat mengakibatkan rendahnya hasil per unit area, sementara produktivitas tinggi pada luas panen yang kecil dapat meningkatkan hasil keseluruhan. Perubahan dalam luas panen atau produktivitas dapat menghasilkan perubahan dalam efisiensi penggunaan sumber daya seperti lahan, air, dan input pertanian lainnya. Kota Cirebon yang bukan merupakan basis kota pertanian memiliki luas panen dan jumlah produksi yang cukup rendah dibandingkan dengan daerah lain disekitarnya. Berikut merupakan luas panen, produktivitas dan produksi pertanian tahun 2019-2022.

Berdasarkan data pertanian yang ada diketahui bahwa Luas Panen padi mengalami fluktuasi dalam luas panen dari tahun ke tahun dan luasan panen tanaman padi sebesar 176,80 Ha menurun drastis pada tahun 2022 dimana pada tahun sebelumnya sebesar 230,20 Ha. Produktivitas tanaman padi juga menurun pada tahun 2020 dan pada tahun berikutnya sekitar 55-59 Kw/Ha. Total produksi padi pada tahun 2022 sebesar 972,40 ton, yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1.266 ton. Penurunan produktivitas mengakibatkan penurunan produksi, hal ini disebabkan oleh faktor seperti cuaca buruk, penyakit tanaman, atau masalah manajemen pertanian.

Luasan panen tanaman palawija sebesar 8 Ha pada tahun 2022. Produktivitas tanaman palawija mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 terutama produktivitas ubi kayu/singkong yang mencapai 160 kw/Ha. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pertanian yang efisien dan

tingginya produktivitas dapat memberikan hasil yang baik meskipun luas tanam tidak selalu besar.

Luasan panen sayur dan buah mengalami peningkatan yang relatif stabil, sedangkan produktivitasnya mengalami fluktuasi yang signifikan. Cabe Merah, Bawang Merah dan Terung mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2021, sedangkan produksi sayuran dan buah mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan penurunan yang signifikan pada tahun 2021 dan 2022.

B. Produksi Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Sektor pertanian di Kota Cirebon bukan merupakan basis sektor utama. Keterbatasan lahan pertanian yang menyebabkan produksi hasil pertanian di Kota Cirebon tidak sebesar daerah sekitarnya yaitu Ciayumajakuning. Produksi sektor pertanian di Kota Cirebon terdiri dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Sub sektor tanaman pangan sendiri dihitung dari hasil komoditas padi dan palawija (jagung, kacang, dan umbi-umbian). Komoditas tanaman pangan yang dihasilkan di Kota Cirebon adalah padi, jagung, kacang hijau, kacang tanah dan ubi jalar.

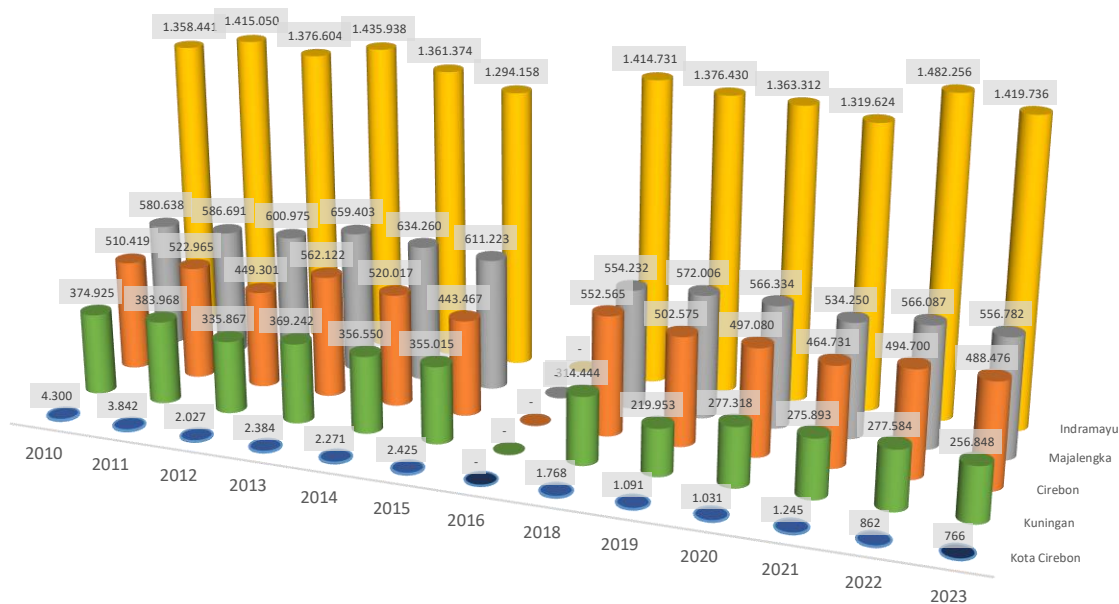
Pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya se wilayah Ciayumajakuning, Kota Cirebon memiliki produksi padi terendah bahkan hanya sekitar 0,07% dari produksi padi Kabupaten Indramayu. Di Jawa Barat sendiri nilai produksi padi di Kota Cirebon menempati urutan ke 24 di atas nilai produksi Kota Cimahi, Kota Bogor dan Kota Depok. Produksi padi mengalami penurunan hingga tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan produksi padi ini salah satunya disebabkan berkurangnya jumlah kelompok tani dan alih fungsi lahan pertanian. Tidak hanya padi, produksi pertanian tanaman pangan di Kota Cirebon juga diperlihatkan dari produksi palawija berupa jagung, kacang, dan singkong seperti pada tabel berikut:

Tabel II-15 Produksi Tanaman Palawija (ton) Kota Cirebon

No	Tanaman	2019	2020	2021	2022
1	Jagung	0	0	0	14,40
2	Kacang Tanah	4,00	0	4,00	0
3	Kacang Hijau	0	2,25	1,00	0,30
4	Singkong	0	36,00	16,00	16,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2023

Gambar II-26 Produksi Padi (ton) Ciayumajakuning



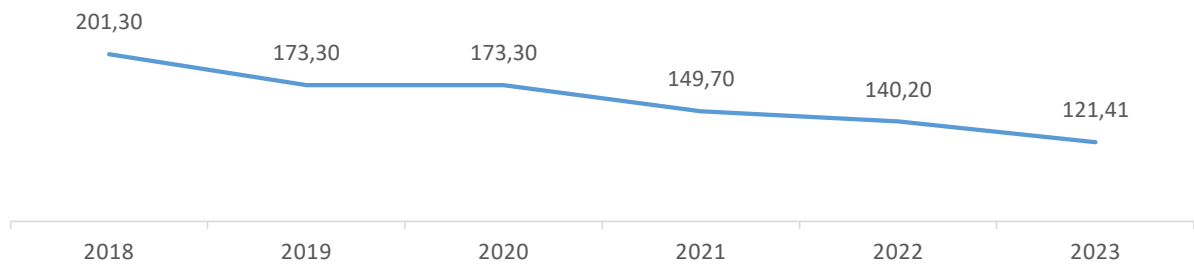
Sumber: BPS 2024

Diantara produksi tanaman pangan palawija di Kota Cirebon nilai produksi tertinggi adalah singkong dimana di tahun 2020 sebesar 36 ton dan turun di tahun 2021 dan 2022 menjadi 16 ton. Terbatasnya lahan pertanian mengakibatkan produksi tanaman pangan palawija juga cukup rendah bahkan produksi tanaman palawija tidak menentu setiap tahunnya. Secara umum produksi tanaman pangan di Kota Cirebon belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk konsumsi pangan masyarakat. Sehingga sebagian besar pemenuhan pangan di Kota Cirebon didistribusikan dari luar Kota Cirebon.

C. Luas Lahan Pertanian dan Kelembagaan Petani

Kota Cirebon mengalami pertumbuhan ekonomi dan penduduk karena migrasi yang cukup cepat. Pertumbuhan ini mengakibatkan luas lahan produktif pertanian setiap tahun menurun. Penurunan ini disebabkan beralih fungsinya lahan sawah menjadi daerah pemukiman dan lahan usaha. Meskipun demikian, adanya teknologi pertanian yang lebih maju seperti dalam bibit unggul dan pupuk menyebabkan produksi pertanian tetap meningkat meskipun luas lahan pertanian berkurang seperti yang terdapat dalam gambar berikut:

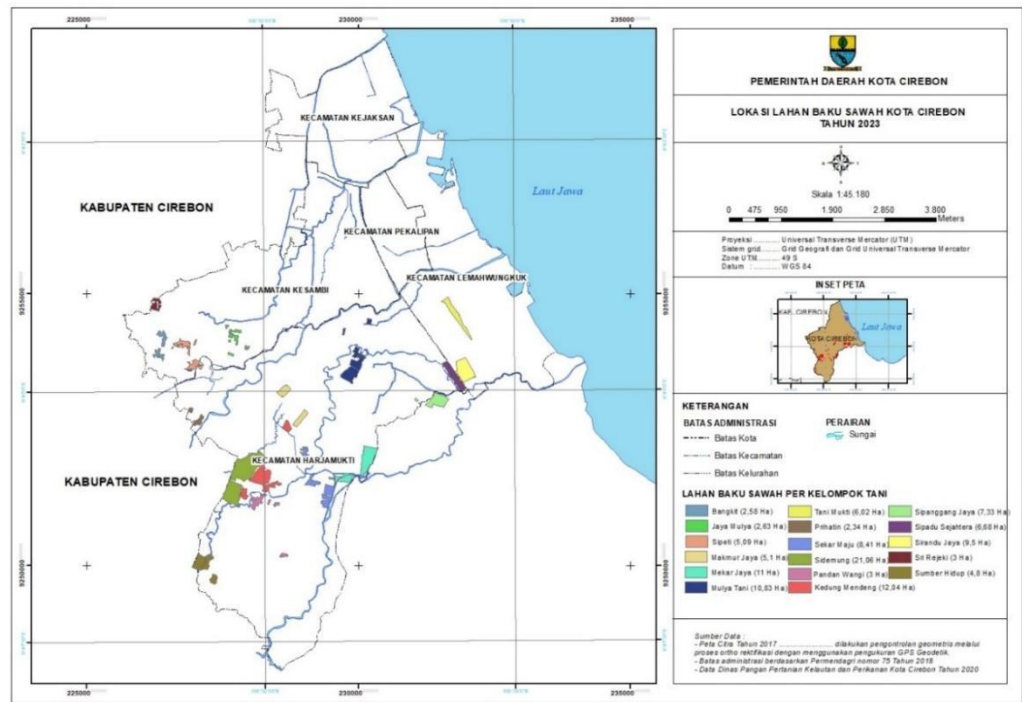
Gambar II-27 Luas Lahan Baku Sawah (Ha)



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon, 2023

Selama 6 (enam) tahun terakhir luas lahan baku sawah mengalami penurunan luasan dimana di tahun 2018 luas lahan baku sawah mencapai 201,20 Ha sedangkan di tahun 2023 tersisa 121,41 Ha saja. Hal ini terjadi akibat alih fungsi lahan pertanian terutama alih fungsi menjadi permukiman. Kepemilikan lahan milik masyarakat mengakibatkan sulitnya dilakukan control terhadap alih fungsi lahan walaupun hal ini telah diatur pada dokumen Rencana Detil Tata Ruang Daerah Kota Cirebon. Lahan Baku Sawah milik Pemerintah Kota Cirebon saat ini seluas ± 0,3 Ha berlokasi di Kelurahan Argasunya. Penurunan luas lahan pertanian ini pun berimbas pada terjadinya penurunan jumlah kelompok tani menjadi 17 ditahun 2023 yang tersebar di 7 kelurahan dari 3 kecamatan. Adapun luas total lahan baku sawah tahun 2023 adalah 121,41 ha yang terdiri dari 28,97 ha sawah irigasi dan 92,47 ha sawah tadah hujan. Kelompok tani dengan garapan sawah terluas adalah kelompok tani Sidemung di Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti. Kecamatan Harjamukti juga merupakan Kecamatan yang memiliki lahan pertanian terluas di Kota Cirebon yaitu sebanyak 92,59 ha.

Gambar II-28 Peta Sebaran Lahan Baku Sawah Kota Cirebon Tahun 2023



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon, 2023

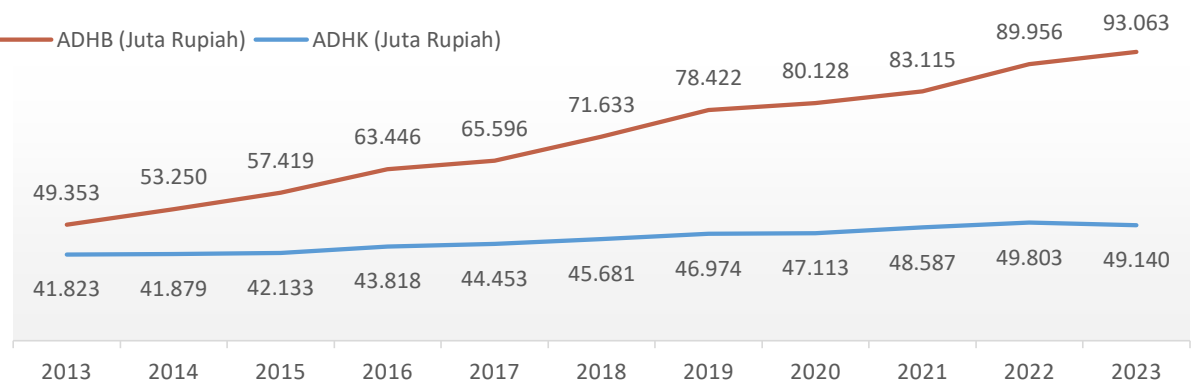
D. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB

Peran sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB Kota Cirebon berada pada urutan terakhir dari seluruh sektor penyumbang PDRB (tanpa sektor pertambangan dan penggalian) berdasarkan lapangan usaha di

Kota Cirebon. Meski begitu Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan cenderung mengalami peningkatan baik berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan.

Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan mengalami peningkatan dimana di tahun 2013 PDRB ADHB memiliki nilai 49.353,07 juta rupiah meningkat di tahun 2023 menjadi 89.956,39 juta rupiah. Sedangkan berdasarkan PDRB ADHK menyumbang 41.823,35 juta rupiah di tahun 2013 dan di tahun 2023 menjadi 49.802,94 juta rupiah. Apabila dilakukan analisis lebih detail berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ) terhadap sektor dalam PDRB di Kota Cirebon yang dilakukan di Tahun 2022 menunjukkan bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan bukan merupakan sektor basis/sektor non-Basis dengan nilai LQ : 0,04 ($LQ < 1$). LQ digunakan untuk mengetahui tingkat spesialisasi sektor-sektor di suatu wilayah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis. Selain itu, sektor pertanian, kehutanan, perikanan apabila dilihat dari identifikasi kemajuan sektor di Kota Cirebon termasuk dalam spesialisasi dalam sektor yang tumbuh lambat di Kota Cirebon juga merupakan sektor yang tidak memiliki daya saing dibandingkan dengan sektor lain dalam PDRB Kota Cirebon. Sedangkan berdasarkan analisis sektor unggulan sektor ini termasuk dalam sektor terbelakang.

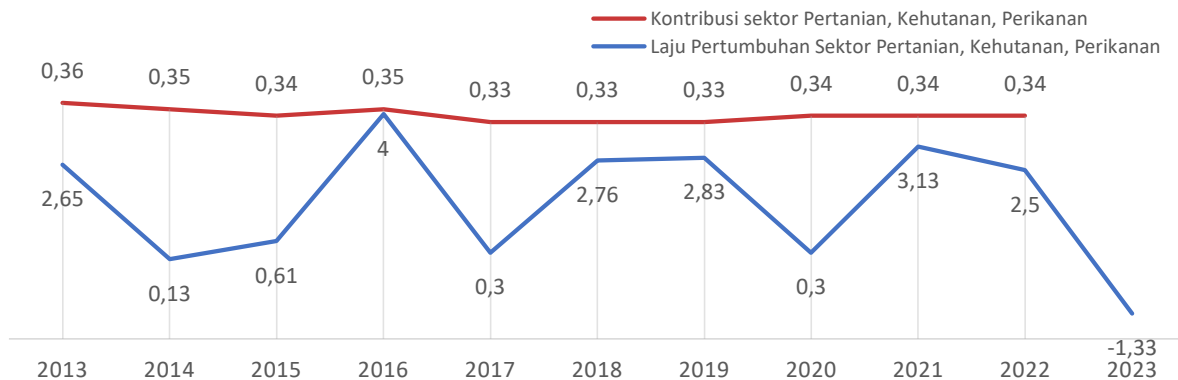
Gambar II-29 PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan



Sumber: BPS Kota Cirebon, 2023

Kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan setiap tahunnya selama 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Untuk laju pertumbuhannya kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan kenaikan 4% dan terendah terjadi pada tahun 2014, 2017 dan 2020.

Gambar II-30 PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)



Sumber: BPS Kota Cirebon, 2023

2.1.1.4.2 Peternakan dan Perikanan

A. Peternakan

Secara keseluruhan populasi ternak di Kota Cirebon pada tahun 2022 umumnya mengalami peningkatan kecuali ayam pedaging yang turun cukup signifikan di tahun 2022 yang hanya 800 ekor dari sebelumnya 3200 ekor, ayam kampung yang turun 791 ekor serta ternak kuda dimana di tahun 2021 terdapat 1 kuda namun di tahun 2022 tidak ada populasi ternak kuda. Populasi ternak besar yang mengalami peningkatan di tahun 2022 adalah populasi Sapi potong yang naik 9 ekor di tahun 2022, kambing yang naik 20 ekor di tahun 2022, Domba yang naik 12 ekor, ayam petelur yang naik 46 ekor dan kenaikan terbesar pada itik/itik manila di tahun 2022 yaitu sekitar 999 ekor meskipun nilai ini masih lebih rendah dari populasi di tahun 2018-2020.

Apabila dilihat kecenderungannya maka terjadi penurunan cukup signifikan selama 5 tahun terakhir pada jenis ternak domba, ayam kampung, ayam pedaging dan itik/itik manila. Dari data tersebut selama 5 tahun terakhir ini juga tidak terdapat populasi babi dan sapi perah di Kota Cirebon. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon telah memiliki 2 unit Rumah Potong Hewan dan Satu unit Rumah Potong Unggas

B. Perikanan

F.1 Produksi Perikanan Tangkap

Kota Cirebon merupakan salah satu kota yang berbatasan dengan garis pantai utara dan berbatasan dengan laut Jawa. Sehingga perikanan tangkap merupakan salah satu sektor yang menunjang keberlangsungan Kota Cirebon. Produksi perikanan tangkap merujuk pada jumlah total ikan dan produk perikanan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan di laut, sungai, dan perairan lainnya. Ini mencakup berbagai jenis hasil tangkapan seperti ikan, udang, cumi-cumi, dan lainnya. Produksi perikanan tangkap dapat diukur dalam berbagai satuan, seperti ton atau kilogram. Nilai perikanan tangkap, di sisi lain, mengacu pada nilai ekonomi dari hasil tangkapan tersebut. Ini mencakup pendapatan yang dihasilkan dari penjualan ikan dan produk perikanan tersebut. Nilai ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jenis ikan atau produk perikanan, ukuran tangkapan, metode penangkapan, serta permintaan dan penawaran di pasar.

Produksi dan nilai perikanan tangkap memberikan gambaran tentang kontribusi sektor perikanan tangkap terhadap perekonomian suatu. Hal ini dapat menunjukkan kesehatan ekosistem laut, pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan, dan perencanaan kebijakan perikanan yang efektif, serta menilai dampak ekonomi dan sosial dari kegiatan perikanan tangkap di suatu wilayah. Kota Cirebon memiliki 1 (satu) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yaitu PPN Kejawan dan 3 (tiga) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yaitu PPI Cangkol, PPI Pesisir dan PPI Kesenden. Selain itu, terdapat 3 (tiga) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kota Cirebon yakni TPI Kejawan, TPI Kesenden dan TPI Cangkol.

Secara keseluruhan produksi dan nilai produksi di Kota Cirebon sekitar 70% didominasi oleh produksi cumi-cumi beku. Kecenderungan produksi cumi-cumi menunjukkan kenaikan dari tahun 2018 hingga 2021, mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan 4.212,13 ton. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan produksi menjadi 3.049 ton, penurunan signifikan dalam produksi cumi-cumi terjadi di tahun 2023 dimana sampai dengan bulan September 2023 produksi cumi-cumi hanya berada pada angka 710,92 ton. Terkait dengan nilai produksi tentunya sejalan dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Nilai produksi meningkat secara signifikan pada tahun 2021, tetapi mengalami penurunan tajam pada tahun 2022 dan 2023. Produksi kakap merah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kecenderungan produksi menunjukkan kenaikan pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020, dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 76,54 ton. Nilai produksinya mengikuti kecenderungan produksi. Kecenderungan produksi jenah menunjukkan fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 90,74 ton yang sebelumnya bernilai 104,53 ton di tahun 2022. Nilai produksi juga meningkat secara substansial hingga tahun 2022, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2023. Produksi kerapu mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan puncak produksi pada tahun 2019 dengan total produksi 118,54 ton dan di tahun 2023 produksi kerapu sebesar 41,68 ton. Nilai produksi mengikuti kecenderungan produksi, dengan penurunan yang signifikan pada tahun 2021 dan 2023 yaitu sekitar 11.159,20 juta rupiah dan 1.875,38 juta rupiah. Kecenderungan produksi udang menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun di tahun 2019 namun terus turun di tahun 2020-2023 dimana di tahun 2019 nilai produksi udang sebesar 957,09 ton, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 106,18 ton. Begitupun nilai produksinya yang mengikuti kecenderungan total produksinya. Produksi ikan tanda-tanda hanya tersedia pada tahun 2021-2023. Terjadi peningkatan produksi dari tahun 2021 hingga 2023. Di Tahun 2023 sampai bulan september 2023 produksi ikan tanda-tanda sudah mencapai 74,56 ton. Fluktuasi dalam produksi dan nilai produksi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan cuaca, kebijakan perikanan, atau faktor ekonomi lainnya.

F.2 Produksi Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya, atau sering disebut juga sebagai akuakultur, merupakan kegiatan pembesaran dan pemeliharaan organisme air seperti ikan, udang, moluska, dan organisme air lainnya dalam lingkungan yang

dikendalikan untuk tujuan komersial, konsumsi manusia, atau tujuan lainnya. Ini adalah bentuk budidaya atau pemeliharaan organisme air untuk keperluan ekonomi. Perikanan budidaya memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan protein daerah, memberikan pekerjaan, dan mendukung perekonomian daerah. Namun, perlu dilakukan dengan bijak dan berkelanjutan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Perikanan budidaya berdasarkan jenis kegiatan terdiri dari budidaya laut, budidaya tambak, budidaya kolam, budidaya keramba, budidaya jaring apung, budidaya sawah tambak dan mina padi.

Perikanan budidaya di Kota Cirebon terdiri dari budidaya lele, nila, patin, bandeng, kerang hijau dan udang. Kecenderungan produksi Lele meningkat dari 2018 hingga 2020, di tahun 2020 produksi ikan lele dapat mencapai 83 94 ton dengan nilai produksi 1.343,04 juta rupiah. Pada tahun 2021 dan 2022 produksi lele mengalami penurunan hingga di tahun 2023 sampai dengan bulan September 2023, nilai produksinya masih di angka 34,96 ton dengan nilai produksi 559,36 juta rupiah. Produksi Nila meningkat di tahun 2019 mencapai 31,40 ton dengan nilai produksi 628 juta rupiah, namun mengalami penurunan setiap tahun setelahnya. Produksi Patin mengalami fluktuasi tetapi mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2023, dimana sampai dengan bulan september 2023 nilai produksi patin mencapai 10,77 ton dengan nilai produksi 161,55 juta rupiah dari sebelumnya di tahun 2022 hanya mencapai 5,64 ton dengan nilai produksi 5,64 juta rupiah. Produksi Bandeng terlihat cukup fluktuatif, namun cenderung turun dibandingkan dengan tahun 2018 dimana tahun 2018 produksi bandeng sebesar 42,46 dengan nilai produksi 723,52 juta rupiah sedangkan di tahun 2023 produksinya masih berkisar 39,6 ton dengan nilai produksi 673,20 juta rupiah. Produksi Udang meningkat tajam dari 2018 hingga 2022. Dimana di tahun 2022 angka produksi udang mencapai 26,17 ton dengan nilai produksi 785,10 juta rupiah, lalu turun pada tahun 2023 produksi udang hanya mencapai 18,52 ton dengan nilai produksi 555,60 juta rupiah. Produksi Kerang Hijau mengalami peningkatan yang signifikan dari 2018 hingga September 2023. Dimana pada tahun 2023 nilai produksinya mencapai 130,58 ton namun nilai produksi kerang hijau ini tidak sebesar komoditas lainnya dimana walaupun produknya merupakan yang tertinggi namun nilai produksinya hanya 417,86 juta rupiah. Adapun komoditas yang memiliki produksi dan nilai produksi yang cukup tinggi diantaranya adalah bandeng, lele dan udang.

F.3 Nelayan dan Kelompok Nelayan

Nelayan adalah seseorang yang berprofesi sebagai penangkap ikan atau sumber daya perairan lainnya seperti udang, kerang, dan sebagainya. Adapun sekelompok individu nelayan yang bekerja sama atau tergabung dalam suatu organisasi atau komunitas membentuk kelompok nelayan. Dimana Keanggotaan dalam kelompok nelayan dapat membantu meningkatkan daya tawar, mengatasi masalah bersama, dan mendapatkan manfaat kolektif. Kota Cirebon sendiri sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan laut menjadikan nelayan sebagai salah satu mata pencaharian bagi masyarakatnya. Dimana berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Kota Cirebon jumlah nelayan pada tahun 2023 sebanyak 3.961 orang turun dibanding tahun 2022 yang jumlah nelayannya mencapai 4.124 orang.

Sejak tahun 2019 jumlah kelompok nelayan di Kota Cirebon berjumlah 19 kelompok. Dari kelompok nelayan ini menghasilkan produksi sebanyak 1.352,68 ton hasil perikanan. Jumlah ini memang tidak sebesar total produksi di tahun 2019 yang mencapai 2.685,93 ton namun jumlah ini sudah meningkat sejak terjadinya penurunan di tahun 2021 yang hanya mencapai 936,43 ton.

F.4 Ekspor Produk Perikanan

Ekspor produk perikanan merujuk pada kegiatan mengirimkan produk-produk yang berasal dari sektor perikanan ke luar daerah. Produk perikanan yang diekspor dapat mencakup ikan segar, ikan beku, olahan ikan, kerang, udang, dan berbagai produk lain yang berasal dari sumber daya perikanan. Ekspor produk perikanan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi regional. Daerah pesisir yang memiliki industri perikanan yang kuat dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif.

terjadi penurunan yang cukup signifikan dari kegiatan ekspor perikanan terutama di tahun 2020 yang turun menjadi 2.514,92 ton dari sebelumnya dapat mengekspor sebanyak 5.249,96 di tahun 2018. Hal ini salah satunya adalah karena adanya dampak pembatasan aktivitas di tahun 2020 akibat Covid-19 yang mengakibatkan produksi perikanan menurun dan berdampak pada ekspor produk perikanan yang juga menurun. Di tahun 2021 jumlah ekspor perikanan kembali meningkat menjadi 3.189,83 ton walaupun nilai tersebut belum dapat setara dengan ekspor pada tahun 2018-2019. Sampai dengan bulan September 2023 ini ekspor perikanan masih pada angka 1.307,61 ton yang mana bahkan lebih rendah dibandingkan ekspor tahun 2020.

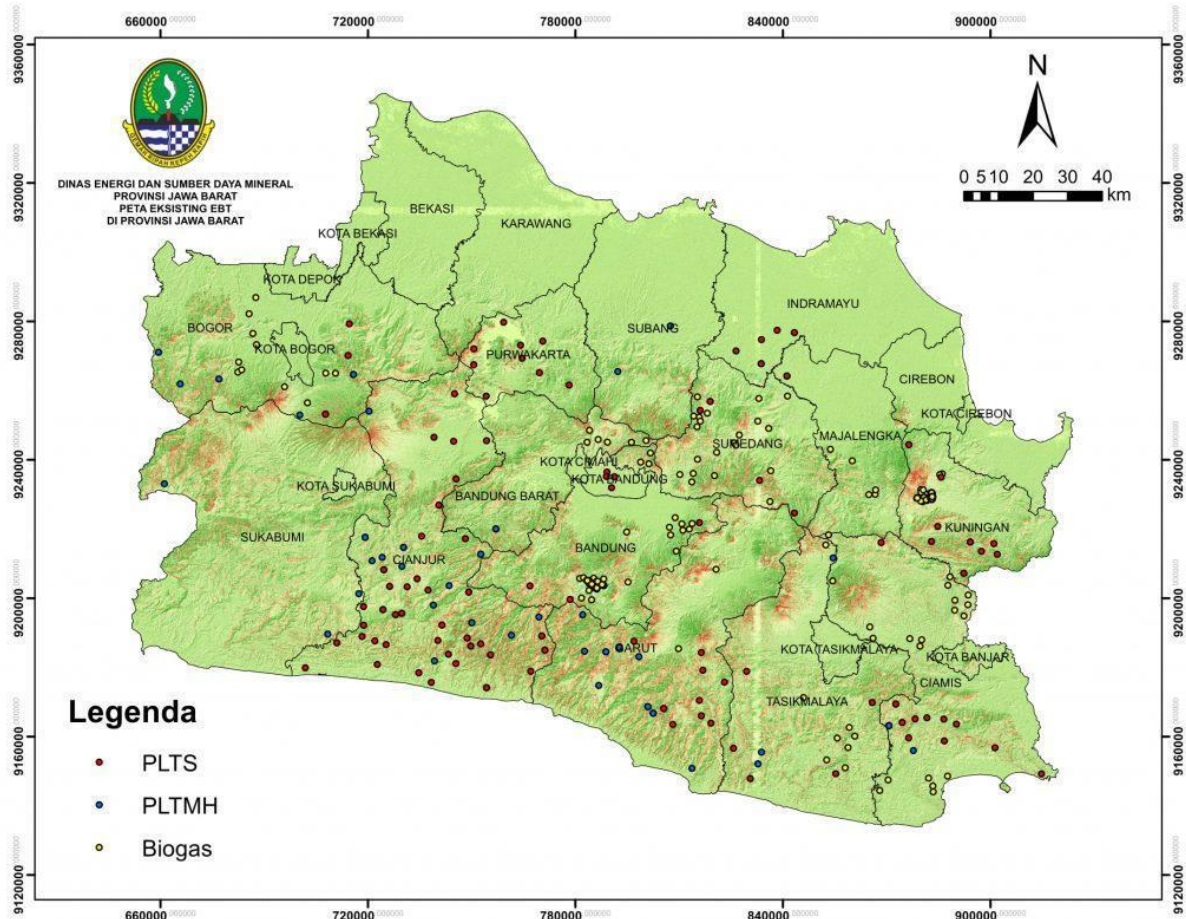
2.1.1.4.3 Energi dan Mineral

Dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), Pemerintah Kota mengupayakan dalam beberapa tahun ke depan menjadikan kota bebas emisi yang mengedepankan pemenuhan kebutuhan dengan Energi Baru Terbarukan.

Potensi Kota Cirebon untuk mendapatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang bersih dan terjangkau antara lain pemanfaatan sumber daya angin, air, biogas dan sinar matahari, walaupun untuk investasinya dibutuhkan biaya yang cukup besar.

Dengan adanya fasilitas sumber energi baru terbarukan, faktor kebutuhan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi akan muncul. Disamping adanya pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan baru, pengeluaran biaya untuk energi bersih yang murah akan menekan biaya produksi dan biaya hidup sehingga ada pendapatan masyarakat yang dapat disimpan karena biaya yang dikeluarkan menjadi berkurang.

Gambar II-31 Peta Sebaran EBT di Jawa Barat



Sumber: <http://esdm.jabarprov.go.id>

Energi yang bersih akan mengurangi dampak emisi dari sumber energi fosil sehingga dapat menekan perubahan iklim yang diakibatkan meningkatnya emisi gas rumah kaca. Kota Cirebon telah mengimplementasi pemanfaatan sinar matahari di Kampung Proklim kelurahan Larangan, namun belum teridentifikasi potensi Energi Baru Terbarukan lainnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sementara ini di wilayah Kota Cirebon yang padat penduduk menyebabkan eksplorasi mineral sangat minim, walaupun sebelumnya ada permasalahan penambangan pasir ilegal yang menyebabkan rusaknya lingkungan. Namun tidak menutup kemungkinan Kota Cirebon memiliki kandungan mineral yang dapat dimanfaatkan dengan tidak mengesampingkan untuk menjaga pelestarian lingkungan hidup.

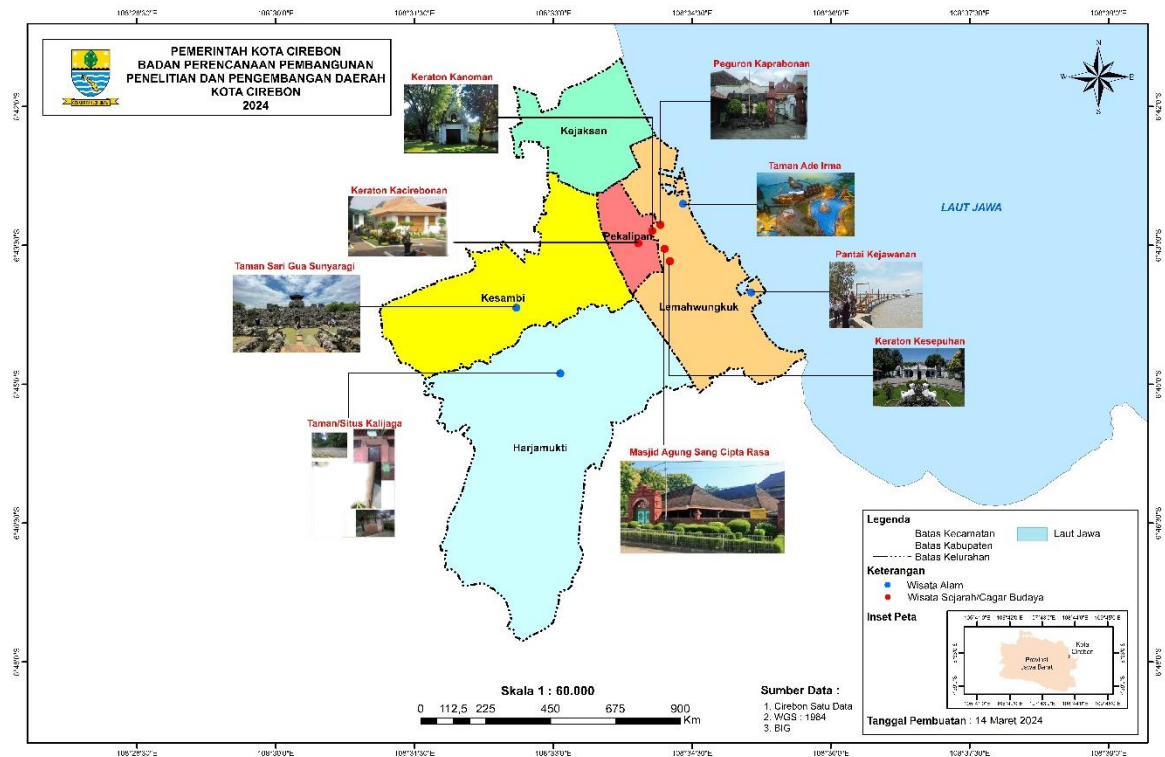
2.1.1.4.4 Pariwisata

Kota Cirebon sebagai salah satu daerah tujuan wisata merupakan salah satu daerah yang nyaman untuk dikunjungi, terlebih dengan akses transportasi yang mudah dan juga ketersediaan fasilitas akomodasi yang banyak pilihan. Kemudahan akses transportasi tidak lepas dari dibangunnya jalan tol Palikanci, Cipali dan Cipularang. Adanya simpul jaringan transportasi merupakan keunggulan lain Kota Cirebon, seperti :

- Bandara Cakrabuana Cirebon dan Bandara Kertajati Majalengka
- Pelabuhan Muara Jati
- Stasiun Kejaksan
- Stasiun Prujakan

- Terminal Type A Harjamukti

Gambar II-32 Peta Sebaran Destinasi Pariwisata Kota Cirebon



Sumber: Disbudpar Kota Cirebon 2024, diolah.

Nilai sejarah yang dimiliki Kota Cirebon dan ragam kuliner khas Cirebon seperti nasi jamblang, empal gentong, tahu gejrot dan berbagai makanan dari laut serta kerajinan rotan, topeng, lukisan kaca dan batik yang mampu menarik para wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk datang berkunjung. Kunjungan Wisatawan ke Kota Cirebon pada tahun 2022 tercatat meningkat 647.634 orang jika dibandingkan dengan tahun 2021. Peningkatan kunjungan wisatawan tersebut juga didukung objek wisata dengan fasilitas yang tersedia. Pada tahun 2022, tercatat ada sebanyak 212 rumah makan, 65 hotel, objek rekreasi ada sebanyak 18 jenis yang tersebar di berbagai lokasi. Pada tahun yang sama, tercatat juga ada 5 toko cinderamata dan 11 pedagang cinderamata non toko yang resmi.

Tabel II-16 Kunjungan Wisatawan di Kota Cirebon

Destinasi	2018	2019	2020	2021	2022
Wisatawan Mancanegara					
Obyek Wisata	710	85.700	161	131	252
Hotel Bintang	9.038	95.242	45.191	57.982	83.514
Hotel Melati	42	9.062	113	13	49
Restaurant	n.a	n.a	n.a	n.a	6.946
Jumlah	9.790	190.004	45.465	58.126	90.761
Wisatawan Nusantara					
Obyek Wisata	696.821	837.900	345.663	3.070.134	1.242.195
Hotel Bintang	348.757	350.752	462.051	457.208	480.119
Hotel Melati	25.196	126.551	133.615	83.727	81.354
Restaurant	n.a	n.a	n.a	n.a	2.422.400
Jumlah	1.070.774	1.315.203	941.329	3.611.069	4.226.068

Sumber: Disbudpar Kota Cirebon 2024.

Kota Cirebon memiliki potensi wisata yang cukup besar, baik berupa wisata alam maupun wisata buatan. Termasuk dalam kelompok wisata alam adalah Taman Kera/Makam Kalijaga (2,00 ha). Wisata buatan adalah Taman Ade Irma

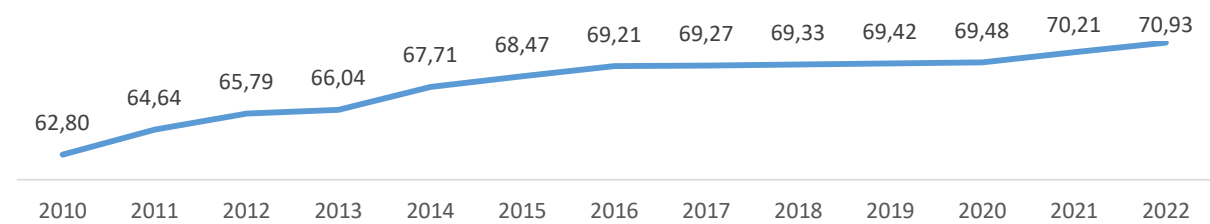
Suryani (4,2 ha). Terdapat pula wisata budaya, yakni Keraton Kesepuhan (18,55 ha), Keraton Kanoman (17,55 ha), Keraton Kacirebonan (4,65 ha), dan Gua Sunyaragi (1,50). Tiga keraton paling utama yang dijadikan unggulan adalah Keraton Kesepuhan, keraton Kanoman dan Keraton Kacirebonan. Selain keraton, wilayah Cirebon memiliki potensi wisata dalam hal cagar budaya yang beragam, mulai dari Masjid bersejarah, gedung bersejarah, maupun tugu dan icon. Dalam hal ini, integrasi antara wisata keraton dengan cagar alam bisa dijadikan salah satu potensi wisata di Kota Cirebon.

2.1.2 Aspek Demografi

Kota Cirebon memiliki potensi sumber daya manusia yang menjadi bagian penting dari modal pembangunan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan yang baik cukup dapat menjadi sumber daya pada sektor produksi yang menghasilkan suplai barang dan jasa untuk kebutuhan pasar lokal dan luar daerah. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Pendidikan yang merupakan representasi indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pengendalian penduduk diperlukan agar permasalahan, pengangguran, kemiskinan, stunting dan permasalahan lainnya untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di masa depan dalam menyongsong era Indonesia Emas Tahun 2045.

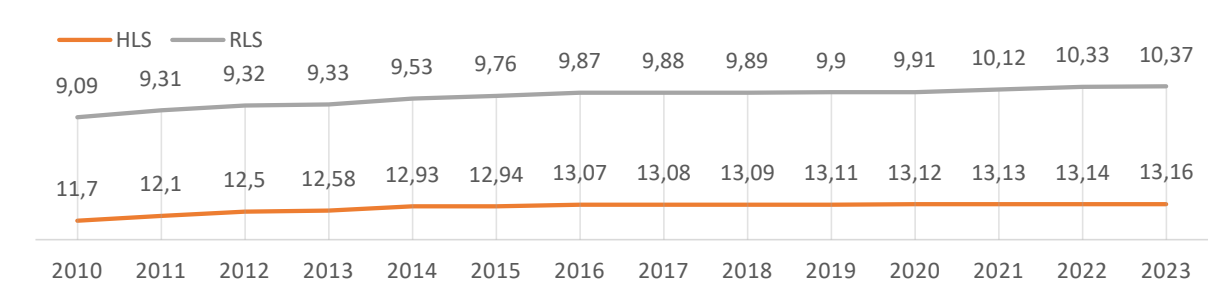
Dasar hukum yang mengatur informasi kependudukan dalam perencanaan pembangunan tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 pada Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa *“Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan”*. Untuk itu segala bentuk perumusan kebijakan yang membutuhkan perhitungan atas dasar data penduduk, wajib menggunakan data penduduk yang dihasilkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, sehingga terjadi keseragaman terhadap penggunaan data yang dipergunakan.

Gambar II-33 Indikator Pendidikan Kota Cirebon



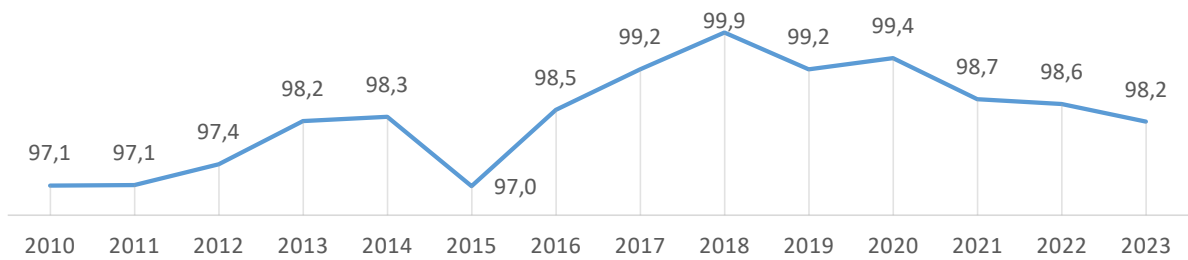
Sumber: Dinas Pendidikan Jabar, 2023

Gambar II-34 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kota Cirebon



Sumber: Opendata Jabar, 2023

Gambar II-35 Angka Melek Huruf Kota Cirebon

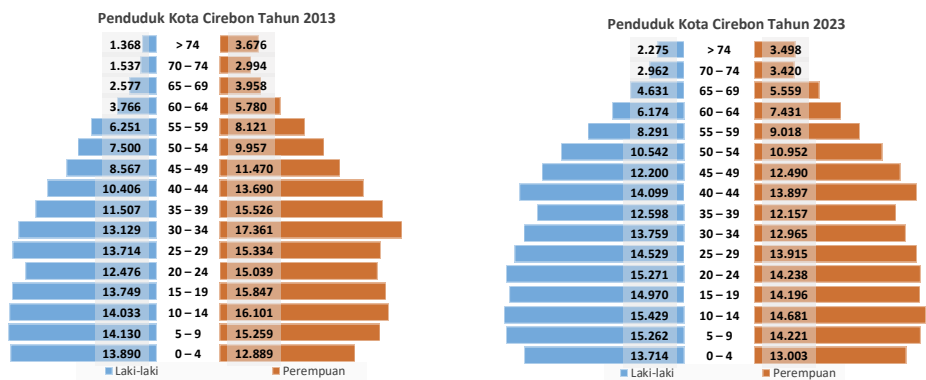


Sumber: Opendata Jabar, 2023

2.1.2.1 Struktur Penduduk

Gambaran struktur penduduk Kota Cirebon dapat dilihat pada grafik berikut yang menyajikan data penduduk berdasarkan usia.

Gambar II-36 Grafik Piramida Penduduk Kota Cirebon

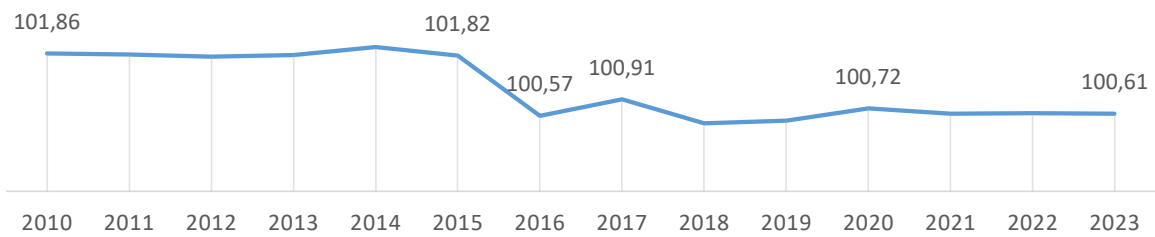


Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2024.

Bentuk grafik penduduk Kota Cirebon di atas sebagian besar penduduk berusia muda, sedangkan penduduk lanjut usia relatif sedikit, angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian, pertumbuhan penduduk sangat cepat, kebutuhan lapangan pekerjaan dan rasio ketergantungan yang besar. Banyaknya jumlah penduduk muda sering dikaitkan dengan fenomena bonus demografi yaitu terjadi saat proporsi kategori penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif) lebih dari setengah total populasi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jumlah penduduk Kota Cirebon di tahun 2010 sebesar 328.518 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,86 menunjukkan antara laki-laki dan perempuan hampir berimbang. Keseimbangan gender dapat mempengaruhi pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Sepuluh tahun kemudian, jumlah penduduk Kota Cirebon di tahun 2023 meningkat menjadi 352.347 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,61.

Gambar II-37 Rasio Jenis Kelamin Kota Cirebon

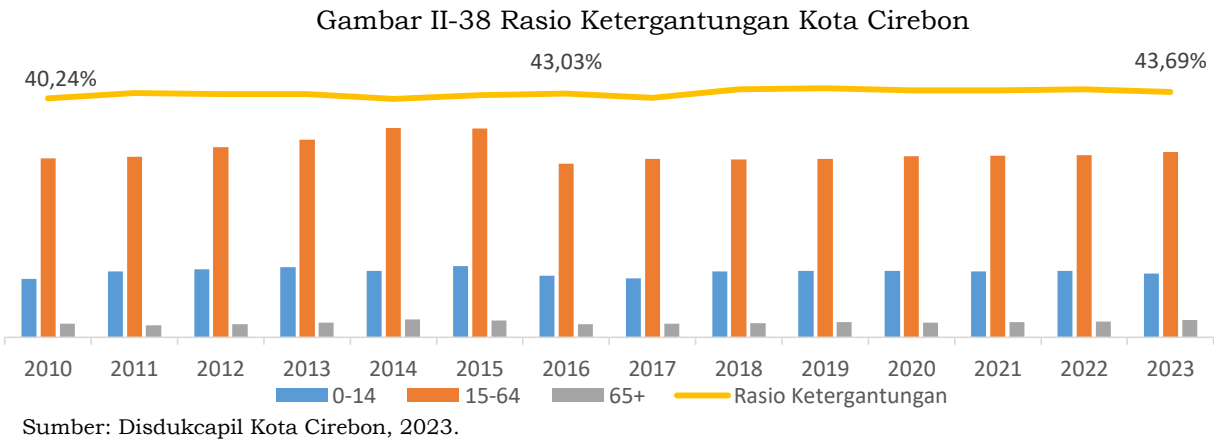


Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon, 2023.

Berdasarkan kelompok umur, di tahun 2018 hingga tahun 2023 jumlah penduduk paling banyak terdapat di kelompok umur 10-14 tahun. Jumlah penduduk paling sedikit berada pada kelompok umur diatas 75 tahun. Berdasarkan pola peningkatan jumlah penduduk usia sekolah, pemerintah daerah perlu direncanakan secara matang pelayanan kepada anak usia sekolah terutama terkait dengan pembangunan pendidikan dan kesehatan dan kelompok usia lansia sehingga perlu direncanakan pula secara matang terkait kesehatan dan fasilitas umum yang ramah lansia.

Hubungan penduduk produktif dan tidak produktif dapat dilihat pada rasio ketergantungan penduduk (*dependency ratio*). Pada tahun 2010 jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) Kota Cirebon sebesar 234.250 jiwa dan 94.268 jiwa masuk pada usia non produktif dengan rasio ketergantungan sebesar 40,24%. Jumlah penduduk usia produktif tahun 2023 sebesar 243.692 jiwa dan jumlah penduduk non produktif sebesar 108.655 jiwa dengan rasio ketergantungan sebesar 43,69%. Rasio ketergantungan sangat tinggi terjadi pada penduduk usia 0-14 tahun. Terjadi Peningkatan rasio ketergantungan sebesar 1,69% dalam periode tahun 2010 hingga tahun 2023.

Rasio ketergantungan yang tinggi (baik kaum muda maupun lanjut usia) dapat mengindikasikan potensi tantangan ekonomi, karena sebagian besar penduduk mungkin bergantung pada penduduk yang aktif secara ekonomi. Hal ini dapat membebani sumber daya seperti layanan kesehatan, jaminan sosial, dan pendidikan. Sebaliknya, rasio ketergantungan yang lebih rendah dapat mengindikasikan terdapat populasi usia kerja yang relatif lebih besar, sehingga berpotensi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada grafik berikut akan disajikan rasio penduduk berdasarkan deskripsi di atas beserta rasio ketergantungan.



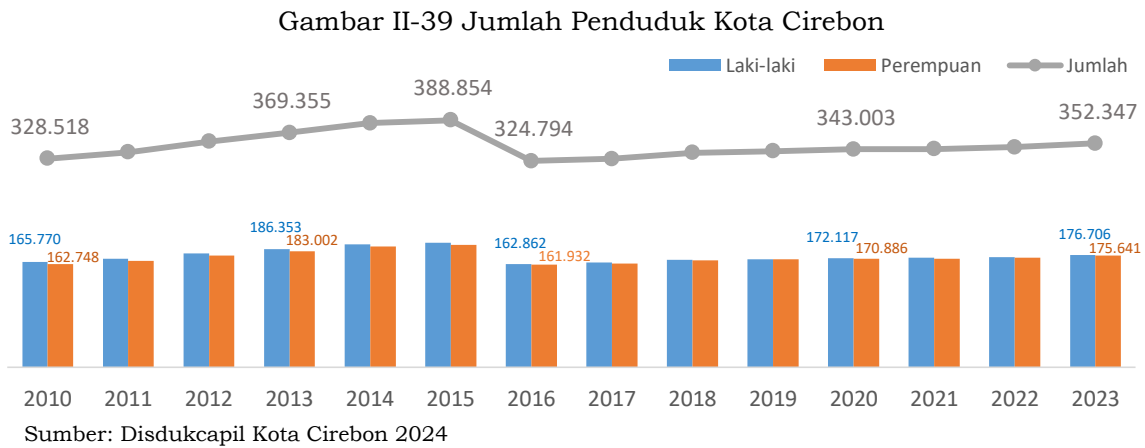
Dari struktur penduduk Kota Cirebon yang nampak didominasi oleh penduduk usia produktif menunjukkan Kota Cirebon mendapatkan bonus demografi. Jika bonus demografi dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah, kondisi ini akan menjadi modal penting untuk membangun menuju 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045. Namun, jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi beban dan permasalahan sosial bagi Pemerintah Daerah.

2.1.2.2 Jumlah Penduduk

Kota Cirebon merupakan kota perdagangan dan jasa yang dan telah ditetapkan Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2021 menjadi PKN Kawasan

Rebana. Hal tersebut menjadi daya tarik yang mengakibatkan adanya perpindahan penduduk dari wilayah lain di pedesaan ke Kota Cirebon (Urbanisasi) sehingga jumlah penduduk di Kota Cirebon cenderung meningkat setiap tahunnya. Berikut grafik perkembangan jumlah penduduk di Kota Cirebon dalam 10 tahun terakhir.

Seperti diilustrasikan pada grafik, secara administratif terjadi penurunan jumlah penduduk pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh adanya pemutakhiran data kependudukan dalam upaya pemerintah dalam mewujudkan Satu Kartu Tanda Penduduk Satu Identitas Penduduk. Pemutakhiran data kependudukan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, merupakan proses percepatan untuk mengeliminir duplikasi data penduduk yang akan digunakan pada Pemilihan Umum pada tahun 2019.

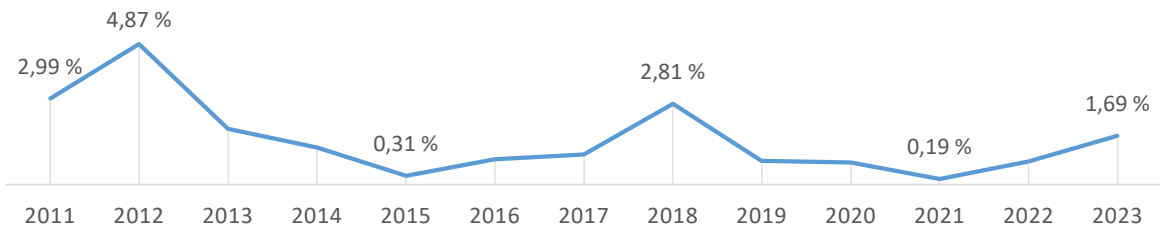


Duplikasi data penduduk yang berhasil dieliminasi pada akhir tahun 2016 karena memiliki identitas kependudukan lebih dari satu, terdiri dari jumlah data penduduk laki-laki yang berhasil dihapus sebesar 33.314 identitas kependudukan, jumlah data penduduk perempuan yang berhasil dihapus sebesar 30.746 identitas kependudukan, sehingga jumlah total penduduk yang datanya dihapus karena memiliki data identitas kependudukan lebih dari satu adalah sebesar 64.060 identitas kependudukan. Jumlah tersebut merupakan 16,73 % dari penduduk Kota Cirebon yang berhasil dibenahi agar data Kependudukan di Indonesia memiliki keakuratan untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan.

2.1.2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi penduduk. Kota Cirebon seperti dijelaskan di atas sebagai kota besar yang memiliki berbagai kelengkapan fasilitas sehingga banyak penduduk yang bermigrasi dan menetap di Kota Cirebon. Banyaknya penduduk dari wilayah daerah sekitar dan wilayah lainnya yang cukup besar yang berkeinginan menetap di Kota Cirebon menjadi salah satu faktor meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di Kota Cirebon, pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan pada tahun 2018 sebesar 2,81%. Selain dari pertumbuhan alamiah karena adanya kelahiran dan kematian.

Gambar II-40 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cirebon



Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2024

2.1.2.4 Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk Kota Cirebon tersebar di 5 kecamatan. Penduduk terbanyak berada pada kecamatan Harjamukti sedangkan jumlah penduduk terkecil berada pada kecamatan Pekalipan. Namun jika dilihat dari kepadatan penduduknya yang dihitung dari jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah kecamatan, nampak terlihat kepadatan penduduk tertinggi berada pada kecamatan Pekalipan dan kepadatan penduduk terendah pada kecamatan Harjamukti.

Tabel II-17 Sebaran dan Kepadatan Penduduk Kota Cirebon Tahun 2010

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km²)	Kepadatan (Jiwa/Km²)
Kejaksan	49.369	3,61	15.368
Lemahwungkuk	60.109	6,51	9.959
Harjamukti	110.651	17,61	7.272
Pekalipan	33.880	1,57	22.921
Kesambi	74.509	8,05	10.559
Kota Cirebon	328.518	37,35	8.796

Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2024

Proporsi kepadatan penduduk per kecamatan dalam periode 2010 hingga 2023 tidak terlalu banyak berubah, walaupun adanya tambahan luas wilayah Kota Cirebon sejak penetapan batas wilayah Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon pada tahun 2018.

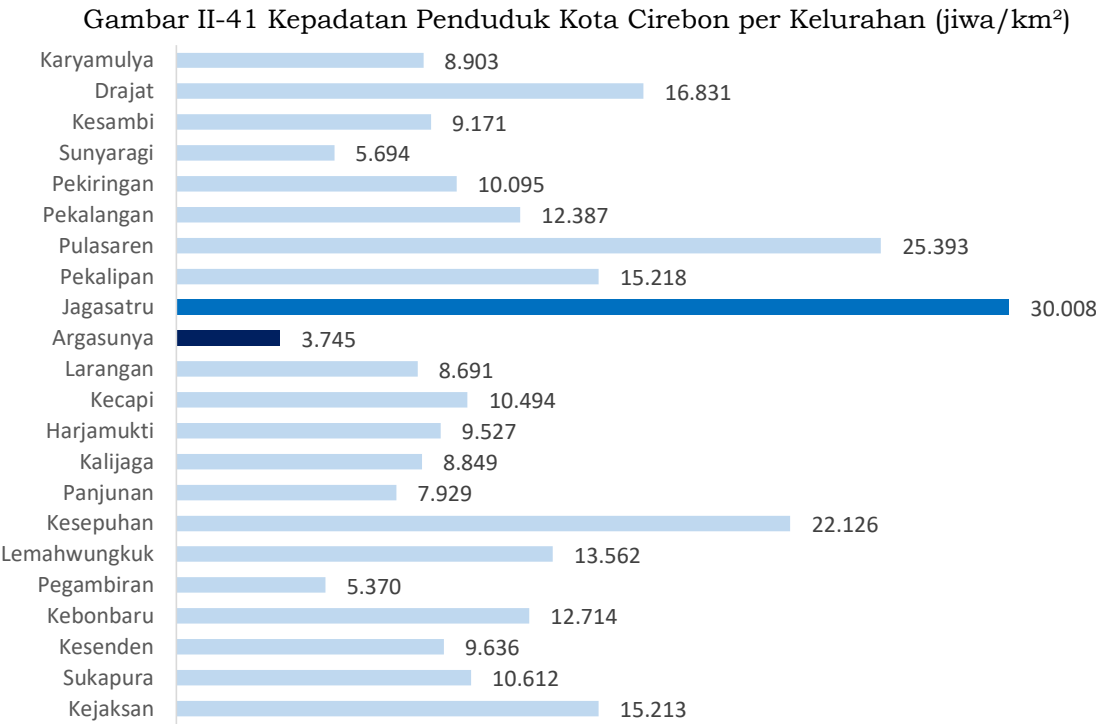
Tabel II-18 Sebaran dan Kepadatan Penduduk Kota Cirebon Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km²)	Kepadatan (Jiwa/Km²)
Kejaksan	51.268	4,441	11.544
Lemahwungkuk	61.073	7,185	8.500
Harjamukti	128.587	17,602	7.305
Pekalipan	31.423	1,585	19.825
Kesambi	79.996	8,653	9.245
Kota Cirebon	352.347	39,466	8.928

Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2024

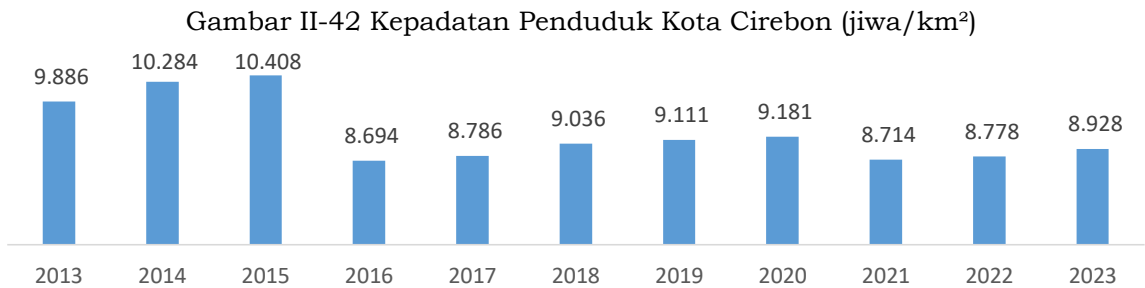
Sebaran penduduk pada grafik berikut menggambarkan penduduk di Kota Cirebon yang cenderung berdomisili di wilayah tengah/pusat kota dengan fasilitas pelayanan umum dan aktivitas perekonomian yang lebih lengkap, sehingga lebih padat dari daerah yang jauh dari fasilitas pelayanan umum. Dari seluruh kelurahan yang ada di Kota Cirebon, Kelurahan Jagasatru merupakan kelurahan terpadat penduduknya mencapai 30.008 jiwa/km², berikutnya kelurahan Pulasaren dengan kepadatan penduduknya 25.393 jiwa/km². Kepadatan penduduk yang tinggi dapat menunjukkan tingkat urbanisasi dan tekanan pada sumber daya seperti lahan, air dan infrastruktur.

Tersedianya fasilitas yang merata untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan mengurangi penumpukan pemukiman penduduk di pusat kota. Disisi lain kepadatan penduduk terendah berada di kelurahan Argasunya yakni 3,745 ribu jiwa/km² berikutnya kelurahan Pegambiran dengan angka 5,370 ribu jiwa/km². Kelurahan Argasunya yang berada di Kecamatan Harjamukti memiliki luas wilayah paling luas di antara kelurahan lainnya, namun memiliki jumlah kepadatan penduduk yang paling rendah. Kepadatan penduduk yang rendah dapat menunjukkan wilayah yang kurang berkembang atau kurang diminati sebagai tempat tinggal.



Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2024.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya kepadatan penduduk diantaranya letak geografi yang jauh dari pusat kota, tingkat perkembangan ekonomi yang jauh dari pusat perdagangan dan industri, rendahnya peluang usaha, jauh dari tempat bekerja dan faktor sosial lainnya seperti jauh dari layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan yang kurang memadai. Dilihat dari wilayahnya yang luas, Argasunya memiliki potensi untuk wilayah pengembangan pusat pelayanan umum dan ekonomi guna mengurai kepadatan penduduk di wilayah pusat kota. Kepadatan penduduk dihitung disesuaikan atas dasar penetapan luas wilayah yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut grafik visualisasi kepadatan penduduk Kota Cirebon selama sepuluh tahun terakhir.



Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2024

Menurunnya jumlah kepadatan penduduk pada tahun 2016 merupakan hasil dari penertiban melalui penghapusan duplikasi kepemilikan dokumen

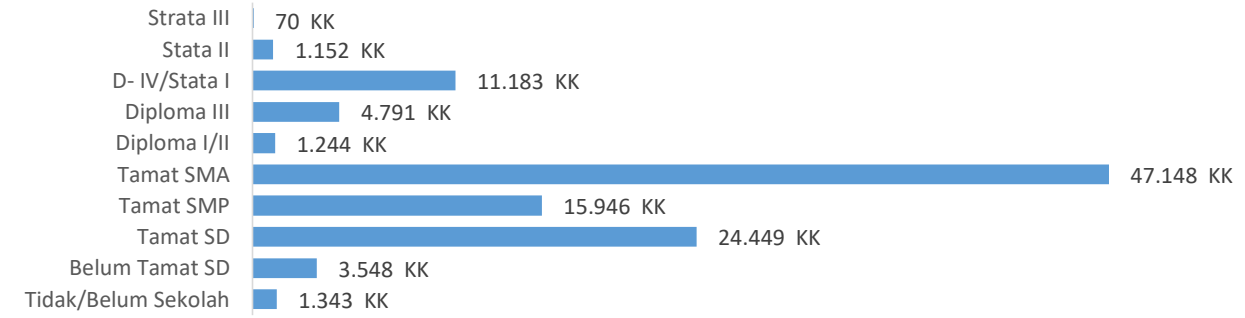
identitas kependudukan untuk mencapai sasaran satu kartu tanda penduduk nasional satu identitas.

2.1.2.5 Penduduk Menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di Kota Cirebon sudah cukup tinggi, hal ini terlihat dari indikator indeks pendidikan di Kota Cirebon yang cukup besar. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan menjadi kontribusi terbesar suksesnya sektor pendidikan disamping faktor sarana dan prasarana pendidikan yang baik.

Data pendidikan terkait hal tersebut dapat dilihat pada grafik Indeks Pendidikan yang memperlihatkan Indikator Angka Melek Huruf dan Harapan Lama Sekolah. Perlu peningkatan dan pemerataan kualitas tenaga didik serta lulusan peserta didik, agar dapat bersaing ditingkat nasional maupun internasional. Grafik berikut menggambarkan tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh setiap Kepala Keluarga di Kota Cirebon. Dari grafik tersebut dapat digambarkan bahwa mayoritas pendidikan Kepala Keluarga di Kota Cirebon berasal dari tingkat SMA dan sebagian kecil dari tingkat SD dan SMP.

Gambar II-43 Pendidikan Terakhir Kepala Keluarga (KK) Kota Cirebon Tahun 2021

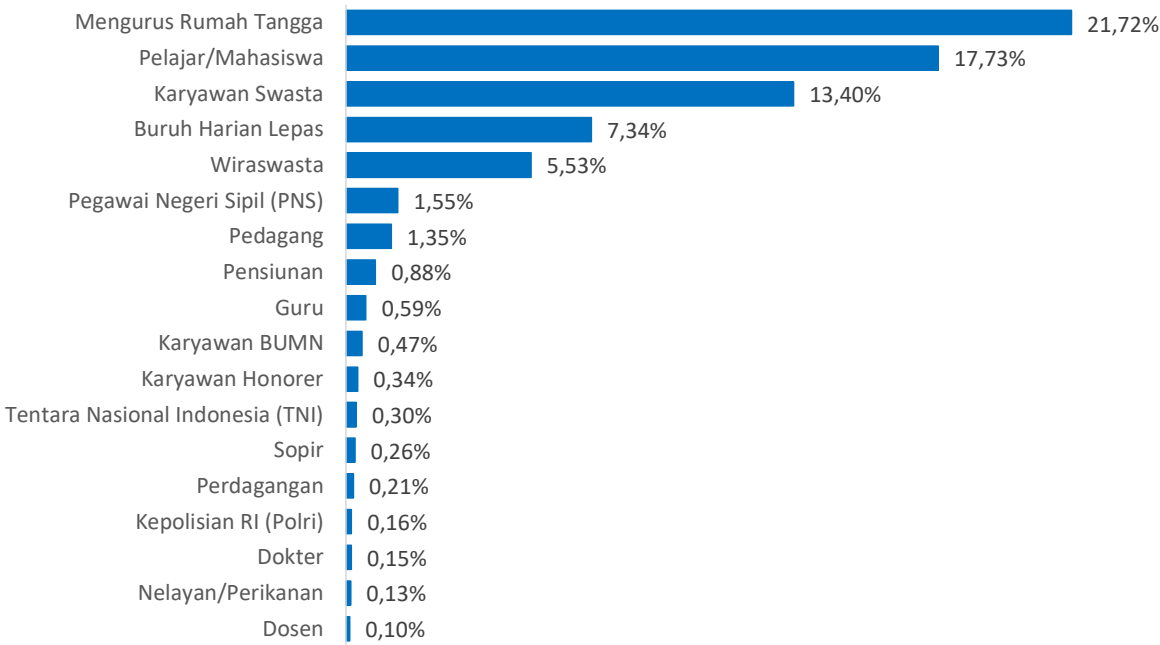


Sumber: Profil Perkembangan Penduduk 2021

2.1.2.6 Penduduk Menurut Pekerjaan

Status pekerjaan terbesar penduduk Kota Cirebon adalah mengurus rumah tangga, yang terbesar selanjutnya berprofesi sebagai Karyawan Swasta/ BUMN, Buruh Harian Lepas, Wiraswasta dan Aparat Pemerintah. Ada juga yang memiliki profesi sebagai Pedagang/Wiraswasta mengelola komoditas berupa barang dan jasa, hal ini sesuai dengan kondisi dan potensi Kota Cirebon sebagai PKN kota perdagangan dan jasa khususnya untuk wilayah Ciayumajakuning. Profesi lainnya adalah Guru, Sopir, pekerja di bidang kesehatan, Nelayan dan sebagian kecil adalah Tukang Batu serta Petani dengan lahan yang sangat terbatas. Dari jenis pekerjaan yang tersedia pada data kependudukan, penduduk Kota Cirebon hanya berprofesi sebanyak 71 jenis pekerjaan dari jumlah keseluruhannya adalah 99 jenis pekerjaan. Penyajian pada grafik merupakan sebagian dari profesi penduduk di Kota Cirebon dengan persentase $\geq 0.1\%$.

Gambar II-44 Penduduk Kota Cirebon berdasarkan dominansi Pekerjaan Tahun 2023

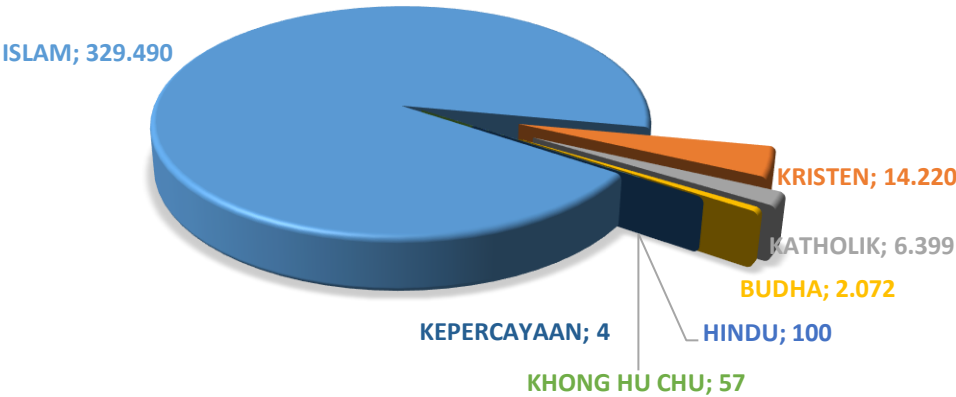


Sumber:Disdukcapil Kota Cirebon 2024

2.1.2.7 Penduduk Menurut Agama

Keberagaman di Kota Cirebon tampak dari penduduknya yang berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa seluruh penjuru tanah air, hal ini merupakan ciri khas dari kota di wilayah pesisir yang pada umumnya sebagai kota tempat berdagang sejak zaman dahulu. Keberagaman daerah dan suku bangsa juga selaras dengan keyakinan yang dibawa masing-masing penduduk yang merupakan agama penduduk tersebut sehingga hampir seluruh agama yang diakui negara dianut oleh penduduk Kota Cirebon. Keberadaan agama yang dianut penduduk Kota Cirebon tampak dari adanya rumah ibadah di wilayah Kota Cirebon, seperti: Masjid, Vihara, Pura, Gereja dan Klenteng yang merupakan rumah ibadah untuk agama konghucu. Berdasarkan data disdukcapil Kota Cirebon tahun 2022 untuk prosentase penganut terbesar adalah 93,51% oleh umat islam; 4,04% umat protestan; 1,82% umat Katolik; 0,59% umat Budha; 0,03% umat Hindu; 0,02% umat Konghucu dan sisanya sebagai penganut kepercayaan.

Gambar II-45 Penduduk Menurut Agama Tahun 2023 (jiwa)



Disdukcapil Kota Cirebon 2024.

2.1.2.8 Masyarakat Adat Kota Cirebon

Masyarakat Cirebon merupakan komunitas yang kaya akan adat istiadat serta tradisi kebudayaan. Kebudayaan dapat dilihat dari adat istiadat pada suatu daerah disamping keseniannya. Adat pada suatu daerah menjadi kekayaan dan kearifan masyarakat tersebut sebagai sisi yang menarik untuk dilihat dan dikenali kepada generasi selanjutnya. Seperti halnya Cirebon yang terkenal dengan adat istiadatnya yang masih kental keberadaannya.

Cirebon merupakan salah satu daerah yang dulunya dipimpin oleh seorang wali penyebar agama Islam bernama Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Tidak heran jika adat istiadat kebudayaan Cirebon dipengaruhi oleh unsur Islam yang kental. Hal ini karena Sunan Gunung Jati memperkenalkan kebudayaan dan adat istiadat sebagai sarana dalam menyebarkan agama Islam di Cirebon. Adat istiadat asli Cirebon yang bisa dikenal saat ini kerap dipertunjukkan pada acara-acara besar keagamaan yang menjadi tradisi secara turun temurun dari para leluhur seperti: pada saat Syawalan Gunung Jati, Rajaban, Ganti Sirap, Muludan dan lain sebagainya.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat merupakan indikator ukuran terkait kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

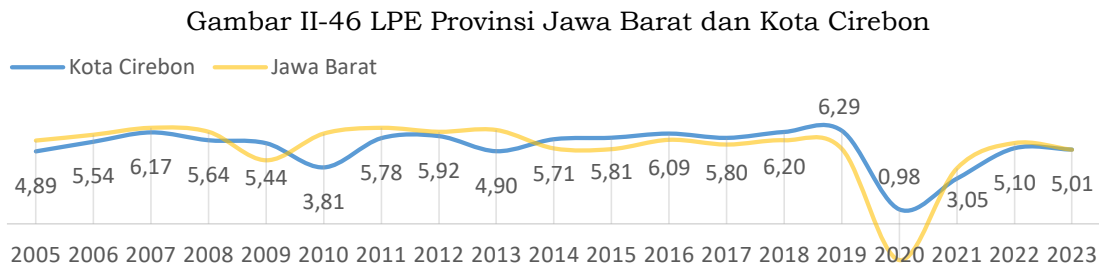
Kesejahteraan ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, kesejahteraan petani dan nelayan, tingkat pengangguran serta pembangunan manusia di Kota Cirebon.

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur perubahan dalam produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah dalam periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi daerah yang tumbuh positif dapat menunjukkan bahwa suatu daerah sedang berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang baik di suatu daerah juga dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.

Dalam kurun waktu periode tahun 2005-2023, kecenderungan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Cirebon menunjukkan nilai yang fluktuatif. Perkembangan LPE pada periode 2005-2013 menunjukkan bahwa nilai LPE Kota Cirebon masih di bawah Jawa Barat. Selanjutnya pada periode 2014 hingga 2019 perekonomian Kota Cirebon tumbuh cepat dan mampu melampaui perekonomian di Jawa Barat dengan rata-rata LPE Kota Cirebon sebesar 5,98 % dan Jawa Barat sebesar 5,31 %. Selain itu, pada tahun 2019 juga menjadi pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon tertinggi selama 17 tahun terakhir sebesar 6,29 %. Pada tahun 2020, dampak pandemi Covid-19 perekonomian di Kota Cirebon mengalami kontraksi hingga menyentuh angka -0,98 %. Namun pada masa pemulihan perekonomian pandemi, Kota Cirebon menunjukkan

pertumbuhan positif secara signifikan pada tahun 2022 dengan LPE mencapai 5,10 %.



Sumber: BPS 2024

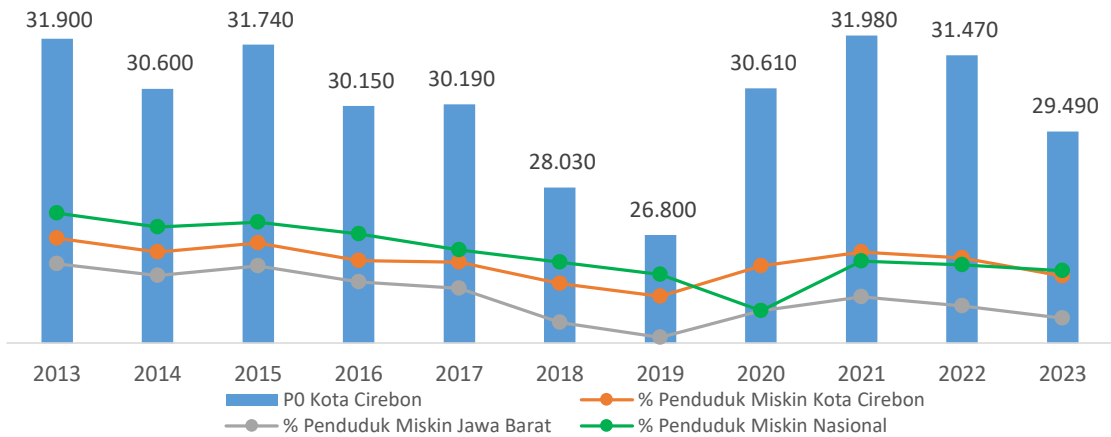
Pertumbuhan ekonomi kota Cirebon searah dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon sebelum terjadinya pandemi Covid-19 berada di atas Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pada saat pandemi Covid-19 terjadi, kontraksi pertumbuhan ekonomi kota Cirebon terbilang rendah bila dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pemulihan perekonomian Kota Cirebon pasca pandemi Covid-19 terlihat masih berada dibawah provinsi Jawa Barat dan Nasional hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi kota Cirebon pasca pandemi Covid-19 berada di bawah provinsi Jawa Barat maupun Nasional dan belum mampu mengejar pertumbuhan ekonomi sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dilihat dari rata-rata LPE tahun 2013-2019 sebesar 5,83%. Posisi LPE yang belum mampu menembus angka rata-rata menjadi hal yang sangat penting untuk diantisipasi karena menunjukkan masih terdapat pelemahan untuk pencapaian LPE tahun selanjutnya. Hal ini tercermin pada capaian LPE tahun 2023 menurun menjadi sebesar 5,01%. Angka ini hampir menyentuh angka LPE tahun 2013 yang sebesar 4,90%

2.2.1.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana kebutuhan dasar hidup yang layak tidak terpenuhi, sarana dan prasarana tidak memadai. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach untuk mendefinisikan penduduk miskin. BPS menentukan garis kemiskinan (poverty line) setiap tahunnya sebagai ambang batas, dimana jika pendapatan seseorang atau rumah tangga memiliki pendapatan dibawahnya dianggap hidup dalam kondisi kemiskinan.

Secara umum, pada periode 2013-2023 tingkat kemiskinan di Kota Cirebon menunjukkan kecenderungan menurun baik dari sisi jumlah maupun %nya. Namun, sejak periode 2020 terjadi kenaikan kemiskinan yang disebabkan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia termasuk Kota Cirebon. Namun demikian mulai tahun 2021 sampai dengan 2022 kemiskinan di Kota Cirebon mengalami penurunan kembali. Adapun persentase penduduk miskin di Kota Cirebon periode 2013-2019, jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, yaitu di atas Provinsi Jawa Barat dan di bawah Indonesia. Namun, pasca Covid-19 menunjukkan Kota Cirebon berada di atas Indonesia dan Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi di Kota Cirebon masih belum optimal terutama bagi penduduk miskin.

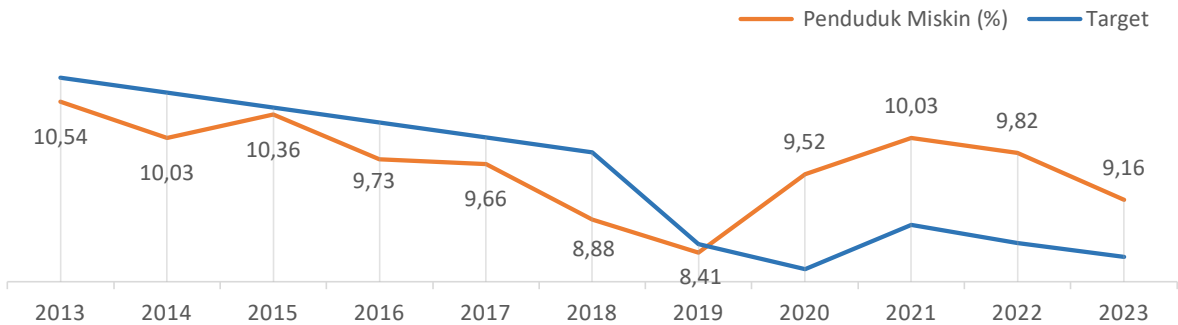
Gambar II-47 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Cirebon



Sumber: BPS, 2024

Penurunan kemiskinan Kota Cirebon yang diukur dengan persentase penduduk miskin merupakan bagian dari target pembangunan pada periode 2013-2023. Adapun persentase penduduk miskin yang ditetapkan menjadi target pembangunan Kota Cirebon jika dibandingkan dengan realisasinya sepanjang tahun 2013-2019 sudah tercapai, namun sejak tahun 2020-2023 capaian persentase penduduk miskin tidak mencapai target penurunan kemiskinan Kota Cirebon dapat dilihat pada grafik berikut. Hal tersebut perlu menjadi evaluasi lebih lanjut terhadap penentuan target dan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

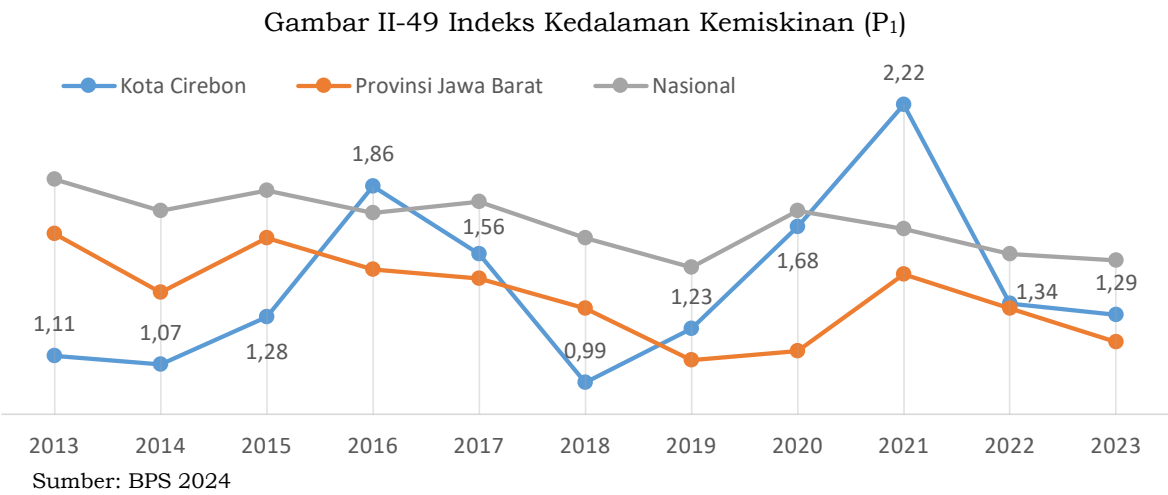
Gambar II-48 Target dan Realisasi Penduduk Miskin Kota Cirebon



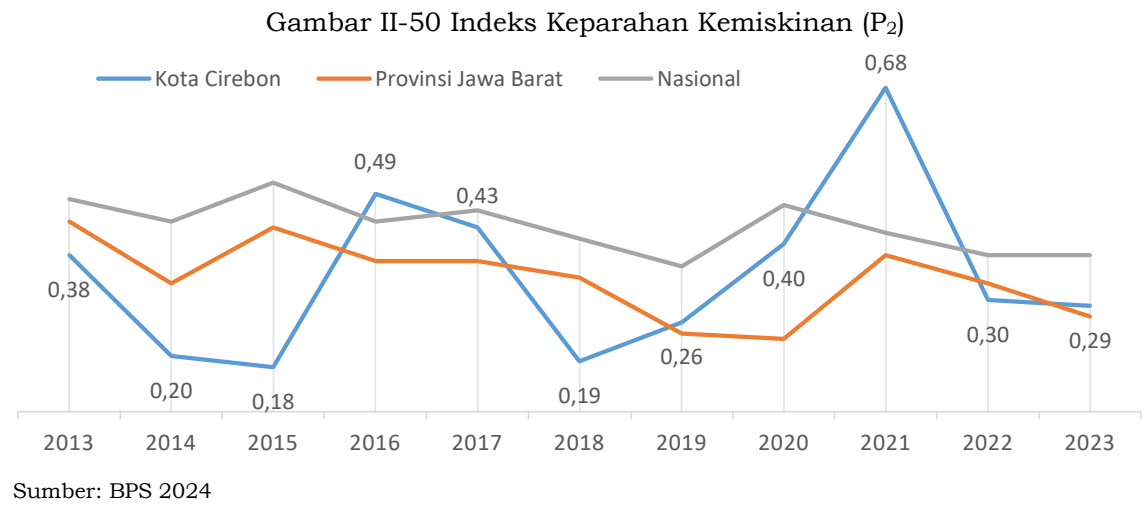
Sumber: BPS 2024 dan Evaluasi RPJPD Kota Cirebon 2005-2025

Tidak hanya jumlah dan persentase penduduk miskin, namun dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) adalah ukuran sejauh mana penduduk miskin dalam suatu wilayah berada di bawah garis kemiskinan, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kedalaman kemiskinan yang lebih besar. Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Grafik P_1 dan grafik P_2 menunjukkan pola Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kota Cirebon yang fluktuatif dalam periode tahun 2013-2023.

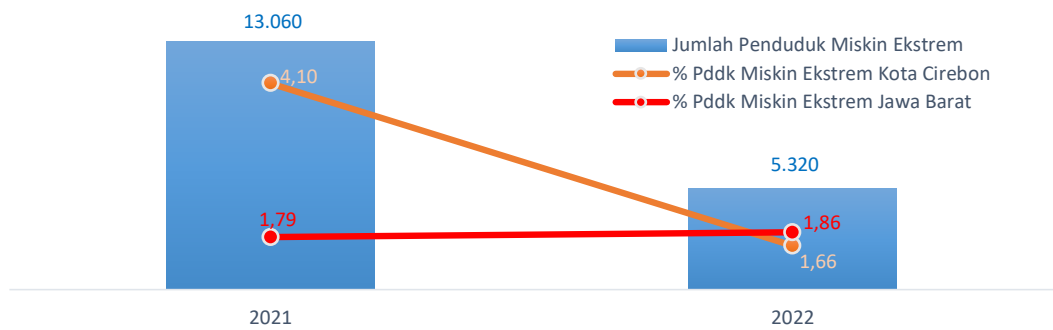


Pada tahun 2018 dan 2022, nilai P_1 dan P_2 di Kota Cirebon mengalami penurunan yang signifikan. Peningkatan penduduk miskin dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 juga berpengaruh pada kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kota Cirebon. Pada tahun 2022 penurunan cukup signifikan pada P_1 sebesar 1,34 dan P_2 sebesar 0,30. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa upaya seperti bantuan-bantuan sosial yang dilakukan pada masa pemulihan Covid-19 mampu mengurangi kedalaman dan keparahan dari penduduk miskin terdampak pandemi. Dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, nilai indeks P_1 dan P_2 Kota Cirebon lebih fluktuatif. Meskipun ada beberapa tahun dengan penurunan kedalaman dan keparahan kemiskinan, masih ada tantangan serius dalam mengatasi kemiskinan di Kota Cirebon.



Pada perkembangan isu kemiskinan berkembang pada pengentasan kemiskinan ekstrim. World Bank mendefinisikan kemiskinan ekstrim sebagai suatu kondisi individu atau keluarga hidup dibawah \$1,90 (US Dollar) per hari atau indikator nilai paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*/PPP). Berdasarkan data pada grafik di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk ekstrim dan persentasenya pada tahun 2022 sebesar 13.060 jiwa (4,10%) mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2021 sebesar 5.320 jiwa (1,66 %). Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin ekstrim Provinsi Jawa Barat sebesar 1,79% lalu meningkat menjadi 1,86% maka dapat diindikasikan Kota Cirebon dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada penurunan penduduk miskin ekstrim di Jawa Barat.

Gambar II-51 Jumlah dan persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kota Cirebon

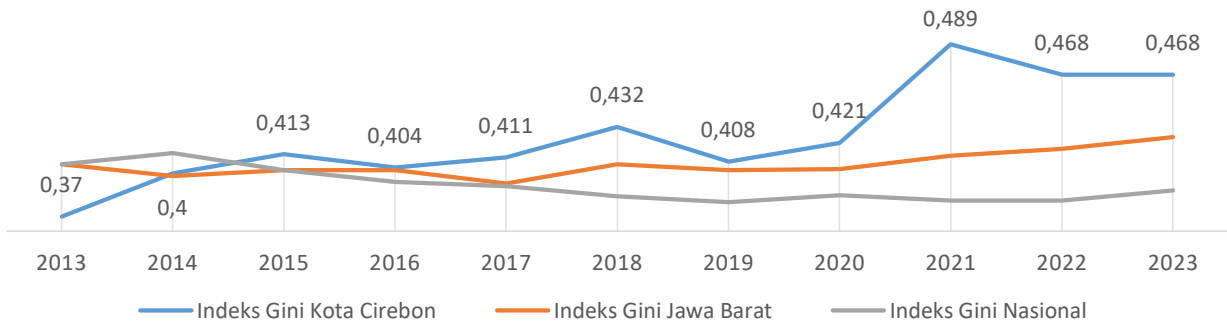


Sumber: BPS 2024.

2.2.1.3 Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan pendapatan di suatu wilayah atau populasi. Indeks Gini berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu), dimana semakin mendekati 0 (nol) mengindikasikan distribusi pendapatan merata dan mendekati 1 (satu) mengindikasikan distribusi pendapatan semakin tidak merata. Berdasarkan data pada grafik di atas menunjukkan nilai yang fluktuatif, dengan kecenderungan mengalami peningkatan. Adapun nilai penurunan paling tinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 0,408 poin. Sejalan dengan indikator kemiskinan lainnya, peningkatan terjadi indeks paling signifikan terjadi pada tahun 2021 dengan nilai 0,489 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi kelompok dengan pendapatan rendah lebih lambat dibandingkan dengan kelompok pendapatan yang lebih tinggi.

Gambar II-52 Indeks Gini Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia



Sumber: BPS 2024

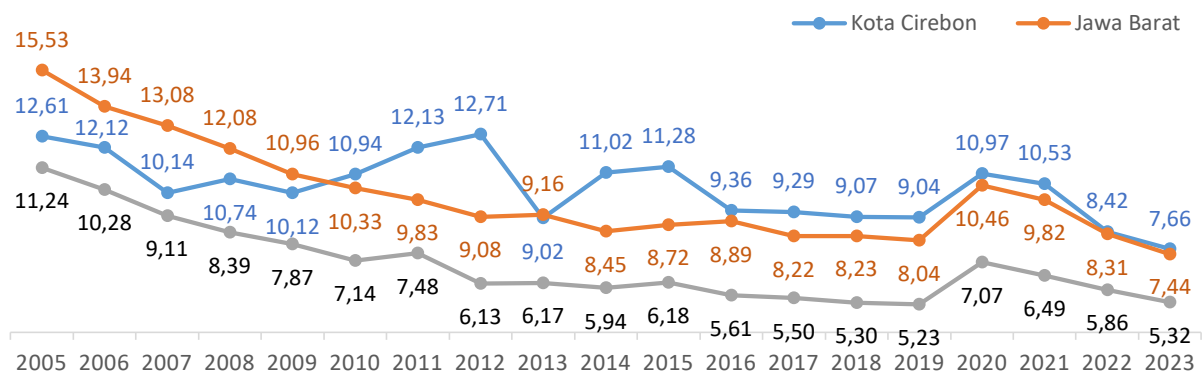
2.2.1.4 Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Kota Cirebon yang berada di pesisir utara pulau Jawa memiliki potensi sumber daya laut yang cukup besar dan sebagian kecil dari sektor pertanian. Penduduk Kota Cirebon yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan, walaupun LPE Kota Cirebon dari sektor pertanian dan perikanan tidak besar yaitu 2,50 pada tahun 2022 dan -1,33 pada tahun 2023, petani dan nelayan perlu juga diperhatikan kesejahteraannya. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani dan nelayan adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai NTP Kota Cirebon juga berkontribusi pada NTP di Provinsi Jawa Barat, sehingga diperlukan intervensi melalui kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon agar sektor pertanian dan perikanan dapat menjadi lebih baik.

2.2.1.5 Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dalam penentuan indikator kinerja pembangunan daerah, TPT merupakan salah satu indikator makro, yaitu indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Dikarenakan merupakan indikator makro, ketercapaian TPT sesuai target merupakan salah satu keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh. TPT Kota Cirebon 2010-2023 lebih tinggi daripada TPT Jawa Barat dan Nasional, kecuali pada tahun 2005-2009 dan 2014 lebih rendah daripada TPT Jawa Barat.

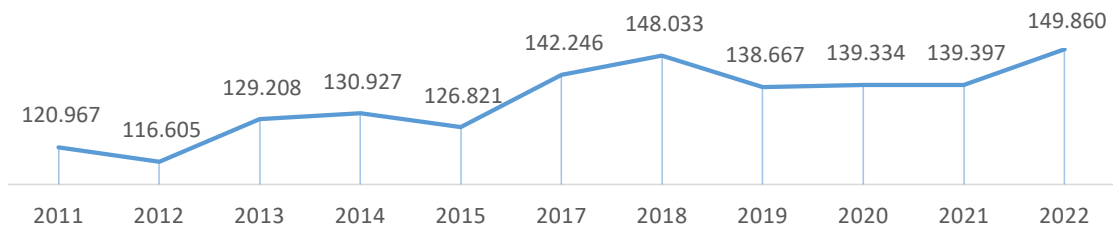
Gambar II-53 Perbandingan TPT Kota Cirebon, Jawa Barat dan Nasional (%)



Sumber: BPS 2024

Dengan perekonomian berbasis perdagangan dan jasa, Kota Cirebon belum memenuhi target capaian TPT Kota Cirebon beberapa tahun terakhir. Berikut data penduduk di Kota Cirebon yang bekerja:

Gambar II-54 Jumlah Penduduk Kota Cirebon yang bekerja



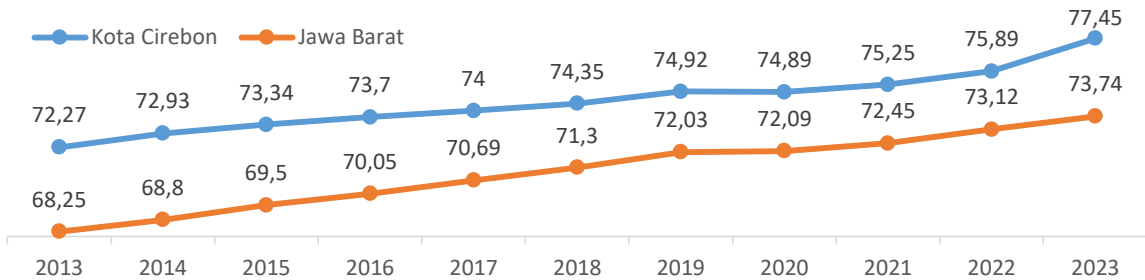
Sumber: Open Data Jabar, 2023

2.2.1.6 Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibagi menjadi 4 kategori yaitu IPM rendah ($IPM < 60$), sedang ($60 \leq IPM < 70$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), dan sangat tinggi (≥ 80). Grafik di bawah ini menunjukkan capaian IPM Kota Cirebon selama tahun 2013 sampai dengan 2022. Selama kurun waktu 10 tahun tersebut mengalami kenaikan setiap tahun dan masuk dalam kategori tinggi, kecuali pada tahun 2020.

Indikator penyusun IPM terdiri dari Usia Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah serta Konsumsi per Kapita yang Disesuaikan. Dari empat indikator tersebut dapat dihitung Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan serta Indeks Daya Beli.

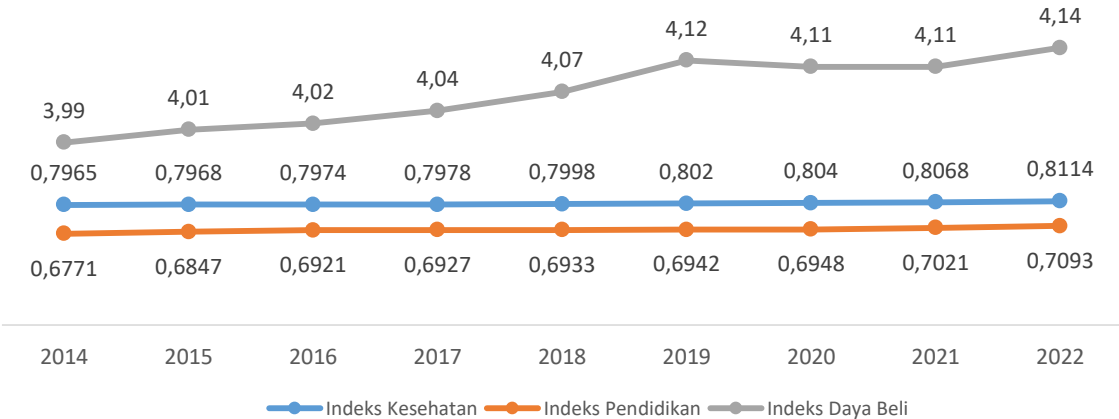
Gambar II-55 Indeks Pembangunan Manusia



Sumber: BPS 2024

Indeks Daya Beli cenderung meningkat, namun pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 yang cukup mempengaruhi sektor ekonomi dan daya beli masyarakat. Meskipun demikian, Indeks Daya Beli kembali meningkat pada tahun 2022 ketika pandemi sudah turun dan ekonomi Kota Cirebon kembali membaik.

Gambar II-56 Indeks Kesehatan, Pendidikan serta Daya Beli Kota Cirebon



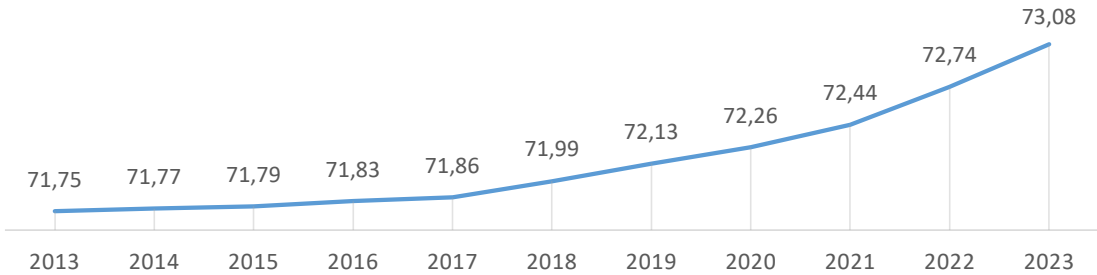
Sumber: BPS 2024

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1 Keluarga Sehat

UHH menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya.

Gambar II-57 UHH di Kota Cirebon



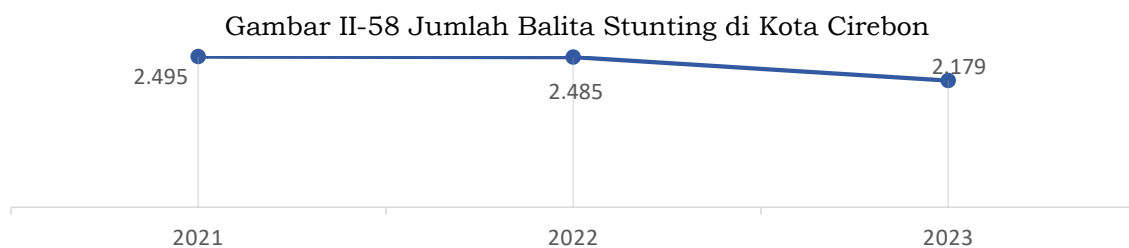
Sumber: Open Data Kota Cirebon 2024

Pada rumus perhitungan UHH diketahui bahwa jumlah usia dari semua orang yang meninggal dibagi jumlah orang yang meninggal pada tahun tersebut, dengan dasar tersebut maka:

1. Kematian ibu dan bayi menurunkan UHH;
2. Kematian Balita menurunkan UHH;
2. Kematian karena penyakit menular pada orang remaja, dewasa dan usia produktif menurunkan UHH;
3. Kematian karena kecelakaan menurunkan UHH; dan
4. Usia penduduk di atas 76 tahun menaikkan UHH.

Untuk menaikkan UHH, pemerintah terus berupaya dengan cara:

1. Meningkatkan upaya pencegahan kematian ibu dan bayi baru lahir melalui serangkaian program dan kegiatan (Ponek, AMP, Perbaikan Gizi, Rujukan, Jampersal, Pemberian Mikronutrien, pemberian Vitamin bagi remaja putri, dll);
2. Meningkatkan upaya pencegahan kematian Bayi dan Balita dengan Imunisasi, Pencegahan Stunting/Wasting, Pencegahan penyakit menular;
3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
4. Memperbaiki status gizi keluarga;
5. Survey Indeks Keluarga Sehat; dan
6. Perbaikan kesehatan lingkungan.



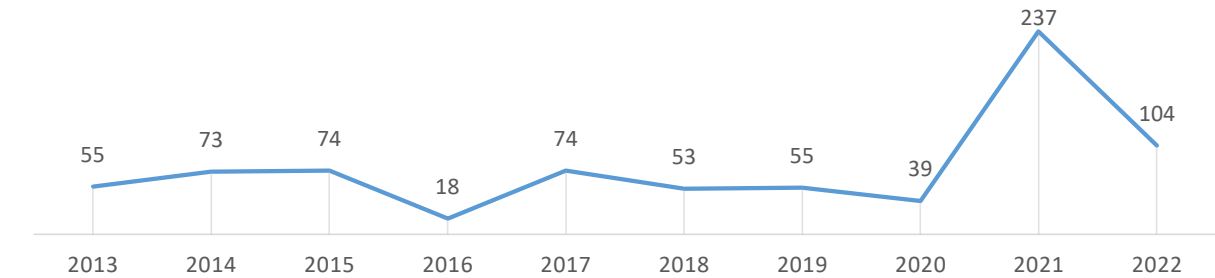
Sumber: Open Data Kota Cirebon 2024

Indikator yang juga menjadi perhatian pemerintah pusat adalah stunting, yaitu gangguan pertumbuhan yang terjadi pada anak balita (di bawah lima tahun) dan memiliki dampak terhadap pertumbuhan fisik mereka. Penyebab stunting dapat berasal dari malnutrisi pada ibu hamil atau selama masa pertumbuhan anak. Gejala stunting paling umum yang terlihat pada anak adalah tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak sebaya. Meskipun postur tubuh anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, stunting menunjukkan adanya keterlambatan pertumbuhan yang memerlukan perhatian serius.

Indikator lainnya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. AKI merupakan salah satu target *global Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam menurunkan AKI menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Berdasarkan data pada grafik selama 2 (dua) tahun terakhir, AKI di Kota Cirebon jauh dari target SDGs yang ingin dicapai pada Tahun 2030. Perlu adanya upaya yang maksimal untuk meminimalkan angka kematian ibu dan mengeliminasi faktor penyebabnya.

Gambar II-59 Angka Kematian Ibu di Kota Cirebon



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cirebon 2024

Permasalahan lain dalam kesehatan keluarga adalah kasus Tuberkulosis (TB) yang jumlahnya cukup tinggi. Penyakit ini merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri micro tuberculosis yang dapat menular melalui melalui udara berupa percikan dahak yang mengandung kuman TB. Sebagian besar kuman TB menyerang paru tetapi bisa juga organ tubuh lainnya. TB bukan penyakit keturunan atau kutukan dan dapat disembuhkan dengan pengobatan teratur, diawasi oleh Pengawasan Minum Obat (PMO). Gejala awal penyakit TB tidak spesifik, umumnya adalah batuk produktif yang berkepanjangan (>3 minggu), sesak nafas, nyeri dada, anemia/kurang darah, batuk darah, rasa lelah, berkeringat di malam hari. Imunisasi BCG sebagai salah satu alternatif pencegahan TB.

- a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)
- b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)
- c. Angka kejadian tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
- d. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)

2.2.2.2 Kualitas Keluarga

Indikator proksi yang mendukung Indeks Kualitas Keluarga yaitu Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA). Secara keseluruhan, baik Indeks Kualitas Keluarga (IKK) maupun Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) memiliki komponen yang saling terkait dan fokus pada aspek-aspek yang sama dalam mengukur kesejahteraan keluarga, seperti ketahanan ekonomi, sosial, kesehatan, psikologis, lingkungan, dan demografi. Meskipun mungkin ada perbedaan dalam metode pengukuran atau prioritas, inti dari kedua indeks ini adalah memastikan keluarga memiliki akses ke sumber daya dan kondisi yang diperlukan untuk hidup sejahtera.

Tabel II-19 Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)

Wilayah	2022	2023
Kota Cirebon	55,43	61,14
Kab. Cirebon	57,08	60,76
Kab. Kuningan	57,78	62,30
Kab. Majalengka	56,42	60,07
Kab. Indramayu	56,24	59,93

Sumber : PK22, PK23 BKKBN

Kota Cirebon mengalami peningkatan iBANGGA yang cukup besar, dengan kenaikan sebesar 5,71 poin. Ini bisa menunjukkan bahwa kota ini berhasil menerapkan program-program yang lebih efektif atau mengalami perubahan signifikan dalam kualitas layanan publik yang mendukung pembangunan keluarga. Peningkatan iBANGGA di seluruh wilayah yang dianalisis

menunjukkan adanya kemajuan dalam kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Namun variasi dalam tingkat peningkatan iBANGGA mengindikasikan bahwa efektivitas program pembangunan keluarga dan tantangan yang dihadapi mungkin berbeda-beda di setiap wilayah. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah untuk terus mendorong peningkatan iBANGGA yang lebih merata dan berkelanjutan. Kualitas Anak

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat ditentukan oleh kualitas hidup seseorang sejak dini. SDM yang berkualitas tidak lepas dari anak-anak yang mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Anak-anak yang masih dalam bangku sekolah merupakan generasi harapan bangsa yang meneruskan tonggak sejarah Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Oleh karena itu, perlindungan dan pelaksanaan hak-hak anak harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Pengukuran pembangunan terkait kualitas anak terdiri dari 5 (lima) parameter, ke-5 (lima) parameter tersebut menggambarkan kondisi terwujudnya hak-hak anak dan orang-orang istimewa perlindungan anak meliputi:

- 1. Hak dan kebebasan sipil;
- 2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan;
- 3. Kesehatan dan kesejahteraan dasar;
- 4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- 5. Perlindungan khusus.

2.2.2.3 Pemberdayaan Perempuan

Pengertian gender mengacu pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, aktivitas, dan karakteristik yang dibangun secara sosial. Perbedaan tersebut tidak menjadi masalah jika pelayanan dan perlakuannya sama.

Indikator yang digunakan untuk melihat capaian pembangunan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG merupakan perubahan indikator pembangunan gender pada tingkat nasional yang semula adalah IDG.

IKG yang tinggi mencerminkan IPG dengan nilai rendah. Nilai IPG di Kota Cirebon cenderung meningkat, hal ini disebabkan oleh perbaikan besaran kesehatan reproduksi dan pemberdayaan.

Tabel II-20 Indikator Pembangunan Gender Kota Cirebon

Indikator	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IPG	91,83	93,23	93,76	93,94	93,94	94,35	94,39	94,46	94,91	95,55
IDG	60,27	71,97	74,89	74,23	73,97	77,86	78,09	77,64	78,07	77,03
IKG					0,380	0,311	0,185	0,301	0,282	0,409

Sumber: BPS 2024

Ketimpangan gender yang masih cukup besar di Kota Cirebon, maka diperlukan peran semua pihak untuk memperbaikinya dalam berbagai dimensi. Untuk itu perlu ada perbaikan, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan terhadap perempuan untuk memiliki lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan akses dan kemampuannya.

2.2.2.4 Perlindungan Anak

Untuk mengukur dan meningkatkan kualitas perlindungan anak pada suatu daerah, Indeks Perlindungan Anak mempunyai peran penting sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan perlindungan anak. Indeks Perlindungan Anak digunakan untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Akan tetapi, Indeks Perlindungan Anak tidak terproduksi untuk tingkatan Kota Cirebon sehingga menggunakan data terkait penilaian Kota Layak Anak yang mempunyai komponen yang sama dengan Indeks Perlindungan Anak. Komponen tersebut terdiri atas 5 (lima) klaster yaitu hak sipil, lingkungan keluarga, kesehatan dasar, pendidikan, dan perlindungan khusus. Kelima klaster ini beserta unsur kelembagaan juga yang menjadi dasar dalam penilaian Kota Layak Anak.

Tabel II-21 Capaian Nilai dari masing-masing klaster pada tahun 2023

Klaster	Nilai Maksimal	Verifikasi Akhir
Kelembagaan	164,00	107,48
Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	115,00	34,25
Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	156,00	82,00
Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	150,00	94,50
Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	110,00	35,00
Klaster V Perlindungan Khusus	205,00	70,50
Kelana dan Dekela	100,00	86,85
Total	1000,00	510,58

Sumber : DP3APPKB Kota Cirebon, 2024

Total nilai evaluasi Kota Layak Anak Kota Cirebon mencapai 510,58, dengan nilai tersebut Kota Cirebon mendapat penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Pratama. Nilai terbesar diperoleh dari Kelana dan Dekela yaitu penyelenggaraan Kota Layak Anak di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan nilai 86,85. Nilai tersebut diperoleh dengan terlaksananya KLA di 3 Kecamatan Kota Cirebon dan 12 Kelurahan di Kota Cirebon. Sedangkan Indikator dengan nilai terkecil diperoleh dari Klaster Hak Sipil dan Kebebasan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya Indikator Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) yang hanya mencapai nilai 17,67 dari nilai maksimal 45,00.

Tercapainya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak tidak lepas dari peran pemerintah untuk menangani kasus terhadap anak dalam suatu daerah. perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan individu untuk melindungi hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berikut adalah data penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Cirebon :

Tabel II-22 Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah	47	29	31	38	28	36

Sumber : DP3APPKB Kota Cirebon 2024

Seluruh kasus kekerasan yang dilaporkan pada anak telah ditangani oleh pemerintah, akan tetapi jumlah kasus kekerasan pada anak kembali meningkat pada tahun 2023 dimana mencapai 36 kasus dibandingkan dengan tahun 2022 hanya sebanyak 28 kasus. Hal tersebut dikarenakan kurangnya aksi pencegahan dari tingkat keluarga terhadap kasus kekerasan terhadap anak.

2.2.2.5 Pembangunan Pemuda dan Olahraga

2.2.2.5.1 Kepemudaan

Karena Indeks Pembangunan Pemuda tidak dihasilkan pada tingkat Kota Cirebon oleh karena itu data yang mendukung Indeks Pembangunan Pemuda yaitu jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan, jumlah atlet yang dibina, rasio kewirausahaan, Jumlah Organisasi Kepemudaan, dan Jumlah Wirausaha Muda.

Berkaitan dengan kepemudaan dan olahraga, kecenderungan data yang diberikan menunjukkan beberapa pola menarik terkait jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan, dan jumlah atlet yang dibina dari 12 cabang olahraga setiap tahunnya dari 2013 hingga 2023.

Tabel II-23 Aktivitas Olah Raga dan Kepemudaan

Jumlah pemuda	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mendapat Pelatihan Kepemimpinan	32	32	182	82	30	32	32	32	32	0
Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	0	80	160	30	30	30	0	0	0	30
Dibina per tahun dari 12 Cabor	96	96	96	96	600	1.004	0	0	2.300	3.100

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2023

Pelatihan kepemimpinan yang telah dilakukan terlihat dari jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kepemimpinan cenderung tinggi pada tahun 2015 dengan 182 orang, kemudian menurun secara signifikan di tahun berikutnya hingga menjadi 0 pada tahun 2022 dan 2023. Ini bisa menunjukkan perubahan fokus atau pendanaan yang mengarah pada penurunan partisipasi dalam pelatihan tersebut.

Pelatihan kewirausahaan yang telah dilakukan terlihat dari jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan mengalami fluktuasi. Mulai dari 2014 hingga 2016, terjadi peningkatan yang cukup stabil dari 0 pada 2014 menjadi 160 pada 2015, kemudian turun kembali pada tahun 2016. Setelah itu, ada variasi kecil dalam partisipasi sampai pada 2023, di mana kembali ada kenaikan menjadi 30 orang. Ini bisa menunjukkan upaya untuk meningkatkan kesadaran atau pelatihan terkait kewirausahaan pada beberapa tahun terakhir.

Tabel II-24 Data Rasio Kewirausahaan Daerah Kota Cirebon

Data Kewirausahaan	2021	2022	2023
Berusaha dibantu buruh tetap	7.595	6.684	4.989
Angkatan Kerja	155.798	163.639	180.902
Bekerja	139.397	149.860	167.037
Pengangguran	16.401	13.779	13.865
Rasio Kewirausahaan	4,875	4,085	2,758

Sumber : BPS, 2024

Rasio Kewirausahaan Daerah akan diperoleh berdasarkan persentase berusaha yang dibantu buruh tetap per total angkatan kerja. Jika membandingkan rasio kewirausahaan di Kota Cirebon antara Tahun 2021 dan Tahun 2022 maka dapat diketahui bahwa rasio kewirausahaan di Kota Cirebon mengalami penurunan sebesar 0,79%. Hal ini diindikasikan menurunnya PDRB Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu Tahun 2021 sebesar 7.268,15 Milyar Rupiah menjadi 7.659,17 Milyar Rupiah di Tahun 2022. Selain itu dampak covid 19 masih dirasakan di Tahun 2022 yaitu dengan

berkurangnya jumlah pengusaha dibantu buruh tetap, sedangkan angkatan kerja terus bertambah sehingga peluang bekerja menjadi menurun.

Jika membandingkan rasio kewirausahaan di Kota Cirebon antara Tahun 2022 dan Tahun 2023 maka dapat diketahui bahwa rasio kewirausahaan di Kota Cirebon mengalami penurunan sebesar 1,32 %. Hal ini diindikasikan menurunnya PDRB Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu Tahun 2022 sebesar 7.659,17 Milyar Rupiah menjadi 8.135.60 Milyar Rupiah di Tahun 2023.

Jumlah organisasi kepemudaan meningkat dari 50 organisasi pada tahun 2014 menjadi 56 organisasi pada tahun 2017 hingga saat ini. Ini menunjukkan pertumbuhan dalam jumlah organisasi yang berfokus pada pengembangan kepemudaan, kegiatan sosial, atau program-program lainnya yang mendukung generasi muda. Pertumbuhan jumlah organisasi kepemudaan menunjukkan peningkatan minat dan dukungan terhadap kegiatan kepemudaan.

Tabel II-25 Data Wirausaha Muda

Wirausaha Muda	2020	2021	2022
Jumlah Usahawan (Orang)	26.433	26.433	31.720

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah wirausaha muda adalah 26.433 orang pada tahun 2018 dan tetap sama pada tahun 2019 hingga 2020. Ini menunjukkan stabilitas dalam jumlah wirausaha muda selama periode ini. Jumlah wirausaha muda meningkat menjadi 31.720 orang pada tahun 2022, mencerminkan peningkatan dalam jumlah wirausaha muda, yang menunjukkan pertumbuhan dalam sektor kewirausahaan, dukungan untuk start-up, serta keberhasilan program pelatihan wirausaha.

2.2.2.5.2 Olahraga

Jumlah Atlet yang dibina terlihat dari dari 12 cabang olahraga mengalami lonjakan yang signifikan dari 2017 hingga 2022, dengan peningkatan yang dramatis dari 600 pada 2017 menjadi 2.300 pada 2022. Lonjakan yang kuat terjadi antara tahun 2018 dan 2019. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan ke 3.100, yang masih cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dari kecenderungan ini, terlihat adanya fluktuasi dan perubahan yang signifikan dalam jumlah pemuda yang menerima pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan, serta lonjakan dalam pembinaan atlet dari 12 cabang olahraga dalam beberapa tahun terakhir. Kecenderungan ini dapat membantu dalam mengidentifikasi pola dan menciptakan strategi yang lebih baik untuk pengembangan pemuda dan olahraga.

Tabel II-26 Jumlah atlet per cabang olahraga

	Cabang Olahraga	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bola Voli	6	6	6	6	6	5	6	5	5	5	5
2	Bola Basket	9	9	9	19	9	10	11	10	11	11	11
3	Sepak Bola	11	11	11	12	12	12	15	12	12	12	12
4	Futsal						1	6	15	15	16	16
5	Sepak Takraw	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
6	Tenis	2	2	2	3	3	3	3	3	3	5	5
7	Tenis Meja	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	9

	Cabang Olahraga	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8	Bulu Tangkis	14	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
9	Billiard	2	2	2	2	2	6	6	6	6	5	5
10	Bowling	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Renang	8	8	8	9	9	10	10	10	10	12	12
12	Tinju/Beladiri	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
13	Sepeda	4	4	4	4	4	5	8	5	5	5	5
14	Binaraga	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
15	Panahan	3	3	3	4	4	5	5	15	15	5	5
16	Gulat	2	2	2	3	3	5	5	5	5	5	5
17	Softball	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6
18	Base Ball	1	1	1	1	1	1	0	2	2	2	2
19	Tarung Derajat						1	1	1	1	2	2
20	Judo						1	1	1	1	0	0
21	Taekwondo	1	1	1	1	1	1	6	6	6	16	16
22	Pencak Silat	15	16	16	17	17	17	20	20	20	20	20
25	Olahraga Tradisional	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
26	Aeromodelling						1	1	1	1	1	1
27	Selam						1	1	1	1	1	1
28	Atletik	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
29	Senam	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
30	Catur	4	5	5	5	6	6	7	7	7	7	7
31	Panjat Tebing	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3
32	Muangthai						1	1	1	1	1	1
33	IMI						2	1	1	1	1	1
34	Drumband	6	6	6	5	5	5	5	5	5	4	4
35	Sepatu Roda						1	1	1	1	1	1
36	Golf						1	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2023

Data tersebut merupakan jumlah atlet yang dibina setiap tahun dalam berbagai cabang olahraga dari tahun 2013 hingga 2023. Sehingga dapat diidentifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh atlet dalam berbagai olahraga.

Pada cabang olahraga, seperti Bola Voli, Bola Basket, Sepak Bola, Tenis Meja, Renang, Softball, dan Gulat, menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Sedangkan cabang olahraga lainnya menunjukkan kecenderungan penurunan atau fluktuasi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seperti Senam, Catur, Drumband, dan beberapa cabang lain yang awalnya memiliki partisipasi stabil namun kemudian mengalami penurunan pada tahun-tahun terbaru.

Ada beberapa cabang olahraga yang mengalami peningkatan partisipasi yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Contohnya adalah Futsal, yang mulai tercatat pada tahun 2016 dan mengalami pertumbuhan pesat hingga 2023. Begitu juga dengan Sepak Takraw yang tetap stabil dari tahun ke tahun. Cabang olahraga seperti Tinju/Beladiri, Sepeda, Panahan, serta beberapa cabang lainnya juga menunjukkan peningkatan perlahan namun stabil dalam jumlah atlet yang terlibat. Untuk cabang olahraga yang mengalami fluktuasi besar dari tahun ke tahun, seperti Judo, *Aeromodelling*, dan Selam yang awalnya memiliki partisipasi kemudian menurun atau bahkan tidak tercatat pada beberapa tahun terakhir.

Sebaliknya, beberapa cabang olahraga seperti Judo, Atletik, dan Taekwondo, awalnya memiliki partisipasi namun terjadi penurunan pada tahun-tahun terbaru. Dari data tersebut menggambarkan setiap cabang olahraga memiliki

dinamika partisipasi yang berbeda dari waktu ke waktu. Beberapa cabang olahraga mengalami peningkatan stabil atau bahkan signifikan, sementara yang lain mengalami fluktuasi atau penurunan yang perlu diperhatikan untuk mengevaluasi penyebabnya, seperti perubahan kecenderungan minat atau program pengembangan olahraga yang mungkin mempengaruhi partisipasi atlet.

2.2.2.6 Pembangunan Kebudayaan

Keanekaragaman budaya merupakan modal dasar pembangunan. Kekayaan budaya merupakan aset yang sangat berharga. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia, melalui pembangunan kebudayaan yang diupayakan oleh pemerintah. Tujuan utama pembangunan kebudayaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan berbagai upaya pembangunan dan perubahan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (CPI) merupakan alat yang memberikan wawasan mengenai kemajuan pembangunan kebudayaan.

IPK memiliki korelasi dengan IPM, yaitu nilai IPK berbanding lurus dengan IPM. Sebagai contoh semakin tinggi tingkat budaya suatu daerah maka semakin besar pula kesejahteraan masyarakatnya. Upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal sangat penting dalam upaya melestarikan budaya lokal. Semakin berkembangnya konsolidasi modernitas di lingkungan global yang berujung pada berkurangnya apresiasi terhadap budaya lokal merupakan hal yang perlu diwaspadai, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memasuki berbagai aspek kehidupan manusia dan belum terealisasi pemanfaatannya.

Pemerintah Kota Cirebon terus berupaya untuk memelihara dan tetap melestarikan budaya lokal, untuk itu upaya merealisasi kawasan wisata dengan daya tarik budaya pada beberapa kawasan menjadi hal penting dalam pembangunan kebudayaan di Kota Cirebon. antara lain: Kampung Arab, Kampung Cina, Kampung Benda Kerep dan juga kawasan keraton sebagai cagar budaya dimana terdapat benda-benda bersejarah.

2.2.2.7 Pembangunan Kelurahan

Kelurahan memiliki peran yang strategis dalam pembangunan kota. Tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal, pembangunan di kelurahan juga berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi kota. Pembangunan di kelurahan melibatkan berbagai aspek yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memajukan pertumbuhan ekonomi kota. Lebih jauhnya, pembangunan kelurahan merupakan salah satu upaya untuk mendukung penguatan pusat pelayanan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kota.

Kemajuan pembangunan di kelurahan diukur dari tingkat perkembangan perkembangan kelurahan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan kelurahan setiap tahunnya. Selain itu, setiap lima tahun diukur laju kecepatan perkembangan berbagai aspek, meliputi: ekonomi masyarakat; pendidikan masyarakat; kesehatan masyarakat; keamanan dan ketertiban; kedaulatan politik masyarakat; peran serta masyarakat dalam pembangunan; lembaga

kemasyarakatan; kinerja pemerintahan desa dan kelurahan; serta pembinaan dan pengawasan.

Hasil evaluasi keberhasilan kegiatan pembangunan setiap tahun akan menentukan laju perkembangan kelurahan dalam kategori cepat berkembang, berkembang, lamban berkembang, dan kurang berkembang. Selanjutnya, hasil analisis laju perkembangan kelurahan setiap tahunnya digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan kelurahan setiap lima tahun dalam klasifikasi desa dan kelurahan swasembada, swakarya, dan swadaya.

Tabel II-27 Kelurahan di Kota Cirebon berdasarkan klasifikasi

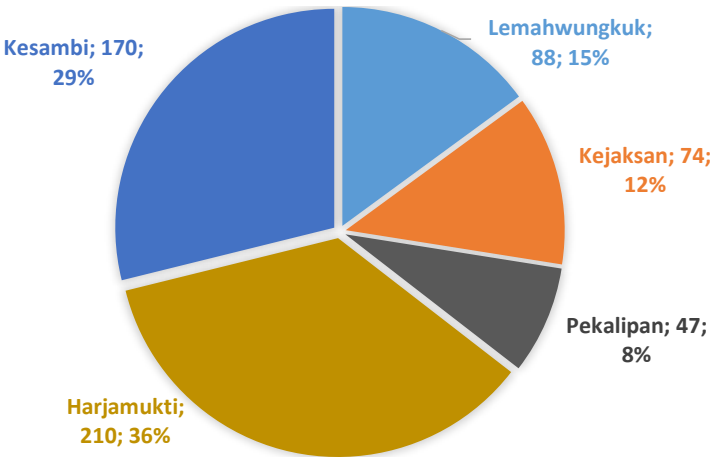
Kategori	2022	2023	2024
swadaya		4	6
swakarya	13	9	6
swasembada	9	9	10

Sumber: Bappelitbangda 2024

2.2.2.7.1 Jumlah Prasarana atau Infrastruktur Pendidikan di Wilayah Kecamatan

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreativitas serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) salah satu diantaranya diupayakan melalui pembangunan di bidang pendidikan, terutama melalui pendidikan formal. Sementara itu, untuk memajukan dunia pendidikan upaya yang dilakukan diantaranya meningkatkan prasarana dan sarana agar dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan kepada masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di Kota Cirebon merupakan salah satu wujud nyata pembangunan dalam bidang pendidikan. Dengan meningkatnya pendapatan penduduk dan semakin majunya ilmu pengetahuan, maka masyarakat mulai menuntut adanya peningkatan sarana dan mutu pendidikan. Pemerintah serta pihak swasta harus mampu memenuhi kebutuhan pendidikan yang berkualitas. Perkembangan dan pertumbuhan kuantitas sarana Pendidikan di Kota Cirebon secara garis besar dikarenakan faktor bertambahnya jumlah dan kepadatan penduduk, juga untuk mengurai titik-titik pendidikan serta pengoptimalan SDM yang ada di Kota Cirebon menuju Kota Cerdas.

Gambar II-60 Prasarana atau Infrastruktur Pendidikan Tahun 2022/2023



Sumber: Bappelitbangda, 2023

Berdasarkan gambar berikut dapat diketahui bahwa tahun 2022 Jumlah Prasarana atau Infrastruktur Pendidikan di Wilayah Kecamatan Tahun 2022

paling banyak terdapat di Kecamatan Harjamukti sebanyak 210 Unit, kemudian Kesambi sejumlah 170 Unit, Lemahwungkuk 88 Unit, Kejaksan 74 Unit dan Pekalipan sejumlah 47 Unit.

2.2.2.7.2 Jumlah Prasarana dan Infrastruktur Kesehatan di Wilayah Kecamatan

Salah satu indikator penting dalam pembangunan adalah Human Development Index (HDI)/Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari indeks ekonomi (pendapatan riil per kapita), indeks pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), dan indeks kesehatan (usia harapan hidup waktu lahir). Indeks kesehatan digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dengan mengukur indikator Usia Harapan Hidup pada saat lahir.

Tabel II-28 Indeks Kesehatan Kota Cirebon

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kesehatan	79,78	79,98	80,2	80,4	80,68

Sumber : BPS Kota Cirebon, 2022

Perkembangan Indeks Kesehatan Kota Cirebon mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, Indeks Kesehatan Kota Cirebon mencapai 80,68 atau meningkat 0,35 % dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mengindikasikan keberhasilan pembangunan bidang kesehatan di Kota Cirebon.

Pertumbuhan dan perkembangan segala aspek dari Sektor Kesehatan yang ada di Kecamatan Kota Cirebon ditujukan untuk mengoptimalkan bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat juga sebagai penyesuaian tempat lokasi agar lebih merata sebarannya.

Tabel II-29 Jumlah Prasarana dan Infrastruktur Kesehatan di Wilayah Kecamatan

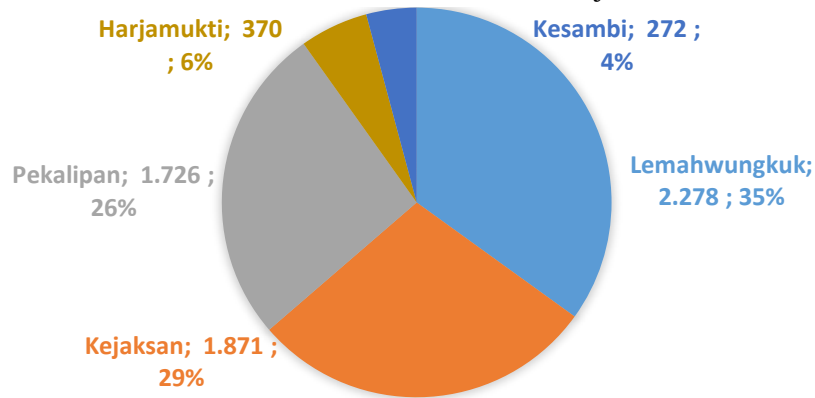
Kecamatan	2020	2021	2022
Lemahwungkuk	79	79	79
Kejaksan	76	45	45
Pekalipan	58	58	58
Harjamukti	132	32	37
Kesambi	99	100	100

Sumber: Bappelitbangda, 2023

2.2.2.7.3 Jumlah Prasarana atau Infrastruktur Ekonomi di Wilayah Kecamatan

Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator dalam mengukur keberhasilan suatu perekonomian dan baik buruknya kualitas kebijakan pemerintah serta tinggi atau rendahnya mutu aparatnya di bidang ekonomi (Widayati, 2010). Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang ditunjukkan oleh besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang melebihi tingkat pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk. Infrastruktur ekonomi, merupakan pembangunan fisik yang menunjang aktivitas ekonomi, meliputi public utilities (telekomunikasi, air bersih, sanitasi, gas), public work (jalan, bendungan, irigasi, drainase) dan sektor transportasi (jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, lapangan terbang).

Gambar II-61 Prasarana atau Infrastruktur Ekonomi di Wilayah Kecamatan 2022



Sumber: Bappelitbangda, 2023

Perkembangan dan pertumbuhan kuantitas dari sektor UKM Mikro tersebut secara garis besar dikarenakan mulai digalakkannya pemberdayaan UKM Mikro yang didorong juga dengan Kebijakan Daerah dan Pihak lainnya terkait dengan kesejahteraan pelaku usaha lokal UKM Mikro di Kecamatan di Kota Cirebon.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan modal penting bagi tercapainya keberhasilan tujuan pembangunan daerah. Dalam upaya mewujudkan Kota Cirebon sebagai pusat perdagangan dan jasa, diperlukan performa daya saing yang baik dalam menyediakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya aktivitas perekonomian di sektor perdagangan maupun jasa. Berjalannya aktivitas perekonomian diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan iklim yang kondusif bagi aktivitas perekonomian ini dijabarkan dalam program pembangunan yang ditujukan untuk memperkuat performa faktor-faktor pembentuk daya saing yang dimiliki oleh Kota Cirebon.

Pada awal kemunculannya, konsep daya saing seringkali dikaitkan dengan produktivitas dalam konteks tingkat efisiensi perusahaan. Studi awal yang dilakukan Michael Porter (1990)⁴ mengenai daya saing nasional yang dihubungkan dengan produktivitas kemudian menjadi salah satu pemantik perhatian terhadap daya saing di tingkat regional (daerah). Konsep tersebut kemudian bergulir lebih luas dimana daya saing tak hanya dilekatkan pada level mikro perusahaan, namun mencakup aspek di luar itu seperti iklim berusaha yang dapat bersifat regional maupun nasional. Iklim berusaha tersebut tentu saja sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang ada dalam situasi wilayah untuk dapat mendukung dan menjamin berlangsungnya aktivitas ekonomi dalam kondisi yang kondusif.

Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017, terdapat empat aspek yang dapat mempengaruhi performa daya saing suatu daerah yakni aspek kemampuan ekonomi daerah, aspek infrastruktur atau fasilitas wilayah, aspek iklim investasi, dan aspek sumber daya manusia. Optimalisasi performa pada masing-masing aspek ini diyakini dapat mendongkrak daya saing suatu daerah. Hal ini tentu juga perlu didukung oleh kebijakan yang dibuat, kelembagaan

⁴ Piter Abdullah, Armida S. Alisyahbana, Nurry Effendi, Budiono (2002). *Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.

yang dibangun, model pengelolaan sumber daya, serta karakteristik-karakteristik ekonomi lainnya yang mendukung sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Hasil penilaian Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kota Cirebon mendapatkan skor penilaian pada tahun 2022 sebesar 3,16 dan 2023 sebesar 3,64 berdasarkan rata-rata dari pilar-pilar aspek lingkup pendukung, sumber daya manusia, pasar, ekosistem inovasi. Sementara pada tahun 2021 mendapatkan skor 3,069 melalui metode penilaian yang berbeda.

2.3.1 Daya Saing Ekonomi

Daya saing (*competitiveness*) dapat dimaknai sebagai kemampuan suatu entitas perekonomian, dalam hal ini Kota Cirebon, untuk mencapai pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan. Dalam otonomi pembangunan di daerah, peran Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan penguatan instrumen tata kelola perbaikan layanan publik dan daya saing. Daerah yang memiliki kemampuan bersaing yang tinggi akan menghasilkan nilai tambah output, kesempatan kerja, kekayaan daerah, dan lainnya. Situasi global yang terus berkembang ke arah keterbukaan pasar dan pengintegrasian perekonomian penguatan daya saing dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki. Terdapat 4 (*empat*) aspek yang dapat mempengaruhi performa daya saing suatu daerah yakni aspek kemampuan ekonomi daerah, aspek infrastruktur atau fasilitas wilayah, aspek iklim investasi, dan aspek sumber daya manusia.

2.3.1.1 Lapangan Usaha Unggulan dan Potensial

Bidang usaha yang paling berkontribusi tertinggi terhadap struktur PDRB tahun 2023 di Kota Cirebon yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Keuangan dan Asuransi. Kenaikan nilai nominal produk nasional bruto yang cukup pesat pada sektor tersebut merupakan dampak dari berbagai langkah strategis dalam rangka pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas. Jenis usaha yang berkembang, padat karya, padat modal, dan padat teknologi, mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya menentukan produktivitas perekonomian. Semakin banyak pekerjaan yang diserap, maka output akan meningkat. Sektor potensial dan tergolong sektor yang dapat tumbuh berkembang pesat dan meningkatkan kapasitasnya untuk menghasilkan tambahan produksi yaitu sektor:

1. Transportasi dan Pergudangan;
2. Real estat;
3. Penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman;
4. Pasokan air, limbah padat, limbah padat dan pengelolaan daur ulang;
5. Pelayanan pendidikan;
6. Industri Pengolahan; dan
7. Jasa Lainnya.

Di antara sektor potensial tersebut di atas, sektor akomodasi dan jasa makanan serta transportasi dan pergudangan mempunyai kontribusi pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun.

2.3.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah nilai PDRB atas dasar harga berlaku per satu orang penduduk yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Angka PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka ini digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah, sehingga dengan penyajian secara berkala akan menunjukkan adanya perubahan kemakmuran. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk, sedangkan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah. Gambar berikut menunjukkan pada periode tahun 2018- 2022 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku penduduk Kota Cirebon mengalami peningkatan dari Rp. 68,42 juta di tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 78,00 juta pada tahun 2022, namun pada tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.70,47 juta.

Tabel II-30 PDRB Per Kapita Kota Cirebon dan Laju Pertumbuhannya

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	68,42	73,61	70,47	72,75	78
2	Pertumbuhan PDRB Per Kapita	4,83	5,14	-4,90	1,71	3,75

Sumber : BPS 2024

Dengan meningkatnya PDRB Per Kapita ADHB pada periode tahun 2018-2022, maka telah terjadi perubahan tingkat kemakmuran yang lebih baik bagi penduduk Kota Cirebon. Hal ini harus diimbangi dengan pertumbuhan penduduk yang tidak terlalu cepat, sehingga tingkat kemakmuran dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk Kota Cirebon. Namun dengan adanya pandemi Covid-19, berdampak terhadap penurunan pendapatan per kapita penduduk Kota Cirebon sebesar Rp.0,89 juta.

2.3.1.3 Pengeluaran Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan pengeluaran rumah tangga. Semakin tinggi rasio atau angka konsumsi rumah tangga, maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman dan Non-Makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya per jumlah penduduk.

Data publikasi BPS menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan di Kota Cirebon cenderung mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2020 mengalami

penurunan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang mendorong masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan sehingga berdampak pada turunnya konsumsi rumah tangga. Dari tabel pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan dapat dilihat bahwa persentase terbesar pada komposisi pengeluaran Bukan Makanan dibandingkan Makanan. Peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita dalam satu bulan pada tahun 2021 juga mengindikasikan pemulihan ekonomi dan peningkatan pendapatan rumah tangga di Kota Cirebon.

Tabel II-31 Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Komoditi

No	Tahun	Makanan		Non-Makanan		Jumlah
		Rp	%	Rp	%	Rp
1	2018	631.400	46,12	540.484	53,88	1.171.884
2	2019	821.159	45,07	673.891	54,93	1.495.050
3	2020	820.119	44,37	654.100	55,63	1.474.219
4	2021	960.673	41,05	669.035	58,95	1.629.708
5	2022	850.872	45,43	708.258	54,57	1.559.130
6	2023	1.040.035	46,11	788.126	56,89	1.828.161

Sumber: BPS
2024

2.3.1.4 Investasi

Nilai Investasi di Kota Cirebon sejak tahun 2013-2019 terus mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penurunan yang ditengarai dipengaruhi oleh kondisi pandemic. Meski demikian, kondisi ini kembali membaik pada tahun 2022. Bahkan, di tahun 2022 Kota Cirebon termasuk dalam sepuluh besar Kabupaten/Kota yang meraih persentase pencapaian realisasi investasi terbesar di Provinsi Jawa Barat, dimana tercatat investasi Rp 791,6 M dapat terealisasi di kota Cirebon dari target sekitar Rp 500 M. Di tahun 2023, meski terjadi sedikit penurunan realisasi investasi menjadi Rp 553,5 M, namun angka penyerapan tenaga kerja cenderung mengalami peningkatan kembali. Sementara itu, jumlah proyek di Kota Cirebon terus bertambah.

Berdasarkan gambaran data tahun 2021, terdapat 10 sektor potensial di Kota Cirebon yang menarik minat investasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini. Sektor terbesar adalah perdagangan dan reparasi serta hotel dan restoran.

Tabel II-32 Rekap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Sampai Sektor Pelaku Usaha Menengah dan Besar Tahun 2021

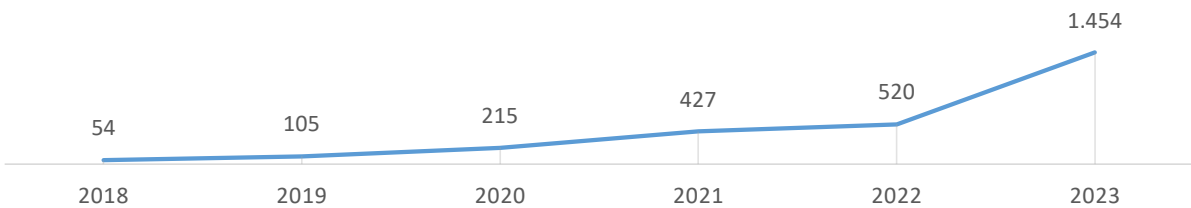
No	Sektor	Jumlah/ Tahap Pelaporan		Status Perusahaan		Periode Pelaporan				Total
		Konstruksi	Produksi	PMA	PMDN	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Perdagangan dan Reparasi	2	134	14	122	39	11	86		408
2.	Hotel dan Restoran	0	80	30	50	15	35	30		240
3.	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	3	12	3	12	4	4	7		45
4.	Listrik, Gas dan Air	2	1	0	3	1	1	1		9
5.	Konstruksi	0	6	0	7	1	5	1		20
6.	Transportasi, Gedung dan Telekomunikasi	0	3	0	3	0	1	2		9
7.	Jasa Lainnya	1	54	9	46	13	11	31		165
8.	Industri Tekstil	0	2	0	2	1	1	0		6
9.	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	0	3	0	3	1	0	2		9
10.	Industri Makanan	0	2	0	2	0	0	2		6
Total		8	297	56	250	75	69	162		917

Sumber : Data Perizinan OSS-RBA, DPMPT Kota Cirebon, Tahun 2021

Berkembangnya investasi di Kota Cirebon merupakan hal yang positif mengingat kehadiran investasi merupakan salah satu tahapan awal dalam

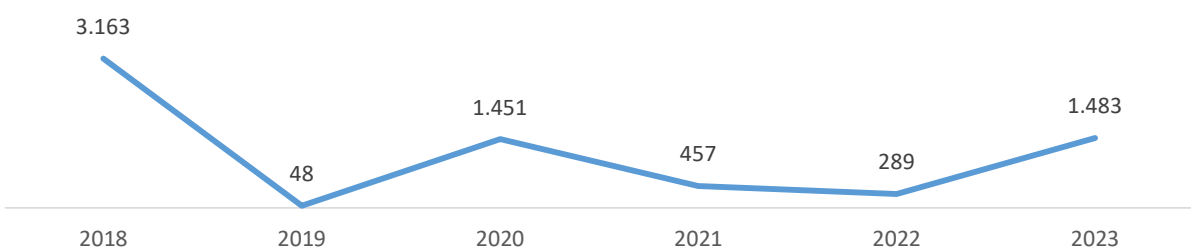
proses produksi yang dapat memberikan dorongan awal bagi pembangunan ekonomi daerah sehingga memiliki peran penting dalam pembangunan daerah untuk meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu, perlu dilakukan kebijakan yang mendorong tumbuhnya penanaman modal serta upaya untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Tujuannya adalah untuk memperkuat daya saing ekonomi dan mempercepat pertumbuhan investasi.

Gambar II-62 Jumlah Proyek Investasi di Kota Cirebon



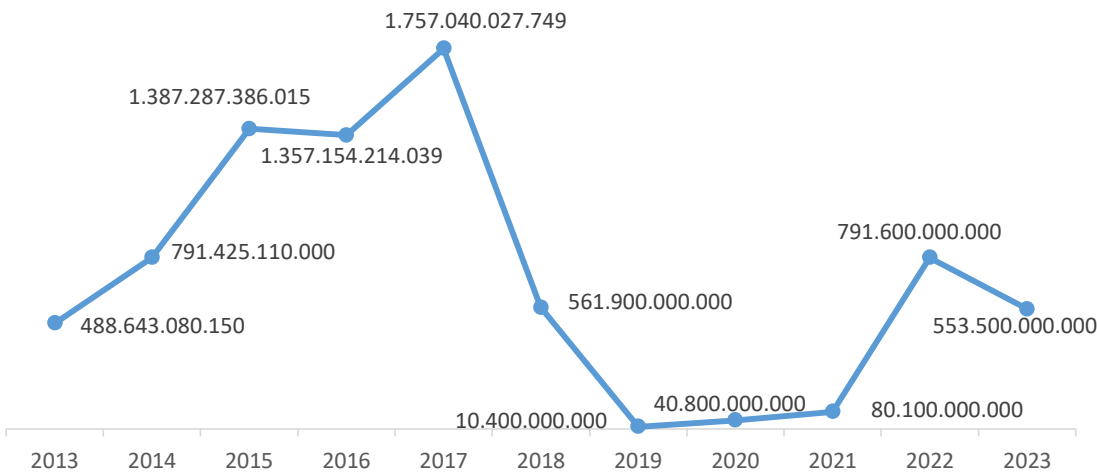
Sumber: DPMPTSP Kota Cirebon 2024

Gambar II-63 Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Cirebon (Orang)



Sumber: DPMPTSP Kota Cirebon 2024

Gambar II-64 Realisasi Investasi Kota Cirebon (Rupiah)



Sumber: DPMPTSP Kota Cirebon 2024

Kondisi iklim investasi di Kota Cirebon yang kondusif tidak lepas dari aspek ketentraman dan ketertiban umum yang relatif stabil. Hal ini juga didukung oleh aspek kemudahan investasi yang tergambar antara lain dari telah berjalannya Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan dukungan Rencana Detail Tata Ruang interaktif yang disahkan pada akhir tahun 2021. Meski demikian, hal ini belum secara optimal didukung oleh daya saing daerah dimana capaian Indeks Daya Saing Kota Cirebon selama Tahun 2020 dan 2021 belum terlalu memuaskan. Pada Tahun 2021, dari 9 kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, capaian Indeks Daya Saing Kota Cirebon menempati urutan ke-5, dengan perolehan indeks sebesar 3,069. Dari 12 pilar pembentuk

Indeks Daya Saing Daerah, terdapat 3 pilar yang memerlukan perhatian untuk peningkatan capaiannya, yaitu pilar kapasitas inovasi, kesiapan teknologi, serta perekonomian daerah. Berikut hasil penilaian Indeks Daya Saing Daerah untuk tahun 2021 dan tahun 2022.

Tabel II-33 Indeks Daya Saing Daerah Kota Cirebon

Pilar	2022	2023	Ket :
1	4,46	4,37	Lingkup Pendukung
2	-	2,56	SDM
3	3,52	4,76	Pasar
4	2,65	2,85	Ekosistem Inovasi
5	4,00	4,06	
6	3,74	4,00	
7	5,00	5,00	
8	3,51	3,51	
9	1,73	2,77	
10	1,13	4,37	
11	5,00	2,33	
12	3,21	3,14	

Sumber : BRIN

2.3.1.5 Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan memperluas peluang ekonomi dan kesejahteraan serta memberikan akses yang luas kepada seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu diperlukan strategi tertentu untuk memastikan pembangunan menyeluruh merata.

2.3.1.6 Daya Saing Digital

Demografi Kota Cirebon didominasi oleh generasi produktif dan masyarakatnya semakin akrab dengan teknologi. Digitalisasi tumbuh subur pasca Pasca Covid-19. Hal ini menjadikan sebagai sektor yang sangat penting untuk proses digitalisasi. Proses digitalisasi yang cukup signifikan adalah pada sektor keuangan digital khususnya perbankan. Hal ini didorong oleh keberadaan sumber daya manusia (SDM), penilaian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kondisi perekonomian, kewirausahaan dan produktivitas, lapangan kerja, infrastruktur, keuangan, serta regulasi dan kapasitas pemerintah daerah.

Pemerintah menerapkan berbagai inisiatif untuk membantu masyarakat di setiap daerah merespons digitalisasi. Penguatan ekosistem digital perlu terus dilakukan untuk meningkatkan perekonomian digital. Untuk itu, kita perlu terus memperkuat elemen fundamental yang berperan sangat penting dalam ekosistem, seperti penguatan infrastruktur digital dan aplikasi pendukungnya, peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi digital dan penelitian. Memperkuat regulasi/kebijakan yang mendukung dan mendukung proses transformasi digital.

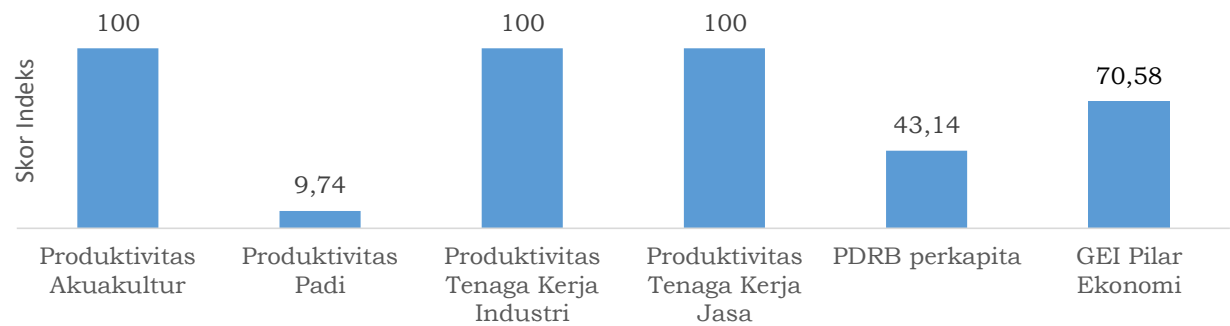
2.3.1.7 Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau (*Green Economy*) merupakan Sistem yang memuat aktivitas perekonomian (produksi, distribusi dan konsumsi) yang menghasilkan peningkatan kualitas hidup manusia untuk jangka panjang, tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang akibat munculnya risiko terkait dampak lingkungan dan keterbatasan ekologis (UNEP, 2011a). Indeks Ekonomi Hijau (*Green Economy Indeks/GEI*) yang digunakan sebagai alat ukur efektivitas transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau terdiri dari 15 indikator terpilih yang mewakili 3 pilar pembangunan berkelanjutan yaitu Pilar Lingkungan, Pilar Ekonomi, dan Pilar Sosial.

Indeks Ekonomi Hijau pada tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami penyesuaian berdasarkan kapasitas, kewenangan, akses data, dan rencana pelaporan kedepannya, sehingga indeks yang diturunkan pada tingkat kabupaten/kota adalah “Indeks Ekonomi Hijau pada Pilar Ekonomi”. Adapun yang menjadi parameter perhitungan Indeks Ekonomi Hijau pada Pilar Ekonomi diantaranya Produktivitas Akuakultur, Produktivitas Padi, Produktivitas Tenaga Kerja Industri, Produktivitas Tenaga Kerja Jasa dan PDRB Perkapita.

Berdasarkan hasil perhitungan GEI Kota Cirebon pada pilar Ekonomi Tahun 2023 adalah 70,58, dengan kategori “Baik Tier 2”. Skor komponen indeks terkait produktivitas padi menjadi komponen dengan skor terendah. Hal ini dikarenakan Kota Cirebon sebagai kawasan di wilayah perkotaan menjadikan pertanian bukan sebagai sektor basis. Keterbatasan lahan pertanian dan alih fungsi lahan pertanian menjadi salah satu penyebab nilai produktivitas padi di Kota Cirebon kurang bersaing. Di Tahun 2023 angka produktivitas padi hanya mencapai 5,58 ton/ha. Selain komponen produktivitas padi, komponen PDRB perkapita juga menjadi komponen yang perlu ditingkatkan untuk mendongkrak nilai Indeks Ekonomi Hijau pada pilar ekonomi ini. Di Tahun 2023 angka PDRB perkapita Kota Cirebon sebesar \$ 5.450,22 USD dengan skor indeks 43,14.

Gambar II-65 Indeks Ekonomi Hijau Pilar Ekonomi Kota Cirebon Tahun 2023



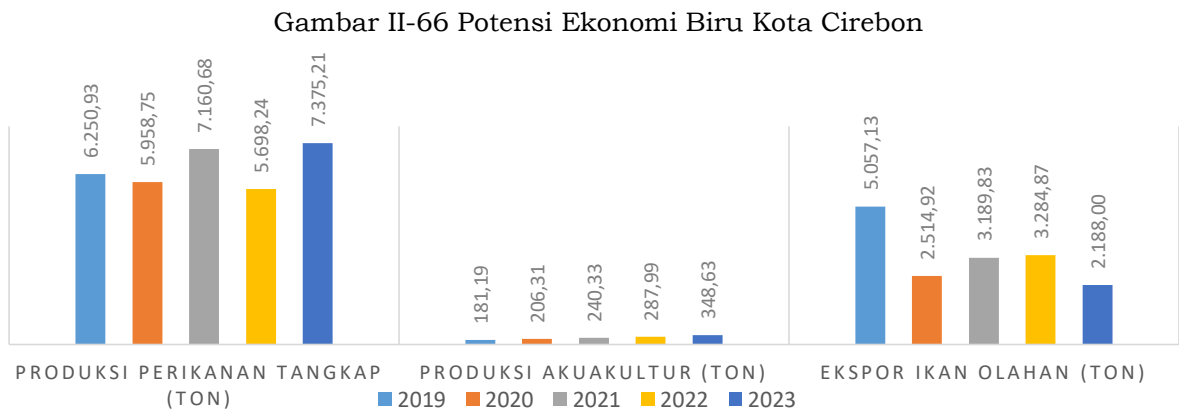
Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.3.1.8 Indeks Ekonomi Biru

Ekonomi biru (*blue economy*) adalah konsep ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan akuakultur, sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Tujuan utama dari ekonomi biru adalah untuk mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir sambil memaksimalkan manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut. Adapun *Indonesian Blue Economy*

Index (IBEI) sebagai alat ukur ekonomi biru terdiri dari 44 indikator yang dikelompokkan kedalam 3 pilar dan 11 sub pilar.

Nilai IBEI di Kota Cirebon belum dapat dianalisis setiap tahunnya dikarenakan terbatasnya kapasitas, kewenangan, akses data dalam menyusun 44 indikator IBEI. Pilar Ekonomi pada IBEI memiliki persentase bobot 32,6%. IBEI pada pilar Ekonomi dapat digambarkan berdasarkan beberapa komponen seperti produksi perikanan tangkap, produksi akuakultur dan ekspor hasil perikanan seperti pada gambar berikut:



Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon 2024

Dalam konteks Indeks Ekonomi Biru, data di atas mengindikasikan pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan. Berdasarkan data produksi perikanan tangkap dari tahun 2019 hingga 2023, mengalami fluktuasi produksi. Produksi mencatatkan peningkatan pada tahun 2021 dan 2023, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2022. Sementara itu, produksi akuakultur menunjukkan kecenderungan kenaikan yang stabil setiap tahunnya selama periode yang sama, menandakan kontribusi positif sektor ini terhadap ekonomi biru. Dalam hal ekspor ikan olahan, terlihat penurunan pada tahun 2020 dan 2023. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya perkuatan ekspor produk perikanan olahan sehingga kegiatan ini akan mendukung secara positif peningkatan nilai IBEI.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah Kota Cirebon. Indikator daya saing SDM Kota Cirebon meliputi Pendidikan, Literasi/Numerasi, Literasi Digital, Angkatan Kerja dan Ketergantungan Penduduk.

Tabel II-34 Penduduk Kota Cirebon berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

Kecamatan	Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD	Tamat SD	SMP	SMA	Diploma I/II	Diploma III	Stata I/D-IV	Stata II	Strata III
Kejaksan	13.142	4.433	6.188	5.703	15.550	372	1.411	3.242	255	13
Lemahwungkuk	13.398	7.342	10.373	8.781	17.185	348	874	1.691	127	16
Harjamukti	34.976	12.996	19.871	13.660	30.626	914	3.654	8.627	575	25
Pekalipan	6.749	3.660	4.508	4.408	9.387	216	716	1.392	93	2
Kesambi	16.812	7.961	10.654	8.853	23.412	699	2.631	7.072	792	53

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Cirebon, 2023

Penduduk di Kota Cirebon didominasi tamatan sekolah menengah atas, walaupun untuk wilayah kecamatan Harjamukti diantaranya masih tercatat adanya yang belum mendapatkan pendidikan, hal ini kemungkinan ada

sebagian warga masih berada pada usia dibawah lima tahun yang belum masuk usia sekolah.

2.3.2.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan amanat Undang-Undang 1945 yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan hak pendidikan kepada semua warga negara dan menyediakan anggaran sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan negara dan daerah. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar 13 (tiga belas) tahun. Dalam menyongsong Indonesia Emas, pendidikan merupakan kunci utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga negara indonesia.

Kota Cirebon memiliki potensi sumber daya manusia yang menjadi bagian penting dari modal pembangunan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Daya saing SDM dari indikator Indeks Pendidikan merupakan representasi indikator Angka Melek Huruf dan indikator Rata-rata Lama Sekolah. Capaian urusan pendidikan Kota Cirebon sangat baik, hal ini tergambar pada indikator yang mengampu bidang pendidikan. Pelayanan yang diberikan tidak membedakan domisili peserta didik, sehingga porsi anggaran untuk pelayanan pendidikan sebagian mengalir kepada peserta didik yang berdomisili di luar Kota Cirebon. Hal ini dapat diantisipasi dengan domisili data peserta didik, agar perhitungan capaian dapat lebih akurat sesuai dengan sasaran anggaran yang diberikan. Karena perhitungan indikator hanya menggunakan peserta didik yang berasal dari Kota Cirebon.

Perbaikan pelayanan pada urusan pendidikan diperlukan, khususnya pada proses penerimaan peserta didik baru adalah dengan mengeliminasi intervensi aparatur dalam menentukan peserta didik yang diterima. Sistem yang digunakan harus dapat bekerja mandiri dalam melayani proses penerimaan peserta didik baru. Keterlibatan seseorang yang dapat mengintervensi sistem akan mengurangi transparansi dan integritas tata kelola pemerintahan. Tingkat pendidikan penduduk di Kota Cirebon sudah cukup tinggi. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan menjadi kontribusi terbesar suksesnya sektor pendidikan.

Angka melek huruf tahun 2007 adalah 97,64 % meningkat pada tahun 2021 menjadi 98,56 %. Sedangkan angka putus sekolah meningkat untuk semua jenjang pendidikan, dengan data sebagai berikut:

Tabel II-35 Angka Putus Sekolah Kota Cirebon

Jenjang	2007	2019	2020	2021
SD	65	10	0	112
SMP/MTS	81	15	2	298
SMA/MA/SMK	224	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD 2005-2025 Kota Cirebon

Meningkatnya angka putus sekolah diindikasikan adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan penurunan ekonomi serta budaya masyarakat yang menganggap pendidikan formal kurang penting.

Untuk mengatasi siswa yang putus sekolah, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah melakukan berbagai upaya, diantaranya melalui Pelaksanaan Program Kurikulum Pendidikan Non Formal, Pemberian Bantuan Operasional

Sekolah kepada siswa tidak mampu, serta melakukan edukasi kepada orangtua siswa tentang pentingnya pendidikan formal.

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Semakin baik kualitas pendidikan akan semakin menentukan arah perbaikan kualitas sumber daya manusianya. Pada penghitungan IPM metode baru, dimensi pendidikan diukur dengan komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Data yang ada, terlihat kecenderungan peningkatan rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun. Kecenderungan menunjukkan peningkatan yang konsisten hingga tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa rata-rata lama sekolah di Kota Cirebon cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Peningkatan rata-rata lama sekolah memiliki sejumlah dampak positif yang signifikan yaitu:

A. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Semakin lama waktu yang dihabiskan untuk pendidikan, semakin tinggi kualitas dan keterampilan yang dimiliki oleh individu. Ini dapat meningkatkan potensi untuk lapangan kerja yang lebih baik dan produktivitas yang lebih tinggi.

B. Peningkatan Tingkat Pendidikan

Dengan rata-rata lama sekolah yang meningkat, masyarakat dapat memiliki akses ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ini dapat membuka pintu bagi pengetahuan yang lebih luas, keterampilan yang lebih maju, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai bidang.

C. Peningkatan Ekonomi Lokal

Individu yang lebih terdidik cenderung memiliki peluang yang lebih baik dalam menciptakan perubahan ekonomi positif dalam komunitas mereka. Mereka mungkin lebih cenderung untuk berkontribusi pada inovasi, berwirausaha, atau mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi.

D. Penurunan Tingkat Kemiskinan

Pendidikan yang lebih tinggi seringkali terkait dengan penurunan tingkat kemiskinan. Individu yang lebih terdidik memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dalam masyarakat.

E. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Individu yang lebih terdidik cenderung lebih sadar akan isu-isu sosial, lingkungan, dan politik. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi dalam kegiatan masyarakat, memperkuat demokrasi, dan memengaruhi perubahan positif dalam lingkungan sosial. Peningkatan rata-rata lama sekolah, di samping memberikan manfaat individual, juga memiliki dampak positif yang luas pada masyarakat secara keseluruhan.

Indikator berikutnya adalah HLS yang merupakan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Hal tersebut menunjukkan bahwa harapan seorang anak di Kota Cirebon untuk

bersekolah semakin baik. Secara umum masyarakat Kota Cirebon sudah sadar akan pentingnya pendidikan, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya angka HLS. Kecenderungannya menunjukkan peningkatan yang sangat lambat, di mana nilai "Harapan Lama Sekolah" hanya naik sedikit dari tahun ke tahun. Harapan atau ekspektasi masyarakat terhadap lama pendidikan yang diharapkan untuk dicapai oleh individu di Kota Cirebon cenderung naik secara bertahap namun dengan peningkatan yang cenderung stabil menunjukkan aspek positif:

1. Kebijakan pendidikan berkelanjutan dengan harapan yang stabil atau meningkat perlahan dari tahun ke tahun, ini bisa mencerminkan adanya kebijakan yang bertujuan untuk memperpanjang masa pendidikan di masyarakat. Ini bisa mencakup upaya pemerintah, program-program sekolah, atau kesadaran akan pentingnya pendidikan lebih lanjut.
2. Perencanaan karir yang lebih matang dengan harapan yang stabil bisa memberikan landasan bagi individu dan keluarga untuk merencanakan masa depan dan karir yang lebih matang. Ini bisa membantu dalam persiapan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau spesialisasi tertentu yang diperlukan dalam dunia kerja.
3. Peningkatan kesadaran pendidikan dengan harapan yang tetap tinggi atau meningkat secara perlahan bisa menunjukkan bahwa masyarakat memahami nilai pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan kesadaran akan manfaat pendidikan lebih lanjut bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.
4. Potensi peningkatan keterampilan dengan harapan yang stabil atau meningkat, ada kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang lebih dalam di berbagai bidang. Ini bisa berdampak positif pada inovasi, pengembangan teknologi, atau pertumbuhan ekonomi.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan harapan yang stabil terhadap lama pendidikan bisa memperkuat kualitas sumber daya manusia di suatu daerah atau negara. Individu yang menghabiskan lebih banyak waktu di sekolah cenderung memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih luas, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi.

Meskipun peningkatan yang lambat, harapan yang stabil terhadap lama pendidikan memiliki nilai positif dalam konteks pengembangan sosial, ekonomi, dan individu.

2.3.2.2 Literasi dan Numerasi

Literasi merujuk pada kemampuan membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sedangkan numerasi merujuk pada kemampuan memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Keterampilan literasi sangat penting dalam kehidupan modern karena dibutuhkan hampir di setiap bidang kehidupan. Keterampilan literasi juga sangat penting dalam pendidikan. Siswa yang memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang baik memiliki keunggulan dalam memahami pelajaran dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, membaca dan menulis merupakan dua keterampilan dasar yang wajib dipelajari dan dikuasai oleh setiap orang, khususnya anak usia

sekolah. Angka Literasi adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan dan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan dan memahami informasi.

Tabel II-36 Angka Literasi Kota Cirebon

Jenjang Pendidikan	Angka Literasi				
	2019	2020	2021	2022	2023
SD/ sederajat	n/a	n/a	n/a	74,89	84,98
SMP/ Sederajat	n/a	n/a	n/a	77,01	84,93

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2024

Ketercapaian angka literasi didukung oleh beberapa variabel pendukung antara lain kemampuan siswa dalam membaca, mengakses internet dan mengunjungi perpustakaan berdasarkan assessment di sekolah tingkat nasional.

Tabel II-37 Angka Numerasi Kota Cirebon

Jenjang Pendidikan	Angka Numerasi				
	2019	2020	2021	2022	2023
SD/ sederajat	n/a	n/a	n/a	58,71	78,23
SMP/ Sederajat	n/a	n/a	n/a	56,06	79,01

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2024

Ketercapaian angka numerasi didukung oleh beberapa variabel pendukung antara lain kemampuan menghitung dan estimasi, pemahaman konsep matematika, pengenalan angka dan huruf, serta pengukuran dan geometri.

2.3.2.3 Literasi Digital

Literasi digital di Kota Cirebon menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat. Literasi digital mengacu pada kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, dan jaringan untuk mengakses, mengelola, mengevaluasi, dan menciptakan informasi. Di Kota Cirebon, upaya untuk meningkatkan literasi digital mencakup berbagai program pelatihan, seminar, dan workshop yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Program-program ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan digital yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam ekonomi digital dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik telah melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat sebanyak 100 orang, kemudian pada tahun 2023 dan 2024 sosialisasi kembali dilakukan di lingkungan di beberapa sekolah baik untuk para siswa dan guru sebanyak 100 orang pada tahun 2023 maupun 2024

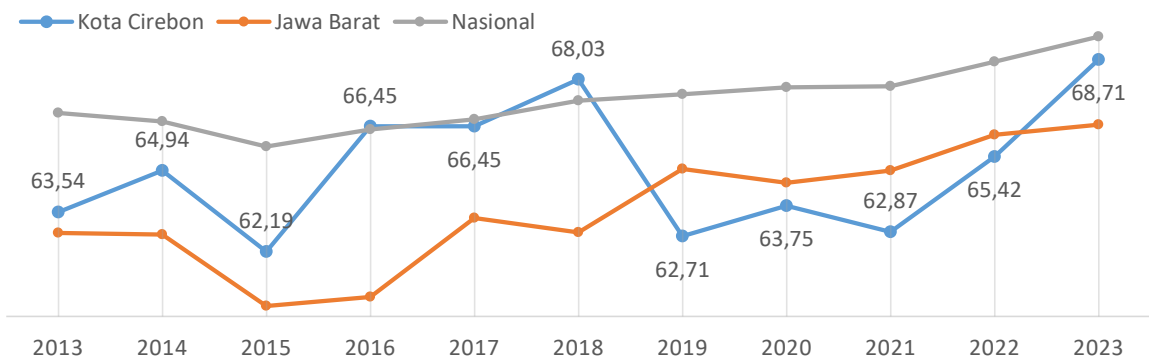
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kota Cirebon telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan infrastruktur digital, seperti perluasan jaringan internet dan peningkatan akses terhadap perangkat teknologi, telah mendorong adopsi TIK di berbagai sektor, termasuk pendidikan, pemerintahan, dan bisnis. Pemerintah Kota Cirebon juga telah berupaya memanfaatkan TIK untuk meningkatkan pelayanan publik, seperti melalui pengembangan aplikasi pelayanan online dan portal informasi yang memudahkan warga dalam mengakses layanan pemerintah. Inisiatif ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Di sisi lain, sektor pendidikan dan bisnis di Kota Cirebon juga merasakan manfaat dari kemajuan TIK. Sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan semakin banyak yang mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, memungkinkan akses ke sumber daya pendidikan yang lebih luas dan metode pengajaran yang lebih interaktif. Di sektor bisnis, adopsi teknologi digital telah membantu pelaku usaha, terutama UMKM, dalam memperluas jangkauan pasar melalui e-commerce dan pemasaran digital. Namun, tantangan tetap ada, termasuk kesenjangan digital dan kebutuhan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat agar semua warga dapat memanfaatkan TIK secara optimal dalam kehidupan sehari-hari..

2.3.2.4 Angkatan Kerja

Persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja yang tercermin dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

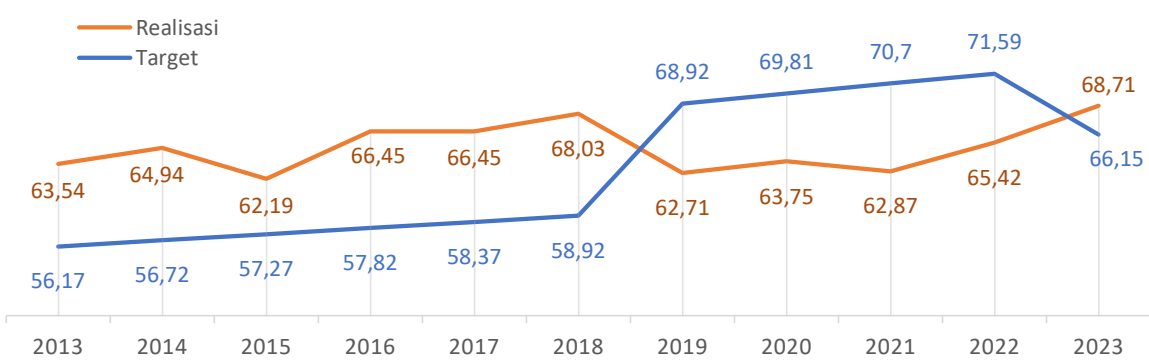
Gambar II-67 Perbandingan TPAK Kota Cirebon, Jawa Barat dan Nasional (%)



Sumber: BPS 2024

Sepanjang tahun 2016-2018, TPAK Kota Cirebon sudah lebih dari 64,13% sehingga masuk dalam kategori tinggi (Mala et al., 2017), akan tetapi mulai turun secara drastis pada tahun 2019 sampai dengan 2021 dan mulai tinggi kembali pada tahun 2022. Beberapa faktor yang mempengaruhi TPAK, yaitu jumlah penduduk yang masih bersekolah, jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga, umur, tingkat pendidikan, serta upah. Meskipun demikian, untuk periode 2019-2022, TPAK Kota Cirebon lebih rendah dibandingkan TPAK Jawa Barat dan TPAK Nasional.

Gambar II-68 Target dan Realisasi TPAK Kota Cirebon (%)



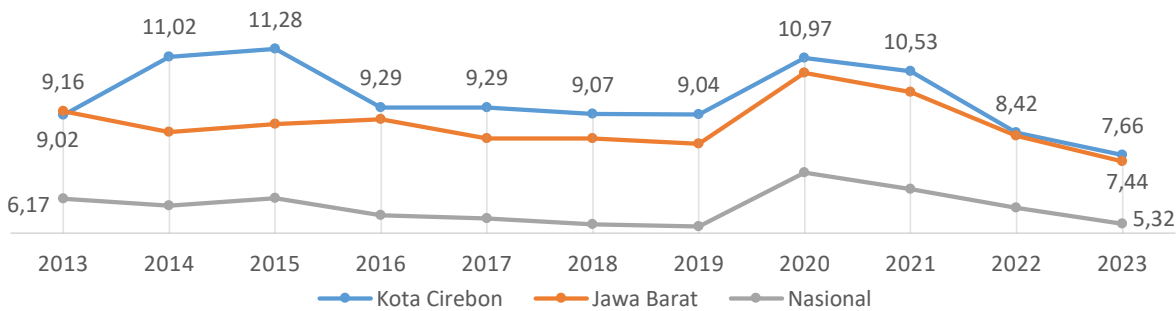
Sumber: RPJMD Kota Cirebon, BPS 2024

Target yang ingin dicapai dalam dokumen perencanaan selama tahun 2013-2023, TPAK Kota Cirebon mencapai target sampai dengan tahun 2018. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, TPAK Kota Cirebon tidak mencapai target.

2.3.2.5 Ketergantungan Penduduk

Rasio ketergantungan sangat erat kaitannya dengan produktivitas penduduk dalam suatu wilayah. Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketergantungan tinggi, maka ketergantungan penduduk usia sekolah dan usia lanjut semakin besar bebannya pada usia produktif. Rasio ketergantungan dapat menjadi salah satu indikator yang menunjukkan kondisi perekonomian.

Gambar II-69 Perbandingan TPT Kota Cirebon, Jawa Barat dan Nasional (%)

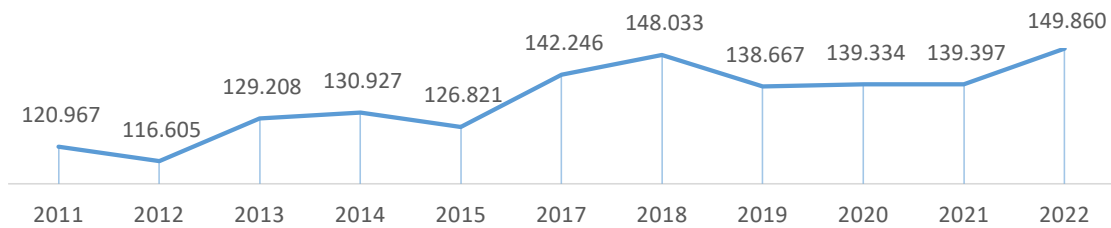


Sumber: BPS 2024

Disamping itu diperlukan juga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai indikator yang juga menunjukkan kondisi perekonomian. TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dalam penentuan indikator kinerja pembangunan daerah, TPT merupakan salah satu indikator makro, yaitu indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Dikarenakan merupakan indikator makro, ketercapaian TPT sesuai target merupakan salah satu keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh. TPT Kota Cirebon 2013-2023 lebih tinggi daripada TPT Jawa Barat dan Nasional.

Dengan perekonomian berbasis perdagangan dan jasa, Kota Cirebon belum memenuhi target capaian TPT Kota Cirebon beberapa tahun terakhir. Berikut data penduduk di Kota Cirebon yang bekerja:

Gambar II-70Jumlah Penduduk Kota Cirebon yang bekerja



Sumber: Open Data Jabar, 2023

2.3.3 Daya Saing Infrastruktur

Komponen *City Development Index* yang menilai kinerja kota dari sisi daya saing infrastruktur berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar. Dalam menilai Indeks Infrastruktur di Kota Cirebon dihitung berdasarkan kinerja terhadap kondisi layanan Air Minum,

Sanitasi, Akses terhadap listrik, Akses terhadap Telepon, Kemantapan Jalan, Tingkat Konektivitas Antar Wilayah, Rasio Rumah Layak Huni, dan Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Peluang investasi di Kota Cirebon sangat berpotensi, hal ini dilihat dari pangsa pasar konsumen yang bukan hanya dari warga Kota Cirebon namun juga dari wilayah sekitar yang merupakan wilayah III Ciayumajakuning. Adanya pelabuhan juga peluang untuk sektor export yang memberi kemudahan untuk melakukan pengiriman produk keluar pulau jawa maupun keluar negeri.

Tabel II-38 Nilai Investasi di Kota Cirebon

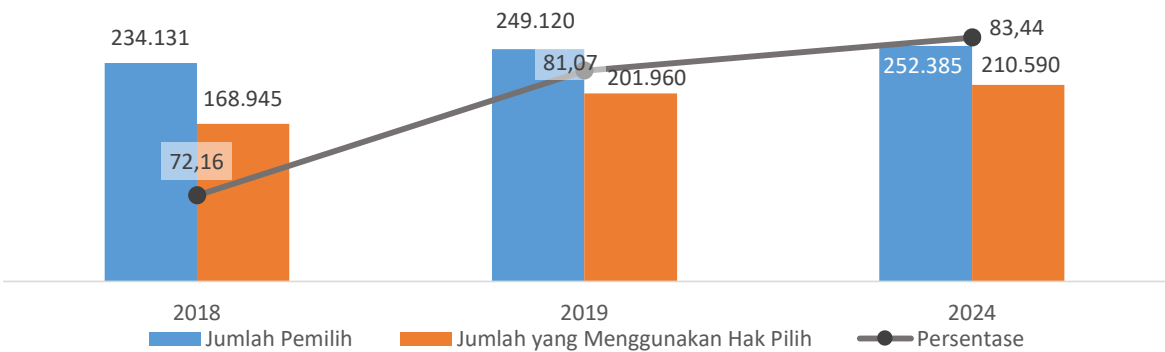
INVESTASI	2021	2022	2023
PMDN UMK	619.864.823.518	764.927.460.042	594.836.183.333
PMDN Non Umk	1.465.226.432.189	4.400.238.628.760	3.398.234.226.752
PMA UMK	500.000.000	11.288.832.982	11.529.160.205
PMA Non UMK	47.481.800.000	1.418.875.588.501	258.171.382.767

Sumber: Cirebon Satu Data 2023

2.3.4.1 Iklim Demokrasi

Iklim demokrasi yang kondusif sangat mempengaruhi daya saing daerah sehingga dapat menjadi pertimbangan investor untuk melakukan investasi. Iklim demokrasi yang diukur dengan Indeks Demokrasi juga memiliki peran penting sebagai pendeteksi dini dalam mengatasi kelemahan sistem demokrasi.

Gambar II-71 Angka Partisipasi Pemilih Kota Cirebon dalam Pemilu/Pilkada



Sumber: KPU Kota Cirebon

Indeks Demokrasi atau Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menjadi tolak ukur yang menggambarkan kondisi demokrasi dari 3 (tiga) aspek yaitu kebebasan sipil, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Adapun kondisi demokrasi di Kota Cirebon akan digambarkan melalui aspek-aspek kinerja kesatuan bangsa dan politik yaitu partisipasi penduduk dalam Pemilu atau Pilkada.

Partisipasi masyarakat Kota Cirebon dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2018, Pemilu Tahun 2019, dan Pemilu Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar di atas. Hasil menunjukkan bahwa terjadi peningkatan partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dengan capaian tertinggi pada Pemilu Tahun 2024 yaitu 83,44%. Adapun dari segi kesetaraan dalam menggunakan hak pilih, pemilih perempuan dan disabilitas juga menunjukkan adanya peningkatan. Dari sisi kepesertaan partai politik yang dapat menunjukkan kebebasan untuk dipilih menunjukkan adanya peningkatan jumlah partai politik, yaitu pada tahun 2019 sebanyak 20 partai menjadi 24 partai pada pemilihan tahun 2024.

Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa jaminan dalam kebebasan dan kapasitas lembaga demokrasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih maupun dipilih.

Kinerja baik tersebut menunjukkan meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada yaitu Komisi Pemilihan Umum yang didukung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Pemerintah Kota Cirebon melakukan upaya-upaya dalam peningkatan partisipasi dalam Pemilu/Pilkada seperti pemutakhiran data pemilih berkala melalui Daftar Pemilih Berkelanjutan, sosialisasi dan pendidikan pemilih, terutama pada pemilih pemula KPU *Goes to School*, KPU *Goes to Campus* dan kegiatan lainnya yang mendukung agar kondusifitas penyelenggaraan 'pesta demokrasi' ini berjalan lancar tanpa adanya konflik.

2.3.4.2 Ketentraman dan Ketertiban menuju kondusifitas daerah

Menciptakan kondisi lingkungan yang tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan berdampak positif pada tatanan kehidupan masyarakat. Hal tersebut merupakan tujuan dari penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kota Cirebon. Adapun kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat ditunjukkan melalui: (1) lokasi rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum; (2) kasus pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3); dan (3) kinerja Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Cirebon (Satlinmas).

2.3.4.2.1 Penegakan Peraturan daerah

Upaya penegakan peraturan daerah sangat penting dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat, hal ini sangat berpengaruh pada tingkat daya saing daerah. Capaian persentase penegakan Peraturan Daerah di Kota Cirebon Tahun 2023 sebesar 56,86 %. Masih dibutuhkan upaya lebih jauh agar dapat dicapai kondusivitas daerah yang mendukung iklim investasi sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah. Dalam rangka penegakan peraturan daerah di Kota Cirebon dilakukan beberapa upaya dilakukan antara lain pengendalian lokasi rawan gangguan ketertiban umum serta upaya menurunkan kasus pelanggaran ketertiban umum.

A. Lokasi Rawan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Lokasi rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) merupakan lokasi yang memiliki potensi terhadap kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum maupun pelanggaran peraturan daerah. Selama periode tahun 2019-2022 telah dilakukan identifikasi lokasi prioritas rawan gangguan trantibum. Jumlah lokasi rawan trantibum merupakan hasil dari identifikasi sekaligus menjadi target lokasi prioritas intervensi penurunan rawan gangguan trantibum. Kondisi awal pada periode 2013-2017 terdapat 45 lokasi, sedangkan kondisi awal periode 2019-2022 terdapat 55 lokasi.

Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan intervensi pada lokasi rawan gangguan trantibum, sehingga adanya penurunan jumlah lokasi pada setiap periode. Intervensi yang dilakukan bertujuan untuk mencegah dan menurunkan kasus dengan patroli pada 6 (enam) ruas jalan Kawasan Tertib Lalu-Lintas yaitu di Jalan Sudarsono, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Jalan Pemuda, Jalan Wahidin, Jalan Siliwangi, dan Jalan Kartini. Adapun dilakukan

Patroli sebanyak 3 *shift* yaitu pagi (jam 06.00-12.00), siang (jam 12.00-18.00) dan malam (jam 18.00-24.00). Frekuensi patroli Satpol PP hanya sampai jam 24.00 WIB tidak sampai 24 jam artinya sistem kerja Satpol PP masih belum mampu menyediakan layanan 24 jam dalam 7 hari.

B. Kasus Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mengatur 13 jenis ruang lingkup, antara lain tertib jalan, jalur hijau, trotoar dan fasilitas umum lainnya; tertib angkutan jalan; tertib sungai, saluran air, dan kolam; tertib tempat dan usaha tertentu; tertib lingkungan; tertib tuna sosial, anak jalanan dan psikotik; tertib susila; tertib bangunan dan penghuni bangunan; tertib tempat hiburan dan keramaian; tertib kawasan sekitar bandara; tertib kawasan sekitar pantai; tertib lingkungan pelajar; dan tertib peran serta masyarakat.

Pada dasarnya setiap orang atau lembaga berkewajiban menyelenggarakan trantibum, serta mendapatkan hak terlindungi dari ancaman gangguan dan pelanggaran trantibum. Penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan (K3) adalah upaya untuk mengatasi atau menangani tindakan atau peristiwa yang melanggar aturan, norma, atau standar yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Tabel II-39 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (persen)	91,30	100	100	64,29	64,29
Jumlah Kasus Pelanggaran K3	69	112	108	14	14
Jumlah Kasus Pelanggaran K3 yang diselesaikan	63	112	108	9	9

Sumber: Cirebon Satu Data, 2022

Berdasarkan data tahun 2017 sampai dengan 2022 menunjukkan bahwa terjadi penurunan persentase penyelesaian kasus pelanggaran K3 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penurunan penyelesaian kasus pelanggaran K3 dikarenakan adanya *refocusing* kegiatan pada penegakan disiplin protokol kesehatan pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Adapun fungsi penegakan peraturan/regulasi di tingkat daerah baik Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang telah diselenggarakan mengandung sanksi yustisial. Berdasarkan data sampai dengan 2023 terdapat 51 Perda yang mengandung sanksi yustisial. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon melaksanakan penegakan peraturan/regulasi di tingkat daerah melalui kegiatan operasi gabungan penyakit masyarakat (PEKAT), minuman keras dan perbuatan asusila; penertiban reklame; penerapan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan rokok ilegal; serta pengawasan pajak hotel dan restoran. Kendala yang dihadapi dalam penegakan peraturan daerah antara lain kurangnya pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap Perda dan Perkada, pembinaan pencegahan secara persuasif yang dilakukan Perangkat Daerah teknis lainnya belum maksimal, serta sanksi yang telah diterapkan belum memberikan efek jera.

2.3.4.2.2 Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia

Pelaksanaan aksi HAM dimaksudkan untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia. Kelompok sasaran utama dalam RAN HAM adalah perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat. Capaian pelaksanaan aksi HAM dan persentase penegakan Peraturan Daerah di Kota Cirebon. Untuk nilai capaian pelaksanaan aksi HAM pada tahun 2024 berdasarkan

pengukuran yang telah dirilis tahun 2024 oleh kementerian Hukum dan HAM RI, nilai rata-rata capaian pelaksanaan aksi HAM Kota Cirebon berada pada 90,83 yang menempati peringkat ke 10 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

2.3.4.3 Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan antar umat beragama adalah saling mendukung antar umat beragama dengan tidak memaksa siapapun untuk menganut suatu agama tertentu, dengan beribadah menurut agamanya, dengan menaati peraturan agama, baik peraturan agama maupun peraturan pemerintah atau pemerintah dan toleransi. Berdasarkan definisi tersebut, alat ukur indeks kerukunan umat beragama terdiri dari tiga indikator utama: (1) toleransi, (2) kesetaraan, dan (3) kerja sama. Pentingnya kerukunan umat beragama tentunya juga untuk menghindari konflik yang semakin meningkat di masyarakat. Karena itu perlu mitigasi konflik tersebut dapat serta berupaya untuk dicegah dan diatasi sejak dini indikator tersebut belum digunakan di Kota Cirebon. Konflik yang berdimensi keagamaan, kalau dibiarkan akan mengakibatkan korban dan akan menjadi tantangan bagi persatuan dan kesatuan.

Dengan penganut agama yang beragam di Kota Cirebon, berdasarkan urutan terbesar menganut agama Islam diikuti Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, Hindu, Konghucu dan ada juga beberapa penganut kepercayaan. Keberagaman agama yang dianut penduduk Kota Cirebon tampak dari adanya fasilitas peribadatan seperti: Masjid, Vihara, Pura, Gereja dan Klenteng. Namun dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir terjadi beberapa potensi konflik dan permasalahan berhubungan dengan perizinan tempat beribadah, seperti yang dialami di Kelurahan Pekiringan dan Kelurahan Kalijaga permasalahan yang terjadi seperti penggunaan bangunan yang bukan diperuntukan untuk kegiatan peribadatan atau belum menyelesaikan perizinan tempat ibadah sehingga terjadi pembatasan kegiatan ibadah maupun pengaduan dari warga. Potensi konflik maupun permasalahan tersebut ditengahi oleh tokoh agama dan instansi terkait. Selain itu dalam menciptakan kerukunan umat beragama Pemerintah Kota Cirebon melibatkan masyarakat dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

2.3.4.4 Layanan Air Minum

Aktivitas di Kota Cirebon yang cukup tinggi akan berdampak kepada perkembangan kota yang pesat, sehingga banyak membutuhkan dukungan penyediaan Infrastruktur yang memadai salah satunya adalah penyediaan kebutuhan dasar akan air bersih. Kondisi Kota Cirebon yang tidak mempunyai sumber air baku untuk air bersih sehingga bergantung pada sumber air baku Cipaniis di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Walaupun untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan perpipaan masih menggunakan sumber air permukaan dan air tanah yang disediakan oleh Dinas PUPR ataupun secara swadaya oleh masyarakat.

A. Jaringan Perpipaan

Jaringan perpipaan yang menyediakan air minum difasilitasi pemerintah melalui PDAM Kota Cirebon. Sumber air baku yang salurkan kepada warga Kota Cirebon melalui jaringan perpipaan, berasal dari 2 (dua) mata air yang lokasinya saling berdekatan di Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan pada ketinggian +375 m di atas permukaan air laut yang berjarak $\pm$ 22 Km dari Kota Cirebon.

Berdasarkan kajian yang terdapat Cirebon *Urban Development Project* III, Keandalan debit maksimum dan minimum Cipaniis pada tahun 1975 sebesar 3000 liter/detik dan 1500 liter/detik dengan total kapasitas air baku $\pm$ 1000 liter/detik. Air baku ini disalurkan melalui jaringan baru pipa 700 mm ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) Plangon yang berjarak kurang lebih 8,2 km, sedangkan untuk jaringan lama menggunakan pipa 250 mm dan 350 mm. IPA Plangon memasok air baku untuk didistribusikan ke Kota Cirebon dengan debit rata-rata 800 liter/detik yang ditampung pada tiga lokasi yaitu menara di Gunung Sari, di Parujakan dan di Kepongpongan.

B. Bukan Jaringan Perpipaan

Sedangkan SPAM bukan jaringan perpipaan, dapat meliputi sumur dalam, sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air. Lokasi pembangunan unit sumur dalam yang teridentifikasi berada di 4 (empat) kelurahan yaitu kelurahan Harjamukti, kelurahan Kalijaga, kelurahan Argasunya, dan kelurahan Sunyaragi, ke 4 (empat) kelurahan tersebut berada di kecamatan Harjamukti dan kecamatan Kesambi, Kota Cirebon

2.3.4.5 Konektivitas Antar wilayah

Kinerja infrastruktur jalan antara lain dapat diwakili oleh panjang jalan dengan perkerasan yang menggambarkan ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung mobilitas orang maupun barang. Selain itu, kinerja infrastruktur jalan juga dapat digambarkan melalui proporsi jalan dengan kondisi baik.

Prasarana jalan yang ada di Kota Cirebon terdiri dari jalan negara sepanjang⁵ 21,33 km, jalan provinsi sepanjang⁶ 6,545 km serta jalan kota sepanjang⁷ 159,172 km. Sesuai dengan statusnya, pengelolaan jalan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota adalah ruas-ruas jalan kota di luar jalan negara dan jalan provinsi. Jalan negara sepanjang 6,545 km tidak termasuk jalan Tol Palikanci sepanjang $\pm$ 1,87 km yang melintasi wilayah kelurahan Argasunya.

Proporsi jalan dengan kondisi baik dapat menggambarkan layanan infrastruktur jalan dalam mendukung aksesibilitas. Dalam kurun waktu 2016-2022, terdapat kenaikan total panjang jalan dari 142,93 km menjadi 159,172 km. Hal ini merupakan perkembangan positif yang dapat meningkatkan kontribusi infrastruktur terhadap daya saing kota. Namun, pada kurun waktu

⁵ Keputusan Menteri PUPR Nomor 1688/KPTS/M/2022.

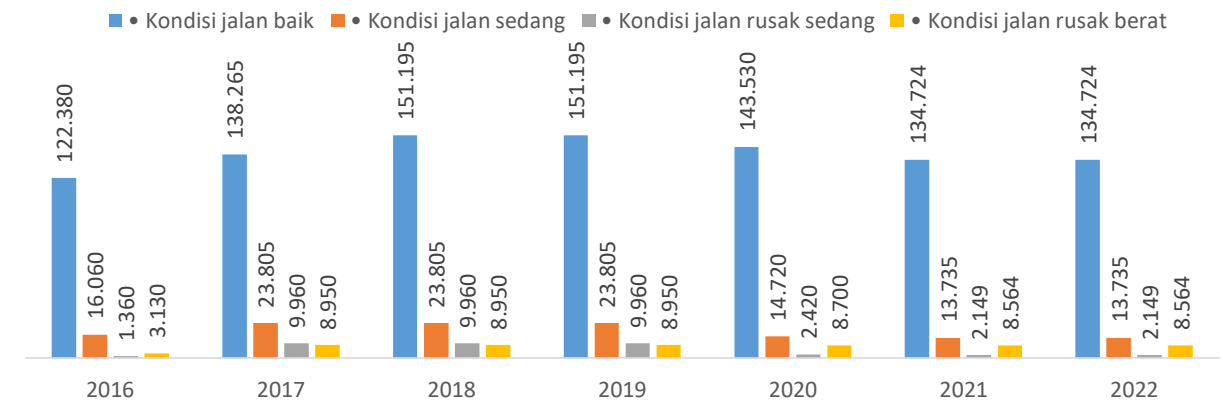
⁶ Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.1086-Rek/2016

⁷ Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 621/Kep.46-DPUPR/2021

yang sama, kenaikan panjang jalan ini juga sejalan dengan bertambahnya panjang jalan dengan kondisi rusak sedang maupun rusak berat.

Salah satu ukuran kinerja infrastruktur jalan adalah kontribusinya terhadap aksesibilitas wilayah. Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas jalan di suatu wilayah maka dilakukan perhitungan rasio panjang jalan dengan luas wilayah⁸. Nilai rasio tersebut menggambarkan panjang jalan yang terdapat dalam 1 (satu) km² luas wilayah. Dalam hal ini, nilai rasio berbanding lurus dengan tingkat aksesibilitas jalan di wilayah tersebut.

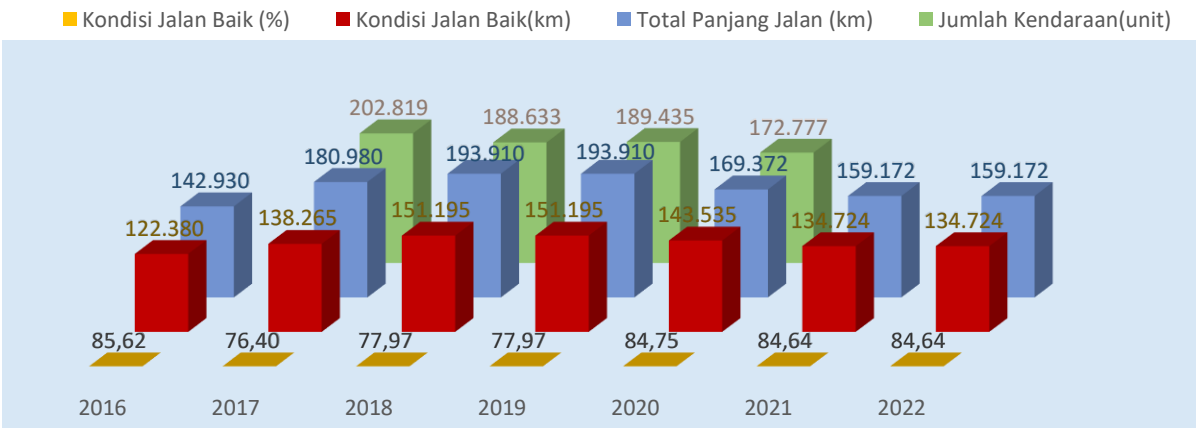
Gambar II-72 Panjang Jalan di Kota Cirebon Berdasarkan Kondisi



Sumber: DPUPR Kota Cirebon 2024

Berdasarkan data tahun 2019, di Kota Cirebon terdapat jalan eksisting sepanjang 159.172 km. Sementara itu, luas wilayah Kota Cirebon saat ini adalah 39,44 km². Dengan demikian, terdapat rasio panjang jalan terhadap luas wilayah sebesar 4.035,80. Angka ini jauh di atas angka rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Provinsi Jawa Barat. Secara statistik, hal ini dapat diartikan bahwa aksesibilitas jalan di Kota Cirebon berada dalam kategori baik jika mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Gambar II-73 Proporsi Kondisi Jalan Baik terhadap Panjang Jalan di Kota Cirebon



Sumber: Bappelitbangda 2023

Dalam kurun waktu 2016-2018 terdapat penambahan panjang jalan yang ada di Kota Cirebon sebesar 50,98 km. Sementara itu, meski terdapat kenaikan angka panjang jalan dengan kondisi baik, namun proporsi kondisi jalan baik menurun dari 85,62% di tahun 2016 menjadi 84,64% di tahun 2022. Sangat

⁸ Buku Informasi Statistik 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)

disayangkan bahwa terjadi penurunan persentase jalan baik. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa penambahan jalan baru tidak dibarengi oleh pemeliharaan jalan eksisting, atau bahkan dapat mengindikasikan kualitas jalan eksisting yang bisa jadi tidak sesuai dengan usia konstruksinya. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan upaya pengawasan dan pemeliharaan kondisi ruas jalan yang ada di wilayah Kota Cirebon sesuai dengan kewenangan status jalannya sehingga keberadaan infrastruktur jalan dapat menjadi nilai tambah bagi daya saing kota.

Mobilitas penduduk Kota Cirebon dilayani oleh angkutan kota (angkot) yang berjumlah 979 kendaraan. Sesuai Keputusan wali Kota No. 5 Tahun 1997 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota, angkot ini beroperasi pada 10 trayek dengan total panjang trayek 189,54 km. Dalam periode tahun 2018 hingga 2020, tidak terdapat penambahan jumlah angkutan yang ada di Kota Cirebon. Pada tahun 2021 terlihat adanya penurunan jumlah angkutan umum yang ada di Kota Cirebon. Jumlah penurunan ini melonjak tajam pada tahun 2022 menjadi sekitar setengahnya, dan pada bulan September 2023 tercatat hanya 261 angkutan umum yang ada. Hal ini merupakan imbas langsung dari beroperasinya layanan *Bus Rapid Transport* (BRT) di Kota Cirebon.

Tabel II-40 Jumlah Angkutan Umum yang ada di Kota Cirebon

Jenis Angkutan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ⁹
Bus Sedang (BRT) ¹⁰	Unit									10	10	10
Angkutan Kota	Unit	979	979	979	979	979	979	979	979	936	499	261

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Cirebon, dalam Open data Cirebon (data diolah)

Pada tahun 2021, terdapat penambahan moda transportasi umum sebanyak 10 unit bus ukuran sedang yang digunakan sebagai bagian dari layanan BRT di Kota Cirebon. Hal ini sejalan dengan strategi penataan dan pengembangan sistem prasarana wilayah dalam RTRW Provinsi Jawa Barat dimana Kota Cirebon mulai mengembangkan sistem angkutan umum massal untuk mengurangi masalah transportasi perkotaan.

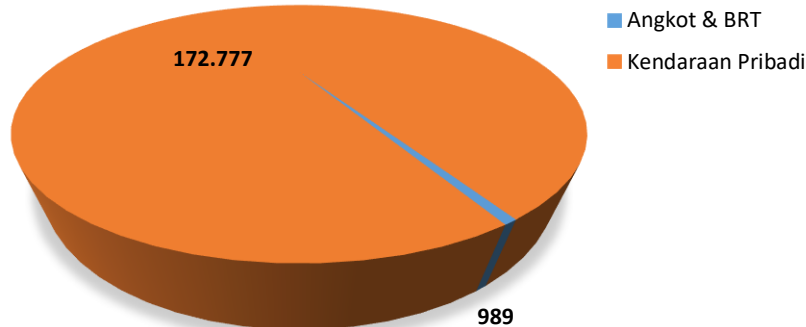
BRT mulai dioperasikan di Kota Cirebon sejak 12 April 2021. Untuk tahap awal, bus yang dioperasikan sebanyak dua bus dengan dua rute. Rute yang pertama berada di dalam wilayah Kota Cirebon, sementara rute lainnya beroperasi hingga wilayah Kabupaten Cirebon. Namun, hanya satu rute yang berjalan karena pertimbangan jumlah penumpang (Koridor I). Selanjutnya di Tahun 2023 dilakukan penambahan Koridor II dengan rute yang melayani hingga Wilayah Selatan Kota Cirebon (Kecamatan Harjamukti) melewati daerah yang strategis seperti daerah-daerah kuliner, wisata, pendidikan, perkantoran dan perbelanjaan. Sejak awal beroperasi hingga bulan September 2023, BRT telah melayani sebanyak 20.824 penumpang. Salah satu indikator kinerja layanan angkutan umum terhadap mobilitas penduduk adalah rasio kendaraan angkutan umum terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan hasil survey BPS, pada akhir tahun 2020, jumlah penduduk di Kota Cirebon adalah 333.303

⁹ Data per September 2023

¹⁰ Dari 10 BRT, saat ini baru 3 BRT yang beroperasi

jiwa¹¹. Dengan data jumlah angkutan umum sebanyak 989 unit angkutan umum yang terdiri dari angkot dan BRT, diperoleh rasio kendaraan angkutan umum terhadap jumlah penduduk Kota Cirebon sebesar 0,00294.

Gambar II-74 Panjang Jalan di Kota Cirebon Berdasarkan Kondisi



Sumber: Bappelitbangda, 2023

Angka ini menggambarkan masih rendahnya ketersediaan angkutan umum dalam menunjang mobilitas masyarakat di wilayah Kota Cirebon. Terlebih jika disandingkan dengan jumlah kendaraan pribadi pada tahun 2020 sebanyak 172.777 unit, maka diperoleh proporsi angkutan umum berbanding kendaraan non-angkutan umum adalah 0,57%. Dapat dibayangkan jumlah kendaraan pribadi yang digunakan untuk mobilitas penduduk di dalam wilayah Kota Cirebon.

Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir, mulai berkembang transportasi berbasis aplikasi online untuk kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Meski belum diperoleh angka pasti untuk jumlah kendaraan yang beroperasi berdasarkan aplikasi online, namun keberadaannya diyakini telah berkontribusi terhadap peningkatan jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Kota Cirebon.

Upaya perbaikan layanan transportasi massal di Kota Cirebon telah mulai dilakukan melalui layanan BRT. Meski di awal kehadirannya terdapat kecenderungan kenaikan jumlah pengguna, namun perkembangan jumlah penumpang pada semester awal tahun 2021 masih fluktuatif. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh kebijakan tarif serta adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun, keberadaan layanan BRT diyakini dapat meningkatkan kenyamanan mobilitas warga di Kota Cirebon sehingga dengan sendirinya dapat berkontribusi pada upaya peningkatan daya saing kota. Layanan angkutan umum masih memiliki performa yang rendah, namun keberadaan BRT diharapkan dapat memberikan nilai lebih pada layanan transportasi umum di masa depan.

¹¹ Kota Cirebon dalam Angka 2021 , Badan Pusat Statistik Kota Cirebon 2021

2.3.4.6 Akses Terhadap Listrik

Jumlah pelanggan listrik di Kota Cirebon dihitung berdasarkan 6 kategorisasi yang meliputi Sosial, Rumah Tangga, Bisnis, Industri, Gedung Pemerintahan, Penerangan Jalan Umum disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II-41 Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Cirebon

Kategori	2020	2021	2022
Sosial	2.490	2.613	2.613
Rumah Tangga	105.349	109.114	109.114
Bisnis	11.340	12.107	12.107
Industri	142	140	140
Gedung Pemerintahan	709	410	410
Penerangan Jalan Umum	57	68	68

Sumber: BPS 2024

Jumlah pelanggan listrik terbesar di tahun 2020-2022 terdapat pada sektor Rumah Tangga dan terkecil pada sektor Penerangan Jalan Umum. Penggunaan konsumsi listrik rumah tangga meningkat cukup tinggi pada tahun 2021-2022 dikarenakan pandemi Covid-19.

2.3.4.7 Akses Terhadap Telepon

Pada tahun 2019 persentase penduduk yang menggunakan ponsel mencapai 83,64 persen ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk telah terhubung dengan teknologi komunikasi mobile yang mencerminkan tingginya penetrasi perangkat seluler di masyarakat. Namun pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan dalam persentase pengguna ponsel menjadi 83,56 persen. Meskipun penurunannya sangat kecil hanya 0,08 persen ini dapat mengindikasikan beberapa hal, salah satu kemungkinan adalah adanya saturasi pasar, dimana hampir semua orang yang membutuhkan dan mampu sudah memilikinya, sehingga pertumbuhan pengguna baru melambat, faktor lain termasuk dampak ekonomi yang disebabkan oleh situasi global yang mungkin mempengaruhi daya beli sebagian masyarakat.

Tabel II-42 Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon di Kota Cirebon

Kategori	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	80,68	83,64	83,56	84,53	82,83	81,95

Sumber: BPS 2024

2.3.4.8 Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

2.3.4.8.1 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tangga dikatakan memiliki sanitasi layak apabila memiliki fasilitas tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan dan dilengkapi dengan SPAL (Sistem Pengolahan Air Limbah) serta sarana lainnya antara lain ventilasi, suhu, kelembaban, kepadatan hunian, penerangan alami, konstruksi bangunan, sarana pembuangan sampah, sarana pembuangan kotoran manusia, dan penyediaan air bersih. Data dalam Kota Cirebon Dalam Angka untuk kondisi rumah yang memiliki sanitasi berjumlah 85.480 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 98.662 pada tahun 2021. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan pada tahun 2022 sebesar 86,7%. Persentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2023 sebesar 90,4%. Proporsi populasi penduduk yang memiliki akses

terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan pada tahun 2021 sebesar 98,662%.

Gambar II-75 Capaian SPM Air Limbah



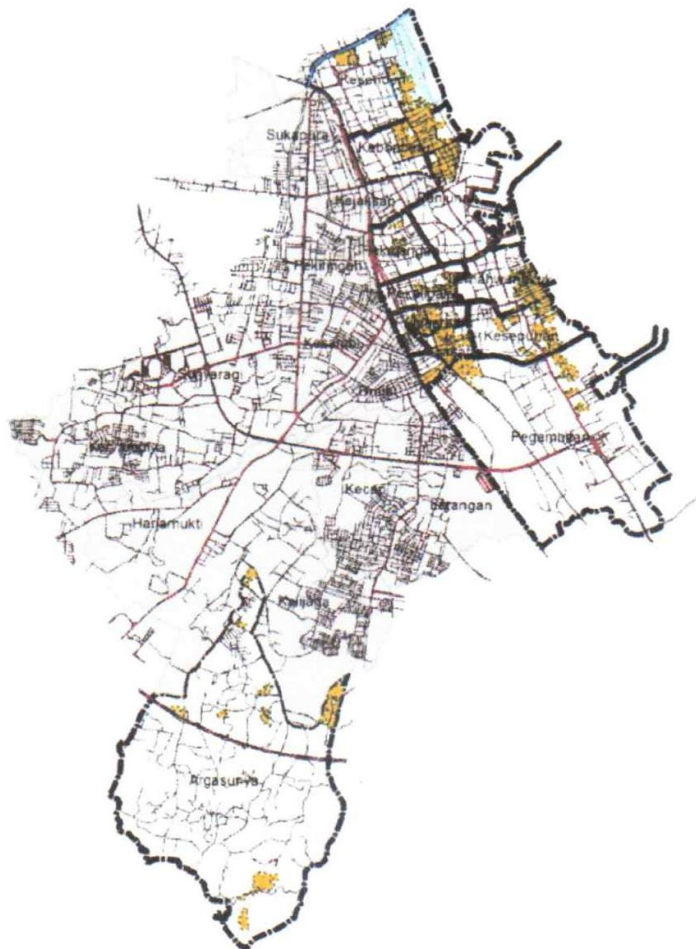
Sumber: DPUTR Kota Cirebon 2023

A. Luas Kawasan Kumuh yang ditangani

Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Sebaran kawasan kumuh yang dapat dijelaskan dengan peta skala kota, kecamatan, kelurahan, dan lingkungan. Kawasan permukiman kumuh dianggap sebagai penyakit kota yang harus diatasi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelola kota akan menentukan kualitas permukiman yang terwujud.

Berdasarkan data jumlah luas kawasan kumuh berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 663/Kep.421-DPRKP/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Cirebon terdapat di 11 (sebelas) Kelurahan pada 4 (empat) Kecamatan dengan luas total sebesar 195,572 Ha atau 4,96% dari total luas 3.946,6 dengan jumlah rumah terdata sebesar 13.010 unit bangunan.

Gambar II-76 Peta sebaran lokasi kumuh dan permukiman di Kota Cirebon



Sumber : Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 663/Kep.421-DPRKP/2021

Performa aspek infrastruktur atau fasilitas wilayah merupakan salah satu aspek yang terlihat jelas dalam pembangunan fisik kota. Terlebih eksisting Kota Cirebon sebagai wilayah perkotaan yang memiliki visi kota perdagangan dan jasa, tentunya perlu ditunjang oleh kinerja infrastruktur yg baik. Keberadaan fasilitas wilayah/infrastruktur diyakini dapat meningkatkan daya tarik dunia usaha untuk turut menghidupkan iklim investasi di Kota Cirebon, yang dengan sendirinya dapat mendongkrak daya saing Kota Cirebon.

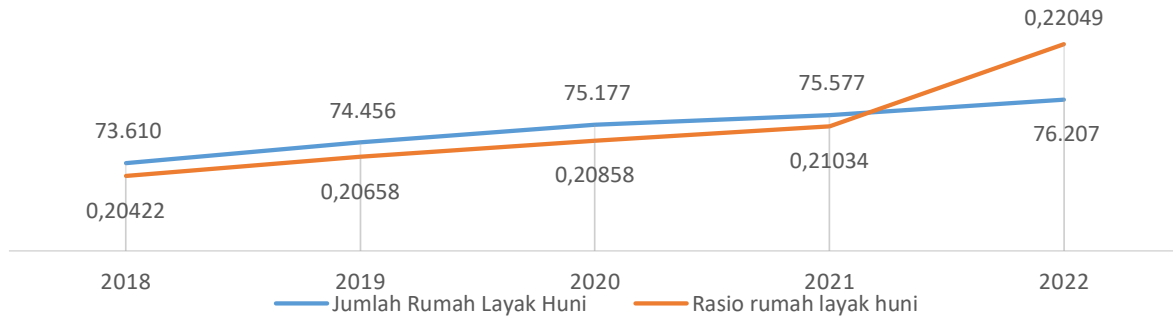
B. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni yang ada di Kota Cirebon terhadap jumlah penduduk Kota Cirebon, dalam satuan persen. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni, dengan kriteria sebagai berikut:

- Keselamatan bangunan Persyaratan keselamatan bangunan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non struktur bangunan. Komponen struktur meliputi pondasi, sloof, kolom, balok, dan rangka atap. Komponen non struktur bangunan meliputi lantai, dinding, kusen dan daun pintu serta jendela, dan penutup atap.
- Kesehatan penghuni Persyaratan kesehatan penghuni meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana sirkulasi udara, pencahayaan, akses sanitasi layak, dan akses air minum layak. Sarana sirkulasi udara minimal 5% dari luas lantai bangunan berupa bukaan jendela dengan memperhatikan sirkulasi udara. Sarana pencahayaan minimal 10% dari luas lantai bangunan dengan memperhatikan sinar matahari. Akses sanitasi layak meliputi bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus beserta septic tank yang layak, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor, dan sistem pembuangan air limbah. Akses air minum layak meliputi pemenuhan akses air minum yang terkoneksi dengan sistem sanitasi di dalam bangunan.
- Kecukupan minimum luas bangunan Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan hunian. Kecukupan minimum luas per orang dihitung 9 meter² dengan tinggi ruang minimal 2,8 meter. Pemenuhan luasan rumah memperhatikan ketersediaan lahan dan kemampuan berswadaya.

Semakin tinggi rasio rumah layak huni menunjukkan semakin berhasil pemerintah/pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak. Jika rasio rumah layak huni bernilai 0,2 artinya untuk setiap 5 (lima) orang penduduk Kota Cirebon, tersedia 1 (satu) unit rumah layak huni. Jika rasio rumah layak huni bernilai 0,25 artinya untuk setiap 4 (empat) orang penduduk Kota Cirebon, tersedia 1 (satu) unit rumah layak huni.

Gambar II-77 Rumah Layak Huni di Kota Cirebon



Sumber: Open data Cirebon, 2023

Berdasarkan data jumlah rumah sebesar 81.388, proporsi jumlah layak huni adalah sebesar 76.207 rumah atau sebesar 93,63% dan proporsi jumlah rumah tidak layak huni sebesar 5.181 rumah atau sebesar 6,37%

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar, seperti telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik harus sesuai dengan asas-asas dengan kemampuan sumber daya yang ada Dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu, pemerintah daerah didukung dengan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan sehingga sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Hasil yang diperoleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon tercermin dalam penilaian yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir khususnya untuk pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah Kota Cirebon mendapatkan penilaian audit BPK Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2016 hingga tahun 2023. Sedangkan untuk penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Cirebon semakin baik, hasil penilaian terakhir pada tahun 2023 sebesar 79,06 dengan kategori BB (Sangat Baik).

2.4.1 Merit System

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN dan Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, standar penilaian penerapan sistem merit pada Instansi Pemerintah menggunakan indikator Indeks Sistem Merit. Aspek pengukuran sistem merit melalui penilaian dengan pembobotan:

1. Perencanaan kebutuhan 10%;
 2. Pengadaan 10%;
 3. Pengembangan karier 30%;
 4. Promosi dan mutasi 10%;
 5. Manajemen kinerja 20%;
 6. Penggajian, penghargaan dan disiplin 10%;
 7. Perlindungan dan pelayanan 4%; dan
 8. Sistem informasi 6%.
- Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit yaitu:
 - Kategori IV nilai 325-400 (Sangat Baik);

- Kategori III nilai 250-324 (Baik);
- Kategori II nilai 175-249 (Kurang); dan
- Kategori I nilai 100-174 (Buruk).

Penilaian secara mandiri yang dilakukan untuk periode 01 Februari 2023 hingga 31 Desember 2023 dengan total nilai sebesar 330, walaupun hasil Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 126/KEP.KASN/C.XI/2023 menetapkan Pemerintah Kota Cirebon berada pada Kategori III (Baik) dengan Nilai 275,5 dan Indeks Sistem Merit sebesar 0,67 dengan rekomendasi perbaikan untuk ke 8 (delapan) penilaian.

2.4.2 Reformasi Birokrasi

Melalui Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2023-2026 sebagai kelanjutan dari Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2020-2023, Road Map Reformasi Birokrasi merupakan alat bantu Kota Cirebon untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dengan membentuk aparatur negara yang profesional. Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya birokrasi yang kapabel, pelayanan publik yang prima, pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Reformasi Birokrasi di Kota Cirebon ditekankan pada percepatan implementasi peraturan, kebijakan dan praktik serta dengan dukungan pimpinan dan seluruh ASN yang tidak melakukan resistensi dan kecepatan adaptasi terhadap kebijakan pemerintah pusat, Reformasi Birokrasi di Kota Cirebon cukup berkembang. Hal tersebut ditandai dengan Indeks reformasi Birokrasi Kota Cirebon mengalami kenaikan berturut-turut dalam periode 2020-2023.

Tabel II-43 Indeks Reformasi Birokrasi

No	Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Cirebon	60,86	62,84	63,53	66,57	73,91

Sumber : Kemen PAN-RB, 2023

Sementara untuk tahun 2023, terjadi perubahan metode penilaian sehingga nilainya tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi secara keseluruhan, perjalanan Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cirebon dari tahun 2020 hingga 2023 mencerminkan komitmen pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi Birokrasi Kota Cirebon Tahun 2023-2026 memiliki slogan Reformasi Birokrasi BerAKHLAK sebagai bentuk public campaign dalam menginternalisasi nilai-nilai Reformasi Birokrasi yang sinergis dengan nilai utamanya Ber-AKHLAK. Pemerintah Daerah Kota Cirebon akan terus berusaha dan memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun lebih mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

2.4.3 Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota

Cirebon, yang termasuk dalam Pelayanan Publik berupa Pelayanan Barang Publik, Pelayanan Jasa Publik dan Pelayanan Administratif. Hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 oleh Ombudsman Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Kota Cirebon mendapatkan nilai 96,28 yang termasuk dalam kategori A (Kualitas Tinggi). Sedangkan pada tahun sebelumnya mendapatkan nilai 74,06 yang termasuk dalam kategori C (Kualitas Sedang).

Keputusan Menteri PAN-RB RI Nomor 795 tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023, Kota Cirebon mendapatkan hasil penilaian rata-rata sebesar 3,78 pada 3 (tiga) unit lokasi evaluasi yaitu: 1. Kecamatan Kejaksan dengan nilai sebesar 2,86; 2. Dinas Sosial dengan nilai sebesar 4,48; dan 3. RSD Gunung Jati dengan nilai sebesar 4,01. Berikut indeks pelayanan publik kota Cirebon berdasarkan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik lingkup Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Secara keseluruhan, perjalanan Indeks Pelayanan Publik Kota Cirebon dari tahun 2021 hingga 2023 mencerminkan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun telah terjadi peningkatan yang signifikan, terus ada upaya untuk terus meningkatkan layanan publik agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat Kota Cirebon.

Tabel II-44 Indeks Layanan Publik Kota Cirebon

Indeks Pelayanan Publik	2021	2022	2023
Indeks	3,14	3,43	3,78
Predikat	B-	B-	B

Sumber : Kementerian PAN-RB

Berdasarkan hasil kedua institusi tersebut, Pelayanan Publik di Kota Cirebon masih dapat ditingkatkan lebih optimal khususnya untuk unit layanan yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pelayanan kepada masyarakat telah memiliki Standar Pelayanan Minimal dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria untuk masing-masing urusan. Untuk itu perbaikan yang akan dilakukan adalah menyesuaikan standar baku yang berlaku untuk sektor yang masih rendah penilaiannya.

2.4.4 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah data dan menghasilkan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.

Pada era keterbukaan informasi masyarakat bisa dengan mudah mengakses kebutuhan informasi yang bersifat informasi publik hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Penerapan SPBE yang terpadu dan peningkatan kualitas layanan SPBE dapat memudahkan pengguna dalam mengakses layanan pemerintah.

Tabel II-45 Indeks SPBE Kota Cirebon

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks SPBE	2,26	2,27	3,02	2,83	3,17	3,57
Predikat	baik	baik	baik	baik	baik	Sangat baik

Sumber: DKIS Kota Cirebon, 2023

Kota Cirebon pada tahun 2020 indeks SPBE mengalami peningkatan menjadi 3,02 dari tahun sebelumnya 2,27, namun pada tahun 2021 karena adanya indikator penilaian baru indeks SPBE Kota Cirebon mengalami penurunan menjadi 2,83. Tingkat pelaksanaan SPBE yang konsisten dan menyeluruh, menghasilkan peningkatan Indeks SPBE Kota Cirebon menjadi 3,57 dengan predikat Sangat Baik pada tahun 2023.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif, serta meningkatkan transparansi dan responsivitas pemerintah. Penerapan SPBE telah mulai dilakukan sejak 2019, dan implementasinya terus bertahap. Kota Cirebon terus berupaya meningkatkan penerapan SPBE dengan menerbitkan regulasi terkait penyelenggaraan SPBE.

2.4.5 Inovasi Daerah

Inovasi merupakan kunci keberhasilan dalam membangun daerah yang maju dan berdaya saing. Inovasi juga digunakan sebagai alat untuk menunjukkan suatu kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indeks Inovasi Daerah yang diraih Kota Cirebon berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2020 dengan menggunakan metode lama sebesar 1.164 yang merupakan kategori sangat inovatif. Sedangkan tahun 2021, nilai Indeks Inovasi Daerah sebesar 43,47 dengan kategori inovatif, tahun 2022 sebesar 41,41 dengan kategori inovatif dan tahun 2023 sebesar 42,46 dengan kategori inovatif.

Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) untuk tingkat provinsi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah mengikuti KIJB pada periode 2022-2023 dengan capaian 45 besar. Dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan, Kota Cirebon dapat terus berkembang dengan inovasi yang terus meningkat.

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Evaluasi Dokumen RPJPD Kota Cirebon Tahun 2005-2025 merupakan dasar penyusunan dokumen RPJPD untuk periode 2025-2045. Capaian pembangunan Kota Cirebon tahun 2005-2025 dilakukan dengan melihat pertumbuhan capaian kinerja awal periode perencanaan dan capaian pada tahun pelaksanaan evaluasi (tahun 2022). Pencapaian pembangunan Kota Cirebon ini tidak terlepas dari arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Kota Cirebon tahun 2005-2025 yang kemudian diterjemahkan dalam pembangunan 5 tahunan pada dokumen RPJMD dan dokumen tahunan pada dokumen RKPD. Adapun dinamika berbagai permasalahan dan tantangan yang terjadi dalam proses pencapaian target pembangunan ini menjadi masukan dalam penyusunan dokumen RPJPD selanjutnya.

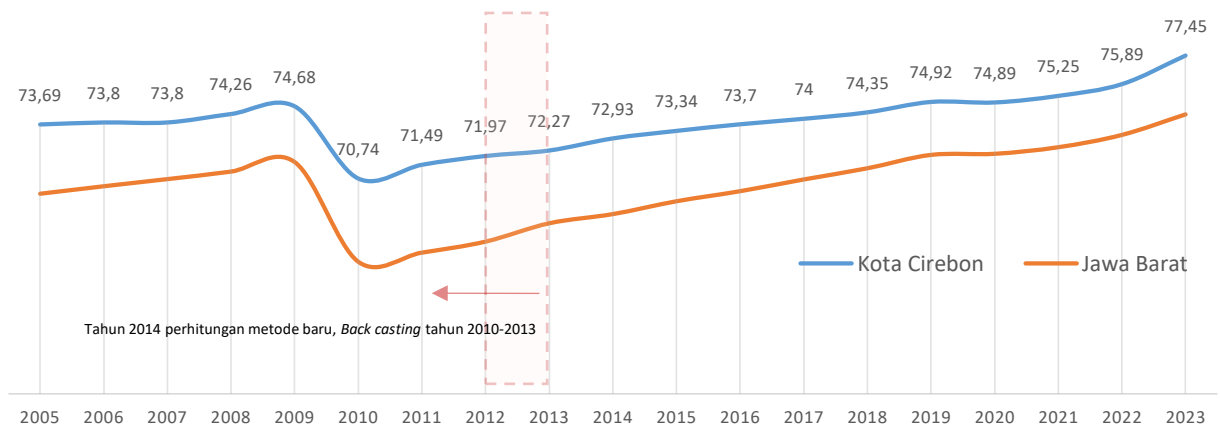
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Cirebon Tahun 2005-2025, disampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan penyusunan RPJPD periode 2025-2045 antara lain :

1. Memperhatikan keselarasan dokumen perencanaan jangka panjang nasional dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota sekitar;
2. Memperhatikan isu strategis internasional/global, nasional dan daerah terkait dengan pembangunan berkelanjutan;
3. Menampilkan sasaran pokok yang bersifat kuantitatif sehingga dapat menggunakan indikator yang dapat diukur serta berkesinambungan;
4. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan disesuaikan dengan potensi unggulan Kota Cirebon;
5. Tetap mempertahankan sektor perdagangan dan jasa, sebagai potensi ekonomi utama yang perlu terus dikembangkan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
6. Perlu memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan pariwisata dan industri kreatif;
7. Mengembangkan pelayanan publik dan kemudahan perizinan yang terintegrasi sebagai komitmen Cirebon Smart City;
8. Perlu memberikan perhatian penuh terhadap penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pembangunan;
9. Peningkatan kualitas manajemen data dan informasi pembangunan;
10. Peningkatan keamanan dan ketertiban yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

2.5.1 Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2014, BPS secara resmi menghitung IPM dengan metode baru. Untuk menjaga kesinambungan series angka IPM metode baru, maka dilakukan *back casting* IPM tahun 2010 sampai 2013. Indikator angka melek huruf dan gabungan angka partisipasi kasar diganti dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Indikator PDB per kapita juga diganti dengan Pengeluaran per kapita. Sehingga adanya kemungkinan perubahan nilai yang cukup signifikan pada nilai IPM pada tahun 2010 sampai 2014.

Gambar II-78 IPM Provinsi Jawa Barat dan Kota Cirebon



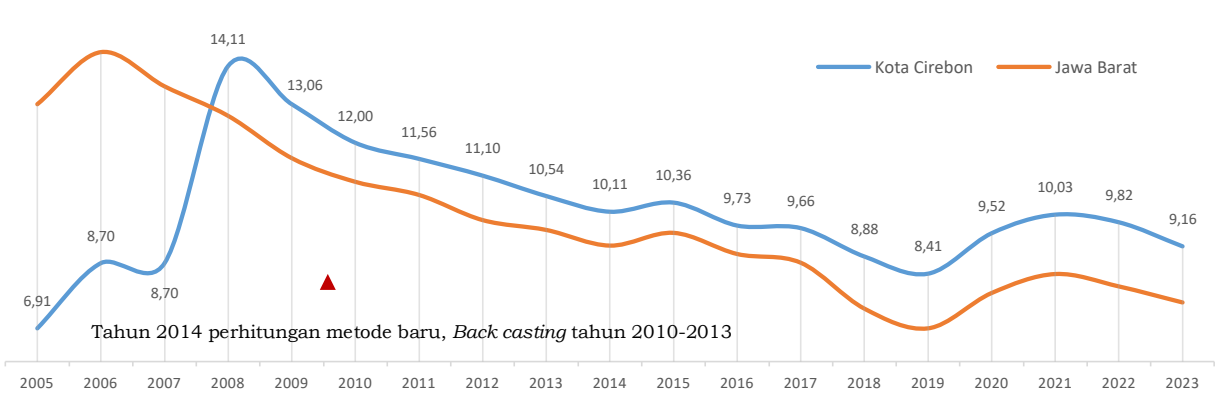
Sumber: BPS Jawa Barat dan Kota Cirebon 2024

Pembangunan manusia Kota Cirebon terus mengalami peningkatan. Selama periode 2005-2023, IPM Kota Cirebon telah tumbuh 3,76 %, dari 73,69 poin di tahun 2005 menjadi 77,45 poin di tahun 2023. Nilai IPM Kota Cirebon berada di atas Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2005-2023. Kemajuan ini masih menempatkan Kota Cirebon pada level pembangunan manusia pada kategori “Tinggi”. Kota Cirebon berhasil mempertahankan status pencapaian IPM dan diharapkan akan terus meningkat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

2.5.2 Kemiskinan

BPS dalam mengukur angka kemiskinan menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Berdasarkan perbandingan data tahun 2005 dan tahun 2023 proporsi penduduk miskin Kota Cirebon menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,25 % dengan angka kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu 14,11 %. Tahun 2008 sampai dengan 2019 proporsi penduduk miskin Kota Cirebon mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan angka terendah pada tahun 2019 yaitu 8,41 %. Angka tersebut kembali meningkat pada tahun 2020 dan 2021 diakibatkan pandemi Covid-19 Pemulihan dampak dari pandemi mulai dirasakan pada tahun 2022.

Gambar II-79 Proporsi Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat dan Kota Cirebon



Sumber: BPS 2024

Secara umum proporsi penduduk miskin di Kota Cirebon lebih tinggi dari penduduk miskin provinsi jawa Barat dalam kurun waktu 2008-2022. Terjadi peningkatan nilai proporsi penduduk miskin pada tahun 2006-2008 akibat

pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak pada kenaikan harga yang cukup signifikan. Kenaikan harga BBM ini tentunya berdampak pada tingginya harga kebutuhan pokok dan mengakibatkan terjadinya inflasi. Intervensi pemerintah pada periode tersebut adalah dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Intervensi tersebut belum mampu menurunkan harga kebutuhan pokok dimana Garis Kemiskinan terus meningkat namun cukup mampu menurunkan angka kemiskinan di Kota Cirebon.

2.5.3 Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Kondisi ketenagakerjaan di Kota Cirebon periode tahun 2005-2023 mengalami angka yang fluktuatif. Angka pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2012 (12,71 %) dan paling rendah tahun 2022 (8,42%). Selisih nilai TPT antara tahun 2005 (12,61%) dengan 2022 yaitu 33,23%. Penurunan pengangguran dan penyerapan tenaga kerja Kota Cirebon masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat. Perubahan struktur perekonomian Kota Cirebon periode tahun 2005-2023 belum sepenuhnya diimbangi dengan pergeseran struktur tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa laju pergeseran tenaga kerja relatif lebih lambat dibanding laju pergeseran ekonomi sektoral.

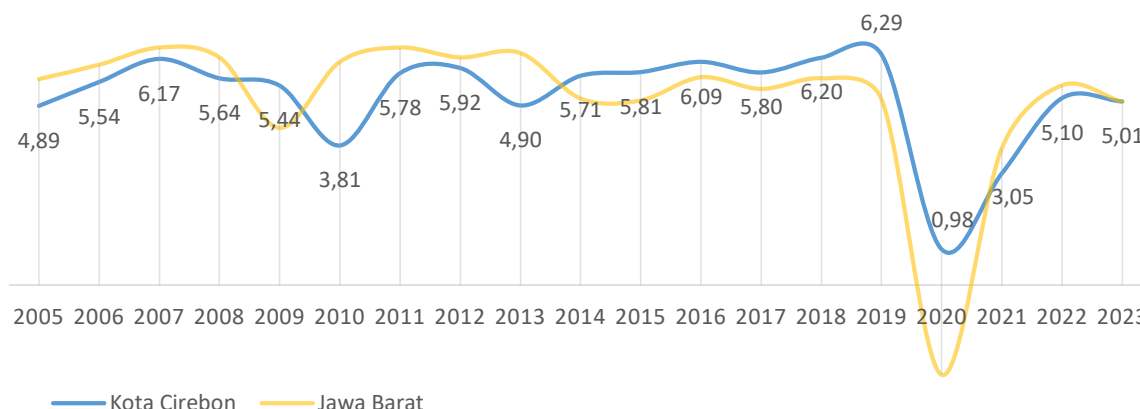
Selama periode 2005-2023 beberapa hal mempengaruhi perkembangan kondisi ketenagakerjaan khususnya angka pengangguran yaitu (1) pemutusan hubungan kerja (PHK) atau penyerapan tenaga kerja yang tidak maksimal pada periode 2009 ke 2012 dan masa pandemi tahun 2019 ke 2021; (2) perkembangan jumlah UMKM yang terdata signifikan dari tahun 2005, hal ini diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja; dan (3) penanaman modal dan investasi sangat erat berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja di Kota Cirebon. Selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2022 jumlah perusahaan besar, menengah, dan kecil berkurang dari 1.034 perusahaan menjadi 520 perusahaan. Jika dilihat dari perbandingan antara jumlah UMKM dan jumlah tenaga kerja yang terserap dapat dilihat bahwa UMKM dapat menyerap tenaga kerja. UMKM di Kota Cirebon saat ini tidak mengandalkan padat karya lagi tetapi lebih berorientasi pada keterampilan (*skill*) dan pemanfaatan teknologi serta mesin. Adapun minimnya laju investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kota Cirebon ini berkaitan erat dengan perkembangan kondisi iklim investasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti keterbatasan lahan, kemudahan regulasi, perizinan investasi, kondisi ekonomi makro, kondisi keamanan dan ketertiban umum, dan kondisi sosial masyarakat.

2.5.4 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur perubahan dalam produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah dalam periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi daerah yang tumbuh positif dapat menunjukkan bahwa suatu daerah sedang berkembang

dan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang baik di suatu daerah juga dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.

Gambar II-80 LPE Provinsi Jawa Barat dan Kota Cirebon

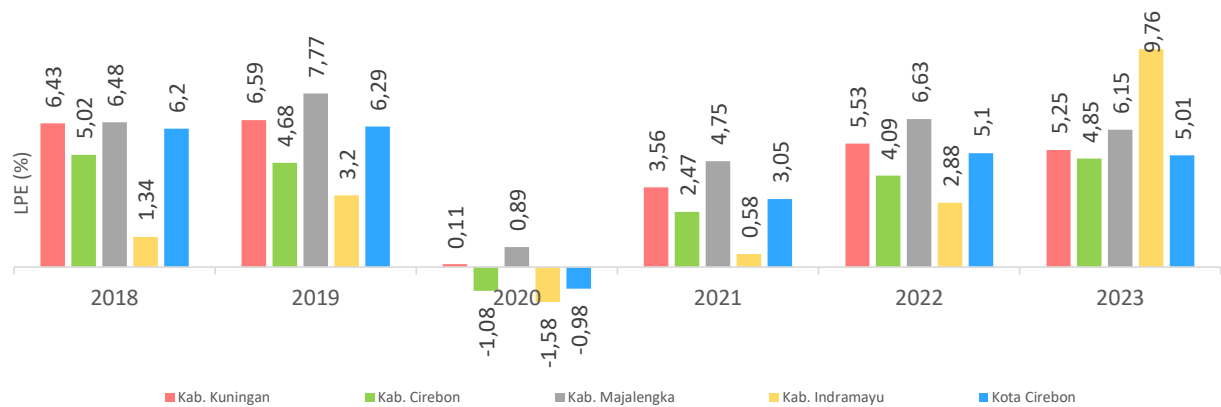


Sumber: BPS 2024

Dalam kurun waktu periode tahun 2005-2023, kecenderungan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Cirebon menunjukkan nilai yang fluktuatif. Perkembangan LPE pada periode 2005-2013 menunjukkan bahwa nilai LPE Kota Cirebon masih di bawah Jawa Barat. Selanjutnya pada periode 2014 hingga 2019 perekonomian Kota Cirebon tumbuh cepat dan mampu melampaui perekonomian di Jawa Barat dengan rata-rata LPE Kota Cirebon sebesar 5,98 % dan Jawa Barat sebesar 5,31 %. Selain itu, pada tahun 2019 juga menjadi pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon tertinggi selama 17 tahun terakhir sebesar 6,29 %. Pada tahun 2020, dampak pandemi Covid-19 perekonomian di Kota Cirebon mengalami kontraksi hingga menyentuh angka -0,98 %. Namun pada masa pemulihan perekonomian pandemi, Kota Cirebon menunjukkan pertumbuhan positif secara signifikan pada tahun 2022 dengan LPE mencapai 5,10 %.

Pertumbuhan ekonomi kota Cirebon searah dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon sebelum terjadinya pandemi covid-19 berada di atas Provinsi Jawa Barat dan Nasional begitupun disaat hantaman covid-19 terjadi, kontraksi pertumbuhan ekonomi kota Cirebon terbilang rendah bila dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pemulihan perekonomian Kota Cirebon pasca pandemi covid-19 terlihat masih berada dibawah provinsi Jawa Barat dan Nasional hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi kota Cirebon pasca pandemi covid-19 berada di bawah provinsi Jawa Barat maupun Nasional dan belum mampu mengejar pertumbuhan ekonomi sebelum terjadinya pandemi covid-19 dilihat dari rata-rata LPE tahun 2013-2019 sebesar 5,83%. Posisi LPE yang belum mampu menembus angka rata-rata menjadi hal yang sangat penting untuk diantisipasi karena menunjukkan masih terdapat pelemahan untuk pencapaian LPE tahun selanjutnya. Hal ini dibuktikan dengan capaian LPE tahun 2023 menurun menjadi sebesar 5,01%. Angka ini hampir menyentuh angka LPE tahun 2013 yang sebesar 4,90%.

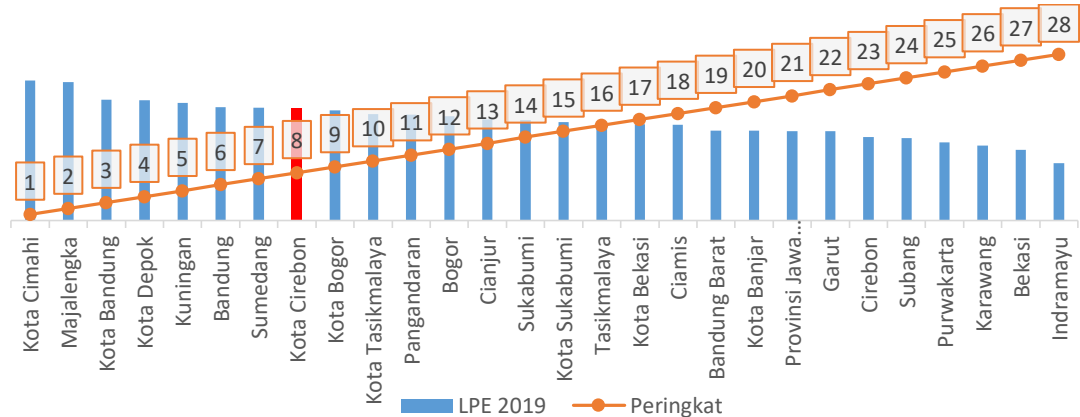
Gambar II-81 LPE Wilayah Ciayumajakuning



Sumber: BPS 2024

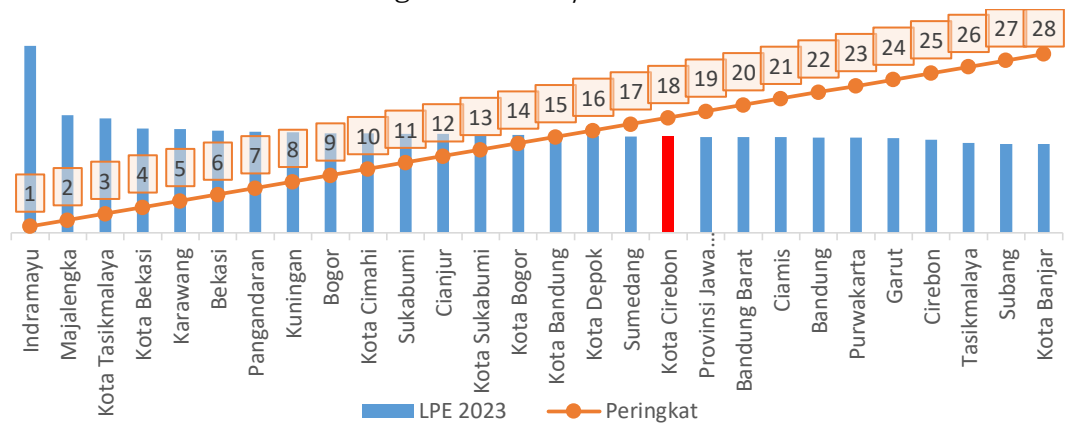
Roda perekonomian di wilayah Ciayumajakuning kembali menunjukkan geliatnya, hal ini dapat dilihat dari bervariasinya perkembangan LPE di Kabupaten/Kota wilayah Ciayumajakuning. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan ini ada pada Kabupaten Majalengka, sedangkan kota Cirebon berada di urutan ketiga setelah kabupaten Kuningan. Disaat pandemi covid-19 terjadi di tahun 2020, hanya kabupaten Kuningan dan kabupaten Majalengka yang mampu bertahan dengan laju pertumbuhan positif, sementara tiga Kabupaten/Kota lainnya termasuk Kota Cirebon berkontraksi negatif. Seiring pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, geliat ekonomi di wilayah ini mulai terlihat tumbuh positif semua, dengan laju tertinggi masih diduduki oleh kabupaten Majalengka, sementara Kota Cirebon berada di urutan ketiga dengan angka 3,04%. Meskipun LPE Kabupaten Majalengka Tahun 2021 paling tinggi dibandingkan daerah lain di wilayah Ciayumajakuning, akan tetapi kenaikan LPE tertinggi diraih Kota Cirebon, yaitu dari -0,99% menjadi 3,04%, atau naik sebesar 4,03%. Kondisi ini dimungkinkan dengan meredanya pandemi covid-19, penghentian kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sehingga roda perekonomian kembali menuju normal dan diharapkan ekonomi di kota Cirebon mampu melaju dengan kecepatan seperti sebelum terjadinya pandemi covid-19 yang mencapai angka 6% atau lebih. Pencapaian LPE kota Cirebon tahun 2023 dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat berada di peringkat ke 18 (delapan belas). Bila dibandingkan dengan peringkat sebelum terjadinya pandemi covid-19, LPE kota Cirebon mengalami penurunan dari sebelumnya di tahun 2019 berhasil menduduki peringkat ke 8 (delapan) dari kabupaten/kota se Jawa Barat.

Gambar II-82 Perbandingan LPE Kab./Kota di Jawa Barat Tahun 2019



Sumber : BPS 2024

Gambar II-83 Perbandingan LPE Kab./Kota di Jawa Barat Tahun 2023



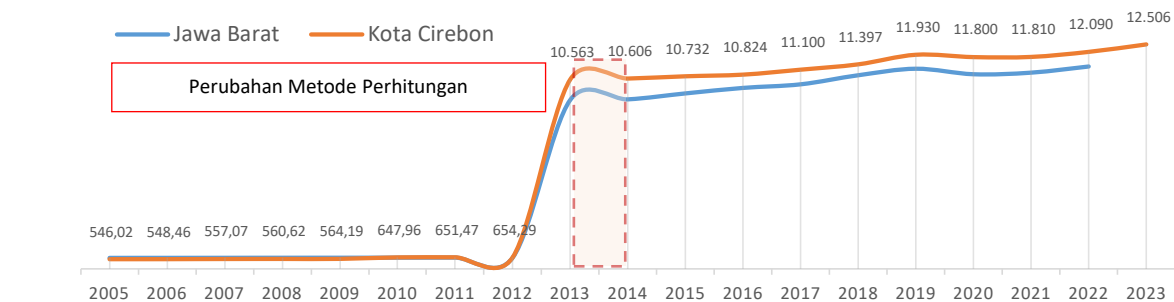
Sumber : BPS 2024

2.5.4.1 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan merupakan nilai yang dapat menunjukkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang dan jasa (daya beli). Maka semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat dapat menunjukkan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang berarti semakin rendah kemampuan masyarakat membeli suatu barang atau jasa. Ada perubahan pada penghitungan paritas daya beli (*purchasing power parity*) yang digunakan. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam penghitungan, sementara pada metode baru terdapat 96 komoditas yang digunakan. Hal ini dilakukan karena selama 1990 hingga 2014 telah terjadi banyak perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga komoditas penghitungan paritas daya beli juga harus diperbarui.

Dalam kurun waktu tahun 2005 sampai 2022, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kota Cirebon terus meningkat dari Tahun 2005 sebesar Rp 546,02 ribu rupiah per kapita menjadi Rp 12.090,00 ribu rupiah per kapita pada tahun 2022. Adapun pada tahun 2013 terjadi perubahan yang signifikan dikarenakan metode baru penghitungan yang dilakukan BPS. Berdasarkan metode lama, pada periode 2005 sampai 2012 rata-rata pengeluaran per kapita mencapai Rp 591,26 ribu rupiah per kapita artinya pada periode tersebut rata-rata pengeluaran harian per kapita masyarakat Kota Cirebon adalah Rp 1.620 rupiah. Capaian pengeluaran per kapita dengan metode baru pada sejak tahun 2013 sampai dengan 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Rata-rata pengeluaran per kapita pada kurun waktu tersebut mencapai Rp. 11.283,20 ribu rupiah per kapita. Artinya rata-rata pengeluaran harian penduduk Kota Cirebon pada periode 2013 sampai dengan 2022 mencapai Rp. 30.920 rupiah per hari. Adapun pandemi Covid-19 juga memberikan dampak pada penurunan pengeluaran penduduk pada tahun 2020, lalu mulai kembali pulih pada tahun 2021.

Gambar II-84 Pengeluaran Per Kapita Provinsi Jawa Barat dan Kota Cirebon



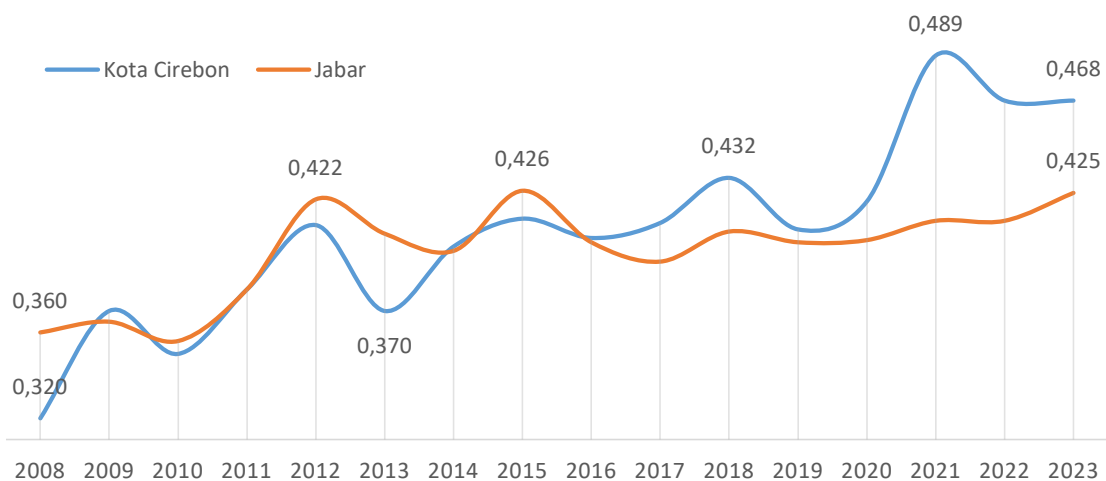
Sumber: BPS 2024

2.5.4.2 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan sebuah kondisi dimana distribusi pendapatan diterima masyarakat tidak merata. Kondisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan modal penghidupan masyarakat. Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah dengan indeks gini (*gini ratio*). Indeks Gini dapat mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan penduduk di Kota Cirebon termasuk kategori sedang. Kondisi demikian memerlukan strategi pengembangan perekonomian yang tepat. Indeks gini mendekati angka 0 (nol) menunjukkan pemerataan sempurna sedangkan mendekati angka 1 (satu) menunjukkan ketidakmerataan sempurna.

Gini rasio tertinggi di Kota Cirebon terjadi pada tahun 2021 yaitu 0,489 sedangkan nilai paling terendah pada tahun 2008 dengan nilai 0,320. Kenaikan indeks gini pada tahun 2019 sampai 2021 merupakan dampak dari pandemi covid-19. Hal tersebut juga sejalan dengan peningkatan angka kemiskinan, pengangguran, dan penurunan pengeluaran masyarakat. Adapun kecenderungan indeks gini Kota Cirebon masih berada di atas Jawa Barat, artinya tidak meratanya distribusi pendapatan di Kota Cirebon masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat.

Gambar II-85 Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Kota Cirebon



Sumber: BPS 2024

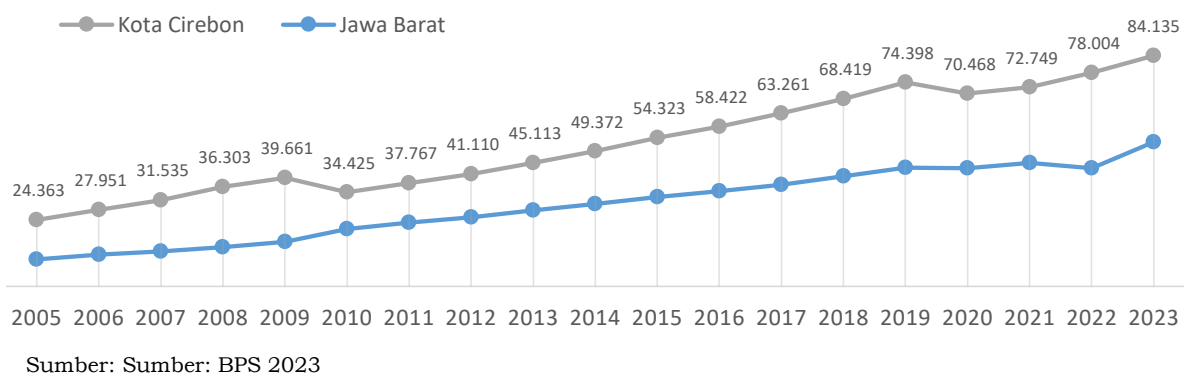
2.5.4.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita digunakan untuk menggambarkan kemakmuran walaupun nilai tersebut sangat dipengaruhi oleh transaksi pasar seperti inflasi. PDRB per kapita akan lebih tepat bila digunakan untuk menggambarkan ukuran produktivitas. Angka ini memberikan gambaran seberapa besar

kontribusi tiap orang (per kapita) terhadap pembentukan PDRB Kota Cirebon. Besaran PDRB per kapita diukur melalui PDRB atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk. Kendati demikian peningkatan PDRB per kapita di bawah ini belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Cirebon secara umum.

Seiring dengan penciptaan nilai tambah dan peningkatan jumlah penduduk, nilai PDRB per kapita Kota Cirebon turut mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2005 tercatat PDRB per kapita Kota Cirebon sebesar Rp 24,363 juta per kapita lalu tahun 2022 tercatat sebesar Rp. 78,004 ribu. Pertumbuhan PDB per kapita dalam 20 tahun terakhir berkisar 3-4 %. Adanya penurunan PDRB per kapita pada tahun 2010 dan 2020 dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional dan global. Sebagaimana Kota Cirebon dengan lapangan usaha paling besar pada sektor perdagangan dan industri pengolahan. Adapun rata-rata PDRB per kapita Kota Cirebon pada kurun waktu 2005 sampai 2022 sebesar Rp 50,425 juta rupiah per kapita berada di atas Provinsi Jawa Barat.

Gambar II-86 PDRB Per Kapita Jawa Barat dan Kota Cirebon



2.5.5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Cirebon

Berdasarkan hasil dari analisis keterkaitan terdapat 210 indikator TPB yang relevan terhadap Kota Cirebon. Indikator TPB tersebut dibagi ke dalam 4 kategori yaitu :

- 1. Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)
- 2. Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB)
- 3. Tidak memiliki data (NA)
- 4. Belum Dilaksanakan (BB)

Setiap indikator dalam tujuan TPB memiliki capaian yang berbeda-beda, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-46 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Cirebon

Tujuan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	SS	SB	NA	BB	Jumlah Indikator
1	Tanpa Kemiskinan	10	13	0	2	25
2	Tanpa Kelaparan	4	4	3	0	11
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	19	12	2	0	33
4	Pendidikan Berkualitas	9	3	1	0	13
5	Kesetaraan Gender	7	4	3	0	14
6	Air Bersih dan Sanitasi Berkelanjutan	5	4	4	1	14
7	Energi Bersih dan Terjangkau	0	0	2	0	2
8	Ekonomi dan Pekerjaan Yang Layak	7	5	6	1	19
9	Infrastruktur, industri dan inovasi	4	2	6	0	12

Tujuan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	SS	SB	NA	BB	Jumlah Indikator
10	Mengurangi Kesenjangan Antar Negara	0	3	2	1	6
11	Kota dan Permukiman yang Aman dan Berkelanjutan	7	5	2	0	14
12	Pola Produksi & Konsumsi Berkelanjutan	2	1	2	0	5
13	Mengatasi Perubahan Iklim	1	1	0	0	2
15	Menghentikan Kehilangan Kehati	0	1	2	1	4
16	Masyarakat yang Inklusif dan Damai	6	6	9	0	21
17	Sarana Revitalisasi Kemitraan Global	4	6	5	0	15
Total		85	70	49	6	210

Sumber : KLHS RPJPD 2025-2045

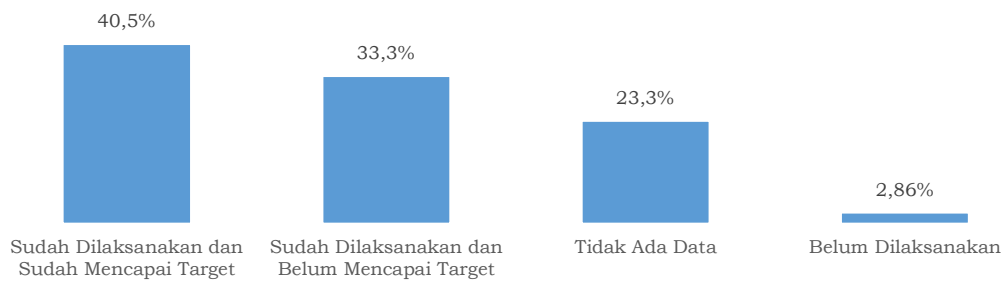
Catatan SS : Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
 SB : Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target
 NA : Tidak memiliki data
 BB : Belum Dilaksanakan
 SS : Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Jumlah indikator yang relevan dengan kondisi Kota Cirebon yaitu sebanyak 210 indikator, jumlah indikator yang sudah dilaksanakan sebanyak 85 indikator. TPB 3 merupakan TPB dengan jumlah indikator paling banyak yaitu 33 indikator, sedangkan paling sedikit yaitu TPB 13 dengan jumlah 2 indikator. Tingkat pencapaian indikator yang termasuk dalam kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS) yaitu TPB 3 yaitu sebanyak 19 indikator. Kategori sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB) memiliki sebanyak 70 indikator dan kategori tidak ada data (NA) sebanyak 49 indikator serta indicator belum dilaksanakan (BB) sebanyak 6 indikator.

Resume dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Cirebon berdasarkan hasil KLHS RPJPD 2025-2045 adalah sebagai berikut:

- 1. Capaian Pilar Sosial sebesar: SS 23,3%, SB 17,1%, NA 4,3%, BB 1,0% secara keseluruhan sebesar 45,7%.
- 2. Capaian Pilar Ekonomi sebesar: SS 7,1%, SB 7,6%, NA 10,0%, BB 1,0% secara keseluruhan sebesar 25,7%.
- 3. Capaian Pilar Lingkungan sebesar: SS 7,1%, SB 5,7%, NA 4,8%, BB 1,0% secara keseluruhan sebesar 18,6%.
- 4. Capaian Pilar Hukum dan Tata Kelola sebesar: SS 2,9%, SB 2,9%, NA 4,3%, BB 0% secara keseluruhan sebesar 10%.

Gambar II-87 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Cirebon



Sumber : KLHS RPJPD 2025-2045

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik yang wajib disediakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dapat diproyeksikan dengan mengacu pada pertumbuhan penduduk untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan. Berikut akan disajikan proyeksi perencanaan sarana prasarana pelayanan publik yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

2.6.1 Analisis proyeksi kependudukan

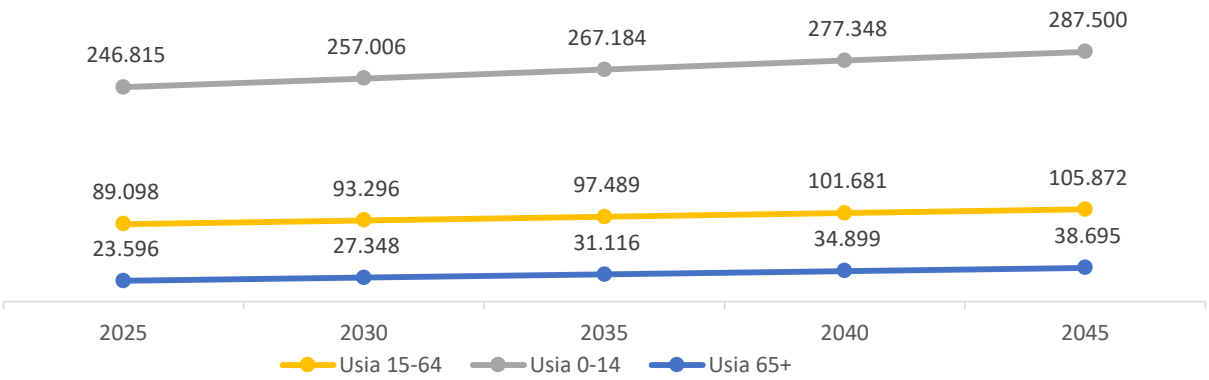
Perkembangan penduduk Kota Cirebon untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang akan meningkat cukup signifikan, jumlah penduduk pada tahun 2045 akan berjumlah 432,067 jiwa. Jumlah tersebut merupakan ±123 % dari jumlah pada tahun 2023 yaitu sebesar 352.347 jiwa. Namun proporsi kepadatan penduduk tidak terlalu banyak berubah, berikut ilustrasi proyeksi secara lengkap jumlah dan kepadatan penduduk Kota Cirebon per 5 (lima) tahun untuk setiap kecamatannya.

Tabel II-47 Proyeksi Jumlah (jiwa) dan Kepadatan (jiwa/km²) Penduduk per Kecamatan.

Kecamatan	Luas Wilayah Km²	Tahun 2025		Tahun 2030		Tahun 2035		Tahun 2040		Tahun 2045	
		Jumlah	Kepadatan	Jumlah	Kepadatan	Jumlah	Kepadatan	Jumlah	Kepadatan	Jumlah	Kepadatan
Kejaksan	4,44	52.310	11.782	54.950	12.376	57.589	12.970	60.228	13.565	62.868	14.159
Lemahwungkuk	7,19	62.314	8.667	65.459	9.104	68.603	9.541	71.747	9.979	74.891	10.416
Harjamukti	17,6	131.201	7.455	137.821	7.831	144.441	8.207	151.061	8.583	157.680	8.959
Pekalipan	1,59	32.062	20.165	33.679	21.182	35.297	22.199	36.915	23.217	38.533	24.235
Kesambi	8,65	81.622	9.436	85.741	9.912	89.859	10.388	93.977	10.864	98.095	11.340
Kota Cirebon	39,47	359.509	9.108	377.650	9.568	395.789	10.028	413.928	10.487	432.067	10.947

Sumber:Bappelitbangda 2024

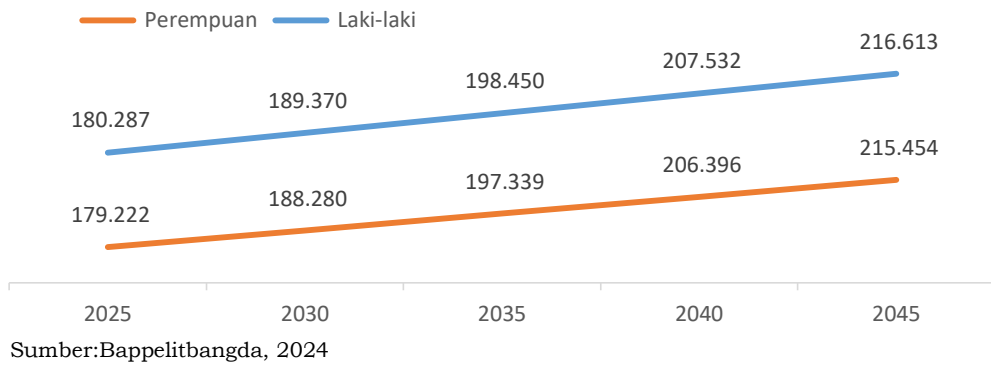
Gambar II-88 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Usia Produktif dan Usia Non Produktif



Sumber:Bappelitbangda, 2024

Untuk proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin tidak mengalami perubahan yang signifikan. Namun perlu diantisipasi perubahan demografi menurut kelompok umur, khususnya kelompok umur produktif dan kelompok umur non produktif. UHH Kota Cirebon yang semakin baik akan memberikan dampak jumlah penduduk usia lanjut yang akan bertambah. Dampak bertambahnya penduduk usia lanjut akan meningkatkan bertambahnya angka ketergantungan di Kota Cirebon. Untuk itu perlu dipersiapkan fasilitas pelayanan dasar penduduk usia lanjut dan penyediaan lapangan pekerjaan penduduk usia produktif agar kebutuhan penduduk Kota Cirebon dapat terpenuhi, walaupun akan terjadi bonus demografi di Kota Cirebon. Berikut ilustrasi perkembangan penduduk berdasarkan proyeksi menurut jenis kelamin dan usia baik produktif dan nonproduktif.

Gambar II-89 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



2.6.2 Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana

Dari data proyeksi demografi tersebut di atas, dapat diperhitungkan kebutuhan terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk kebutuhan dasar antara lain: perumahan, air bersih, energi, persampahan, kesehatan, pendidikan. Perhitungan proyeksi penyediaan fasilitas sarana dan prasarana kebutuhan dasar seperti disebutkan di atas dihitung dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta standar nasional indonesia.

2.6.2.1 Rumah dan Permukiman

Untuk perencanaan lingkungan perumahan dan permukiman pada perkotaan, Standar Nasional Indonesia nomor 03-1733-2004 dapat menjadi acuan untuk proyeksi kebutuhan perumahan untuk pemukiman penduduk di Kota Cirebon. Dokumen lain yang digunakan sebagai acuan perencanaan perumahan dan pemukiman dalam aspek ketahanan rumah terhadap gempa, kepadatan bangunan lingkungan, spesifikasi teknis kawasan permukiman, pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan, rumah tahan angin, ventilasi dan pencahayaan pada bangunan serta penyediaan kebutuhan fasilitas umum pada perumahan permukiman.

Dalam hal fasilitas yang diperlukan untuk melengkapi perumahan dan permukiman adalah sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana pendidikan dan kesehatan, sarana ibadah, sarana perniagaan, sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana ruang terbuka dalam bentuk taman dan lapangan olah raga, jaringan drainase, jaringan air bersih dan air limbah.

Fasilitas umum lainnya adalah sarana transportasi, jaringan komunikasi, jaringan sumber energi dan lainnya termasuk akses jalan bagi perumahan yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi penggunaanya seperti pejalan kaki, pengendara kendaraan bermotor serta prasarana pendukung jalan seperti perkerasan jalan, trotoar dan median, drainase, taman, rambu lalu lintas, parkir dan elemen pelengkap jalan lainnya. Untuk 20 tahun kedepan diharapkan penyelenggaraan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah memenuhi kondisi yang layak sesuai NSPK¹² (Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria) dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui pedoman. Desain infrastruktur elemen pelengkap jalan dan jembatan harus sesuai spesifikasi standar dan pedoman yang dilengkapi dengan jalur pedestrian dan jalur sepeda di samping elemen pelengkap lain

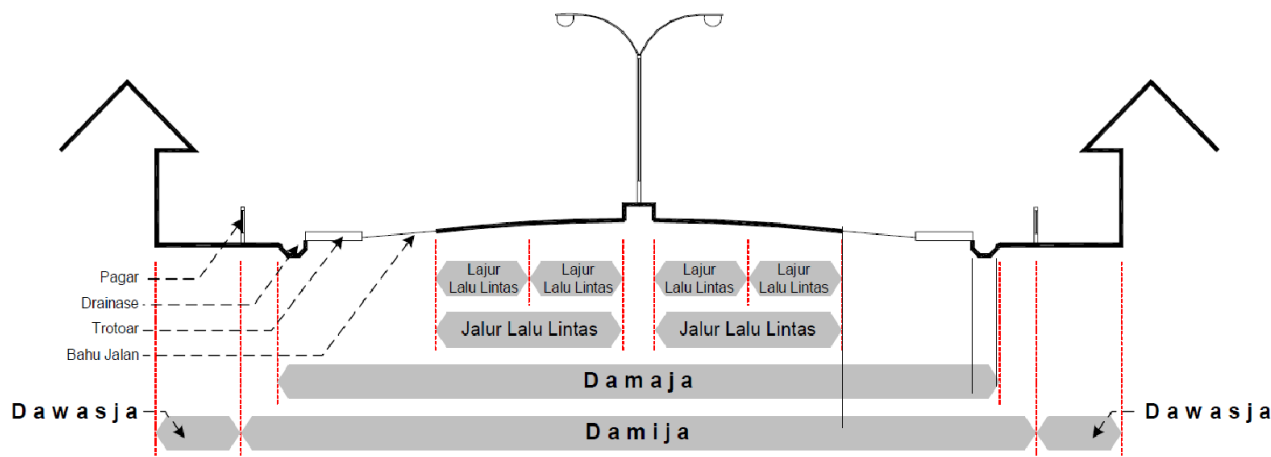
¹² <http://binamarga.pu.go.id/index.php/nspk>

seperti median jalan, lampu penerangan, kamera pengawas, rambu lalu-lintas, taman dan drainase yang cukup sehingga tidak menimbulkan genangan air yang dapat mengurangi kualitas jalan.

Fasilitas jalur pedestrian dan jalur sepeda di Kota Cirebon sudah terwujud pada lokasi jalan Wahidin dan sebagian jalan Siliwangi. Hal ini bertujuan untuk menggiatkan budaya berjalan kaki dan bersepeda demi pengurangan gas rumah kaca dan kemacetan lalu-lintas serta menjaga kebugaran jasmani warga Kota Cirebon. Fasilitas lainnya seperti median pembatas jalan dan jalur pedestrian sudah terwujud di jalan Dokter Wahidin Sudiro Husodo dan sebagian jalan Dokter Cipto Mangunkusumo. Fasilitas jalan yang sesuai standar dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan para penggunanya.

Berikut ilustrasi model penampang jalan yang wajib disediakan pada lingkungan perumahan dan permukiman berdasarkan dokumen standar nasional indonesia yang dikutip dari pedoman teknis yang diterbitkan oleh Dirjen Cipta Karya pada tahun 1998.

Gambar II-90 Bagian-bagian dari jalan¹³



Sumber: SNI 03-1733-2004

Dokumen untuk masing-masing aspek tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam hal spesifikasi, risiko alam dan lingkungan serta strategi pelaksanaan dalam rentang waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan perumahan permukiman berdasarkan proyeksi penduduk selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Selain pertimbangan perkembangan penduduk, peningkatan kepadatan penduduk dalam suatu wilayah menjadi parameter agar dapat direduksi menjadi dibawah 200 jiwa/hektar. Rumah susun dapat menjadi alternatif dalam hal keterbatasan lahan. Jika diasumsikan kebutuhan rumah per keluarga dihuni oleh 4 orang, maka kebutuhan jumlah perumahan berdasarkan proyeksi penduduk adalah sebagai berikut:

Tabel II-48 Kebutuhan Perumahan Kota Cirebon (unit)

Kecamatan	2025	2030	2035	2040	2045
Kejaksan	13.078	13.738	14.397	15.057	15.717
Lemahwungkuk	15.579	16.365	17.151	17.937	18.723
Harjamukti	32.800	34.455	36.110	37.765	39.420
Pekalipan	8.016	8.420	8.824	9.229	9.633

¹³ Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998

Kecamatan	2025	2030	2035	2040	2045
Kesambi	20.406	21.435	22.465	23.494	24.524
Kota Cirebon	89.877	94.413	98.947	103.482	108.017

Sumber: Bappelitbangda 2024

2.6.2.2 Air Bersih

Standar Minimal kebutuhan air bersih berdasarkan Permen Pekerjaan Umum No.14 Tahun 2010 adalah 60 liter/orang/hari. Sehingga berdasarkan peraturan tersebut, proyeksi kebutuhan air bersih melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah sebagai berikut:

Tabel II-49 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Cirebon (liter/hari)

Kecamatan	2025	2030	2035	2040	2045
Kejaksan	3.138.600	3.297.000	3.455.340	3.613.680	3.772.080
Lemahwungkuk	3.738.840	3.927.540	4.116.180	4.304.820	4.493.460
Harjamukti	7.872.060	8.269.260	8.666.460	9.063.660	9.460.800
Pekalipan	1.923.720	2.020.740	2.117.820	2.214.900	2.311.980
Kesambi	4.897.320	5.144.460	5.391.540	5.638.620	5.885.700
Kota Cirebon	21.570.540	22.659.000	23.747.340	24.835.680	25.924.020

Sumber: Bappelitbangda, 2024

2.6.2.3 Energi/listrik

Meski masih didominasi oleh sektor rumah tangga, namun konsumsi listrik yang diserap oleh sektor industri cukup besar. Data konsumsi listrik oleh sektor bisnis ini dapat memberikan gambaran intensitas kegiatan usaha yang berlangsung di Kota Cirebon. Berikut ini data KWH terjual yang didasarkan pada golongan tarif serta data rasio elektrifikasi di Kota Cirebon.

Sumber energi untuk memenuhi kebutuhan listrik dapat diupayakan melalui potensi energi listrik dari Sinar Matahari dan Angin. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data BMKG dan Dinas ESDM Jawa Barat mengenai potensi tersebut. Walaupun investasi awal cukup besar, potensi ini dapat menggantikan energi yang dihasilkan dari bahan bakar mineral dan batubara

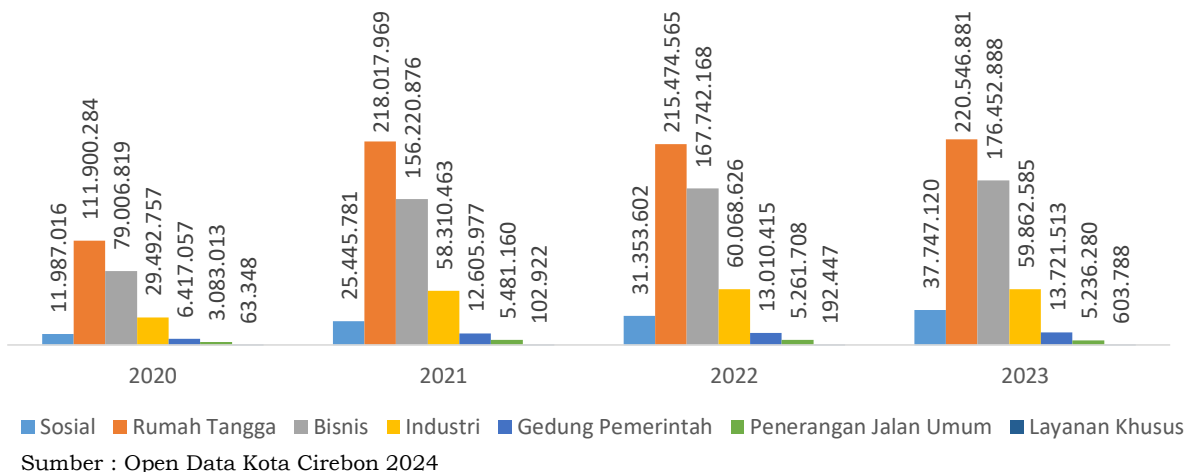
Tabel II-50 Persentase Elektrifikasi

Kota Cirebon	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio elektrifikasi (%)	91,46	91,6	93,41	89,42	88,42	99,99	99,99	99,99

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, 2021

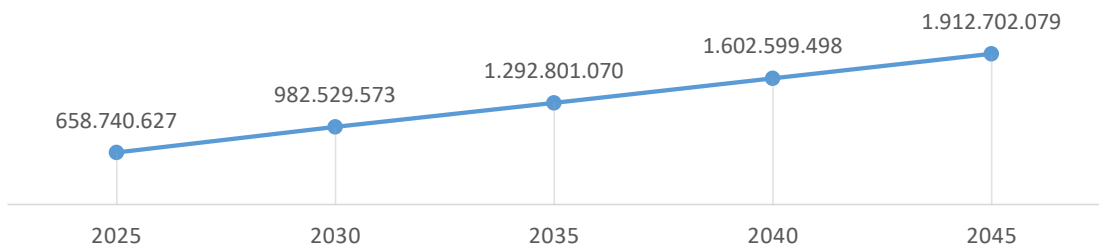
Jika dikelompokkan berdasarkan golongan tarif yang digunakan baik untuk keperluan komersial maupun konsumsi rumah tangga, sosial dan keperluan lain maka dapat diilustrasikan jumlah listrik yang terjual dalam periode 2020-2023 sebagai berikut.

Gambar II-91 Kwh Terjual Berdasarkan Golongan Tarif



Untuk proyeksi kebutuhan energi listrik dalam 20 tahun ke depan, berdasarkan data penggunaan energi pada tabel di atas maka dapat diprediksi kebutuhan energi listrik seperti pada grafik berikut.

Gambar II-92 Proyeksi Kebutuhan listrik Kota Cirebon (Kwh)



Sumber: Bappelitbangda 2024

2.6.2.4 Persampahan dan Limbah

Volume timbulan sampah yang dihasilkan Kota Cirebon, dengan asumsi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 untuk setiap orangnya dalam sehari menghasilkan 0,7 kg, sehingga Kota Cirebon akan menghasilkan timbulan sampah diproyeksikan sesuai dengan perkiraan jumlah penduduk Kota Cirebon dalam periode 20 tahun mendatang. Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan sampah, termasuk upaya untuk pengurangan sampah melalui penggunaan kembali sampah menjadi bahan baku atau barang jadi yang dapat dimanfaatkan.

Tabel II-51 Proyeksi Timbulan Sampah Kota Cirebon (kg/hari)

Kecamatan	2025	2030	2035	2040	2045
Kejaksan	36.617	38.465	40.312	42.160	44.008
Lemahwungkuk	43.620	45.821	48.022	50.223	52.424
Harjamukti	91.841	96.475	101.109	105.743	110.376
Pekalipan	22.443	23.575	24.708	25.841	26.973
Kesambi	57.135	60.019	62.901	65.784	68.667
Kota Cirebon	251.656	264.355	277.052	289.750	302.447

Sumber: Bappelitbangda, 2024

Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pengelolaan sampah mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3242-1994, perhitungannya didasarkan atas data a) peta penyebaran rumah; b) luas daerah

yang dikelola; c) jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi pendapatan tinggi, menengah, dan rendah; d) jumlah rumah berdasarkan tipe; e) besaran timbunan sampah per hari; f) jumlah bangunan fasilitas umum; g) kondisi jalan (panjang, lebar dan kondisi fisik); h) kondisi topografi dan lingkungan; i) ketersediaan lahan untuk lokasi TPS dan daur ulang sampah skala lingkungan; dan j) karakteristik sampah.

Pada penyelesaian permasalahan sampah yang memiliki tujuan utamanya adalah memiliki budaya dengan hidup minim/tanpa sampah untuk bumi yang lebih indah, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengupayakan pusat pengelolaan sampah regional Cirebon Raya berlokasi di Ciwaringin sebagai Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) dengan kapasitas sampah 1.000 ton/hari. TPPAS Cirebon Raya diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan sampah untuk wilayah sekitar sehingga dapat dimanfaatkan dan lebih memiliki nilai bagi masyarakat walaupun kapasitas 1000 ton/hari masih kurang dari proyeksi timbunan sampah dari kawasan sekitar.

TPPAS Cirebon Raya dimulai inisiasi sejak tahun 2017, saat ini telah mencapai tahap persiapan awal berupa studi pendahuluan. Walaupun TPPAS segera akan terwujud, budaya penanganan sampah harus dimulai dari sumbernya yaitu pemilahan sampah pada tingkat individu dan rumah tangga sehingga akan lebih memudahkan untuk tingkat yang lebih luas melalui tahapan *Refuse/Menolak*: tolak kemasan atau bungkus sekali pakai; *Reduce/Mengurangi*: kurangi penggunaan barang yang tidak bisa terurai; *Reuse/Menggunakan Kembali*: Gunakan barang-barang yang awet atau tahan lama; *Recycle/Daur Ulang*: Memanfaatkan sampah menjadi barang baru; *Rot/Mengkomposkan*: Olah sampah organik atau dapur menjadi kompos atau pupuk alami.

Sedangkan untuk proyeksi air limbah Kota Cirebon dalam 20 tahun ke depan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon harus mencapai akses layak sebesar 29,67%. Dalam pencapaian SPM Air Limbah Kota Cirebon, Pemerintah Kota Cirebon berkewajiban untuk memfasilitasi yang belum memiliki akses Air Limbah sebesar 3,25% dan menyempurnakan akses Air Limbah yang belum layak sebesar 10,99%. Capaian akses aman Air Limbah di Kota Cirebon telah mencapai 15,44%.

2.6.2.5 Kesehatan

Sebagai salah satu jenis pelayanan dasar, urusan kesehatan sangat berkaitan dengan kebutuhan dasar dari masyarakat. Pelayanan kesehatan yang baik turut mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dikarenakan dapat meningkatkan indeks kesehatan. Sarana kesehatan sangat diperlukan untuk menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Berdasarkan perhitungan SNI 03-1733-2004 di lihat dari kondisi eksisting pada tahun 2023, Beberapa jenis sarana kesehatan seperti Posyandu, BKIA/Klinik Bersalin, dan Puskesmas Pembantu masih membutuhkan peningkatan jumlah fasilitas untuk memenuhi proyeksi kebutuhan hingga tahun 2045. Meskipun jumlah Posyandu yang tersedia saat ini melebihi proyeksi kebutuhan di tahun 2025, peningkatan kebutuhan hingga tahun 2045 menunjukkan perlunya penambahan Posyandu untuk menjaga kecukupan

pelayanan kesehatan dasar di masyarakat. Akan tetapi untuk Puskesmas, jumlah fasilitas yang ada saat ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi proyeksi kebutuhan hingga tahun 2045. Fokus bisa diarahkan pada peningkatan kualitas layanan.

Prioritas pembangunan sarana kesehatan baru dan peningkatan kapasitas fasilitas yang ada sangat penting untuk memastikan akses kesehatan yang memadai bagi populasi yang terus bertambah. Kebutuhan sarana kesehatan diproyeksikan meningkat secara bertahap seiring dengan pertumbuhan populasi, menuntut perencanaan dan alokasi sumber daya yang tepat oleh pemerintah dan pihak terkait.

Tabel II-52 Proyeksi Sarana Kesehatan Kota Cirebon

No.	Jenis Sarana	Kondisi Saat ini (2023)	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Sarana				
				2025	2030	2035	2040	2045
1	Posyandu	328	1.250	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	4	18
2	Balai Pengobatan Warga	0	2.500	144	152	159	166	173
3	BKIA/ Klinik Bersalin	4	30.000	8	9	10	10	11
4	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	7	30.000	5	6	7	7	8
5	Puskesmas dan Balai Pengobatan	98	120.000	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
6	Tempat Praktek Dokter	74	5.000	Terpenuhi	2	6	9	13
7	Apotik/ Rumah Obat	134	30.000	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon 2024

2.6.2.6 Pendidikan

Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan akan meningkat signifikan dalam 20 tahun mendatang berdasarkan rujukan proyeksi penduduk Kota Cirebon dan SNI 03-1733-2004. Hal ini menuntut perhatian khusus dalam perencanaan dan alokasi sumber daya untuk memastikan akses pendidikan yang memadai di masa depan.

Untuk perencanaan dalam memenuhi Kebutuhan infrastruktur pendidikan adalah antisipasi pertumbuhan penduduk usia sekolah. Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan fasilitas pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan dalam periode 20 tahun mendatang. Kendala yang dihadapi Kota Cirebon adalah permasalahan keterbatasan lahan sehingga perlunya peran lintas sektor untuk dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan. Berdasarkan tabel berikut Setiap jenjang pendidikan menunjukkan peningkatan kebutuhan fasilitas sarana pendidikan secara konsisten dari tahun 2025 hingga 2045. Hal ini mencerminkan pertumbuhan populasi atau peningkatan partisipasi pendidikan yang memerlukan tambahan fasilitas.

Tabel II-53 Proyeksi Sarana Pendidikan Kota Cirebon

Jenis Fasilitas	Kondisi Saat ini (2023)	Kebutuhan Sarana				
		2025	2030	2035	2040	2045
PAUD	100	188	202	217	231	246
SD	164	61	72	83	95	106
SMP	53	22	26	29	33	37
SMA	57	18	22	25	29	33

Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon 2024

Kebutuhan fasilitas PAUD menunjukkan peningkatan terbesar dibandingkan jenjang pendidikan lainnya, hal ini disebabkan adanya penambahan wajib belajar yang dimulai dari jenjang PAUD. Dari 164 sarana pendidikan SD jumlah saat ini yang diproyeksikan menjadi 270 pada tahun 2045, hal ini menunjukkan stabilnya peningkatan jumlah siswa di jenjang SD. Pada jenjang SMP dan SMA ini menunjukkan pola peningkatan kebutuhan yang hampir identik, dari jumlah eksisting yang hampir sama (SMP : 53, SMA : 57) menuju angka yang sama di tahun 2045 (90 fasilitas untuk masing-masing jenjang). Ini bisa menunjukkan pola transisi siswa yang stabil dari SMP ke SMA tanpa ada lonjakan besar dalam jumlah siswa.

2.6.2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Kebijakan Tata Ruang Kota Cirebon diatur oleh Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011–2031. Rencana struktur ruang wilayah Kota diarahkan pada tujuan keseimbangan pembangunan antara pusat kota yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional, sub pusat kota yang melayani sub wilayah kota, dan pusat lingkungan yang melayani skala lingkungan wilayah kota.

Rencana Struktur Ruang Kota Meliputi :

A. Kebijakan Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Dalam kebijakan rencana sistem pusat pelayanan kota, dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- 1. Mengembangkan struktur dan hirarki perkotaan yang terintegrasi dengan pengembangan kota kota lainnya di Ciayumajakuning sebagai Kawasan perkotaan yang cepat tumbuh;
- 2. Mengembangkan kota bagian selatan;
- 3. Menetapkan pembagian wilayah kota menjadi 4 sub wilayah kota dengan 5 sub pusat kota;
- 4. Mengembangkan jaringan pusat kota, sub pusat kota, dan pusat lingkungan yang berhirarki dan tersebar secara berimbang dan saling terkait menjadi satu system kota menuju pusat kota; dan
- 5. Mengembangkan kegiatan pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan atau administrasi masyarakat pada bagian wilayah kota dan SWK secara merata.

B. Kebijakan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kota

Kebijakan pengembangan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi.

1. Mengembangkan sistem jaringan transportasi jalan untuk mendorong integrasi kegiatan antar bagian wilayah kota, pembangunan, dan memudahkan pergerakan serta distribusi barang dan jasa;
 2. Menetapkan jalan sesuai dengan fungsi, kapasitas dan tingkat pelayanannya;
 3. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan;
 4. Mengembangkan jalan lingkar selatan untuk mempermudah akses ke wilayah selatan;
 5. Meningkatkan aksesibilitas untuk mendukung pengembangan jalan tol kanci-pejagan;
 6. Menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terintegrasi dengan pusat kegiatan;
 7. Mengembangkan sistem transportasi yang baru pada wilayah yang mempunyai tingkat perkembangan kegiatan fungsional sangat tinggi dan pada ruas-ruas jalan yang sering terjadi kemacetan lalu lintas;
 8. Meningkatkan pelayanan rute angkutan umum;
 9. Peningkatan aksesibilitas pelabungan dengan pengembangan jalur kereta api.
- C. Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi
1. Menata pengembangan fasilitas sistem jaringan distribusi telekomunikasi secara merata;
 2. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi pada wilayah yang memiliki potensi tumbuhnya kegiatan ekonomi baru;
 3. Mengembangkan teknologi modern untuk meningkatkan luas daerah pelayanan telekomunikasi, khususnya wilayah yang secara geografis memiliki lokasi yang sulit terlayani.
- D. Kebijakan pengembangan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan energi
1. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan listrik;
 2. Mengembangkan instalasi baru, pengoperasian instalasi penyaluran dan peningkatan jaringan distribusi ;
 3. Mengembangkan penggunaan sumberdaya energi lainnya secara optimal dan efisien.
- E. Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan dan sumber daya air
1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas dalam penyediaan air baku;
 2. Mewujudkan keseimbangan ketersediaan air;
 3. Mengembangkan wilayah pelayanan;
 4. Melestarikan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumber daya air.
- F. Kebijakan pengembangan prasarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota
1. Meningkatkan pemerataan pelayanan air minum di wilayah kota;
 2. Mengembangkan prasarana pengolahan air bersih;

3. Meningkatkan efisiensi kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. Mengendalikan pencemaran lingkungan;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah;
7. Menata jaringan drainase yang terpadu dan saling terkoneksi;
8. Mengembangkan jalur pejalan kaki;
9. Mengembangkan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.

G. Kebijakan penetapan dan pengembangan kawasan lindung

1. memantapkan kawasan lindung dengan menjaga dan mengembalikan fungsi kawasan;
2. mengarahkan pemanfaatan kawasan lindung wilayah kota untuk kegiatan jalur hijau dan ruang terbuka hijau kota;
3. menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota minimal 30% (tiga puluh per seratus) dari luas wilayah kota;
4. meningkatkan kerjasama antar instansi pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan kelestarian dan keberlanjutan kawasan lindung;
5. meningkatkan kerja sama antar daerah otonom yang berbatasan, khususnya terkait Daerah Aliran Sungai; dan
6. mendorong dan meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian kawasan lindung.

H. Kebijakan pengembangan dan pengendalian Kawasan budidaya

1. mengembangkan kawasan perumahan dengan menerapkan pola pembangunan hunian berimbang;
2. mengembangkan perumahan secara vertikal pada kawasan perumahan kepadatan tinggi;
3. mengembangkan kompleks perkantoran pemerintah maupun swasta secara vertikal;
4. mengembangkan dan mengendalikan kawasan pergudangan pada perbatasan kota dengan mempertimbangkan aspek ekologis;
5. mengembangkan akomodasi wisata beserta fasilitas penunjang pariwisata;
6. mengarahkan terbentuknya kawasan ruang terbuka non hijau untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, secara merata pada sub wilayah kota;
7. mengarahkan dan menata kawasan bagi kegiatan sektor informal;
8. menetapkan kawasan ruang evakuasi bencana;
9. meningkatkan skala pelayanan fasilitas yang memenuhi arahan untuk fasilitas dengan skala pelayanan regional, kota serta lokal yang menciptakan fungsi kegiatan primer, sekunder dan tersier;
10. mendukung pemanfaatan fasilitas penunjang militer;
11. mengembangkan kawasan pendidikan di bagian selatan kota sebagai kawasan strategis sosial budaya dengan ditunjang sarana dan prasarana pendukung kegiatan; dan
12. mengembangkan kawasan wisata bersejarah dan kawasan wisata alam.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan

Permasalahan pembangunan Kota Cirebon dirumuskan dari hasil analisis data yang tersaji pada gambaran umum daerah, dan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah dilakukan oleh Bappelitbangda. Dari hasil tersebut permasalahan pembangunan kota dapat dikategorikan dalam 4 (empat) aspek utama yaitu (1) Aspek Geografi dan Demografi, (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (3) Aspek Daya Saing Daerah, dan (4) Aspek Pelayanan Umum.

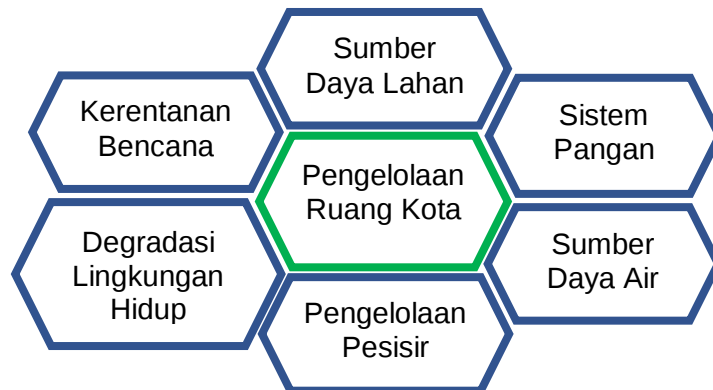
3.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

3.1.1.1 Geografi

Beberapa permasalahan pembangunan kota yang terkait aspek geografis antara lain pengelolaan ruang kota, sumber daya lahan dan sumber daya air yang tersedia, kualitas lingkungan hidup, kerawanan bencana, sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan pangan, serta pengelolaan pesisir.

Gambar III-1

Permasalahan Aspek Geografi Kota Cirebon



Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon

Pemanfaatan ruang kota belum efektif. Pemanfaatan ruang kota yang berkelanjutan merupakan suatu keniscayaan bagi terwujudnya kemajuan kota yang dapat dinikmati oleh masyarakat hingga masa mendatang. Keberhasilan pembangunan kota sendiri tak lepas dari strategi dalam memanfaatkan sumber daya dan potensi ruang kota yang tersedia sebagai potensi dan tantangan kondisi geografis Kota Cirebon. Pemanfaatan ruang kota yang belum efektif dalam memenuhi kualitas ruang perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal seperti rencana pola ruang yang belum ideal dikarenakan status lahan dan kompleksitas pemanfaatan lahan eksisting, konsistensi pengendalian tutupan lahan masih rendah, masih lemahnya dukungan regulasi penegakan pelanggaran pemanfaatan ruang kota, dan masih terbatasnya SDM di bidang penataan ruang. Pemahaman terhadap aspek geografis merupakan hal yang sangat penting untuk memahami dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan kota sehingga dapat dirumuskan arah pembangunan yang tepat bagi pemanfaatan ruang kota yang berkelanjutan.

Tingkat kerentanan bencana di Kota Cirebon relatif tinggi. Indeks Risiko Bencana Kota Cirebon tahun 2022 sebesar 141,07 dengan kategori sedang. Tingkat kerentanan bencana di Kota Cirebon untuk bencana banjir, gempa bumi, kebakaran lahan, gelombang ekstrim, kekeringan, letusan gunung api Ciremai dan cuaca ekstrim masih relatif tinggi. Kerusakan yang terjadi akibat bencana di Kota Cirebon tahun 2023 adalah kerusakan pada 5.423 rumah. Penyebab tingginya tingkat kerentanan bencana di Kota Cirebon adalah karena belum adanya *early warning system* multi bencana. Sistem peringatan dini multi bencana merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memberikan informasi cepat dan akurat tentang potensi terjadinya bencana alam atau ancaman lainnya. Fungsinya melibatkan beberapa aspek penting untuk melindungi masyarakat dan mengurangi risiko dampak bencana. Selain itu, belum optimalnya aksi mitigasi dan adaptasi bencana dan belum tersedianya rencana kontinjensi bencana membuat kerentanan bencana di Kota Cirebon relatif tinggi. Minimnya perencanaan adaptasi, mitigasi, dan pengelolaan informasi kebencanaan kota harus segera ditangani untuk mencapai ketahanan bencana.

Penanganan banjir/genangan di Kota Cirebon belum optimal. Tingginya curah hujan yang terjadi di Kota Cirebon berpengaruh pada tingginya intensitas kejadian banjir di beberapa titik, hal ini diperparah dengan drainase yang buruk serta bertambahnya luas lahan terbangun yang berdampak pada berkurangnya daya serap air. Berdasarkan hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis tahun 2023, sepertiga kawasan Kota Cirebon merupakan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi. Wilayah rawan banjir paling besar ada di kecamatan Harjamukti dan paling rendah di kecamatan Pekalipan.

Degradasi kualitas lingkungan hidup perkotaan. Degradasi lingkungan ini merujuk pada penurunan kualitas atau fungsi ekosistem alami, baik itu karena aktivitas manusia maupun faktor alam. Proses ini mencakup perubahan yang merugikan dalam tanah, air, dan udara, serta kehilangan keanekaragaman hayati. Beberapa bentuk degradasi lingkungan yang terjadi di Kota Cirebon diantaranya Pencemaran lingkungan, perubahan tata guna lahan rendahnya keanekaragaman Hayati, perubahan iklim, kurangnya RTH kerusakan lahan dan pengelolaan sampah yang belum optimal. Adapun upaya untuk mengatasi degradasi lingkungan hidup perkotaan melibatkan perencanaan tata kota yang berkelanjutan, praktik-praktik pengelolaan lingkungan yang bijak, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan memulihkan keseimbangan ekosistem perkotaan. Permasalahan pada aspek lingkungan hidup melibatkan sejumlah isu yang mempengaruhi ekosistem dan keseimbangan alam terutama terkait dengan kualitas lingkungan hidup dan risiko bencana.

Degradasi kualitas lingkungan hidup perkotaan yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- Belum terpenuhinya 20 persen luasan RTH publik di Kota Cirebon
- Belum optimalnya pengelolaan persampahan.
- Kualitas lingkungan hidup belum mencapai kategori baik
- Dampak perubahan iklim di lingkungan perkotaan meningkat

- Degradasi ekosistem lingkungan di kawasan pesisir
- Pengendalian tutupan lahan yang rendah
- Potensi Keanekaragaman hayati yang rendah

Belum terpenuhinya 20 persen ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Cirebon. Luas RTH publik di Kota Cirebon pada tahun 2022 baru mencapai 8,8% dari luas wilayah Kota Cirebon atau seluas 39,466 Km². Kondisi ini masih jauh dari kondisi ideal penyediaan RTH publik di kawasan perkotaan sebanyak 20% dari luas wilayah perkotaan. Bahkan angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan persentase luas RTH Kota Cirebon di tahun 2011 yang mencapai 8,96% (39,44 km²). Minimnya ketersediaan RTH terutama yang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon disebabkan karena keterbatasan lahan yang diperparah dengan adanya konversi lahan tidak terbangun. Padahal lahan-lahan yang tidak terbangun ini merupakan potensi pemenuhan RTH publik. Adanya konversi lahan ini erat kaitannya dengan penguasaan RTH yang menjadi aset Pemerintah Kota Cirebon. Kondisi lahan dengan kepemilikan aset pribadi masyarakat sebetulnya dapat menjadi potensi besar dalam menunjang ketersediaan RTH. Namun, tekanan pembangunan dalam upaya pemenuhan pengembangan properti, kebutuhan akan lahan untuk perumahan atau proyek komersial, dan kurangnya insentif bagi pemilik lahan untuk menjaga sifat hijau pada lahan pribadi menjadi tantangan utama dalam penyediaan RTH publik. Selain itu secara administratif inventarisasi dan sistem pengelolaan data RTH publik di Kota Cirebon masih belum terbangun dengan baik, terutama dalam pembagian urusan kewenangan.

Belum optimalnya pengelolaan persampahan. Secara umum penanganan persampahan di Kota Cirebon sebetulnya sudah cukup baik dimana dari jumlah timbulan sampah tahun 2022 sebesar 836,25 m³/hari dapat tertangani sebesar 84,24%. Namun pada konsep lingkungan hidup yang berkelanjutan pengurangan sampah dari sumber merupakan hal yang saat ini menjadi target utama dalam pengelolaan persampahan. Tahun 2022 pengurangan sampah di Kota Cirebon baru mencapai 11.73% dari target yang ditetapkan oleh Kebijakan Strategi Nasional (Jakstranas) pengelolaan sampah sebesar 30% pengurangan sampah di tahun 2025. Sebagian besar sampah timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Cirebon dikirim ke TPA Kopi Luhur. Pengelolaan sampah di TPA kopi luhur belum sepenuhnya menerapkan sistem *controlled landfill/sanitary landfill*, dimana saat ini masih menggunakan sistem open dumping yang tidak ramah lingkungan. Kapasitas TPA Kopi Luhur pun semakin terbatas dimana Luas TPA kopi luhur ±141.224 m², yang dapat digunakan untuk penimbunan sampah ±8 Ha, dengan asumsi jumlah sampah yang sudah masuk 2.000.000 m³ dengan ketinggian 25 m maka sisa daya tampung TPA adalah 240.000 m³ dengan ketinggian 3 m. Pengelolaan Pusat Daur Ulang (PDU) Dukuh Semar masih belum optimal dimana kapasitas pengelolaan sampah di TPU sebesar 5 ton/hari namun saat ini hanya mengelola satu kontainer per hari (6 m³). Padahal optimalisasi PDU ini dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA Kopi Luhur. Program penanganan sampah melalui *reduce, reuse & recycle* (3R) mulai dari hulu belum dapat menurunkan volume timbunan sampah secara signifikan. Pemenuhan sarana dan prasarana

pengelolaan persampahan yang dapat disediakan oleh pemerintah Kota Cirebon juga masih terbatas. Selain pengelolaan sampah rumah tangga yang belum optimal, pengelolaan sampah spesifik yang mengandung B3 yang berasal dari masyarakat juga belum optimal. Selain itu, dari permasalahan persampahan ini juga disebabkan karena belum adanya regulasi yang spesifik dalam pengelolaan pengurangan sampah.

Kualitas lingkungan hidup di Kota Cirebon belum mencapai kategori baik. Nilai indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2022 adalah 54,14 poin dengan kategori sedang. Nilai ini berada di bawah IKLH Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi salah satu penurunan kualitas lingkungan hidup. Terjadinya penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) dimana tahun 2014 sebesar 50 poin turun di tahun 2022 47,69 poin. Berdasarkan sampel yang dihitung tahun 2022 tingkat pencemaran air tercemar ringan-tercemar sedang. Pencemaran air ini diantaranya akibat pembuangan limbah domestik dimana masih terdapat perusahaan yang belum memiliki sistem pengolahan limbah, pencemaran sampah ke badan air. Hal ini mengakibatkan rendahnya daya dukung penyedia air di Kota Cirebon. Selain itu, nilai Indeks Kualitas udara (IKU) juga mengalami penurunan, dimana di tahun 2014 nilai IKU 90,03 poin turun menjadi 74,27 poin di tahun 2022. Meningkatnya pencemaran udara terutama terjadi akibat dari aktivitas transportasi. Selain itu pencemaran udara yang terjadi di kawasan pesisir (pelabuhan) diakibatkan oleh aktivitas bongkar muat batu bara. Nilai Indeks Kualitas lahan (IKTL) menurun, dimana tahun 2014 nilai IKTL 30,62 poin turun di tahun 2022 menjadi 23,28 poin. Hal ini akibat terjadinya alih fungsi tutupan lahan yang terjadi. Penurunan kualitas lingkungan hidup di kawasan yang berdekatan dengan pesisir dapat dilihat dari terjadinya intrusi air laut pada kawasan tersebut

Dampak perubahan iklim di lingkungan perkotaan meningkat. Perubahan iklim memberikan dampak serius pada lingkungan, memicu perubahan dalam dinamika ekosistem dan menyebabkan tantangan baru bagi keberlanjutan lingkungan. Peningkatan suhu global mengakibatkan perubahan dramatis dalam pola cuaca, menyebabkan cuaca ekstrem yang lebih sering terjadi. Banjir, kekeringan, dan badai yang lebih kuat menjadi lebih umum, mengancam ekosistem darat dan air. Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2022 sebesar 5,37%. Namun, apabila dilihat dari nilai emisinya terjadi peningkatan dimana tahun 2012 nilai emisi GRK sebesar 196,37 gg co2 meningkat di tahun 2021 sebesar 286,71 gg co2 dengan emisi tertinggi berasal dari sektor energi (pada sub sektor transportasi). Tingginya emisi yang dihasilkan pada sektor energi perlu diantisipasi dengan penerapan konversi energi menjadi energi baru terbarukan. Pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim di Kota Cirebon belum menjadi prioritas dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Belum optimalnya aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi salah satu penyebab adanya peningkatan dampak perubahan iklim di Kota Cirebon.

Degradasi ekosistem lingkungan di kawasan pesisir. Kawasan pesisir, sebagai perbatasan antara daratan dan lautan, sangat rentan terhadap aktivitas manusia yang tidak terkendali. Di pesisir pantai Kota Cirebon terjadi

pendangkalan akibat sedimentasi yang berlangsung menerus sehingga terbentuk tanah-tanah timbul. Luasan tanah timbul di kawasan pesisir Kota Cirebon sekitar $\pm 44,72$ ha. Pengembangan lahan tanah timbul di Kota Cirebon ini tidak sepenuhnya terbentuk secara alami karena masyarakat setempat juga melakukan pengurukan. Aktivitas pemadatan lahan oleh masyarakat sangat berdampak pada ekosistem karena dilakukan dengan menggunakan timbunan sampah yang mengakibatkan degradasi lingkungan pesisir. Selain itu, terjadi okupasi lahan tanah timbul di pesisir pantai oleh masyarakat untuk dijadikan permukiman yang kemudian menjadikan kawasan pesisir pantai Cirebon menjadi kawasan kumuh. Luas permukiman kumuh di kawasan pesisir sesuai dengan SK Wali Kota Nomor 663/Kep. 421-DPRKP/2021 sebesar 95,54 Ha di tahun 2021. Menjamurnya permukiman kumuh di kawasan pesisir menandakan belum optimalnya penatagunaan lahan di kawasan pesisir. Hal ini makin memperparah degradasi lingkungan hidup. Upaya restorasi kawasan pesisir dengan melakukan penanaman mangrove juga belum optimal. Luas kawasan mangrove Kota Cirebon ± 26.20 Ha, dan sekitar ± 12.09 Ha dalam kondisi rusak. Kawasan pesisir yang rentan risiko bencana banjir dan rob juga menjadi salah satu penyebab degradasi ekosistem lingkungan di kawasan pesisir. Data di tahun 2021 terdapat 2 kejadian banjir. Degradasi ekosistem ini salah satunya berakibat pada menurunnya jumlah produksi perikanan tangkap dimana tahun 2021 sebesar 4.519,05 ton/tahun turun menjadi 3.540,58 di tahun 2022.

Pengendalian tutupan lahan yang rendah. Pemanfaatan ruang di Kota Cirebon dapat dikatakan masih belum mendukung fungsi lindung, dimana sebanyak 7,49% dari luas kawasan lindung yang ditetapkan belum dimanfaatkan sesuai fungsinya. Pengendalian tutupan lahan ini sangat penting dilakukan dalam membantu memulihkan ekosistem yang terdegradasi. Belum terkelolanya upaya konservasi lingkungan di wilayah perkotaan dan optimalisasi upaya pengendalian pemanfaatan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang merupakan beberapa penyebab dari rendahnya pengendalian tutupan lahan.

Potensi Keanekaragaman hayati yang rendah. Luas Taman Keanekaragaman hayati Kota Cirebon berdasarkan SK walikota No 660/Kep.386-DLH/2023 adalah $\pm 4,7$ Ha. Terbatasnya luas Taman Keanekaragaman Hayati mengakibatkan jumlah spesies yang dapat diakomodasi juga terbatas. Ini dapat mengakibatkan penurunan keanekaragaman genetik dalam populasi, yang dapat membuat populasi lebih rentan terhadap penyakit, perubahan lingkungan, dan tekanan lainnya. Keanekaragaman hayati ini dapat meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap perubahan. Semakin banyak spesies yang ada dalam suatu ekosistem, semakin baik kemungkinan ekosistem itu dapat bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Kurangnya inventarisasi vegetasi lokal khas Cirebon juga merupakan salah satu penyebab dari rendahnya pengelolaan potensi keanekaragaman hayati. Secara umum, 55,5% lahan Kota Cirebon memiliki jasa ekosistem keanekaragaman hayati yang tergolong sangat rendah hal ini disebabkan oleh kurangnya rendahnya upaya konservasi lahan dan adanya konversi lahan lindung (sempadan dll.).

Tingginya ketergantungan terhadap ketersediaan dan produksi pangan.

Kota Cirebon berada di wilayah dengan kondisi geografis, iklim dan perkembangan perkotaan yang kurang mendukung pertumbuhan sektor pertanian secara optimal sehingga Kota Cirebon tidak mampu untuk memproduksi pangan secara mandiri. Kontribusi PDRB sektor pertanian sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 hanya sebesar $\pm 0,33$ persen. Tahun 2021-2023 total Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kota Cirebon sekitar 20,21 ton, di bawah total CPPD yang perlu disediakan oleh Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah yaitu sekitar 61,25 Ton. Di Jawa Barat sendiri nilai produksi padi di Kota Cirebon menempati urutan ke 24 di atas nilai produksi Kota Cimahi, Kota Bogor dan Kota Depok, artinya untuk memenuhi konsumsi pangan Kota Cirebon perlu menjaga stabilitas penyediaan dan harga komoditas pangan tersebut.

Belum optimalnya pengelolaan kawasan pesisir, termasuk di dalamnya potensi ekonomi perikanan dan ekowisata pesisir. Belum optimalnya pengelolaan kawasan pesisir disebabkan beberapa hal seperti masih rendahnya upaya konservasi keanekaragaman hayati, terjadi okupasi lahan pada kawasan tanah timbul di pesisir, dimana bermunculan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat merusak ekosistem pesisir dan mengancam keberlanjutan. Selain itu penatagunaan lahan di kawasan tanah timbul belum berjalan efektif dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pesisir juga belum optimal dikarenakan belum efektifnya koordinasi lintas lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pesisir, antara lain dengan Pelindo dan PPN Kejawan.

Sumber daya lahan yang terbatas. Berdasarkan peta penggunaan lahan tahun 2023, persentase lahan terbangun di Kota Cirebon sebesar 63,41% dan lahan belum dikembangkan sebesar 36,59%. Terbatasnya luas wilayah dengan proporsi kawasan terbangun yang tinggi, menjadi permasalahan yang harus dihadapi pemerintah Kota Cirebon. Luas wilayah administrasi yang relatif kecil dengan tekanan urbanisasi yang tinggi dan permintaan lahan yang cukup tinggi untuk perumahan dan aktivitas ekonomi dapat menyebabkan dampak negatif pada perencanaan tata ruang dan infrastruktur. Karakteristik sebagai kawasan perkotaan dengan intensitas lahan terbangun yang tinggi menyebabkan perlindungan dan rehabilitasi lahan semakin terbatas. Selain itu, masih lemahnya komitmen terhadap konsistensi pengendalian pemanfaatan ruang serta konflik hak kepemilikan lahan dapat menghambat pengelolaan dan penggunaan lahan secara optimal.

Sumber daya air yang terbatas. Berdasarkan hasil analisis dalam dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon 2025-2045, Kota Cirebon memiliki selisih atau kekurangan penyediaan air pada tahun 2023 sebesar 173.703.096,30 m³/tahun. Untuk itu pemerintah daerah Kota Cirebon harus mengantisipasi defisit kebutuhan air minum dengan konservasi air tanah dari pencemaran dan mencegah eksploitasi air tanah secara berlebihan oleh gedung perkantoran, rumah sakit, pusat perbelanjaan, hotel. Pengendalian terhadap eksploitasi air tanah dapat dicegah melalui pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah.

3.1.1.2 Demografi

Permasalahan pada aspek demografi meliputi pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk, urbanisasi, penduduk angkatan kerja dan lansia.

Gambar III-2

Permasalahan Demografi Kota Cirebon



Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon

Laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi disebabkan oleh masih tingginya angka migrasi dan tingkat kelahiran. Jumlah penduduk yang terus bertambah berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, meningkatnya kebutuhan pangan, energi, air bersih, hunian, serta sarana dan prasarana wilayah dalam jangka panjang serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang, untuk memenuhi kebutuhan hunian dan aktivitas penduduk.

Tingkat urbanisasi yang masih tinggi menyebabkan perbedaan kepadatan penduduk di wilayah tertentu. wilayah perkotaan menjadi lebih padat dibandingkan dengan wilayah selatan Kota Cirebon, hal ini disebabkan karena pembangunan infrastruktur, ketersediaan lapangan kerja, kualitas pelayanan publik masih terpusat di wilayah pusat kota. Tingginya urbanisasi selain meningkatkan penambahan penduduk di kawasan perkotaan juga menyebabkan krisis perumahan, terutama bagi penduduk dengan pendapatan rendah yang kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Distribusi penduduk yang kurang merata. Penduduk kota Cirebon cenderung berdomisili di wilayah pusat kota dengan fasilitas pelayanan umum dan aktivitas ekonomi yang lebih lengkap sehingga wilayah kecamatan pekalipan maupun kecamatan kejaksan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Sementara kepadatan penduduk paling rendah berada di kecamatan harjamukti khususnya di kelurahan Argasunya. Kepadatan penduduk yang rendah menunjukkan wilayah yang kurang berkembang atau kurang diminati sebagai tempat tinggal karena secara geografis terletak jauh dari pusat kota, peluang usaha yang masih rendah dan jauh dari pusat fasilitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan sosial lainnya.

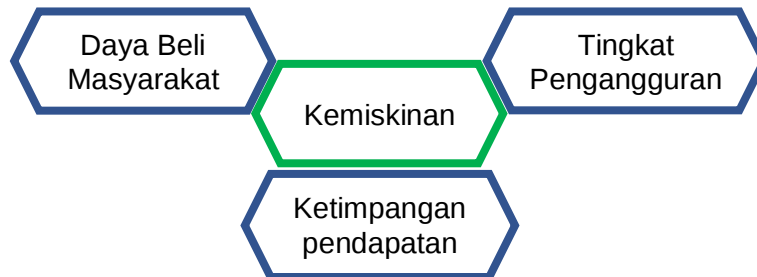
Angkatan kerja dan penduduk lanjut usia. Tingginya proporsi penduduk usia produktif yang memiliki daya saing rendah memunculkan meningkatnya risiko ketergantungan dari penduduk lanjut usia. Tingkat pendidikan angkatan kerja didominasi oleh lulusan dasar dan menengah. Rasio ketergantungan usia produktif cenderung tinggi. Penanganan penduduk lanjut usia belum optimal.

3.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

3.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Beberapa permasalahan pembangunan yang terkait aspek kesejahteraan ekonomi meliputi kemiskinan, daya beli masyarakat, tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

Gambar III-1 Permasalahan Kesejahteraan Ekonomi Kota Cirebon



Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon

Kemiskinan masih menjadi permasalahan pokok di Kota Cirebon meskipun berbagai pendekatan dan sejumlah upaya untuk menekan laju pertumbuhan masyarakat miskin telah dilakukan. Permasalahan kemiskinan yang multidimensional melibatkan banyak aspek yang kompleks, termasuk aspek sosial, ekonomi dan politik. Masalah kemiskinan sebagai hal utama yang harus dianalisis untuk perencanaan pembangunan ke depan secara holistik. Faktor penyebab masyarakat menjadi miskin antara lain karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan yang buruk, pengangguran dan ketidakstabilan pekerjaan, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, infrastruktur dan akses sumber daya yang buruk termasuk akses yang terbatas terhadap air bersih, sanitasi, dan listrik serta adanya siklus kemiskinan dimana kemiskinan seringkali diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Faktor-faktor lain seperti ketidaksetaraan gender, kondisi alam, faktor budaya dan kebijakan pemerintah dapat memperburuk masalah kemiskinan di Kota Cirebon.

Jumlah penduduk miskin di kota Cirebon tahun 2023 sebesar 29.490 jiwa atau sekitar 9,16% jauh di atas persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat yang sebesar 7,62%. Jika dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 1,29 di tahun 2023 menandakan jarak pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin dekat, angka ini masih di atas angka Provinsi Jawa Barat yang sebesar 1,17. Sedangkan berdasarkan indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,29 di tahun 2023 menandakan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil, angka ini masih di atas angka Provinsi Jawa Barat yang sebesar 0,27. Menghapus kemiskinan menjadi tujuan pertama dari agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu penurunan kemiskinan ekstrim menjadi 0% di tahun 2030. Jumlah penduduk miskin ekstrim kota Cirebon tahun 2022 sebesar 5.320 jiwa atau sekitar 1,66% yang harus ditangani oleh Pemerintah Kota Cirebon menuju 0%.

Berdasarkan hasil kajian kemiskinan Kota Cirebon Tahun 2023 diketahui bahwa karakteristik kemiskinan di Kota Cirebon yang paling kritis ada pada dimensi pendidikan, kepala rumah tangga miskin masih banyak yang lulusan

SD dan SMP, berikutnya dimensi demografi dan kepemilikan aset. Wilayah kantong kemiskinan berada di kecamatan Harjamukti dan kecamatan Lemahwungkuk. Menyelesaikan permasalahan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial yang terkoordinasi. Upaya-upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan akses terhadap sumber daya, dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata dapat membantu memerangi kemiskinan secara efektif.

Tingkat pengangguran masih tinggi. Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak seimbang dengan permintaan pasar kerja, serta masih rendahnya kualitas SDM menjadi salah satu faktor penyebab masih tingginya angka pengangguran. Persentase pengangguran terbuka terbanyak menurut tingkat pendidikan yang paling banyak adalah pada tingkat pendidikan SLTA ke bawah, terutama tingkat pendidikan SD dan SMA. Untuk tingkat pendidikan SMA Kejuruan, bahkan persentasenya meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Pemda Kota Cirebon untuk dapat mengatasinya.

Daya beli masyarakat masih rendah. Berdasarkan data paritas daya beli Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2023, pengeluaran per kapita kota Cirebon berada di urutan keempat terendah diantara 9 kota di Jawa Barat. Daya beli Masyarakat kota Cirebon dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, termasuk pajak, harga barang dan jasa, nilai tukar mata uang, suku bunga, ketersediaan kredit, tingkat pekerjaan dan pengangguran, serta tingkat pendapatan riil masyarakat.

Ketimpangan pendapatan masih tinggi. Berdasarkan data indeks gini kota Cirebon tahun 2023 sebesar 0,468 masih cukup tinggi di atas angka Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Distribusi pendapatan masyarakat kota Cirebon makin kurang merata disebabkan beberapa hal seperti kesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan yang kurang merata, kesenjangan pasar kerja, kebijakan pajak dan jaminan sosial yang tidak memadai atau kurang progresif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang kurang merata di berbagai sektor menyebabkan perbedaan pendapatan yang besar antar kelompok masyarakat yang berbeda serta keterbatasan akses ke pelayanan sosial dapat memperburuk kondisi hidup dan menghambat kesempatan individu untuk meningkatkan pendapatannya.

3.1.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Permasalahan kesejahteraan sosial budaya.

Gambar III-2 Permasalahan Kesejahteraan Sosial Budaya Kota Cirebon



Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon

Belum meratanya akses layanan sosial. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya verifikasi dan validasi data penduduk miskin secara berkala.

Masih minimnya upaya pelestarian budaya Cirebon. Kebudayaan Kota Cirebon merupakan warisan yang sangat berharga dan tidak dapat diabaikan dalam sejarah dan budaya, terutama yang dibawa oleh Sunan Gunung Jati. Kota Cirebon dikenal dengan kekayaan budaya yang sangat beragam, yang berasal dari perkembangan kerajaan di masa lalu seperti Keraton Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, dan Keprabonan serta berkembangnya budaya Arab dan Cina menjadikan kebudayaan Cirebon memiliki ciri khas tersendiri. Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai tantangan dalam mempertahankan budaya asli Kota Cirebon. Tradisi lisan dan nilai-nilai kearifan lokal dalam perayaan adat istiadat kurang dihidupkan, belum terciptanya lembaga adat dan minimnya pendukung kegiatan adat istiadat, masih adanya benturan antara nilai-nilai ritus dengan paham keagamaan, minimnya kreasi atau inovasi baru dalam seni kreatif khas Cirebon, minimnya tingkat apresiasi seni budaya, permainan rakyat, olahraga tradisional dan minimnya pemeliharaan bangunan dan situs cagar budaya. Selain itu komitmen dan dukungan regulasi belum optimal.

Meningkatnya kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Kekerasan pada anak di Kota Cirebon masih perlu menjadi perhatian, jumlah keseluruhan kasus kekerasan pada anak dan perempuan masih diatas 50 kasus per tahun. Meski beberapa program perlindungan perempuan dan anak yang telah dilaksanakan, akan tetapi kekerasan terhadap anak dan perempuan masih tetap belum menurun dengan drastis. Terjadi peningkatan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2021 ke 2022 dengan berawal dari 26 kasus menjadi 35 kasus. Pada kasus kekerasan terhadap anak, terjadi peningkatan pada tahun 2023 dimana sebelumnya pada tahun 2022 terdapat 28 kasus, pada 2023 terdapat 36 kasus yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun secara akumulasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun, masih terjadi peningkatan pada masing-masing kategori kasus kekerasan.

Belum optimalnya pembangunan keluarga disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya terdapat fenomena disfungsi keluarga, masih tingginya keluarga yang rentan secara ekonomi, serta rendahnya pemahaman dan keterampilan dalam manajemen keluarga. Kurangnya perencanaan keuangan dan pengasuhan anak juga dapat mempengaruhi efektivitas pembangunan keluarga. Menurut penilaian BKKBN, untuk iBANGGA Kota Cirebon berada pada posisi normal. Akan tetapi perlu mempertahankan dan melakukan peningkatan karena capaian daerah yang setara lebih tinggi dari capaian Kota Cirebon.

Peningkatan Indeks Ketimpangan Gender yang disebabkan turunnya Indeks Pemberdayaan Gender. Hal tersebut salah satu penyebabnya adalah turunnya persentase perempuan pada Parlemen. Data menunjukkan fluktuasi dalam Indeks Ketimpangan Gender Kota Cirebon dari tahun ke tahun. Sementara ada periode-periode perbaikan yang signifikan seperti pada tahun 2019-2020 dimana terjadi penurunan indeks ketimpangan sebesar 0,126 poin.

Tren terbaru menunjukkan adanya kembali peningkatan ketimpangan dimana pada tahun 2023 meningkat sebanyak 0,127 poin.

Masih rendahnya peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

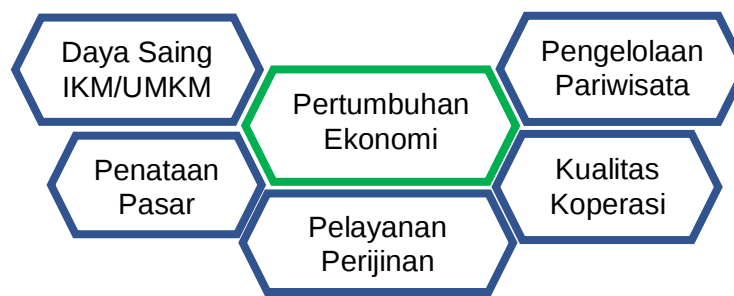
Kurangnya peran pemuda antara lain disebabkan oleh kurangnya anggota aktif yang memiliki komitmen dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan organisasi kepemudaan, kurangnya pemanfaatan teknologi dengan efektif untuk menarik perhatian pemuda, minimnya jumlah fasilitator atau pelatih yang berpengalaman dan berkualitas sehingga program tidak berjalan efektif, serta kurangnya program pelatihan yang memadai untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan organisasi di kalangan anggota muda dapat menghambat proses kaderisasi.

3.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

3.1.3.1 Daya Saing Ekonomi

Permasalahan daya saing ekonomi di Kota Cirebon.

Gambar III-3 Permasalahan Daya Saing Ekonomi Kota Cirebon



Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon

Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cirebon bertumbuh masih lamban di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 perlu menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kota Cirebon. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon sebelum terjadi pandemi terhitung dari 2013-2019 sebesar 5,83 persen. Angka ini belum mampu digapai lagi pada pertumbuhan ekonomi pasca terjadi pandemi. Pertumbuhan ekonomi kota Cirebon sebelum terjadi pandemi berada di atas LPE Provinsi Jawa Barat dan berada di posisi ke 8 nilai LPE Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Namun di tahun 2022 LPE Kota Cirebon berada di bawah LPE Provinsi Jawa Barat dan berada di peringkat 15 nilai LPE Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Posisi LPE yang belum mampu menembus angka rata-rata menjadi hal yang sangat penting untuk diantisipasi karena menunjukkan masih terdapat pelemahan untuk pencapaian LPE tahun selanjutnya. Hal ini dibuktikan dengan capaian LPE tahun 2023 yang sebesar 5,01%, hampir menyentuh angka LPE tahun 2013 yang sebesar 4,90%. Perlambatan LPE ini disebabkan oleh menurunnya sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Beban perlambatan LPE ini juga perlu mendapatkan perhatian pada Indeks Gini dimana pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon belum dapat merata dirasakan oleh semua masyarakat Kota Cirebon. Indeks Gini Kota Cirebon tahun 2023 masih sebesar 0,468 persen. Angka ini masih berada di atas angka Indeks Gini Provinsi Jawa Barat yang sebesar 0,425 persen dan Indeks Gini Nasional yang sebesar 0,388.

Permasalahan lain yang terjadi pada aspek daya saing ekonomi yaitu belum optimalnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal yang disebabkan oleh beberapa hal seperti:

- daya saing IKM/UMKM yang masih rendah; disebabkan karena masih terbatasnya pemasaran produk UMKM & IKM, masih terbatasnya akses keuangan UMKM pada lembaga keuangan, masih terbatasnya inovasi dalam pengembangan produk UMKM & IKM
- Belum optimalnya pemanfaatan shelter bagi sektor informal;
- Belum maksimalnya penataan dan pengelolaan pasar tradisional dari kualitas layanan dan okupansi kios pasar;
- Kurang signifikannya peningkatan kualitas koperasi;
- Belum optimalnya pengelolaan pariwisata lokal dan industri kreatif sebagai sektor ekonomi potensial;

Belum optimalnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal menjadi masalah pokok yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di Kota Cirebon. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon terus tumbuh dan meningkat, namun pada kenyataannya indeks Gini juga ikut meningkat yang berarti bahwa pembangunan ekonomi belum dapat dirasakan merata bagi semua lapisan masyarakat dan masih terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan antar golongan dan antar wilayah. Investasi yang masuk di daerah kurang mendorong tumbuhnya investasi lokal, dimana produk-produk unggulan daerah masih mengalami hambatan di bidang pemasaran, permodalan, pemanfaatan teknologi dan informasi, sehingga kerjasama ekonomi antar wilayah maupun antar pelaku ekonomi lokal belum menunjukkan sinergitas. Pertumbuhan potensi ekonomi lokal masih terkendala pada kurangnya akses sumber daya seperti modal, teknologi dan pelatihan, infrastruktur yang kurang memadai, akses pasar, minimnya inovasi dan ketergantungan daerah terhadap ketersediaan dan produksi pangan.

Daya saing IKM/UMKM yang masih rendah. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya pemasaran produk UMKM & IKM, masih terbatasnya akses keuangan UMKM pada lembaga keuangan, masih terbatasnya inovasi dalam pengembangan produk UMKM & IKM. IKM/UMKM di Kota Cirebon memiliki potensi yang besar namun terdapat kurangnya akses ke pasar, dalam hal ini masih terdapat UMKM yang masih belum mampu menjangkau pasar yang lebih luas, selain itu akses keuangan pun menjadi salah satu kendala, dimana masih banyak UMKM yang kesulitan dalam mendapatkan akses untuk pembiayaan dikarenakan keterbatasan dalam menghasilkan laporan keuangan yang memadai, dan yang menjadi pengaruh dalam rendahnya daya saing IKM/UMKM yaitu karena digitalisasi yang terbatas, sebagaimana perkembangan yang terjadi di Indonesia yang sudah berada pada era 4.0, mengharuskan untuk semuanya dapat melek terhadap teknologi termasuk para pelaku IKM/UMKM. Dengan paham dan mengerti mengenai digitalisasi ini sebenarnya akan membantu para pelaku usaha untuk dapat meningkatkan jangkauan pasar dan daya saing, namun memang belum sepenuhnya

IKM/UMKM dapat memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi.

Masih terbatasnya pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maupun Industri Kecil dan Menengah. Kedudukan Kota Cirebon sebagai pusat perdagangan dan jasa bertumpu pada aktivitas ekonomi yang dibentuk dari UMKM dan IKM. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemasaran produk UMKM dan IKM di Kota Cirebon yaitu minimnya unit atau pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi dan sistem informasi. Hal tersebut menciptakan kesenjangan digital yang menghambat UMKM dan IKM dalam menjangkau pasar secara luas. Selain itu, jejaring usaha dan pemerintah belum terbentuk secara maksimal. Jejaring usaha seperti pusat perbelanjaan (minimarket, department store, dan supermarket) dan platform *online* swasta yang dapat bermitra dengan UMKM, IKM serta pemerintah sebagai merchant. Adapun E-TUKU (Telusuri Harga Komoditas Kotaku) merupakan platform yang diinisiasi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah masih terbatas hanya memberikan informasi mengenai harga komoditas yang berada di pasar tradisional.

Masih terbatasnya akses keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maupun Industri Kecil dan Menengah. Tidak hanya dari sisi pemasaran, permasalahan pengembangan UMKM dan IKM yaitu akses keuangan. Kendala ini mencakup pemahaman UMKM dan IKM terhadap akses keuangan. Padahal sumber keuangan untuk menjadi modal diperlukan untuk ekspansi, pembelian peralatan, dan peningkatan kapasitas produksi. Keterbatasan akses keuangan ini juga membatasi inovasi dan pertumbuhan bisnis di tingkat mikro dan kecil.

Masih terbatasnya inovasi dalam pengembangan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maupun Industri Kecil dan Menengah. Kendala ini terutama disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, dana riset dan pengembangan, teknologi dan keahlian inovatif. UMKM dan IKM seringkali menghadapi keterbatasan dalam mengadopsi teknologi terkini, seperti perangkat lunak terkemuka atau mesin produksi canggih. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk meningkatkan efisiensi, kualitas produk, dan daya saing di pasar. Selain itu, kurangnya kolaborasi antara pelaku industri, lembaga riset, dan lembaga pendidikan juga dapat membatasi pertukaran ide dan pengetahuan inovatif. Hal lain yang mendasari yaitu kurangnya minat pelaku usaha untuk meningkatkan skala usaha yang ditunjukkan dengan kurang signifikannya rasio pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil atau menengah.

Belum optimalnya pemanfaatan shelter bagi sektor informal. Aktivitas ekonomi informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) dan klemprakan merupakan hal yang banyak ditemukan di area perkotaan. Dari jumlah PKL yang terdata sebanyak 1.672 PKL hanya 133 PKL yang dapat difasilitasi shelter, artinya masih ada 1.539 PKL yang perlu difasilitasi. Lokasi Kawasan Tertib Lalu Lintas yang seharusnya bebas dari PKL namun masih ditemukan PKL yang melakukan aktivitas sehingga menimbulkan hambatan lalu lintas pada ruas tersebut. Hal yang lain yang menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan shelter yaitu rendahnya minat PKL untuk menempati shelter yang telah disediakan. Pemerintah Kota Cirebon hingga tahun 2022 telah membangun 3 shelter yaitu Alun-Alun Kejaksan, Samping BJB Siliwangi, dan Pujabon masing-

masing shelter pada tahun 2022 terisi dengan 50 PKL; 13 PKL; dan 70 PKL. Selain itu, berdasarkan laporan dari Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2023 masih ada penindakan/penertiban pelanggar PKL dan aduan masyarakat terhadap PKL.

Belum maksimalnya penataan dan pengelolaan pasar tradisional, baik dari segi kualitas layanan maupun okupansi kios pasar. Kota Cirebon secara administratif termasuk kota sedang memiliki sebanyak 12 pasar sebagai sarana perdagangan yang dikelola Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan. Pasar-pasar yang ada di Kota Cirebon tidak hanya melayani penduduk dalam kota, melainkan wilayah sekitarnya. Kelengkapan barang, jasa, dan komoditas pangan yang ada di pasar tradisional menjadi alasan tingginya aktivitas ekonomi di Kota Cirebon. Hanya saja, hal tersebut belum sejalan dengan penataan dan pengelolaan pasar tradisional. Kurangnya perhatian terhadap penataan infrastruktur fisik, mobilitas barang dan manusia mempengaruhi kenyamanan pengunjung yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi pada pasar tradisional. Selain itu, rendahnya kualitas layanan yang diberikan oleh pedagang dan manajemen pasar dapat mempengaruhi pengalaman belanja masyarakat sebagai pelanggan. Okupansi kios pasar yang kurang optimal juga mencerminkan kurangnya daya tarik atau fasilitas yang memadai bagi pedagang. Diperlukan upaya serius dalam perbaikan infrastruktur pasar, pelatihan untuk meningkatkan pelayanan, serta strategi manajemen untuk mengoptimalkan okupansi kios.

Kurang signifikannya peningkatan kualitas koperasi. Kualitas koperasi menjadi esensial untuk keberlanjutan dan kontribusi yang lebih efektif terhadap perkembangan ekonomi lokal. Pada perkembangannya, pertumbuhan koperasi aktif dan sehat belum signifikan pada tahun 2018 sejumlah 240 unit lalu pada tahun 2022 sejumlah 270 unit. Dalam meningkatkan kualitas koperasi untuk menjalankan usaha/bisnis, masih terdapat koperasi yang belum memenuhi kelengkapan legalitas usaha. Faktor-faktor seperti manajemen yang masih konvensional, kurangnya akses terhadap sumber daya finansial, dan kurangnya pemberdayaan anggota koperasi, pola kemitraan antara koperasi dan usaha mikro-kecil belum optimal menyebabkan kurangnya inovasi dan daya saing koperasi.

Belum optimalnya pengelolaan pariwisata lokal dan industri kreatif sebagai sektor ekonomi potensial. Kinerja sektor pariwisata Kota Cirebon masih berada di bawah potensi yang dimiliki Kota Cirebon disebabkan oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan yang cenderung masih rendah. Daya tarik wisata utama Kota Cirebon berasal dari wisata budaya dan sejarah. Potensi pariwisata budaya dan sejarah tidak sepenuhnya milik pemerintah Kota Cirebon, namun berada pada wilayah Keraton sehingga diperlukan kolaborasi dan sinergi yang baik antara Pemerintah Kota Cirebon dengan pihak Keraton untuk memajukan pariwisata budaya dan sejarah tersebut. Dari aspek objek destinasi wisata (ODW), jumlah ODW tahun 2019 hingga tahun 2022 tidak signifikan yaitu 54 ODW menjadi 65 ODW. Pada perkembangannya kunjungan wisatawan 95% masih didominasi oleh wisatawan dalam negeri. Adapun kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi pada tahun 2019 yaitu 190.004 wisatawan, namun sejak

tahun 2020 kunjungan wisatawan mancanegara cenderung kurang signifikan. Perkembangan kunjungan wisatawan dipengaruhi berbagai hal seperti kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan event-event yang diselenggarakan di Kota Cirebon belum secara signifikan mampu meningkatkan kunjungan wisata skala internasional. Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah kolaborasi aktor dari pengelola obyek wisata, Pemerintah Daerah, akademisi, praktisi baik yang individu maupun tergabung dalam asosiasi/perhimpunan, serta masyarakat sekitar obyek wisata.

Pariwisata di Kota Cirebon memberikan *multiplier effect* bagi sektor-sektor ekonomi lainnya, sehingga dapat dikatakan pariwisata merupakan sektor ekonomi potensial di Kota Cirebon. Pariwisata menjadi salah satu pendorong terbentuknya ekosistem industri kreatif di Kota Cirebon. Peluang dan potensi dari industri kreatif belum tergali secara mendalam karena keterbatasan data pendukung. Pada tahun 2019, hasil kajian Bidang Penelitian dan Pengembangan Kota Cirebon memetakan potensi industri kreatif didominasi sektor kuliner sebesar 79%, 10,85% sub sektor fashion, 5% subsektor kriya, dan kurang dari 5% subsektor desain interior dan desain visual, seni rupa, dan seni pertunjukan. Selain dari faktor basis data industri kreatif, faktor penghambat pengembangan industri kreatif di Kota Cirebon yaitu kompetensi SDM industri kreatif masih di skala lokal, transformasi digital yang belum merata, promosi dan pemasaran belum efektif menjangkau pasar baru, serta kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai.

3.1.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Permasalahan pada aspek daya saing sumber daya manusia meliputi kualitas sumber daya manusia, kompetensi tenaga kerja dan literasi digital.

Gambar III-4 Permasalahan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kota Cirebon



Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon

Kesenjangan kualitas sumber daya manusia di Kota Cirebon menjadi masalah serius yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Kesenjangan Kualitas Sumber Daya Manusia yang disebabkan oleh permasalahan-permasalahan seperti:

- Rendahnya peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia
- Masih terdapat penduduk usia produktif yang memiliki daya saing rendah
- Rendahnya penggunaan identitas budaya Cirebon di masyarakat
- Belum meratanya derajat Kesehatan masyarakat
- Masih adanya kesenjangan kualifikasi pendidikan di masyarakat.
- Belum optimalnya kinerja dan pengembangan ASN

Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas dapat menciptakan kesenjangan kualitas SDM di tingkat kota. Ketidakmerataan dalam infrastruktur pendidikan seperti kurangnya sekolah, perpustakaan, atau fasilitas penunjang pendidikan lainnya di beberapa wilayah kota dapat membatasi akses dan kualitas pendidikan. Permasalahan pokok pada aspek sumber daya manusia di Kota Cirebon adalah adanya kesenjangan kualitas sumber daya manusia yang terlihat dari masih tingginya Indeks Gini, persentase kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Tidak adanya kesempatan yang setara untuk pengembangan keterampilan dan karir di wilayah Kota Cirebon dapat menciptakan kesenjangan kualitas sumber daya manusia. Faktor-faktor ini dapat mencakup kurangnya pelatihan keterampilan, program magang, atau peluang pekerjaan yang setara. Kemudian, perbedaan dalam kondisi lingkungan dan kesehatan di wilayah Kota Cirebon dapat mempengaruhi kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Kesenjangan kesehatan dan lingkungan dapat menciptakan perbedaan dalam kualitas hidup dan ketersediaan sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Semua hal di atas membuat Kota Cirebon harus menghadapi tantangan berupa masih terdapat penduduk usia produktif yang memiliki daya saing rendah yang diikuti dengan rendahnya penggunaan identitas budaya Cirebon di masyarakat. Kemudian, untuk mendukung kehidupan bermasyarakat, Kota Cirebon mempunyai permasalahan berupa belum meratanya derajat Kesehatan masyarakat dan masih adanya kesenjangan kualifikasi pendidikan di masyarakat. Dengan begitu Kota Cirebon perlu meningkatkan kualitas SDM dari berbagai sisi kehidupan.

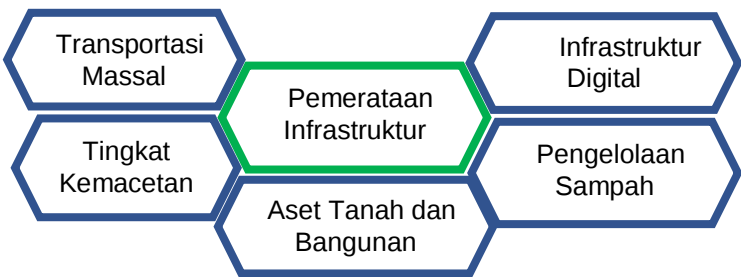
Belum optimalnya literasi digital dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu faktor penghambat dalam meningkatkan daya saing SDM di Kota Cirebon adalah minimnya literasi digital dan pemanfaatan TIK. Masyarakat masih minim kemampuan digital skill dalam kehidupan sehari-hari serta masih rendah kemampuan masyarakat melindungi data pribadi dan keamanan digital. Terlebih lagi pemanfaatan TIK belum sepenuhnya digunakan untuk kegiatan produktif.

Terdapat gap kompetensi tenaga kerja. Penurunan pengangguran dan penyerapan tenaga kerja Kota Cirebon masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat. Kompetensi angkatan kerja yang masih rendah disebabkan karena angkatan kerja didominasi oleh lulusan SMA ke bawah. Selain itu, jenis pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan belum memadai. Angkatan kerja didominasi oleh lulusan SMA ke bawah. Hal ini menyebabkan produktivitas tenaga kerja daerah tinggi akan tetapi tidak disertai dengan peningkatan pendapatan per kapita.

3.1.3.3 Daya Saing Infrastruktur

Permasalahan daya saing infrastruktur di Kota Cirebon

Gambar III-5 Permasalahan Daya Saing Infrastruktur Kota Cirebon



Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon

Layanan infrastruktur yang belum merata. Penyediaan infrastruktur maupun sarana prasarana kota sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan mobilitas dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal, keberadaan layanan infrastruktur harus terdistribusi merata. Layanan infrastruktur strategis saat ini terkonsentrasi di pusat perkotaan, belum sepenuhnya mempertimbangkan sebaran pusat-pusat aktivitas di wilayah lainnya. Hal ini dikarenakan belum optimalnya perencanaan sebaran infrastruktur untuk dapat melayani wilayah kota Cirebon secara efektif. Selain itu masih terdapat keterbatasan dalam pembiayaan maupun kendala pengadaan lahan untuk penyediaan infrastruktur baru. Hal ini dipengaruhi oleh masih minimnya upaya pelibatan di luar pemerintah salah satunya terlihat pada belum optimalnya keterlibatan swasta dalam penyediaan infrastruktur.

Sistem transportasi massal yang belum optimal. Transportasi massal yang disediakan oleh pemerintah Kota Cirebon dalam rangka mengurangi kemacetan belum berjalan optimal. Keberadaan transportasi massal BRT belum dapat dirasakan secara meluas oleh warga Kota Cirebon, armada yang berjumlah 10 hanya baru beroperasi 4 armada dengan satu rute. Layanan BRT belum menjangkau seluruh area wilayah Kota Cirebon dan belum terintegrasi dengan moda transportasi lainnya sehingga perlu adanya perencanaan jaringan transportasi yang komprehensif dengan merespon kebutuhan pergerakan lintas wilayah.

Tingkat kemacetan di Kota Cirebon belum tertangani

Titik kemacetan terjadi di pusat-pusat aktivitas yang kerap terjadi pada saat jam sibuk dan pada akhir pekan, antara lain di lokasi fasilitas Pendidikan, perbelanjaan, lokasi tujuan wisata dan titik-titik pertemuan jalur lalu lintas. Adanya perlintasan sebidang dengan jalur kereta api ikut menambah Tingkat kemacetan di Kota Cirebon. Hal lain yang menyebabkan kemacetan adanya perilaku ketidakdisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.

Pengelolaan sampah di TPA belum optimal. Saat ini penyelesaian penanganan masalah sampah masih menggunakan metode sanitary landfill, sementara volume sampah semakin besar. Seharusnya penanganan sampah sudah dilakukan pengurangan dari sumbernya melalui pengelolaan sampah 3R (*recycle, reduce, dan reuse*) seperti bank sampah, pusat daur ulang, dan

pengomposan masih belum optimal dan masih jauh dari target. Kapasitas dan daya tampung fasilitas pengelolaan sampah Kota Cirebon yaitu TPA Kopi Luhur juga masih sangat terbatas. Sisanya sampah dibakar, ditimbun, dibuang sembarang (illegal dumping) oleh Masyarakat. Perlu digalakkan program pemerintah untuk melakukan pengurangan sampah mulai dari tingkat rumah tangga. Keberadaan bank sampah perlu ditingkatkan lagi, pada saat ini baru ada 74 bank sampah yang terdaftar namun hanya 25 yang masih aktif beroperasi dan 2 bank sampah yang baru beroperasi.

3.1.3.4 Daya Saing Investasi

Permasalahan daya saing investasi di Kota Cirebon meliputi perizinan, ruang dan insentif.

Gambar III-6 Permasalahan Daya Saing Investasi Kota Cirebon



Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon

Belum optimalnya sinergitas pelayanan perizinan. Kebijakan *Online Single Submission* untuk kemudahan izin berusaha menjadi tantangan tersendiri untuk Pemerintah Daerah. Tantangan itu berupa pengendalian atas pemanfaatan ruang dan pengawasan terhadap jenis usaha. Terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah investor terutama investor dalam negeri, dari tahun 2020 sebanyak 304 investor menjadi 3.825 investor pada tahun 2021. Jumlah investor penanaman modal dalam negeri Kota Cirebon pada OSS hingga tahun 2023 terus meningkat. Dalam implementasi OSS, masih ditemui kendala diantaranya Keterbatasan SDM atau tim teknis dalam asesmen perijinan, dukungan regulasi daerah terhadap masing-masing jenis perizinan belum optimal. Hal lainnya masih dijumpai kendala dalam proses bisnis pelayanan perizinan dimana kinerja pertimbangan teknis perizinan belum berjalan efektif.

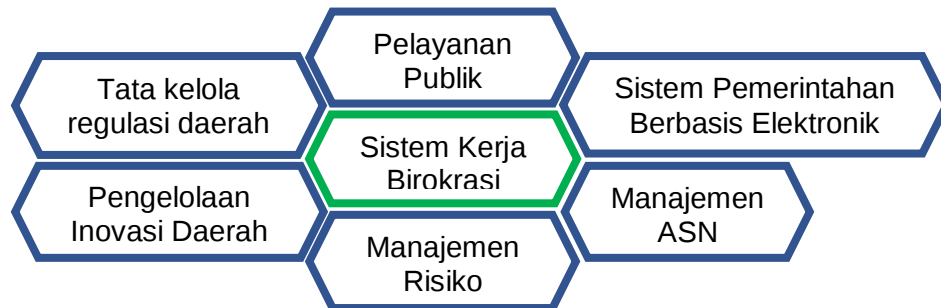
Regulasi terkait insentif investasi masih terbatas. Regulasi terkait insentif kemudahan investasi masih terbatas. masih didominasi oleh investasi risiko rendah. Pada level pemerintahan, insentif terhadap kemudahan investasi PMA maupun PMDN seperti insentif pajak dan retribusi daerah, dan subsidi bunga kredit modal kerja masih terbatas dalam penyelenggaraan investasi dan penanaman modal daerah. Model-model inisiatif dalam menyediakan skema insentif kredit modal kerja perlu diperluas skala implementasinya.

Belum optimalnya kepastian ruang untuk investasi. Investasi membutuhkan alokasi ruang dan infrastruktur pendukung yang diatur di dalam rencana tata ruang wilayah dalam rangka memberikan kepastian berusaha, serta efisiensi dalam penyediaan infrastruktur wilayah. Alokasi ruang untuk investasi belum sepenuhnya diimbangi dengan layanan infrastruktur pendukung sehingga mengurangi daya saing investasi wilayah. Selain itu, akses informasi investasi bagi investor masih belum optimal.

3.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan pada aspek pelayanan umum di Kota Cirebon meliputi sistem kerja birokrasi, tata kelola regulasi daerah, pelayanan publik, sistem pemerintahan berbasis elektronik, manajemen ASN, manajemen risiko, pengelolaan inovasi daerah.

Gambar III-7 Permasalahan Aspek Pelayanan Umum Kota Cirebon



Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon

Belum optimalnya sistem kerja birokrasi. Birokrasi semestinya lebih efektif, responsif, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Walaupun kondisi geografis dan demografis Kota Cirebon lingkungannya lebih Kecil dibandingkan Kota/Kabupaten lain, Kota Cirebon memiliki siklus kehidupan yang padat yang berasal dari luar Kota Cirebon. Kota Cirebon menjadi pusat keramaian dari daerah sekitar yaitu Kota dan Kabupaten se-Ciayumajakuning serta Kota Cirebon memiliki mobilitas yang tinggi. Hal tersebut yang secara tidak langsung harus membuat Kota Cirebon untuk meningkatkan kualitas sistem kerja pada birokrasi yang belum optimal dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam urusannya agar tercipta kondisi yang lebih efektif dan efisien. Untuk menghadapi hal tersebut, dibutuhkan kesadaran dan kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik secara merata yang pada kenyataannya belum terimplementasikan oleh semua pihak penyelenggara pemerintahan. Selain itu, dibutuhkan juga pengintegrasian sistem berbasis teknologi dengan sistem pemerintahan untuk mendukung optimalnya sistem kerja birokrasi.

Belum optimalnya tata kelola regulasi daerah. Dukungan regulasi merupakan hal mendasar dalam membangun sistem bagi terselenggaranya pelayanan umum yang efektif dan efisien. Belum optimalnya tata kelola regulasi di kota Cirebon disebabkan karena proses bisnis pembentukan regulasi daerah yang belum berjalan optimal, belum tersedianya dukungan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan SOP pembentukan regulasi daerah dan koordinasi antar Perangkat Daerah yang kurang berjalan dengan baik. Hal ini dapat menghambat efektivitas dan efisiensi regulasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu diperlukan komitmen pengendalian dan penegakan regulasi daerah agar berjalan konsisten serta peningkatan kapasitas SDM lembaga.

Belum optimalnya kualitas pelayanan publik. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, Kota Cirebon membutuhkan penerapan teknologi informasi pada sistem pelayanan publik. Untuk menghadapi permasalahan penduduk yang semakin kompleks dan mendukung jalannya proses pelayanan publik, dibutuhkan peningkatan kompetensi dan

keterampilan sumber daya manusia aparatur yang akan menciptakan inovasi yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat Kota Cirebon dalam proses pengambilan keputusan dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak memenuhi kebutuhan riil masyarakat.

Belum optimalnya Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Di tengah perkembangan teknologi informasi dan penerapan teknologi digital yang semakin luas di berbagai aspek kehidupan mengubah cara kerja dan berinteraksi masyarakat, membuka peluang untuk makin berinovasi dan lebih efisien. Digitalisasi dalam pemerintahan mendukung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, adaptif, transparan, dan akuntabel. Permasalahan pemerintah Kota Cirebon dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu kurangnya kesiapan infrastruktur teknologi informasi, belum optimalnya pelayanan publik yang mengadopsi teknologi digital dan belum terintegrasinya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, pengembangan inovasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik masih perlu peningkatan kolaborasi antara sektor pemerintah, sektor swasta serta akademisi.

Belum optimalnya Manajemen Aparatur Sipil Negara. Manajemen ASN yang baik sangat mempengaruhi kualitas pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengelolaan manajemen ASN pemerintah Kota Cirebon perlu memperhatikan kapasitas dan kualitas SDM yang dimiliki, sistem penghargaan dan sanksi, serta penerapan system. Belum optimalnya manajemen ASN di pemerintah Kota Cirebon disebabkan oleh beberapa hal seperti sistem penghargaan dan sanksi yang kurang memadai, penerapan sistem merit belum berjalan sepenuhnya, hal ini disebabkan karena masih adanya resistensi terhadap perubahan, kurangnya transparansi dalam proses penilaian dan keputusan promosi. Selain itu juga belum diterapkan manajemen talenta, pendistribusian SDM belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan unit kerja.

Belum tersedianya Manajemen Risiko yang handal. Manajemen risiko yang efektif pada pemerintah daerah dapat secara langsung meningkatkan kualitas pelayanan umum di daerah. Belum tersedianya manajemen risiko yang handal disebabkan beberapa hal yaitu kurangnya kompetensi dalam identifikasi, penilaian dan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur yang kurang terstruktur dalam manajemen risiko, kurangnya komitmen dan dukungan manajemen puncak. Selain itu belum optimalnya penerapan manajemen risiko di pemerintah Kota Cirebon karena manajemen risiko yang kurang terintegrasi dengan baik sehingga MR belum menjadi bagian dalam pengambilan keputusan, kurangnya pemahaman tentang pentingnya MR sehingga dalam penyusunan perencanaan belum mempertimbangkan risiko, sistem pemantauan dan penilaian yang lemah sehingga kurangnya umpan balik dan perbaikan dalam penerapan manajemen risiko.

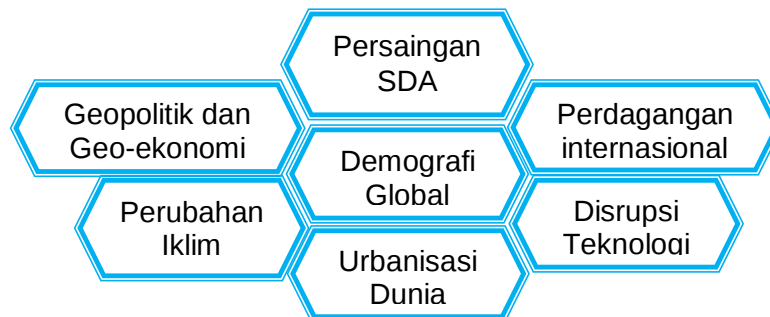
Pengelolaan inovasi Daerah. Belum terbentuk ekosistem inovasi daerah yang efektif disebabkan karena belum tersedia regulasi daerah untuk pengembangan inovasi daerah dan belum optimalnya dukungan kelembagaan

dalam pengelolaan inovasi daerah. Selain itu keikutsertaan pemerintah kota dalam gelaran inovasi masih minim, kemitraan dan kolaborasi belum optimal.

3.2. Isu Strategis Sesuai Konteks

3.2.1. Isu Global

Gambar III-8 Isu Global



Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon

3.2.1.1 Isu Geopolitik dan Geoekonomi

Persaingan dan dominasi negara-negara besar dalam kancah politik dan perekonomian global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian dunia. Perang dagang, dan konflik yang hingga saat ini masih berlangsung di Kawasan Timur Tengah, Eropa Timur dan Laut Cina Selatan-Indo Pasifik dapat memberikan efek secara global baik langsung maupun tidak langsung. Kondisi ini menuntut setiap Negara termasuk Indonesia untuk terus waspada sehingga dapat meminimalkan dampak negatif atau memaksimalkan peluang yang ada. Dalam jangka panjang hal ini dapat mendorong globalisasi Dimana setiap negara membangun kemandirian dan ketahanan dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas rantai pasok global. Di tengah tensi geopolitik yang ada, Kawasan Indo-Pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka berbagai peluang yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan luar negeri menjadi *windows of opportunity* sebagai bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global.

3.2.1.2 Isu Global Perubahan Iklim

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh seluruh dunia pada abad ke-21. Peningkatan emisi gas rumah kaca, akibat dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan produksi industri, telah menyebabkan pemanasan global. Pada Januari 2023 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) menyatakan pemanasan global diperkirakan mencapai 1,21°C. Dalam 30 tahun, pemanasan global ini dapat berlanjut hingga mencapai 1,5°C. Tantangan perubahan iklim mencakup dampak ekstrem pada cuaca, kenaikan permukaan air laut, perubahan pola hujan, dan kerugian keanekaragaman hayati. Fenomena cuaca ekstrem, seperti badai yang lebih kuat, kebakaran hutan yang meluas, dan gelombang panas yang ekstrim, semakin sering terjadi, mengancam keberlanjutan ekosistem dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Perubahan iklim juga menghadirkan tantangan untuk ketahanan pangan,

mengingat perubahan pola hujan dan suhu dapat mempengaruhi produksi tanaman dan peternakan. Dampak perubahan iklim ini kemudian melahirkan kesepakatan kebijakan global dalam pembangunan rendah karbon untuk menurunkan intensitas emisi pada sektor-sektor tertentu. Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan Perjanjian Paris tentang Perubahan iklim dinyatakan melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC). Komitmen ini menjadi dasar bagi Indonesia dalam merancang kebijakan nasional sebagai bentuk upaya menurunkan intensitas emisi karbon dalam aktivitas pembangunan nasional.

A. Demografi Global

Pertumbuhan populasi dunia terus bertambah meskipun laju pertumbuhannya bervariasi. Di negara berkembang umumnya memiliki tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi sedangkan di negara maju terjadi peningkatan jumlah penduduk usia lanjut akibat peningkatan angka harapan hidup. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 milyar penduduk. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok usia tua dan tingginya penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan penyediaan lapangan pekerjaan. Menurut UNDP, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di Kawasan perkotaan pada tahun 2050, Dimana 95% pertambahan tersebut berada di negara *emerging economic*. Di Asia dalam 4 (empat) dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Sebanyak 25-30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di Kawasan permukiman tanpa pelayanan dasar yang memadai seperti air, drainase, sanitasi, listrik dan jalan.

B. Urbanisasi Dunia

Urbanisasi mengacu pada peningkatan jumlah orang yang tinggal di kota-kota dibandingkan dengan pedesaan. Lebih dari setengah populasi dunia sekarang tinggal di kota. Semakin banyak orang yang pindah ke kota-kota besar menyebabkan pertumbuhan pesat di daerah perkotaan, kota menjadi semakin padat, lebih luas dan saling berhubungan. Kota besar semakin meningkat, hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat di perkotaan dengan keterbatasan sumber daya alam dan lahan. Ini dapat memperburuk masalah perumahan, lalu lintas, polusi, konsumsi energi dan ketidaksetaraan sosial. Kebutuhan akan pangan, air, energi semakin meningkat, selain itu urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke wilayah sekitar berimplikasi pada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat permukiman dan kawasan perdagangan/jasa.

C. Perdagangan Internasional

Globalisasi dapat mempercepat integrasi ekonomi dunia, dengan berbagai tantangan dan dinamika yang mempengaruhi bagaimana negara-negara saling bertukar barang dan jasa. Perdagangan internasional adalah bidang yang sangat kompleks dan dinamis dengan dampak yang luas terhadap ekonomi global, lingkungan dan kesejahteraan sosial. Adanya perjanjian perdagangan

bebas (FTA) menimbulkan ketimpangan ekonomi antar negara maju dengan negara berkembang karena negara maju memiliki keunggulan kompetitif dalam hal teknologi, inovasi, infrastruktur yang lebih unggul dan memiliki akses pasar yang lebih luas daripada negara berkembang. Manfaat dari perdagangan bebas lebih banyak dirasakan oleh perusahaan besar atau yang memiliki keterampilan tinggi, sebaliknya kelompok berpenghasilan rendah atau industri tradisional tidak merasakan manfaatnya, hal ini dapat memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Perdagangan internasional juga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama ketika produksi dan transportasi barang meningkatkan emisi karbon, deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam. Upaya yang dapat dilakukan menghadapi perdagangan internasional perlu adanya penguatan industri lokal, diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan agar lebih tahan terhadap guncangan eksternal.

D. Disrupsi Teknologi

Saat ini terjadi transformasi mendasar secara menyeluruh yang berkaitan dengan sistem perkembangan teknologi digital. Disrupsi teknologi mengubah cara hidup, bekerja dan berinteraksi. Teknologi baru seperti otomatisasi, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), robotika akhirnya mempermudah aktivitas dan pekerjaan manusia. Era disrupsi teknologi membuat segala hal menjadi mudah, instan, dan modern. Pekerjaan rutin yang berbasis keterampilan rendah semakin digantikan oleh mesin menyebabkan bertambahnya pengangguran. Disrupsi teknologi juga dapat memperlebar kesenjangan ekonomi bagi mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi baru dan mereka yang tertinggal. Masyarakat yang mampu beradaptasi akan mendapatkan manfaat lebih besar. Teknologi baru seringkali berkembang lebih cepat dari pada regulasi yang mengaturnya. Hal ini menimbulkan tantangan dalam memastikan bahwa teknologi baru digunakan dengan cara etis dan tidak merugikan masyarakat, selain itu faktor keamanan data dan privasi menjadi hal yang perlu diperhatikan.

E. Persaingan Sumber Daya Alam

Persaingan sumber daya alam seringkali memicu munculnya konflik dan ketegangan antar negara. Isu persaingan ini disebabkan karena kelangkaan sumber daya alam seperti minyak, gas alam, air bersih, mineral langka yang semakin menipis akibat dari eksploitasi yang berlebihan. Sumber daya alam yang melimpah dapat menjadi kekuatan ekonomi suatu negara, negara yang kaya akan sumber daya alam cenderung menjadi sasaran investasi asing namun disisi lain bisa menghadapi risiko eksploitasi. Eksploitasi sumber daya alam berdampak pada kerusakan lingkungan, termasuk deforestasi, pencemaran air dan perubahan iklim.

3.2.2. Isu Global Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development*

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu pendekatan dalam pengembangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini muncul sebagai tanggapan terhadap tantangan global terkait pertumbuhan populasi, perubahan iklim, kemiskinan,

dan kehilangan keanekaragaman hayati. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan maka dibangunlah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goal (SDG's). SDG's dibangun berdasarkan lintasan historis yang telah dirintis oleh negara-negara dan PBB, termasuk The Economic and Social Council (ECOSOC) yang merupakan salah satu organisasi bagian dari PBB. Agenda SDGs berisi 17 Tujuan yang tersebar ke dalam empat pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola. Pada setiap Goal terdapat 1 (satu) atau lebih target (total terdapat 169 target), dan pada setiap target, terdapat 1 (satu) atau lebih indikator (per April 2022 terdapat total 248 indikator). SDG's terdiri dari 17 Tujuan yang mencakup empat pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola. Setiap tujuan diarahkan untuk mencapai hasil yang berkelanjutan dalam bidang-bidang ini, sehingga keseluruhan pembangunan lebih seimbang dan menyeluruh.

Terdapat tujuh isu Pembangunan Berkelanjutan di Kota Cirebon yaitu:

1. Kemiskinan dan perlunya Penguatan daya saing SDM dan perlindungan sosial.
2. Belum Optimalnya Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan pelayanan dasar yang merata, terjangkau dan inklusif.
3. Optimalisasi ruang kota tanpa melampaui daya dukung dan daya tampungnya.
4. Kerentanan terhadap bencana alam dan Perubahan Iklim.
5. Optimalisasi Pertumbuhan Potensi Ekonomi Lokal.
6. Kecukupan, keamanan, dan pemanfaatan pangan
7. Tata Kelola Pemerintahan dan kerja sama dengan daerah berbatasan.

3.2.3. Isu Nasional

Gambar III-9 Isu Nasional



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat

3.2.3.1 Bonus Demografi

Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke 4 (empat) terbesar didunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah yang dilihat dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* (PISA) siswa Indonesia tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382,00 dimana capaian tersebut masih dibawah siswa dari negara-negara OECD yaitu sebesar 488,33. Selain itu produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar 7.274,9 USD dimana angka tersebut berada dibawah rata-rata kawasan ASEAN. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 (lima belas) tahun ke depan. Dengan penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya.

3.2.3.2 Ekonomi Hijau dan Biru

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan dari pandemi COVID-19 namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai “tulang punggung” nya. Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Sementara itu, paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu-isu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi.

3.2.3.3 Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, serta Ketahanan Bencana

Kenaikan suhu global tahun 2022 mencapai 0,89 dibandingkan suhu pada tahun 1900 dan dikhawatirkan akan terus meningkat melampaui 1,5°C. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Indonesia turut berkontribusi dalam Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global. Pada tahun 2020 Indonesia berkontribusi sebesar 2,67 persen dari total emisi global (*Our World*

in Data Based on the global Carbon project, 2022). Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim penting dan mendesak guna mengurangi risiko perubahan iklim. Dampak krisis perubahan iklim sudah lebih parah dari yang diperkirakan khususnya pada aspek ketahanan pangan, ketersediaan air, kesehatan, kemiskinan dan kematian.

Daya dukung sumber daya alam merujuk pada kemampuan suatu lingkungan atau ekosistem untuk memberikan sumber daya alam yang dapat digunakan oleh manusia tanpa merusak atau merugikan kapasitas alamiahnya untuk memperbaharui atau mempertahankan sumber daya tersebut. Ini mencakup air, tanah, hutan, energi, dan keanekaragaman hayati.

Daya tampung kualitas air diperkirakan akan terus menurun mengakibatkan krisis air bersih seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Daya tampung kualitas udara juga sudah melampaui standar baku mutu dimana konsentrasi rata-rata tahunan polusi terus meningkat dan berada di atas baku mutu. Daya tampung lahan mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas dimana sebanyak 11 provinsi memiliki kondisi buruk akibat kebakaran hutan dan lahan. Daya tampung lingkungan laut mengalami penurunan karena aktivitas yang tidak berkelanjutan dan peningkatan persaingan akan laut.

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun per tahunnya. Di Indonesia terdapat 18.000 km garis pantai berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi. Kondisi tersebut diperparah dengan daya dukung hutan dan lahan sawah yang diperkirakan akan terus menurun. Selain itu, daya dukung ketersediaan air juga menunjukkan tren menuju kelangkaan khususnya di wilayah Jawa. Adapun, daya dukung ekosistem laut diprediksi akan mengalami kerentanan seiring dengan kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut yang diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan.

3.2.3.4 Perpindahan IKN

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta baik dari sisi konsumsi, impor ekspor perdagangan antar daerah, serta belanja pemerintah pusat di wilayah tersebut. Potensi kehilangan belanja pemerintah pusat ke wilayah DKI diperkirakan mencapai 90 persen dari total keseluruhan belanja. Keterkaitan aktivitas perekonomian yang erat menjadikan perpindahan IKN akan berdampak langsung terhadap kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat. Dampak yang diakibatkan berupa penurunan PDRB sebesar 0,06 persen, serta upah nyata di sektor pertanian turun sebesar 0,49 persen, sehingga dampaknya perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan

ketimpangan pendapatan yang telah menjadi permasalahan di Provinsi Jawa Barat.

3.2.3.5 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan tren pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dari potensi daerah yang ada. Tujuan pemekaran wilayah pada dasarnya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing daerah. Tren pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang memiliki peranan stimulan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Di samping itu perlu adanya peningkatan kualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah dimana kualitas belanja daerah sangat mempengaruhi terhadap pencapaian indikator makro daerah.

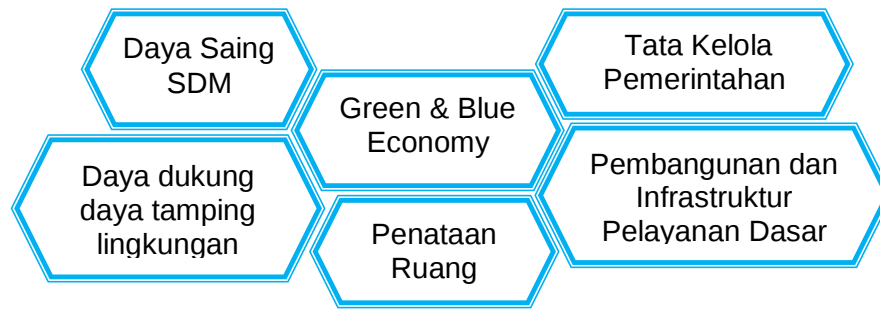
3.2.3.6 Konektivitas dan Infrastruktur Dasar

Terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas *hinterland* (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan. Rendahnya jangkauan jaringan serat optik sebagai layanan digital yang berkualitas dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler di daerah terpencil menjadi tantangan nasional. Kedepannya, selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa masalah lain yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun. Dalam pemenuhan infrastruktur dasar, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Selain itu, pelayanan tenaga listrik belum optimal dan belum berkelanjutan.

3.2.4. Isu Jawa Barat

Isu strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dirumuskan berdasarkan permasalahan yang dihadapi sampai dengan tahun 2023, isu pembangunan dalam *West Java Development Forum* (WEDF), serta tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi dalam periode 2025-2045 yang meliputi isu global, nasional, dan regional Jawa Bali. Berdasarkan hal tersebut di atas maka isu strategis Provinsi Jawa Barat untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

Gambar III-10 Isu Jawa Barat



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat

3.2.4.1 *Green dan blue economy* serta pembangunan inklusif

Perekonomian yang berkelanjutan mencakup pergeseran sektor-sektor perekonomian menjadi lebih bersih, pengarusutamaan *green economy* dan *blue economy*. Perekonomian yang bersih atau "*clean economy*" mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Ekonomi biru atau "*blue economy*" mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan secara berkelanjutan. Ini mencakup pemanfaatan laut, samudra, dan sumber daya yang terkait, sambil mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan pembangunan inklusif adalah pembangunan yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah

3.2.4.2 Kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Kualitas sumber daya manusia mencakup kualifikasi pendidikan, keterampilan, pengetahuan, derajat kesehatan, karakter sosial budaya dan produktivitas. Karakter sosial budaya yang inklusif adalah sosial budaya yang terbuka dan ramah serta saling menghargai. Sosial budaya yang inklusif memiliki peran penting untuk membentuk identitas suatu masyarakat dan individu, serta berperan dalam Pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Daya saing sumberdaya manusia mengacu pada kemampuan untuk bersaing secara efektif dalam pasar kerja global serta kontribusi pada pembangunan.

3.2.4.3 Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar

Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur dasar antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat serta antara perkotaan dan pedesaan mengakibatkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan akses layanan dasar masyarakat di wilayah tersebut. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Provinsi Jawa Barat bagian selatan seperti infrastruktur jalan, sumberdaya air dan irigasi, kesehatan, pendidikan, dan digital akan meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah Jawa Barat. Untuk mengurangi kesenjangan wilayah perkotaan dan perdesaan, dibutuhkan akselerasi pembangunan infrastruktur layanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal

di wilayah pedesaan. Sementara di wilayah perkotaan, pertumbuhan yang pesat dalam jangka panjang perlu diimbangi dengan layanan infrastruktur fasilitas perkotaan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

3.2.4.4 Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka panjang perlu mengedepankan prinsip-prinsip berkelanjutan dari daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penggunaan bahan baku yang lebih efisien dan terbarukan serta mempertahankan nilai produk, bahan dan sumber daya perekonomian sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya. Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pemanfaatan sumber daya serta kehidupan sosial budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan batas-batas pertumbuhan serta mewujudkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pembangunan jangka Panjang.

3.2.4.5 Keberlanjutan penataan ruang

Keberlanjutan penataan ruang merujuk pada upaya untuk mengembangkan dan memelihara lingkungan yang seimbang antara kebutuhan manusia dengan keberlangsungan ekosistem alam, penggunaan teknologi dan inovasi dalam perencanaan, penggunaan lahan yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta pengembangan transportasi yang ramah lingkungan seperti transportasi publik dan penggunaan kendaraan listrik. Keberlanjutan penataan ruang menjadi krusial karena pertumbuhan populasi dan perkotaan yang pesat mengakibatkan tekanan besar terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan ini, diharapkan pembangunan dapat berjalan seimbang dengan kebutuhan lingkungan dan keberlangsungan generasi mendatang, dalam hal pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, energi dan pangan.

3.2.4.6 Kualitas tata kelola pemerintahan

Kualitas tata kelola pemerintahan merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti transparansi, akuntabilitas, kolaborasi, partisipasi publik, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan responsif. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3.2.5. Isu Regional Pengembangan Kawasan Rebana

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Cirebon didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 87/2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Berdasarkan Peraturan tersebut, percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan. Pengembangan kawasan tersebut berbasis *eco-industry*, yang dilakukan melalui pembangunan *eco-industrial park* atau kawasan industri berwawasan lingkungan.

Dalam kebijakan percepatan pembangunan kawasan Rebana, arah fungsi kawasan Kota Cirebon sebagai Kawasan Perkotaan diarahkan sebagai Pusat Perkotaan Inti. Kota Cirebon sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dengan peran untuk melayani kegiatan skala internasional. Kawasan Rebana KPI Cirebon (Kota Cirebon dan Kab. Cirebon) dengan spesialisasi investasi: Industri pengolahan makanan dan minuman, furnitur dan barang dari kayu, perkapalan, pakan, dan bahan galian non logam, bahan bangunan, pengolahan garam konsulasi, dan pengolahan *hotmix* dan beton.

Beberapa program yang akan dikembangkan di Kota Cirebon diantaranya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap I & Tahap II dan Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan. Merespon hal tersebut terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh Kota Cirebon untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan perkembangan kota dengan adanya pengembangan kawasan Rebana tersebut. Perkembangan kawasan peruntukan industri di pengembangan Rebana akan membawa dampak bagi pergerakan arus barang dan orang yang melewati Kota Cirebon. Hal ini harus dipandang sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan oleh Kota Cirebon untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon.

3.3. Isu Strategis Kota Cirebon

Isu strategis kota Cirebon dirumuskan dengan mempertimbangkan rumusan permasalahan yang signifikan, perumusan isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat, perumusan isu strategis Nasional dan rumusan isu strategis global. Dari pertimbangan tersebut diperoleh rumusan isu strategis Kota Cirebon sebagai berikut:

3.3.1. Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia.

Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia merupakan isu penting yang berdampak langsung pada kemajuan ekonomi, sosial dan pembangunan suatu daerah. Rendahnya peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia demi kemajuan ekonomi kota menjadi hal yang harus diperhatikan secara serius. Pemerintah Kota Cirebon telah melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Beberapa kebijakan tersebut termasuk dalam upaya penguatan pemberdayaan masyarakat termasuk didalamnya upaya peningkatan kualitas keluarga, peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial, akselerasi pertumbuhan, dan pemerataan pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan produktivitas daya saing daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan dan pengembangan budaya. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mewujudkan kota kreatif berbasis budaya dan sejarah serta mengatasi permasalahan seperti peningkatan angka kemiskinan, penurunan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kenaikan jumlah pengangguran. Selain itu, terdapat juga upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran di wilayah Kota Cirebon.

Gambar III-11 Isu Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat

3.3.2. Optimalisasi Pertumbuhan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing Tinggi, Inklusif, dan Berkelanjutan

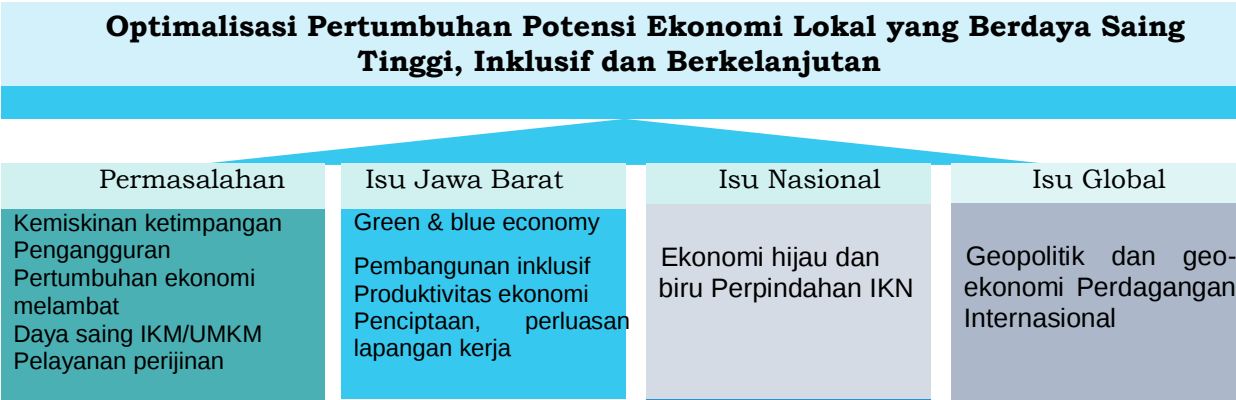
Potensi ekonomi lokal yang memiliki daya saing tinggi, inklusif, dan berkelanjutan menciptakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi lokal Kota Cirebon mengacu pada aktivitas ekonomi yang tumbuh dan memiliki potensi daya saing. Cakupan aktivitas ekonomi lokal di Kota Cirebon seperti UMKM, IKM, sektor ekonomi kreatif, pariwisata lokal, perikanan, termasuk aktivitas yang terjadi pada pasar tradisional dan modern.

Pertama-tama, fokus pada daya saing tinggi menuntut pemanfaatan sumber daya lokal, pengembangan inovasi, dan peningkatan produktivitas. Dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif, komunitas lokal dapat menonjolkan sektor-sektor unggulannya dalam pasar global. Selanjutnya, inklusivitas dalam konteks ini menekankan pentingnya memberdayakan semua lapisan masyarakat, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah serta industri kecil dan menengah. Dengan menyediakan akses terhadap pelatihan, pendanaan, dan pasar, ekonomi lokal inklusif menciptakan peluang yang setara untuk pertumbuhan usaha bagi semua. Terakhir, aspek berkelanjutan merujuk pada prinsip-prinsip pembangunan yang memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menerapkan praktik-praktik yang ramah lingkungan, mendukung pekerjaan yang layak, dan mempromosikan inklusif sosial adalah kunci untuk mencapai ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dengan memadukan ketiga dimensi ini, potensi ekonomi lokal dapat dioptimalkan, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat dan memperkuat daya saing di tingkat yang lebih luas.

Dampak yang akan ditimbulkan ketika isu ini mampu diintervensi dengan baik yaitu peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, peningkatan kapasitas pelaku usaha dari segi akses keuangan, inovasi produk, pemasaran, dan adaptasi teknologi, peningkatan jaringan infrastruktur pendukung sarana ekonomi, peningkatan daya saing potensi ekonomi dari sektor pariwisata dan industri kreatif, dan peningkatan peluang investasi yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.

Gambar 3.13

Isu Optimalisasi Pertumbuhan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing Tinggi, Inklusif, dan Berkelanjutan



3.3.3. Ketahanan Pangan dan Air

Isu ketahanan pangan dan air adalah tantangan yang semakin mendesak akibat pertumbuhan populasi, urbanisasi, perubahan iklim dan tekanan terhadap sumber daya alam. Keduanya saling terkait karena air adalah elemen krusial dalam produksi pangan. Rentannya ketahanan pangan, kecukupan terhadap nilai produksi/pengadaan pangan kota harus diantisipasi demi meningkatkan angka kecukupan pangan, pola pangan harapan dan mengurangi malnutrisi. Masalah pokok ketahanan pangan di Kota Cirebon mencakup tingginya ketergantungan terhadap ketersediaan dan produksi pangan, yang dapat menyebabkan kerentanan terhadap gangguan pasokan dan fluktuasi harga pangan. Pertama-tama, ketergantungan pada pasokan pangan luar kota atau bahkan luar provinsi dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan pasokan, terutama dalam situasi darurat atau krisis kesehatan seperti pandemi. Terbatasnya produksi lokal juga dapat berdampak negatif terhadap ketahanan pangan, mengingat adanya risiko gangguan dalam rantai pasokan yang panjang.

Selain itu, faktor perubahan iklim dan bencana alam dapat mempengaruhi produksi pangan lokal di Kota Cirebon. Jika kota ini terlalu bergantung pada pasokan dari luar wilayah, kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam dapat meningkat, menyebabkan ketidakpastian dalam ketersediaan pangan. Dalam konteks ini, diversifikasi sumber pasokan pangan dan pendorong produksi lokal menjadi krusial. Mendorong pertanian perkotaan, mendukung petani lokal, dan membangun sistem distribusi pangan yang efisien dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar kota. Inisiatif ini juga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat lokal dan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, edukasi masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan lokal dan budaya makanan sehat dapat memberikan dukungan kepada usaha lokal dan meningkatkan ketahanan pangan di tingkat komunitas. Pembangunan kebijakan yang mendukung inisiatif pertanian perkotaan dan penyediaan insentif bagi pelaku usaha lokal juga menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah ketergantungan pada pasokan dan produksi pangan di Kota Cirebon. Dengan demikian, upaya bersama dari pemerintah, pelaku

usaha, dan masyarakat dapat membantu membangun ketahanan pangan yang lebih kokoh dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Sebagai wilayah yang memiliki karakteristik urban ketersediaan air merupakan isu penting dalam menjamin keberlangsungan aktivitas dari skala rumah tangga hingga aktivitas ekonomi dalam berbagai tingkatan. Sayangnya ketersediaan air justru menjadi salah satu tantangan geografis di Kota Cirebon dimana tidak terdapat banyak sumber air bersih yang memadai untuk mencukupi kebutuhan masyarakat kota secara mandiri. Kurangnya ketersediaan kualitas, kuantitas kontinuitas, dan keterjangkauan layanan dan sumber air dan layanan sanitasi kota menjadi persoalan serius yang harus diatasi.

Gambar III-12 Isu Ketahanan Pangan dan Air



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat

3.3.4. Optimalisasi Ruang Kota Tanpa Melampaui Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan

Optimalisasi ruang kota menjadi sangat penting dalam konteks pertumbuhan perkotaan yang cepat dan berkelanjutan. Untuk menjawab kebutuhan populasi yang terus berkembang, diperlukan perencanaan perkotaan yang bijak dan berkelanjutan. Optimalisasi ruang kota adalah langkah untuk memastikan bahwa pertumbuhan perkotaan tidak melampaui daya dukung daya tampung lingkungan.

Ruang kota bukanlah sumber daya tidak terbatas, melainkan suatu ekosistem yang memerlukan pemeliharaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Optimalisasi ruang kota mencakup penggunaan lahan yang efisien, pelestarian ruang terbuka hijau, dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Hal ini, harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, keseimbangan ekosistem perkotaan, dan kemampuan alam untuk menanggung beban dari aktivitas manusia. Integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan perkotaan diharapkan dapat mengoptimalkan pertumbuhan perkotaan, menjaga keanekaragaman lingkungan, serta memastikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi penduduk kota. Minimnya perencanaan adaptasi, mitigasi, dan pengelolaan informasi kebencanaan kota.

Gambar III-13 Isu Optimalisasi Ruang Kota Tanpa Melampaui Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat

3.3.5. Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif mengacu pada upaya pemerintah Kota Cirebon untuk mengembangkan sistem tata kelola yang lebih baik dan efektif dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah dapat mencakup digitalisasi pelayanan publik, kolaborasi antar daerah dan pelaku pembangunan, koordinasi perencanaan dan penganggaran untuk percepatan pembangunan, serta peluang dan tantangan dalam penerapan kontrak kinerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Transformasi riset dan inovasi juga dapat membantu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Gambar III-14 Isu Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat

3.3.6. Kemantapan Jaringan Infrastruktur Perkotaan Yang Inklusif Dan Berketahanan Di Seluruh Wilayah

Kemantapan jaringan infrastruktur perkotaan yang mendukung kehidupan dan aktivitas masyarakat menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Cirebon. Isu kemantapan jaringan infrastruktur yang inklusif dan berketahanan berkaitan dengan bagaimana kota merencanakan, membangun, dan memelihara infrastruktur yang tidak hanya kuat dan tahan lama tetapi juga mampu mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat dan mampu bertahan serta pulih

dari berbagai tantangan dan bencana. Kemantapan jaringan infrastruktur meliputi sistem transportasi yang terintegrasi, kualitas jalan yang baik, ketersediaan energi dan kelistrikan, ketersediaan air minum dan sanitasi, infrastruktur pelayanan publik sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Gambar III-15 Isu Kemantapan Jaringan Infrastruktur Perkotaan Yang Inklusif Dan Berketahanan Di Seluruh Wilayah



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (25) menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Selanjutnya RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW, dimana Pembangunan daerah yang dilakukan dalam jangka panjang selama 20 tahun, diarahkan untuk tercapainya suatu tatanan masyarakat yang lebih baik dari kondisi saat ini.

Gambaran keadaan pada masa depan yang diinginkan disebut sebagai visi misi jangka panjang. Visi misi merupakan kondisi yang menjadi cita – cita serta merupakan harapan dan keinginan bersama dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan dokumen RPJPD. Perumusan Visi dan Misi merupakan upaya keadaan yang menjadi muara dari berbagai penyelesaian masalah yang sering disebut dengan isu strategis. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa visi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholder pembangunan daerah, yang mencerminkan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholder pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

4.1 VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (stakeholders) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Visi mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Visi daerah dituangkan dalam RPJPD, dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif.

4.1.1 Visi Indonesia Emas 2045

Cita-cita besar bangsa Indonesia adalah membangun Indonesia Emas 2045 sebagaimana tercermin dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Visi, 5 (lima) Sasaran Visi, 8 (delapan) Misi (Agenda), 17 (tujuh belas) arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. Melalui kerangka pikir ini, Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur mewujudkan Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan tepat pada 2045 kemerdekaan Indonesia berusia 100 tahun,

Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa visi abadi negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Visi abadi negara ini kemudian diterjemahkan kedalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, melalui misi abadi negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

4.1.2 Visi Jawa Barat 2045

Rumusan mengenai keadaan atau kondisi Provinsi Jawa Barat yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan, dan isu strategis Provinsi Jawa Barat serta penjabaran visi Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045, Pulau Jawa diarahkan sebagai Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan. Secara spesifik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2045 diarahkan sebagai pusat *cutting-edge industry*, inovasi dan pendidikan *Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics* (STEAM) bertaraf global serta penumpu ketahanan pangan nasional. Sebagai pusat *cutting-edge industry* harus memiliki pusat industri yang bertaraf global sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang didukung dengan kawasan sains dan teknologi. Sebagai pusat inovasi dan pendidikan STEAM bertaraf global harus mengintegrasikan sistem dan standar kualitas pendidikan internasional dengan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, sehingga mampu menghadapi tantangan masa depan dan mampu

bersaing secara global. Sebagai penunpu ketahanan pangan nasional harus memiliki sistem produksi pertanian, keanekaragaman pangan, keamanan pangan, keamanan lahan dan hak petani, infrastruktur yang maju, kawasan strategis agrikultur, serta kemitraan dan kolaborasi. Ketiga peran tersebut harus didukung infrastruktur yang berkualitas dan modern, terintegrasi dan handal; sistem pendidikan, kesehatan, dan pertanian yang maju dengan standar kualitas tinggi; serta pemerintahan yang kredibel, adaptif dan inovatif.

Visi Jawa Barat dirumuskan berdasarkan isu strategis antara lain Kualitas dan Daya Saing SDM, *Green* dan *Blue Economy* serta Pembangunan Inklusif, Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Keberlanjutan Penataan Ruang, Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dalam Pembangunan serta Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas, Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 adalah **Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan**. Rumusan visi tersebut diharapkan dapat menjadi komitmen, kesepakatan, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Visi ini tentunya akan menjadi acuan dalam perumusan Visi Kota Cirebon 2045.

4.1.3 Visi Kota Cirebon 2045

Rumusan mengenai keadaan Kota Cirebon yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun mendatang dilakukan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, capaian hasil pembangunan yang telah dilakukan selama ini, isu-isu strategis di Kota Cirebon, juga berupaya menjabarkan visi Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan, di samping tentunya juga sebagai bagian dari penjabaran visi Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan kebijakan pengembangan kewilayahan pada Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon ditetapkan sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning dengan fokus pengembangan diarahkan sebagai Kawasan perkotaan inti dari Pusat Kegiatan Nasional dengan sarana prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (*hinterland*), serta menjadi simpul utama pelayanan jasa dan perdagangan, dan industri di daerah bagian timur, serta untuk kegiatan wisata budaya dan religi. Hal ini kemudian diterjemahkan dalam tujuan pembangunan pada Rencana Tata Ruang Kota Cirebon untuk mewujudkan Kota Cirebon sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis budaya dan sejarah yang kreatif, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Daerah Kota dalam mendukung PKN dan WP Ciayumajakuning. Peran ini menjadi bagian dari hal penting yang melatari perumusan Visi Kota Cirebon 2045.

Selanjutnya, Visi Kota Cirebon 2045 disusun berdasarkan analisis terhadap potensi dan permasalahan pembangunan yang ada. Visi Kota Cirebon 2045 mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat. Rumusan Visi harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian daerah yang ingin dicapai.

Tabel IV-1 Perumusan Visi RPJPD Kota Cirebon

Masalah Pokok	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
Aspek Sumber Daya Manusia Kesenjangan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing	Kota Cirebon Maju, Sejahtera, Berkelanjutan
Aspek Ekonomi Belum optimalnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal Kerentanan pangan	Peningkatan Potensi Ekonomi Lokal	
Aspek Infrastruktur Sistem Transportasi Massal belum optimal Penanganan banjir/genangan di Kota Cirebon Tingkat kemacetan di Kota Cirebon belum tertangani Pengelolaan Sampah di TPA belum optimal Kondisi Infrastruktur Perkotaan Kurang merata Perlu peremajaan terhadap kondisi infrastruktur non fisik/jaringan informasi digital	Kemantapan infrastruktur yang inklusif dan berketahanan secara merata.	
Aspek Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan	Transformasi Birokrasi yang inovatif, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.	
Aspek Lingkungan Hidup Degradasi kualitas lingkungan hidup perkotaan	Kualitas Lingkungan Hidup Ruang Kota yang berkelanjutan	

Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon 2024

Berdasarkan Perumusan Visi RPJPD di atas, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon tahun 2025-2045 adalah:

“KOTA CIREBON MAJU, SEJAHTERA, BERKELANJUTAN”

Beberapa kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Visi RPJPD di atas, penjelasannya sebagaimana berikut ini :

Maju : Kota Cirebon Memiliki Ekonomi Yang Berdaya Saing, Infrastruktur Yang Mantap Serta Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif.

Pada tahun 2045 kualitas sumber daya manusia Kota Cirebon telah memiliki kompetensi yang daya saing sesuai dengan kebutuhan zaman yang beradaptasi dengan teknologi dalam berbagai sektor termasuk dukungan infrastruktur dalam pencapaiannya berdasarkan kebutuhan masyarakat secara adil dan merata.

Sumber daya manusia yang berkualitas akan membantu peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dengan naungan pemerintah yang memiliki tata kelola yang juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Sejahtera : Masyarakat Kota Cirebon memiliki derajat kesehatan, kualitas pendidikan, pekerjaan, dan tingkat sosial yang layak, memiliki ketahanan, kemandirian dan produktif.

Kesejahteraan masyarakat dengan pendidikan STEAM yang mumpuni dalam berinovasi didukung kesegaran jasmani dan rohani sehingga dapat mandiri dan produktif. Hal ini akan memperbaiki tingkat sosial dan ketahanan dalam menyongsong tahun 2045.

Berkelanjutan : Kemampuan kota untuk menjaga dan mendukung produktivitas masyarakat dan lingkungan dengan aman dan nyaman secara terus menerus tanpa terbatas waktu.

Sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dilindungi dan dijaga agar produktivitas masyarakat akan terus berlanjut seterusnya, sehingga kehidupan akan terasa aman dan nyaman dengan kemampuan penataan kota dalam pengelolaannya.

Ketercapaian Visi Kota Cirebon Maju, Sejahtera, Berkelanjutan akan ditunjukkan dengan 5 (lima) sasaran visi yaitu:

1. Peningkatan Pendapatan per Kapita
2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
3. Indeks Daya Saing Daerah
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
5. Penurunan Emisi GRK menuju *Net Zero Emission*

Tabel IV-2 Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Kota Cirebon dengan Sasaran Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat dan Sasaran Visi RPJPN Tahun 2025–2045

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD PROVINSI 2025-2045				RPJPD KAB/KOTA 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US\$)	5.500	30.300	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	57,14 – 57,42	273,17 – 325,25	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	92,34 – 91,98	109,04 – 161,12
		b. Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	54,65	495,56		b. -	-	-
		c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28		c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	41,15 – 41,38	46,43 – 47,60		c. Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan (%)	10,34	9,83
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 – 7,0	0,5 – 0,8	Kemiskinan dan ketimpangan menurun	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,35 – 5,85	0,09 – 0,34	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	7,58 – 8,37	0,12 - 0,76
		b. Rasio Gini (indeks)	0,379 – 0,382	0,377 – 0,320		b. Rasio gini (Indeks)	0,383 – 0,390	0,357– 0,380		b. Rasio gini (Indeks)	0,455 – 0,462	0,427 – 0,45
		c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	12,54	10,77		c. Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota (%)	1,10	1,14
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	<i>Global Power Index</i> (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kepemimpinan daerah di dunia internasional meningkat	Indeks Daya Saing Daerah (poin)*	3,87	5,00	Pengaruh daerah di dunia internasional meningkat	Indeks Daya Saing Daerah (poin)	3,70	4,70
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54 (2022)	0,73	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,56	0,69	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	77,91	84,68
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,61	75,84	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq/2010 IDR Milyar))	0,15	3,69
										b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,99	58,04

Sumber: RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, 2024 (diolah) *indikator proxy

4.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Berikut ini adalah Misi (Agenda) Pembangunan Nasional 2045, Misi Pembangunan Provinsi Jawa Barat 2045 dan Misi Pembangunan Kota Cirebon 2045 sebagai berikut :

4.2.1 Misi (Agenda) Pembangunan Nasional 2045

Berdasarkan dari visi yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri atas:

Gambar IV-1 Delapan (8) Misi (Agenda) Pembangunan 2045



Sumber: RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan;
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
8. Kesenambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Dalam proses pencapaian misi, dibutuhkan nilai-nilai ideal bagaimana misi tersebut dilaksanakan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang inovatif, ditopang oleh supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Mewujudkan misi juga harus didampingi dengan nilai proporsional yang berkaitan dengan karakter dan akar budaya yang terus dipegang sebagai identitas nasional.

Indonesia telah memiliki nilai dan kualitas yang luar biasa dalam mencapai misi pembangunan nasional. Nilai-nilai luhur Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi landasan kokoh dalam memenuhi agenda pembangunan nasional. Oleh sebab itu, berkaitan dengan misi yang mewujudkan Indonesia Emas 2045 terdapat satu nilai penting yang harus selalu dijunjung tinggi yaitu Kedaulatan Rakyat.

4.2.2 Misi Jawa Barat 2045

Berdasarkan visi yang telah dijelaskan diatas, diperlukan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan visi tahun 2045. Rumusan umum dalam bentuk pernyataan misi tersebut untuk memastikan aktivitas yang ditentukan mengarah pada terwujudnya kondisi-kondisi yang ingin dicapai. Karena itu, misi Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Provinsi Jawa Barat Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

Misi 1	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing
--------	--

Mengembangkan sumber daya manusia yang berakhlak dan berdaya saing dilakukan untuk membentuk masyarakat Provinsi Jawa Barat yang menggabungkan aspek moralitas dan profesional dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitasnya. Masyarakat Provinsi Jawa Barat diharapkan memiliki karakter, etika yang baik, pemahaman yang luas terhadap nilai-nilai budaya, menghormati perbedaan, memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang relevan serta mutakhir sesuai perkembangan zaman. Upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia tersebut diantaranya melalui perluasan akses dan perbaikan pelayanan kesehatan prima untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, pelatihan tenaga kerja sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja, dan peningkatan ketahanan sosial masyarakat.

Misi 2	Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif
--------	---

Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, tetapi juga memperhatikan dan mendukung kepentingan seluruh masyarakat, termasuk yang kurang beruntung. Upaya ini dilakukan melalui perubahan struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi yang lebih memberikan nilai tambah melalui peningkatan produktivitas ekonomi daerah, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kerja sama dan kolaborasi dengan sektor swasta, dan mendorong kewirausahaan lokal.

Misi 3	Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas, Akuntabel dan Inovatif
--------	--

Menguatkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, berkualitas, akuntabel, dan inovatif ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima. Upaya yang dilakukan yaitu dengan

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan hukum, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan publik, menguatkan ekosistem inovasi pemerintahan, meningkatkan kolaborasi penyelenggaraan pelayanan publik, dan meningkatkan manajemen ASN yang unggul.

Misi 4	Mewujudkan Provinsi yang Aman dan Tertib serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah
--------	--

Mewujudkan provinsi yang aman dan tertib serta menjaga stabilitas ekonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan daya saing daerah terutama berkaitan dengan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Jawa Barat. Untuk mewujudkan hal itu dilakukan dengan meningkatkan kualitas demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga ketentraman dan ketertiban umum, menjaga stabilitas ekonomi makro, serta meningkatkan kerja sama dengan dunia internasional.

Misi 5	Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan
--------	--

Mewujudkan masyarakat madani, berbudaya, maju, dan peduli lingkungan ditujukan untuk membentuk masyarakat inklusif yang memperhatikan nilai-nilai keadilan, keragaman sosial budaya, kemajuan, dan peduli akan keberlanjutan lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan kerukunan umat beragama, pengembangan budaya, peningkatan kualitas keluarga dan pemuda, peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan pangan, air, energi serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Misi 6	Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Inklusif
--------	---

Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang, mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur. Infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif menjadi salah satu kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah mencakup pengembangan jalan, sumber daya air dan irigasi, energi, telekomunikasi, dan transportasi.

Misi 7	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas
--------	---

Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas merupakan investasi masa depan yang ditujukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar mencakup pengembangan perumahan, air minum, sanitasi, dan persampahan secara terpadu.

Misi 8	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan
--------	---

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan ditujukan agar pembangunan per tahapan periode pembangunan dapat dilakukan secara berkesinambungan, Upaya ini dilakukan dengan kaidah pelaksanaan yang efektif disertai dengan pembiayaan yang berkelanjutan dan melaksanakan manajemen risiko yang efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan misi untuk mewujudkan visi **Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan**, dibutuhkan nilai-nilai ideal yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Nilai-nilai luhur Pancasila tentunya menjadi nilai dasar yang melandasi hal itu. Di samping itu, nilai-nilai yang sudah tertanam dalam masyarakat Provinsi Jawa Barat sebagaimana masyarakatnya dikenal lembut, periang, sopan, religius, dan menghormati orang tua patut menjadi landasan juga.

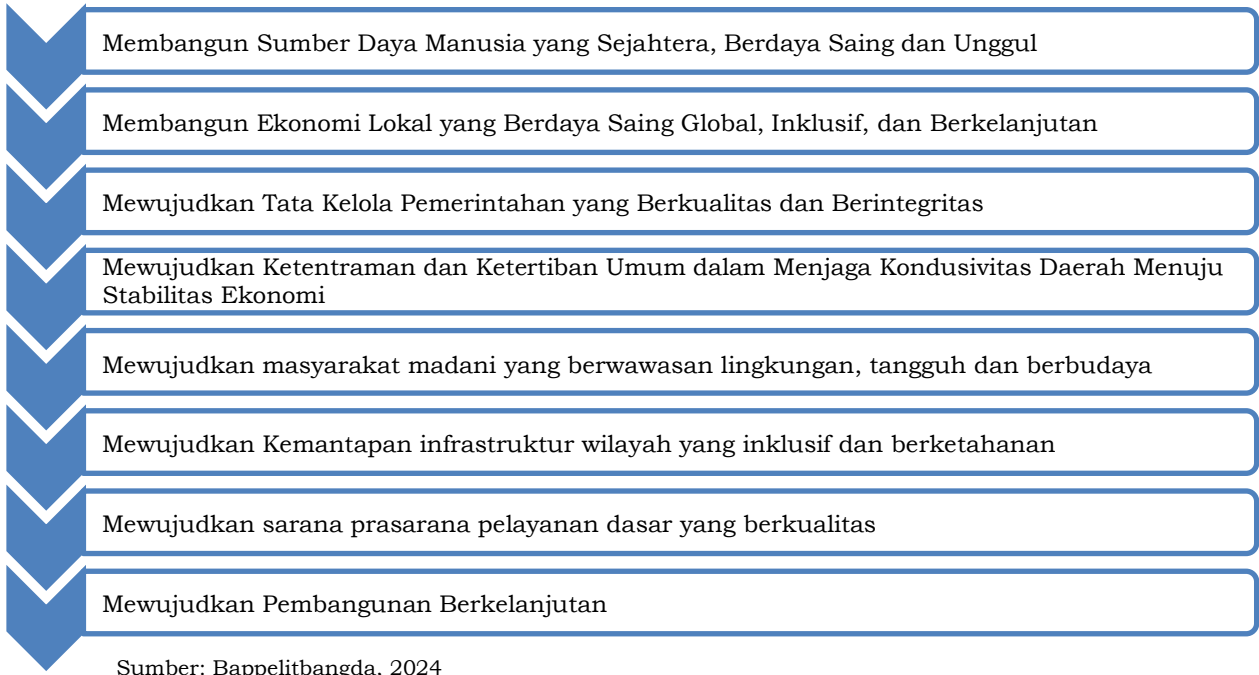
Nilai-nilai yang sudah tertanam dalam masyarakat tampak sebagaimana dalam ungkapan silih asih, silih asah dan silih asuh. Artinya saling mengasihi (mengutamakan sifat welas asih), saling menyempurnakan atau memperbaiki diri (melalui pendidikan dan berbagi ilmu), dan saling melindungi (saling menjaga keselamatan).

Adanya nilai-nilai yang menjadi dasar pelaksanaan misi, diharapkan Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan dapat diwujudkan. Dengan demikian, perwujudan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 merupakan bagian dari perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045.

4.2.3 Misi Kota Cirebon 2045

Berdasarkan Visi Kota Cirebon 2045 yaitu “Kota Cirebon Maju, Sejahtera, Berkelanjutan”, maka diperlukan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Hal ini tertuang dalam 8 (delapan) misi pembangunan yang ditetapkan sebagai berikut:

Gambar IV-2 Delapan (8) Misi Kota Cirebon 2045



Delapan misi Kota Cirebon tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misi 1	Membangun Sumber Daya Manusia yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Unggul
--------	--

Membangun Sumber Daya Manusia yang sejahtera diartikan bahwa Sumber Daya Manusia di Kota Cirebon dapat mengetahui apa yang menjadi nilai pribadi, tujuan dan prioritas, menjunjung tinggi integritas, mengembangkan pola pikir *growth mindset*, terus belajar dari manapun, mengembangkan pola pikir digital, bersikap proaktif, kreatif, dan inovatif, membangun relasi dan menciptakan personal branding, bersikap respek dan menghargai sesama, mengembangkan komunikasi yang efektif, adaptif dan berani keluar dari zona nyaman. Diharapkan, masyarakat Kota Cirebon tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi pada Pembangunan Kota Cirebon yang dilandasi nilai etika dan moral yang positif.

Misi 2	Membangun Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing Global, Inklusif, dan Berkelanjutan
--------	--

Membangun Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing Global, Inklusif, dan Berkelanjutan diartikan bahwa proses pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha/pasar untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang berbasis budaya dan sejarah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan peluang ekonomi dan menjamin akses yang adil bagi seluruh anggota masyarakat terhadap peluang ekonomi yang tercipta. Pertumbuhan yang inklusif memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi atas dasar kesetaraan terlepas dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda.

Misi 3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
--------	--

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan integritas adalah salah satu hal yang sangat penting. Upaya penguatan integritas yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dilakukan dengan mewujudkan proses layanan yang cepat, mudah dan transparan serta bebas dari KKN. Selain itu, dengan menerapkan Meritokrasi atau Sistem Merit yang merupakan sistem manajemen kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan diangkat, ditempatkan, dipromosikan sesuai kompetensi. Artinya bahwa ASN tersebut harus mempunyai keahlian dan profesionalisme sesuai kebutuhan jabatan yang akan dipangku.

Misi 4	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Menjaga Kondusifitas Daerah Menuju Stabilitas Ekonomi
--------	--

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketentraman dan ketertiban umum di Kota Cirebon yang dinamis memungkinkan pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tenang, tentram, tertib dan teratur. Pengaturan tentang ketertiban umum di Kota Cirebon bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada upaya menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian hidup. Kondusifitas daerah yang terbina dari ketentraman dan ketertiban umum diharapkan memberikan stabilitas bagi ekonomi Kota Cirebon, dimana perekonomian dapat berjalan sesuai rencana, terkendali dan berkesinambungan.

Misi 5	Mewujudkan masyarakat madani yang berwawasan lingkungan, tangguh dan berbudaya
--------	--

Mewujudkan masyarakat madani yang memiliki adab dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya. Dimana sistem tersebut didasarkan pada prinsip moral yang dapat menjamin keseimbangan antara kestabilan masyarakat dan kebebasan individunya dalam mengoptimalkan dan mensekresikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Masyarakat Kota Cirebon diharapkan mampu menjaga lingkungan hidupnya dan melakukan penanganan tanggap darurat bencana, serta menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya, nilai-nilai etnis dan moral yang hidup dalam budaya masyarakat.

Misi 6	Mewujudkan Kemantapan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berketahanan
--------	--

Terwujudnya infrastruktur wilayah yang dikelola dengan baik sehingga dapat berfungsi secara efisien, handal, dan aman dalam jangka waktu yang panjang merupakan investasi yang penting bagi masyarakat Kota Cirebon. Kemantapan infrastruktur Kota Cirebon di mana semua individu dan kelompok, termasuk yang rentan atau terpinggirkan, dapat mengakses dan menggunakan fasilitas dan layanan tersebut tanpa diskriminasi ingin diwujudkan untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam akses terhadap infrastruktur tersebut. Kota Cirebon sebagai salah satu wilayah yang strategis membutuhkan infrastruktur yang mantap dengan

penggunaan teknologi canggih dan perencanaan tata ruang yang tepat. Dengan demikian, Kota Cirebon mampu memberikan manfaat yang inklusif dan berketahanan untuk memastikan bahwa infrastruktur dapat memenuhi kebutuhan saat ini serta menyesuaikan diri terhadap tantangan di masa depan.

Misi 7	Mewujudkan sarana prasarana pelayanan dasar yang berkualitas
Mewujudkan sarana prasarana pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat Kota Cirebon berarti memastikan bahwa infrastruktur yang digunakan untuk menyediakan layanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan transportasi, memiliki standar kualitas yang tinggi. Sarana prasarana pelayanan dasar yang berkualitas mencakup kemudahan akses oleh semua orang di seluruh wilayah Kota Cirebon, tersedia secara konsisten dan memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi masyarakat, memenuhi standar keamanan, kebersihan, maupun kenyamanan, dan dipastikan keberlanjutan fungsinya dalam jangka waktu panjang. Mewujudkan sarana prasarana pelayanan dasar yang berkualitas juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, mengurangi disparitas sosial, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan.	
Misi 8	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Mewujudkan pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen Kota Cirebon untuk menciptakan suatu sistem yang menggabungkan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial secara holistik dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur ekonomi yang memadai, pembukaan lapangan kerja, pengembangan industri yang ramah lingkungan, promosi inovasi, kewirausahaan, peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi; pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi; pembangunan perumahan yang terjangkau; serta peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana melibatkan praktik-praktik pembangunan yang ramah lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah yang efisien, pelestarian ruang terbuka hijau, dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati juga menjadi penekanan yang penting dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga menciptakan kota yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa depan.	

Selanjutnya untuk memastikan keselarasan antara rencana pembangunan pusat dan daerah dilakukan sinkronisasi perencanaan Pembangunan guna mendapatkan hasil dan dampak positif bagi Masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang akan disusun. Sinkronisasi perencanaan pembangunan adalah untuk menciptakan keselarasan, keterpaduan, dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan yang berorientasi kolaborasi.

Tabel IV-3 Penyelarasan Misi RPJPD Kota Cirebon dengan Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat dan Misi RPJPN Tahun 2025 – 2045

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD PROVINSI 2025-2045	RPJPD KOTA CIREBON 2025-2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi	Misi
1	Transformasi Indonesia	Transformasi sosial	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing	Membangun Sumber Daya Manusia yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Unggul
2		Transformasi ekonomi	Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif	Membangun Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing Global, Inklusif, dan Berkelanjutan
3		Transformasi tata kelola	Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas, Akuntabel dan Inovatif	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
4	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Provinsi yang Aman dan Tertib serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Menjaga Kondusifitas Daerah Menuju Stabilitas Ekonomi
5		Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan	Mewujudkan masyarakat madani yang berwawasan lingkungan, tangguh dan berbudaya
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang merata dan inklusif	Mewujudkan Kemantapan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berketahanan
7		Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas	Mewujudkan sarana prasarana pelayanan dasar yang berkualitas
8		Kesinambungan pembangunan	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, Hasil Pembahasan, 2024

4.3 Upaya Transformasi Super Prioritas (*Game Changer*)

RPJPD sebagai pedoman memuat seluruh aspek pembangunan untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045, terdapat upaya transformatif super prioritas (*Game Changer*), yaitu:

4.3.1 Transformasi Sosial

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM.
4. Penguatan pendidikan vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
5. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
6. Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting, Tuberkulosis, HIV-AIDS.
7. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.

4.3.2 Transformasi Ekonomi

1. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI yang berdaya saing.
2. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
3. Peningkatan pemanfaatan ketenagalistrikan berbasis pengembangan energi baru dan terbarukan.
4. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital.
5. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion.

4.3.3 Transformasi Tata Kelola

1. Penguatan tata kelola pemerintah daerah, penataan kelembagaan dan kapasitas ASN yang adaptif serta peningkatan kualitas ASN Pemerintah Daerah Kota Cirebon, menuju penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang profesional dan bebas korupsi.
2. Penguatan integritas partai politik.

4.3.4 Landasan Transformasi Mewujudkan Kota Cirebon yang Aman dan Tertib serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah

1. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.

2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah.

4.3.5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

1. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
2. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, serta integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.
3. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dan kelautan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan melalui pengelolaan kawasan strategis pesisir.
4. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
5. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

5.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD. Penyusunan dokumen RPJPD arah kebijakan merupakan tahapan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang dibagi kedalam empat tahapan lima tahunan.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas ada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan RPJMD secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya penyinergian antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan.

Rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045 ditempuh melalui 4 (empat) tahapan dengan tema besar pada masing-masing tahapan pembangunan sejalan dengan pentahapan pembangunan yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Masing-masing tahap tersebut sebagaimana berikut ini:

5.1.1 Tahap Pertama (2025–2029) - Pondasi

1. Peningkatan pemenuhan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta produktivitas sumber daya manusia.
2. Penguatan ekonomi lokal yang inovatif dan kesempatan kerja
3. Penataan birokrasi yang adaptif dan responsif serta pemberdayaan masyarakat sipil.

4. Peningkatan penegakan hukum untuk mencapai keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Penguatan landasan perlindungan kebudayaan lokal dan tata kelola lingkungan hidup dengan partisipasi masyarakat
6. Penyediaan infrastruktur mantap.
7. Penguatan basis data untuk penyediaan sarana prasarana pelayanan dasar secara merata.
8. Penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan kota yang berkelanjutan.

5.1.2 Tahap Kedua (2030–2034) - Akselerasi

1. Pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkualitas.
2. Akselerasi peningkatan produktivitas serta kualitas ekonomi lokal.
3. Transformasi birokrasi yang tangkas dan mendorong masyarakat sipil partisipatif.
4. Peningkatan kapasitas untuk mencapai keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan kebudayaan lokal dan implementasi tata kelola lingkungan hidup untuk mewujudkan ketahanan sosial dan ekologi.
6. Pemerataan infrastruktur mantap.
7. Akselerasi penyediaan sarana prasarana dasar di lokasi prioritas.
8. Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan kota yang berkelanjutan.

5.1.3 Tahap Ketiga (2035–2039) - Pemantapan

1. Optimalisasi pemberdayaan SDM yang sejahtera dan unggul.
2. Perluasan peluang pasar di tingkat regional, nasional, dan global dengan teknologi aplikatif.
3. Optimalisasi birokrasi yang kompetitif dan membangun masyarakat sipil mandiri.
4. Pemantapan kapasitas untuk mencapai keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Optimalisasi perlindungan dan pelestarian kebudayaan lokal dan lingkungan hidup menuju kota yang berketahanan terhadap berbagai perubahan.
6. Optimalisasi Infrastruktur mantap yang inklusif dan berketahanan.
7. Optimalisasi pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan dasar.
8. Pemantapan ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan kota yang berkelanjutan.

5.1.4 Tahap Keempat (2040–2045) - Perwujudan

1. Perwujudan SDM yang sejahtera, unggul, dan berkelanjutan.
2. Perwujudan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing Global, Inklusif, dan Berkelanjutan.
3. Perwujudan birokrasi kelas dunia yang berkualitas dan berintegritas.

4. Perwujudan ketenteraman dan ketertiban umum menuju kondusivitas daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi.
5. Perwujudan masyarakat madani yang berwawasan lingkungan, tangguh dan berbudaya.
6. Perwujudan Kemantapan Infrastruktur yang inklusif dan berketahanan.
7. Perwujudan sarana prasarana pelayanan dasar yang berkualitas secara merata.
8. Mewujudkan ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan kota yang berkelanjutan.

Mengacu kepada Visi dan Misi Kota Cirebon 20 (dua puluh) tahun ke depan, serta prioritas pembangunan pada setiap tahap, maka arahan umum kebijakan pembangunan Kota Cirebon untuk setiap misi adalah sebagai berikut :

Misi 1	Membangun Sumber Daya Manusia yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Unggul
--------	--

Tahap I Pondasi	Tahap II Akselerasi	Tahap III Pemantapan	Tahap IV Perwujudan
Peningkatan pemenuhan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta produktivitas sumber daya manusia	Pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkualitas	Optimalisasi pemberdayaan SDM yang sejahtera dan unggul	Perwujudan SDM yang sejahtera, unggul, dan berkelanjutan

Misi 2	Membangun Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing Global, Inklusif, dan Berkelanjutan
--------	--

Tahap I Pondasi	Tahap II Akselerasi	Tahap III Pemantapan	Tahap IV Perwujudan
Penguatan ekonomi lokal yang inovatif dan kesempatan kerja.	Akselerasi peningkatan produktivitas serta kualitas ekonomi lokal	Perluasan peluang pasar di tingkat regional, nasional, dan global dengan teknologi aplikatif	Perwujudan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing Global, Inklusif, dan Berkelanjutan

Misi 3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
--------	--

Tahap I Pondasi	Tahap II Akselerasi	Tahap III Pemantapan	Tahap IV Perwujudan
Penataan birokrasi yang adaptif dan responsif serta pemberdayaan masyarakat sipil.	Transformasi birokrasi yang tangkas dan mendorong masyarakat sipil partisipatif.	Optimalisasi birokrasi yang kompetitif dan membangun masyarakat sipil mandiri.	Perwujudan birokrasi yang akuntabel, berkualitas dan berintegritas.

Misi 4 | Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Menjaga Kondusivitas Daerah Menuju Stabilitas Ekonomi

Tahap I Pondasi	Tahap II Akselerasi	Tahap III Pemantapan	Tahap IV Perwujudan
Peningkatan penegakan hukum untuk mencapai keamanan dan ketertiban masyarakat.	Peningkatan kapasitas untuk mencapai keamanan dan ketertiban masyarakat.	Pemantapan kapasitas untuk mencapai keamanan dan ketertiban masyarakat.	Terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di masyarakat.

Misi 5 | Mewujudkan Masyarakat Madani yang Berwawasan Lingkungan, Tangguh dan Berbudaya

Tahap I Pondasi	Tahap II Akselerasi	Tahap III Pemantapan	Tahap IV Perwujudan
Penguatan landasan perlindungan kebudayaan lokal dan tata kelola lingkungan hidup dengan partisipasi masyarakat	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan kebudayaan lokal dan implementasi tata kelola lingkungan hidup untuk mewujudkan ketahanan sosial dan ekologi	Optimalisasi perlindungan dan pelestarian kebudayaan lokal dan lingkungan hidup menuju kota yang berketahanan terhadap berbagai perubahan	Perwujudan masyarakat madani yang berwawasan lingkungan, tangguh dan berbudaya

Misi 6 | Mewujudkan Kemantapan Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berketahanan

Tahap I Pondasi	Tahap II Akselerasi	Tahap III Pemantapan	Tahap IV Perwujudan
Penyediaan infrastruktur mantap	Pemerataan infrastruktur mantap	Optimalisasi Infrastruktur mantap yang inklusif dan berketahanan	Perwujudan Kemantapan Infrastruktur yang inklusif dan berketahanan

Misi 7 | Mewujudkan Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas

Tahap I Pondasi	Tahap II Akselerasi	Tahap III Pemantapan	Tahap IV Perwujudan
Penguatan basis data untuk penyediaan sarana prasarana pelayanan dasar secara merata	Akselerasi penyediaan sarana prasarana dasar di lokasi prioritas	Optimalisasi pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan dasar	Perwujudan sarana prasarana pelayanan dasar yang berkualitas secara merata

Misi 8 | Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Tahap I Pondasi	Tahap II Akselerasi	Tahap III Pemantapan	Tahap IV Perwujudan
Penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan kota yang berkelanjutan	Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan kota yang berkelanjutan	Pemantapan ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan kota yang berkelanjutan	Mewujudkan ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan kota yang berkelanjutan

Tabel V-1 Arah Kebijakan RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025–2045

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAPIV
		2025 - 2029 Fondasi	2030 - 2034 Akselerasi	2035 - 2039 Pemantapan	2040 - 2045 Perwujudan
Kota Cirebon yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	Membangun Sumber Daya Manusia yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Unggul	Optimalisasi partisipasi dan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun PAUD dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Percepatan pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun PAUD dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Pemantapan pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun PAUD dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Perwujudan pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun PAUD dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
		Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter	Percepatan penerapan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter	Penguatan manajemen talenta, prestasi, dan karakter peserta didik	Penerapan manajemen talenta, prestasi, dan karakter peserta didik
		Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang merata di seluruh wilayah kota	Percepatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dengan tingkat partisipasi yang optimal bagi seluruh anak usia dini di Kota Cirebon	Pemantapan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang menyeluruh dan terintegrasi	Perwujudan pendidikan anak usia dini yang menyeluruh, terintegrasi, dan berkualitas
		Kebijakan peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik sesuai dengan keahliannya	Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif.	Perkuatan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan serta pemberian bantuan/insentif khusus guru.	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan
		Penataan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur layanan pendidikan yang sesuai standar.	Perluasan dan pemerataan kebutuhan infrastruktur layanan pendidikan yang sesuai standar dan berbasis digital.	Pengembangan dan penguatan akses layanan pendidikan yang sesuai standar dan berbasis digital.	Perwujudan layanan pendidikan yang sesuai standar dan berbasis digital.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Fondasi	Akselerasi	Pemantapan	Perwujudan
		Kebijakan pendidikan nonformal dan pendidikan terbuka, serta penyediaan akses dan pembangunan pendidikan bagi warga tidak mampu sebagai upaya peningkatan inklusi sosial, pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan.	Akselerasi Pendidikan non formal, peningkatan literasi dan edukasi, serta pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan di seluruh wilayah kota Cirebon untuk memastikan lulusan dengan tingkat serapan yang tinggi di dunia kerja untuk mendukung upaya percepatan inklusi sosial, pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan.	Pemantapan akses dan kualitas pendidikan nonformal serta pendidikan bagi warga tidak mampu sebagai upaya penguatan inklusi sosial, pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan.	Perwujudan pendidikan non-formal serta pendidikan bagi masyarakat tidak mampu yang berkualitas sebagai upaya mewujudkan inklusi sosial, pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan.
		Penyiapan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan.	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.	Peningkatan kompetensi masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.	Perwujudan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
		Peningkatan akses terhadap kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas serta dapat menjangkau seluruh wilayah untuk pelayanan primer dan rujukan	Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan yang didukung dengan peralatan kesehatan yang memadai sehingga tercipta keamanan dan ketahanan Kesehatan.	Pengoptimalan fasilitas kesehatan dengan pemanfaatan tepat guna sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain dengan meningkatnya angka harapan hidup, menurunkan tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.	Penyelenggaraan akses dan layanan kesehatan dengan fasilitas sarana prasarana sesuai standar tingkatan fasilitas kesehatan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Fondasi	Akselerasi	Pemantapan	Perwujudan
		Pemenuhan sarana dan prasarana air minum, sanitasi, ruang terbuka hijau untuk mendukung aktivitas fisik dan pola hidup sehat	Peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif dengan peningkatan akses terhadap sanitasi sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat	Pengelolaan pemberdayaan masyarakat lokal untuk dapat melakukan tindakan promotif-preventif untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas	Perwujudan pola hidup sehat serta lingkungan bersih untuk mendukung kesehatan masyarakat
		Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja yang didukung dengan kebijakan mengenai tenaga kesehatan	Pengoptimalan pendayagunaan tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengawasan sumberdaya kesehatan dalam menjalankan profesinya sesuai peraturan dan perundangundangan.	Perwujudan layanan kesehatan dengan tenaga kesehatan yang sejahtera melalui dukungan bantuan/in-sentif
		Pencegahan dan penuntasan stunting dengan dukungan integrasi data melalui pemanfaatan sistem informasi geospasial dan pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan lokal untuk mendukung upaya menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi	Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat untuk dapat mengenali dan menangani stunting serta koordinasi dan sinergitas penanggulangan stunting dengan lintas sektor melalui penyediaan data stunting, keluarga rawan, dan pemanfaatan pangan lokal untuk mendukung upaya menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi	Penanganan prevalensi stunting melalui sosialisasi dan percepatan penanganan didukung kualitas layanan kesehatan dan akses makanan bergizi untuk mendukung upaya menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi	Terciptanya mekanisme preventif dalam pencegahan stunting dan percepatan penanganan kasus berbasis konsumsi pangan lokal serta peningkatan layanan kesehatan dan gizi untuk ibu dan anak

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Fondasi	Akselerasi	Pemantapan	Perwujudan
		Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan gizi dan perhatian khusus	Pemantapan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pemantapan gizi ibu hamil dan anak balita	
		Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit potensi re-emerging serta peningkatan akses layanan pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim	Pengendalian penanganan penyakit menular dan tropis terabaikan yang diawali oleh tindakan preventif	Terciptanya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang efektif dan efisien
		Kebijakan layanan jaminan kesehatan nasional	Peningkatan layanan jaminan kesehatan nasional	Optimalisasi pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan nasional	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan jaminan kesehatan nasional
		Kebijakan masyarakat penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	Peningkatan kebijakan masyarakat penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang	Penguatan kebijakan masyarakat penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal melalui partisipasi di berbagai bidang	Perwujudan program kebijakan tenaga kerja sektor formal bagi penyandang disabilitas di berbagai bidang

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025 - 2029 Fondasi	2030 - 2034 Akselerasi	2035 - 2039 Pemantapan	2040 - 2045 Perwujudan
		Penataan dan Pemenuhan penyediaan Jaminan Sosial terutama Bagi Kelompok Rentan dan Masyarakat	Peningkatan jaminan sosial terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat dengan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	Perluasan Lingkup jaminan sosial dengan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	Perwujudan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Guna meningkatkan jaminan sosial bagi kelompok rentan dan masyarakat agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien
		Penguatan kebijakan pengendalian penduduk yang didukung sistem database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif yang dapat menyediakan data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan.	Peningkatan kebijakan pengendalian penduduk yang sinergis dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan distribusi penduduk yang tersebar seimbang	Optimalisasi upaya distribusi penduduk yang tersebar seimbang di seluruh Kecamatan sesuai potensi daerah masing masing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Perwujudan pengendalian penduduk untuk distribusi penduduk yang tersebar seimbang di seluruh Kecamatan sesuai potensi daerah masing masing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
	Membangun Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing Global, Inklusif, dan Berkelanjutan	Peningkatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor jasa dan perdagangan didukung fasilitas MICE (Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran) yang sinergis dengan rencana pengembangan kawasan Rebana	Mendukung aksesibilitas pengembangan sector perdagangan jasa berbasis keunggulan wilayah melalui supply logistik didukung fasilitas MICE (Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran).	Peningkatan aksesibilitas pengembangan sector perdagangan jasa melalui supply logistik yang sinergis dengan pengembangan MICE (Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran).	Perwujudan jaringan transportasi dan logistic perkotaan yang berdaya saing yang sinergis dengan pengembangan MICE untuk mendukung perdagangan jasa berbasis keunggulan wilayah.
		Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan usaha ekonomi lokal berbasis ekonomi hijau dan biru	Pengembangan usaha ekonomi lokal berbasis ekonomi hijau dan biru	Peningkatan diversifikasi produk dan bernilai tambah berbasis ekonomi hijau dan biru untuk berekspansi global	Perwujudan ekonomi Kota Cirebon yang bertanggung jawab terhadap kehidupan manusia dan kelestarian alam

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Fondasi	Akselerasi	Pemantapan	Perwujudan
		Penguatan tata kelola sektor perdagangan melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan daya saing, peningkatan ekspor, pembukaan pasar baru, pengembangan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia	Peningkatan nilai jual sektor perdagangan berbasis inovasi, digitalisasi, teknologi, dan kolaborasi	Penguatan sistem jejaring perdagangan pada tingkat global	Kota Cirebon menjadi kota dengan ekonomi berdaya saing tinggi
		Penataan dan penguatan daya tarik wisata budaya dan wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif sejalan dengan pengembangan MICE.	Penguatan pemasaran dan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sejalan dengan pengembangan MICE.	Pengembangan pariwisata sejalan dengan penciptaan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat	Perwujudan pariwisata Kota Cirebon yang berkualitas dan berkelanjutan
		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis serta akses terhadap jasa keuangan.	Peningkatan akses UMKM terhadap jasa keuangan untuk mendukung pengembangan produktivitas melalui inovasi pengembangan IPTEK, Ekonomi produktif (Termasuk industri manufaktur, keuangan syariah, ekonomi kreatif UMKM dan Koperasi).	Peningkatan dan pemantapan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya untuk mendukung berkembangnya jumlah dan produktivitas UMKM.	Perwujudan UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok global sebagai wujud keberlangsungan ekonomi UMKM.
		Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) daerah yang berdaya saing di tataran global.	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI daerah yang berdaya saing di tataran global.	Perluasan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah untuk mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI daerah yang berdaya saing di tataran global.	Perwujudan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah yang mendukung pengembangan usaha besar dan menengah (DUDI) daerah agar memiliki daya saing di tingkat global.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Fondasi	Akselerasi	Pemantapan	Perwujudan
		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.	Percepatan pengembangan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Pemantapan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan yang berkelanjutan	Perwujudan keberlangsungan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan yang berkelanjutan.
		Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling yang terintegrasi dengan pemagangan dan penempatan tenaga kerja.	Peningkatan sumber daya manusia untuk memperluas akses terhadap kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan di DUDI dan green job, pelayanan kesehatan, dan pendidikan tenaga kerja bersertifikasi.	Pemantapan kualitas dan daya saing tenaga kerja bersertifikasi.	Perwujudan tenaga kerja yang bersertifikasi dan memiliki daya saing global.
		Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha bagi IKM/UMKM maupun usaha yang dapat menyerap tenaga kerja padat karya terampil.	Akselerasi investasi, diversifikasi sektor dan pemerataan investasi.	Pemantapan integrasi ekonomi dan konektivitas global.	Terwujudnya investasi yang dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan keberlanjutan.
		Penataan dan restrukturisasi BUMD.	Peningkatan produktivitas BUMD	Optimalisasi pengembangan bisnis BUMD yang berdaya saing.	Terwujudnya BUMD yang berdaya saing.
		Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan	Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat kreatif, infrastruktur dasar dan digital, serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan permodalan	Pemantapan pusat-pusat inkubasi dan pusat kreatif	perwujudan kewirausahaan yang berdaya saing

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Fondasi	Akselerasi	Pemantapan	Perwujudan
		Penyediaan sarana prasarana pendukung untuk pengembangan varietas unggul komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan	Pengembangan varietas unggul untuk komoditas pertanian, perikanan dan peternakan	Pemantapan peningkatan varietas unggul komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan	Perwujudan komoditas pertanian, perikanan dan peternakan yang berkualitas
		Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan	Pengembangan close loop model pertanian, peternakan dan perikanan melalui penyiapan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian, peternakan dan perikanan	Penerapan closed loop model pertanian, peternakan dan perikanan
		Industrialisasi koperasi terutama pada komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna	Peningkatan keterkaitan koperasi pada rantai nilai pasok domestik	Peningkatan keterkaitan koperasi pada rantai nilai pasok domestik dan global	Perwujudan penerapan modernisasi koperasi

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAPIV
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Fondasi	Akselerasi	Pemantapan	Perwujudan
		Penyediaan dan pengembangan perumahan yang layak dan terjangkau, infrastruktur air baku dan air minum, serta sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan. Pengembangan layanan infrastruktur dilakukan melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan untuk peningkatan ketahanan bencana.	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, terutama pada kawasan perkotaan Cirebon.	Perwujudan City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan martabat kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.
		Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).	Peningkatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan	Implementasi pengelolaan kawasan perkotaan yang terintegrasi.
		Peningkatan produktivitas pertanian yang berdaya saing dengan infrastruktur yang terintegrasi	Percepatan peningkatan produktivitas pertanian yang berdaya saing dengan infrastruktur yang terintegrasi	Pemantapan peningkatan produktivitas pertanian yang berdaya saing dengan pemeliharaan infrastruktur	Perwujudan pertanian yang ramah lingkungan dan berdaya saing

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAPIV
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Fondasi	Akselerasi	Pemantapan	Perwujudan
		Pengendalian alih fungsi lahan pertanian serta perluasan penerapan pemanfaatan lahan pekarangan untuk pertanian	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani dan masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penguatan modernisasi pertanian dan implementasi teknologi smart farming	Perwujudan pelaksanaan urban farming yang berkelanjutan dan adaptif terhadap teknologi serta perubahan iklim.
		Peningkatan produksi peternakan, melalui peningkatan jumlah populasi ternak	Percepatan penyediaan sarana penunjang peningkatan populasi ternak (kawin alami dan kawin buatan/inseminasi buatan)	Pemantapan ketersediaan sarana penunjang peningkatan populasi ternak	Perwujudan peningkatan peningkatan jumlah populasi ternak
		Perluasan pembentukan kampung perikanan budidaya serta peningkatan kapasitas pembudidaya	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi pembudidaya melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan sarana prasarana budidaya ikan	Pengembangan teknologi budidaya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pemeliharaan ikan, seperti penggunaan smart feeding, sistem recirculating aquaculture systems (RAS) atau teknologi pengendalian lingkungan lainnya.	Perwujudan peningkatan produktivitas akuakultur yang berkelanjutan
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan	Pengembangan infrastruktur pendukung seperti PPI dan TPI yang modern dan efisien untuk meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan dan memperluas akses pasar bagi produk perikanan tangkap	Penerapan teknologi perikanan tangkap yang ramah lingkungan serta implementasi teknologi smart fishing	Perwujudan peningkatan produksi perikanan tangkap

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025 - 2029 Fondasi	2030 - 2034 Akselerasi	2035 - 2039 Pemantapan	2040 - 2045 Perwujudan
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	Pembangunan sistem pengelolaan dan penyusunan regulasi daerah.	Percepatan upaya penyederhanaan regulasi melalui reregulasi dan deregulasi peraturan daerah.	Penguatan sistem regulasi daerah untuk peningkatan kualitas regulasi.	Perwujudan sistem regulasi daerah yang efektif dan efisien.
		Pembangunan infrastruktur digital yang merata, penguatan kapasitas SDM, dan peningkatan keamanan SPBE untuk percepatan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital.	Keterpaduan pelayanan publik berbasis digital melalui interoperabilitas data dan layanan.	Perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan pelaksanaan audit SPBE untuk pemantapan digitalisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang bebas korupsi.	Perwujudan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital yang auditable dan secure.
		Pengembangan sistem meritokrasi untuk pengembangan karir ASN berbasis kinerja.	Peningkatan kualitas ASN Pemerintah Daerah Kota Cirebon menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi.	Pemantapan manajemen ASN yang berdaya saing.	Perwujudan ASN yang adaptif, profesional, berintegritas dan berdaya saing.
		Penataan kelembagaan berbasis evaluasi yang tepat fungsi serta penguatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan sistem informasi digital.	Penguatan proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan daerah serta hubungan kerja	Pemantapan sistem akuntabilitas (perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja) tata kelola pemerintah daerah	Perwujudan kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang akuntabel
		Pengembangan infrastruktur manajemen risiko untuk pengendalian pembangunan.	Penguatan proses manajemen risiko untuk pengendalian pembangunan.	Pemantapan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Perwujudan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025 - 2029 Fondasi	2030 - 2034 Akselerasi	2035 - 2039 Pemantapan	2040 - 2045 Perwujudan
	Menciptakan stabilitas ekonomi, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menuju kondusivitas daerah	Kebijakan partisipasi masyarakat sipil dan adat dalam kegiatan Musrembang dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan demokrasi sehat	Pemantapan iklim politik yang kondusif dalam menciptakan kesatuan bangsa di daerah.	Terwujudnya kehidupan demokrasi yang sehat
		Penguatan karakter dan identitas bangsa melalui pembinaan ideologi pancasila untuk mewujudkan kedaulatan politik hukum dan ketentraman serta ketertiban umum	Peningkatan ketentraman serta ketertiban umum untuk menopang stabilitas ekonomi.	Pemantapan ketentraman serta ketertiban umum untuk menopang stabilitas ekonomi.	Terwujudnya keamanan dan ketertiban umum dengan menjunjung tinggi nilai Pancasila dan tujuan pembangunan nasional
		Penguatan peran Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah yang terkoordinasi dan sinergis	Peningkatan koordinasi pengendalian penegakan Peraturan Daerah yang melibatkan stakeholder terkait	Optimalisasi pengendalian penegakan Peraturan Daerah yang terkoordinasi dan sinergis untuk mendukung kondusivitas daerah	Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah untuk mendukung kondusivitas daerah
		Peningkatan pengendalian inflasi daerah.	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Optimalisasi pengendalian inflasi daerah.	Terwujudnya kemandirian keuangan daerah terhadap pengendalian inflasi
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Percepatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah, penguatan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Pemantapan kapasitas fiskal daerah yang optimal/berkualitas serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Perwujudan kapasitas fiskal daerah yang optimal/berkualitas serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025 - 2029 Fondasi	2030 - 2034 Akselerasi	2035 - 2039 Pemantapan	2040 - 2045 Perwujudan
		Peningkatan kerja sama antar wilayah dalam pengelolaan berbagai aspek pembangunan daerah	Pengembangan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan berbagai aspek pembangunan daerah	Penguatan kerja sama internasional dalam pengelolaan berbagai aspek pembangunan daerah	Penerapan kerja sama internasional dalam pengelolaan berbagai aspek pembangunan daerah
	Mewujudkan Masyarakat Madani yang Berwawasan Lingkungan, Tangguh dan Berbudaya	Penguatan peran masyarakat dalam pelestarian kebudayaan dan tradisi masyarakat Cirebon	Peningkatan kapasitas masyarakat yang berbudaya dan adaptif terhadap perkembangan jaman serta Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat	Pelestarian dan pemantapan perlindungan nilai kebudayaan dan tradisi dan adaptif	Perwujudan kebudayaan yang siap bersaing dengan perkembangan jaman
		Penguatan karakter dan identitas budaya lokal melalui penggunaan atribut budaya sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya Cirebon.	Meningkatkan sinergi dan sinkronisasi kebijakan dalam pelestarian kebudayaan yang mengakomodir kearifan lokal dan potensi kebudayaan Kota Cirebon dengan melibatkan masyarakat dan komunitas	Pemantapan karakter dan identitas budaya lokal yang merepresentasikan ciri khas dan keunikan Kota Cirebon	Perwujudan budaya khas Kota Cirebon yang memperkuat citra Kota
		Penguatan individu dan masyarakat dalam penghargaan dalam keberagaman etnis dan agama	Penguatan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kerjasama antarumat beragama dalam kegiatan sehari-hari	Pemantapan kerukunan umat beragama, etnis serta golongan	Perwujudan kerukunan umat beragama
		Penguatan peran keluarga dalam pembentukan karakter masyarakat dengan kemudahan akses edukasi dan informasi publik	Peningkatan kualitas hidup dengan pembangunan ketahanan keluarga	Penguatan ketahanan keluarga	Perwujudan keluarga yang berkualitas
		Perlindungan anak, perempuan, disabilitas, lansia dan pemuda	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial		Perwujudan kesetaraan gender dan inklusi sosial

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025 - 2029 Fondasi	2030 - 2034 Akselerasi	2035 - 2039 Pemantapan	2040 - 2045 Perwujudan
		Pemberdayaan perempuan, disabilitas, lansia dan pemuda		Pemantapan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial	
		Penguatan regulasi dan tata kelola Lingkungan Hidup dengan partisipasi masyarakat	Pemulihan kualitas lingkungan hidup yang berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim	Optimalisasi daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk mewadahi ruang kota yang layak huni	Perwujudan lingkungan hidup yang berkualitas dan berketahanan
		Penyusunan strategi pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem serta jasa lingkungannya.	Percepatan pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem serta jasa lingkungannya	Pemantapan pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem serta jasa lingkungannya	
		Pengelolaan keanekaragamanhayati, pelestarian kawasan lindung, dan ekosistem alami	Peningkatan pelestarian keanekaragamanhayati, kawasan lindung, dan ekosistem alami	Pemantapan pelestarian keanekaragamanhayati kawasan lindung, dan ekosistem alami	
		Persiapan Pemulihan ex TPA Grenjeng menjadi kawasan lindung	Pemulihan ex TPA Grenjeng menjadi kawasan lindung		
		Perencanaan dan penataan Kawasan pesisir yang sinergis dengan rencana tata ruang.	Penguatan pengendalian lingkungan pesisir yang sinergis dengan pengendalian pemanfaatan ruang	Pemantapan pengelolaan dan pengendalian lingkungan pesisir yang berketahanan	
		Percepatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Optimaliasi Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Fondasi	Akselerasi	Pemantapan	Perwujudan
		Peningkatan kapasitas dalam upaya pembangunan rendah karbon serta penguatan adaptasi perubahan iklim	Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim	Pemantapan kolaborasi pendukung pembangunan rendah karbon serta penerapan industri dan ekonomi hijau dengan pengembangan energi baru terbarukan	
		Pemenuhan akses sanitasi dasar pada rumah tangga	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) (pencapaian target 0% BABS)	Pemantapan infrastruktur sanitasi berkelanjutan yang ramah lingkungan	Perwujudan sistem sanitasi sehat dan aman
		Penyiapan dan penetapan instrumen circular economy dalam pengelolaan sampah	Penerapan circular economy dalam pengelolaan persampahan	Pemantapan Penerapan circular economy dalam pengelolaan persampahan	Perwujudan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat menuju zero waste city
		Pencapaian target pengurangan sampah dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah	Percepatan pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir	Pemantapan pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir	
		Pemenuhan sarana dan prasarana persampahan			
		Peningkatan TPS menjadi TPS 3R serta optimalisasi Pusat Daur Ulang Sampah (PDU)	Peningkatan kapasitas TPS 3R dan PDU	Pemantapan Pengolahan sampah di TPS 3R dan PDU	
		Clean and Clear lahan TPA Kopi Luhur dan revitalisasi TPA Kopi Luhur dengan pembangunann TPST dengan RDF Tahap I (240 ton/ hari)	Peningkatan kapasitas TPA Kopi Luhur dengan pembangunan TPST dengan RDF Tahap II (200 ton/ hari)	Pemantapan pengolahan sampah di TPA kopi luhur serta penguatan kolaborasi dan kemitraan dengan TPPAS Regional Jawa Barat	

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Fondasi	Akselerasi	Pemantapan	Perwujudan
		Mainstreaming Transisi Energi di masyarakat	Mendorong pengurangan emisi karbon dari sektor energi	Optimalisasi infrastruktur yang mendukung penggunaan energi terbarukan	Perwujudan diversifikasi dan efisiensi energi untuk energi yang ramah lingkungan
		Pembangunan pasar atau jaringan distribusi untuk makanan yang tersisa atau mendekati tanggal kadaluarsa yang aman dan terstruktur	Pengelolaan food loss dan food waste	Pengendalian food loss dan food waste	Pengurangan food loss dan food waste untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien, berkelanjutan
		Penguatan kerja sama dan kelembagaan sektor pangan serta pengembangan produksi pangan di rumah tangga	Peningkatan ketersediaan Pangan	Pengendalian akses pangan dan keterjangkauan harga pangan	Perwujudan ketahanan pangan
		Peningkatan knowledge, attitude and practice masyarakat tentang pentingnya kualitas konsumsi dan pemenuhan gizi seimbang serta pentingnya mengurangi pemborosan pangan (stop boros pangan) sejalan	Peningkatan upaya diversifikasi konsumsi pangan dengan mendorong produksi, distribusi, dan konsumsi pangan lokal yang beragam dan bernutrisi tinggi untuk mendukung pemenuhan pangan aman, bergizi, dan cukup bagi masyarakat.	Pemantapan upaya diversifikasi konsumsi pangan dengan mendorong produksi, distribusi, dan konsumsi pangan lokal yang beragam dan bernutrisi tinggi untuk mendukung pemenuhan pangan aman, bergizi, dan cukup bagi masyarakat.	
		Peningkatan pengetahuan dan akses masyarakat tentang pemanfaatan lahan pertanian di perkotaan salah satunya dengan pemanfaatan pekarangan atau <i>rooftop farming</i> untuk mendukung produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil	Pemanfaatan Teknologi Pertanian Urban dengan penggunaan teknologi pertanian inovatif seperti hidroponik, aquaponik, vertikultur, dan sistem tanam dalam pot untuk memaksimalkan penggunaan ruang sempit dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil	Pemantapan pengembangan infrastruktur pertanian urban untuk peningkatan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil	

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Fondasi	Akselerasi	Pemantapan	Perwujudan
		Penerapan praktik pertanian Tangguh untuk mendorong system produksi pangan yang berkelanjutan	Percepatan praktik pertanian Tangguh untuk membentuk system produksi pangan yang berkelanjutan	Optimalisasi sistem produksi pangan yang berkelanjutan	
		Pengembangan perikanan berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan.	Pengembangan potensi ekonomi biru	Pemantapan pengembangan potensi ekonomi biru	Perwujudan ekonomi biru
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak dalam peningkatan produksi hasil perikanan	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan	Pemantapan produktivitas dan daya saing produk perikanan sebagai salah satu potensi ekspor	Perwujudan daya saing produk perikanan
		Penyediaan sarana dan prasarana bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan	Modernisasi sarana dan prasarana perikanan serta pemanfaatan teknologi perikanan		
		Pengawasan kualitas produk peternakan yang beredar, dengan pemeriksaan organoleptis dan pengujian laboratorium, serta sosialisasi kualitas dan penanganan produk asal hewan	Percepatan penyediaan sarana penunjang pengawasan secara berkelanjutan terhadap kualitas produk peternakan	Pemantapan ketersediaan sarana penunjang pengawasan secara berkelanjutan terhadap kualitas produk peternakan	Perwujudan produk peternakan yang berkualitas
		Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis	Percepatan penyediaan sarana penunjang pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis	Pemantapan ketersediaan sarana penunjang pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis	Perwujudan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis menurunkan angka kematian hewan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Fondasi	Akselerasi	Pemantapan	Perwujudan
		Penguatan kolaborasi dan kemitraan penyediaan air bersih serta pengembangan strategi dan rencana darurat untuk mengatasi krisis air	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan kekeringan	Penggunaan teknologi dalam pemenuhan sumber air baku	Perwujudan pemenuhan kebutuhan air baku
		Penyediaan dan penataan basis data potensi sumber daya air untuk ketersediaan air yang berkelanjutan	Penguatan kebijakan konservasi sumber daya air untuk menjamin ketersediaan cadangan air antara lain melalui pembangunan embung maupun penampung air lainnya	Pemantapan pengelolaan sumber daya air sebagai upaya konservasi sumber air yang berkelanjutan	Perwujudan konservasi air yang berketahanan dan berkelanjutan
		Penerapan pengelolaan air limbah melalui rekayasa teknis berupa pembuatan kolam retensi, biopori, dan perbaikan dan pengembangan jaringan drainase yang berwawasan lingkungan sebagai bagian dari konservasi air yang berketahanan	Penguatan kebijakan konservasi air yang sinergis untuk mendukung pengurangan bencana dan menjamin kelestarian tanah dan lingkungan	Pemantapan pengendalian dan pengelolaan upaya konservasi air yang berketahanan	
		Pengelolaan risiko bencana dengan peningkatan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana	Peningkatan sistem teknologi peringatan dini bencana	Pemantapan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap bencana	Perwujudan Resilience dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim dan bencana
		Pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dengan dengan optimalisasi pelaksanaan transisi energi	Penguatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim	

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025 - 2029 Fondasi	2030 - 2034 Akselerasi	2035 - 2039 Pemantapan	2040 - 2045 Perwujudan
		Pengintegrasian tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan kota	Percepatan upaya antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan kota yang terintegrasi	Penguatan upaya antisipasi perubahan iklim ke dalam rencana, kebijakan, strategi pembangunan kota	Perwujudan internalisasi antisipasi perubahan iklim dalam pembangunan kota
	Mewujudkan Kemantapan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berketahanan	Penyediaan dan penataan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan yang dibutuhkan untuk proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas pembangunan daerah maupun nasional diantaranya penyediaan lahan untuk pembangunan Jalan Lingkar Cirebon, pembangunan embung, serta pendukung pengembangan MICE (Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran).	Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah dengan pendekatan kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat atau LA-RAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan Clear, Clean, Consolidated).	Pemantapan proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas pembangunan daerah maupun nasional.	Perwujudan proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas pembangunan daerah maupun nasional.
		Pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh.	Percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh.	Optimalisasi infrastruktur kota yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh.	Perwujudan keberlanjutan dari infrastruktur kota yang berkualitas, andal dan tangguh.
		Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas yang efisien dan merata, termasuk di Cirebon bagian selatan.	Percepatan konektivitas dan aksesibilitas yang efisien dan merata untuk menunjang produktivitas ekonomi.	Optimalisasi konektivitas dan aksesibilitas yang efisien dan merata.	Perwujudan konektivitas dan aksesibilitas yang efisien, merata, dan berkelanjutan.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Fondasi	Akselerasi	Pemantapan	Perwujudan
		Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas perdagangan dan jasa yang inklusif dan berdaya saing, termasuk antara lain kemudahan aksesibilitas, ketersediaan prasarana sarana umum yang memadai serta penyediaan akses telekomunikasi dan digital.	Percepatan penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas perdagangan dan jasa yang inklusif dan berdaya saing.	Pemantapan infrastruktur penunjang aktivitas perdagangan dan jasa yang inklusif dan berdaya saing.	Perwujudan infrastruktur penunjang aktivitas perdagangan dan jasa yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
		Pembangunan dan perluasan cakupan layanan sarana prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi yang saling terintegrasi antar moda pada wilayah kota dengan memperhatikan aksesibilitas terhadap prasarana umum dan obyek strategis serta kepentingan pengembangan MICE tourism.	Pengembangan dan perluasan cakupan layanan sarana prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi pada wilayah kota yang terintegrasi dengan wilayah sekitar khususnya Ciayumajakuning dengan memperhatikan aksesibilitas MICE tourism dan aksesibilitas dengan Bandara Kertajati.	Pemantapan layanan sarana prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi pada wilayah kota yang saling terintegrasi dengan jangkauan aksesibilitas Ciayumajakuning.	Perwujudan layanan sarana prasarana sistem transportasi publik massal yang efisien, menunjang produktivitas dan berkelanjutan.
		Perencanaan dan penataan jaringan pergerakan yang mendukung mobilitas yang humanis dan berkelanjutan antara lain jalur pedestrian dan jalur sepeda.	Penguatan penataan jaringan pergerakan yang mendukung mobilitas yang humanis dan berkelanjutan	Pemantapan jaringan pergerakan yang mendukung mobilitas yang humanis dan berkelanjutan untuk mendukung terciptanya kota Cirebon yang layak huni	Perwujudan jaringan pergerakan yang mendukung mobilitas yang humanis dan berkelanjutan untuk mendukung terciptanya kota Cirebon yang layak huni
		Penguatan pengelolaan jalan kota dan jalan lingkungan.	Akselerasi dan penguatan pengelolaan jalan kota dan jalan lingkungan.	Pemantapan jalan kota dan jalan lingkungan.	Perwujudan jalan kota dan jalan lingkungan yang mantap dan berkelanjutan.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Fondasi	Akselerasi	Pemantapan	Perwujudan
		Perencanaan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pemanfaatan energi rendah emisi berbasis energi baru dan terbarukan, khususnya sistem ketenagalistrikan skala kecil pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi	Percepatan pengembangan infrastruktur yang mendukung pemanfaatan energi rendah emisi berbasis energi baru dan terbarukan	Optimalisasi infrastruktur yang mendukung pemanfaatan energi rendah emisi berbasis energi baru dan terbarukan.	Perwujudan infrastruktur yang mendukung pemanfaatan energi rendah emisi berbasis energi baru dan terbarukan.
		Pengembang infrastruktur digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital	Peningkatan ekosistem digital melalui peningkatan utilisasi, pemanfaatan TIK, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka transformasi digital	Pemantapan pemanfaatan ekosistem digital dalam aktivitas sosial-ekonomi-lingkungan	Perwujudan ekosistem digital dalam aktivitas sosial-ekonomi-lingkungan
		Pengembangan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air dengan mengoptimalkan sumber-sumber air baku alternatif, antara lain Jatigede.	Akselerasi pengembangan infrastruktur sumber daya air	Preservasi dan pendayagunaan sumber daya air yang optimal dan efisien.	Perwujudan ketahanan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025 - 2029 Fondasi	2030 - 2034 Akselerasi	2035 - 2039 Pemantapan	2040 - 2045 Perwujudan
	Mewujudkan kelengkapan sarana prasarana pelayanan dasar yang berkualitas	Penyediaan dan pengelolaan data sarana prasarana pelayanan dasar yang terintegrasi dengan berbasis spasial	Akselerasi pengelolaan sarana prasarana pelayanan dasar yang terintegrasi dengan berbasis spasial	Optimalisasi pengelolaan sarana prasarana pelayanan dasar yang terintegrasi dan berkelanjutan	Perwujudan pengelolaan sarana prasarana pelayanan dasar yang terintegrasi dan berkelanjutan
		Perencanaan penyediaan hunian layak di perkotaan sesuai kebutuhan pengguna dan karakteristik wilayah antara lain melalui penyediaan hunian vertikal, rumah deret, dan optimalisasi kawasan campuran serta penataan kawasan kumuh dengan memperhatikan alternatif skema pembiayaan yang terjangkau.	Percepatan penyediaan serta peningkatan dan pemerataan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan melalui skema pembiayaan yang terjangkau sesuai kebutuhan pengguna dan karakteristik wilayah.	Pemantapan penyediaan serta peningkatan dan pemerataan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan.	Perwujudan hunian layak di perkotaan yang terjangkau dan sinergis dengan rencana tata ruang.
		Penyediaan, pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum yang merata, aman dan terjangkau bagi semua.	Percepatan penyediaan dan pemerataan peningkatan akses layanan air minum yang merata, aman dan terjangkau bagi semua.	Optimalisasi pemenuhan akses layanan air minum yang merata, aman dan terjangkau bagi semua.	Perwujudan keberlanjutan akses layanan air minum yang merata, aman dan terjangkau bagi semua.
		Peningkatan akses terhadap sanitasi yang memadai dan merata bagi semua orang	Percepatan pembangunan akses terhadap sanitasi yang memadai dan merata bagi semua orang	Optimalisasi pemenuhan akses terhadap sanitasi yang memadai dan merata bagi semua orang	Penguatan keberlanjutan akses terhadap sanitasi yang memadai dan merata bagi semua orang
		Peningkatan kualitas air dengan mengurangi polusi, yang masuk kedalam badan air dan secara signifikan meningkatkan daur ulang	Percepatan peningkatan kualitas air dengan mengurangi polusi, yang masuk kedalam badan air dan secara signifikan meningkatkan daur ulang	Pemantapan peningkatan kualitas air dengan mengurangi polusi, yang masuk kedalam badan air dan secara signifikan meningkatkan daur ulang	Penguatan keberlanjutan kualitas air dengan mengurangi polusi, yang masuk kedalam badan air dan tercapainya daur ulang secara signifikan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025 - 2029 Fondasi	2030 - 2034 Akselerasi	2035 - 2039 Pemantapan	2040 - 2045 Perwujudan
		Penyediaan dan peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar yang merata, meliputi antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi dan penunjang konektivitas, termasuk di kawasan Cirebon selatan.	Akselerasi penyediaan peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar yang merata, meliputi antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi dan penunjang konektivitas, termasuk di kawasan Cirebon selatan.	Pemantapan penyediaan dan peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.	Perwujudan sarana prasarana pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.
	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Penyelenggaraan penataan ruang yang mengarah pada penerapan compact city dalam penyediaan layanan perkotaan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ketersediaan ruang terbuka hijau, keanekaragaman hayati, serta mempertimbangkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim serta wilayah kesatuan lanskap ekologis.	Akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana pola ruang dan struktur ruang yang berwawasan lingkungan.	Optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai rencana pola ruang dan struktur ruang yang berwawasan lingkungan.	Perwujudan tata ruang wilayah yang efisien, berwawasan lingkungan, dan berdaya saing.
		Penyediaan, pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum yang merata, aman dan terjangkau bagi semua.	Percepatan penyediaan dan pemerataan peningkatan akses layanan air minum yang merata, aman dan terjangkau bagi semua.	Optimalisasi pemenuhan akses layanan air minum yang merata, aman dan terjangkau bagi semua.	Perwujudan keberlanjutan akses layanan air minum yang merata, aman dan terjangkau bagi semua.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Fondasi	Akselerasi	Pemantapan	Perwujudan
+		Penyusunan rencana pengembangan kawasan, antara lain termasuk revisi RDTR, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, standar pelayanan, dsb.	Percepatan penyusunan rencana pengembangan kawasan untuk mendukung akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang, antara lain termasuk urban renewal, penataan kawasan pesisir, sempadan sungai dan sempadan jalan.	Pemantapan pengelolaan lingkungan permukiman dan perkotaan untuk mendukung pengembangan kawasan yang menunjang kegiatan produktif, humanis dan berwawasan lingkungan.	Perwujudan pengembangan kawasan perkotaan yang menunjang kegiatan produktif, humanis, berwawasan lingkungan, dan mendukung penguatan citra Kota Cirebon.
		Perencanaan dan penyiapan kerangka implementasi standar bangunan dan penataan lingkungan yang berketahanan bencana dan iklim	Percepatan penerapan standar bangunan dan penataan lingkungan yang berketahanan bencana dan iklim	Optimalisasi implementasi standar bangunan dan penataan lingkungan yang berketahanan bencana dan iklim	Perwujudan bangunan dan penataan lingkungan yang berketahanan bencana dan iklim
		Perencanaan dan implementasi penatagunaan tanah	Percepatan tertib pertanahan, termasuk antara lain legalisasi aset Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan status tanah timbul.	Pemantapan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan serta pengendalian pemanfaatan tanah timbul dan ruang-ruang publik.	Perwujudan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai arahan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah.
		Perencanaan penyediaan cadangan lahan untuk kepentingan pembangunan daerah.	Peningkatan pengelolaan lahan yang efektif dan efisien dalam mengelola cadangan lahan untuk kepentingan pembangunan daerah.	Optimalisasi pengelolaan cadangan lahan untuk mendukung peningkatan investasi dalam pembangunan daerah.	Tersedianya sistem pengelolaan lahan yang efektif dan efisien dalam mengelola cadangan lahan untuk kepentingan pembangunan daerah.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN MISI			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAPIV
		2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Fondasi	Akselerasi	Pemantapan	Perwujudan
		Sinkronisasi periodisasi dan substansi serta integrasi rencana tata ruang dengan dokumen perencanaan pembangunan berbasis spasial	Akselerasi integrasi implementasi rencana tata ruang dengan dokumen perencanaan pembangunan berbasis spasial	Pemantapan integrasi rencana tata ruang dengan dokumen perencanaan pembangunan berbasis spasial	Perwujudan perencanaan pembangunan daerah yang holistik, integrasi, tematik, dan spasial.

5.2 Sasaran Pokok

Sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada dasarnya merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok.

Sasaran Pokok RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi Kota Cirebon. Sasaran dirumuskan dari Arah Pembangunan hasil penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045, Arah Kebijakan Transformasi serta Indikator Utama Pembangunan berupa indikator hasil penyelarasan.

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Mengacu pada Arah Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, maka Arah Pembangunan Kota Cirebon Tahun 2025-2045 adalah:

Tabel V-2 Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPN Tahun 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi 2025-2045		RPJPD Kab/Kota 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
1	Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Transformasi Sosial	Pelayanan Kesehatan prima untuk semua	Transformasi Sosial	Pemerataan pelayanan kesehatan
		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		Pendidikan berkualitas yang merata		Pemerataan pendidikan yang berkualitas
		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju		Penguatan perlindungan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial
2	Transformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas ekonomi daerah	Transformasi Ekonomi	Penguatan ekonomi lokal dan ekonomi kreatif
		IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau		Penerapan ekonomi hijau, biru dan digital		Penerapan ekonomi hijau, biru dan digital
		IE 6. Transformasi Digital		Pembangunan SDM berdaya saing		Pembangunan SDM berdaya saing
		IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global		Peningkatan ekosistem perdagangan dan jasa berorientasi ekspor
		IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan		Penguatan pusat pelayanan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah
3	Transformasi Tata Kelola	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Transformasi Tata Kelola	Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Transformasi Tata Kelola	Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Peningkatan kondusivitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi 2025-2045		RPJPD Kab/Kota 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
		IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro		Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah		Meningkatkan stabilitas ekonomi makro daerah
		IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan		Peningkatan kerjasama regional maupun internasional		Peningkatan kerjasama internasional
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan kerukunan umat beragama	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan kerukunan umat beragama
		IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender		Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender
		IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas		Peningkatan kualitas lingkungan hidup		Peningkatan kualitas lingkungan hidup
		IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi		Ketahanan pangan, air dan energi
		IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim		Ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penjabaran dari arah kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan karakteristik Kota Cirebon dan mendukung tercapainya Visi Kota Cirebon. Secara rinci tercantum pada tabel berikut.

Tabel V-3 Arah Kebijakan Transformasi Kota Cirebon Tahun 2025-2045

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
Transformasi Sosial	Pemerataan pelayanan kesehatan	Transformasi Sosial
		Peningkatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan
		Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal
		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap melalui kearifan lokal
		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
		Penguatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di Cirebon selatan
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas
		Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .
		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
		Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion
		Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.
		Efektivitas fasilitasi bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat
		Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
		Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
		Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban renewal</i> pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		Transformasi Ekonomi
		Percepatan pemenuhan kualitas infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.
		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
		Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .
		Implementasi Transformasi
		Mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria.
	Pemerataan pendidikan yang berkualitas	Transformasi Sosial
		Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan pendidikan kesetaraan
		Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi
		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, dasar, dan kesetaraan yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah
		Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan
		Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
		Penguatan pendidikan vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
		Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik
		Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
		Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
		Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung upaya pelayanan pendidikan yang berkualitas
		Peningkatan akses pendidikan menengah dan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>).

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		Penyelenggaraan pendidikan dasar terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
		Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK
		Fasilitasi penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.
		Peningkatan efektivitas fasilitasi bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat
		Fasilitasi penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, dan rentan
		Transformasi Ekonomi
		Penguatan pengelolaan jalan kota.
		Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global
		Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.
		Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui <i>digital marketplace/platform</i> .
		Transformasi Tata Kelola
		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
		Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro
		Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
		Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
		Implementasi Transformasi
		Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas re-searcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luarmnegeri.
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
	Penguatan perlindungan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial	Transformasi Sosial
		Peningkatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan
		Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal
		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap melalui kearifan lokal
		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
		Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
		Penguatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas
		Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .
		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan pendidikan kesetaraan
		Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi
		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, dasar, dan kesetaraan yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah
		Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan
		Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung upaya pelayanan pendidikan yang berkualitas
		Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK
		Fasilitasi penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama
		Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan
		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion
		Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> .
		Pengembangan/peningkatan <i>government-induced</i> activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi wilayah
		Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.
		Efektivitas fasilitasi bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat
		Fasilitasi penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, dan rentan
		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.
		Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
		Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
		Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.
		Transformasi Ekonomi
		Peningkatan produktivitas dan distribusi produk pangan sebagai upaya penguatan ketahanan pangan.
		Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui <i>digital marketplace/platform</i> .
		Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, pada kawasan perkotaan Cirebon.
		Percepatan pemenuhan kualitas infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan
		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (<i>green & grey infrastructure</i>) pada kawasan perkotaan
		Mendukung peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan.
		Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan
		Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.
		<i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i> , terutama pada kawasan perkotaan.
		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, wisata religi maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
		Penguatan pengelolaan jalan kota.
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan. Transformasi Tata Kelola Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat, dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. Penguatan integritas partai politik Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>. Implementasi Transformasi Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. Mendukung percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas Mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria.

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
Transformasi Ekonomi	Penguatan ekonomi lokal dan ekonomi kreatif	Transformasi Sosial
		Penguatan pendidikan vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
		Penyelenggaraan pendidikan dasar terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
		Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.
		Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi wilayah
		Transformasi Ekonomi
		Peningkatan produktivitas dan distribusi produk pangan sebagai upaya penguatan ketahanan pangan.
		Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.
		Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui <i>digital marketplace/platform</i> .
		Fasilitasi akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.
		Pengembangan <i>closed loop</i> model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan. Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. Mendukung penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa transportasi (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi) Percepatan pemenuhan kualitas infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan. Mendukung peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan. <i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i>, terutama pada kawasan perkotaan. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Cirebon Raya. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, wisata religi maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. Penguatan pengelolaan jalan kota. Peningkatan sarana & prasarana yang terintegrasi dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif, terutama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati). Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global Mendukung penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i>, dan pajak karbon.

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. Peningkatan produktivitas BUMD. Transformasi Tata Kelola Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital). Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Penguatan pengendalian inflasi daerah. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .
		Implementasi Transformasi
		Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (revisi RTRW, revisi RDTR, standar pelayanan, dsb.).
		Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
		Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luarmnegeri.
		Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .
	Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru	Transformasi Sosial
		Penyelenggaraan pendidikan dasar terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.
		Transformasi Ekonomi
		Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
		Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
		Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
		Mendukung penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa transformasi (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)
		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (<i>green & grey infrastructure</i>) pada kawasan perkotaan
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.
		Fasilitasi percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		Mendukung penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon.
		Mendukung pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
		Transformasi Tata Kelola
		Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
		Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.
		Peningkatan upaya pelestarian ekosistem alami.
		Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .
	Peningkatan transformasi digital	Transformasi Sosial
		Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan pendidikan kesetaraan
		Peningkatan akses pendidikan menengah dan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>).
		Penyelenggaraan pendidikan dasar terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK
		Transformasi Ekonomi
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui <i>digital marketplace/platform</i> .
		Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif
		Mendukung peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.
		Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan
		Transformasi Tata Kelola
		Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.
		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
		Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
		Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah
		Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
		Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya .
		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
		Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
		Implementasi Transformasi
		Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
	Peningkatan ekosistem perdagangan dan jasa berorientasi ekspor	Transformasi Sosial
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun <i>reskilling</i> .
		Pengembangan/peningkatan <i>government-induced</i> activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi wilayah
		Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.
		Transformasi Ekonomi
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
		Pengembangan <i>closed loop</i> model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian
		Pengembangan <i>closed loop</i> model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
		Mendukung penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa perdagangan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)
		Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, pada kawasan perkotaan Cirebon.
		Percepatan pemenuhan kualitas infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan
		Mendukung peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan.
		Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		Fasilitasi percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Cirebon Raya. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. Mendukung pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa. Penguatan pengelolaan jalan kota. Mendukung pembangunan Jalan Tol Trans Jawa yang melintasi Kota Cirebon untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: - Cirebon-Indramayu; dan - Cirebon-Kuningan. Mendukung pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan. Mendukung pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama dry port KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon. Mendukung peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat) Mendukung optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan kualitas pelayanan Pelabuhan Cirebon terhadap Pelabuhan Patimban. Mendukung pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan Peningkatan sarana & prasarana yang terintegrasi dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif, terutama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati). Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. Peningkatan produktivitas BUMD.

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		Mendukung pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. Transformasi Tata Kelola Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital). Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. Implementasi Transformasi Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (revisi RTRW, revisi RDTR, standar pelayanan, dsb.). Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luarmnegeri.

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
	Penguatan pusat pelayanan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah	Transformasi Sosial
		Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
		Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.
		Pengembangan/peningkatan <i>government-induced</i> activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi wilayah
		Transformasi Ekonomi
		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
		Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
		Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
		Mendukung penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa transportasi (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)
		Percepatan pemenuhan kualitas infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.
		Mendukung peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan.
		Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan
		Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		Fasilitasi percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. <i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i>, terutama pada kawasan perkotaan. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Cirebon Raya. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. Penguatan pengelolaan jalan kota. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>. Implementasi Transformasi Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luarmnegeri. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>.

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
	Tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas	Transformasi Sosial
		Pengembangan/peningkatan <i>government-induced</i> activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi wilayah
		Transformasi ekonomi
		<i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i> , terutama pada kawasan perkotaan.
		Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Cirebon Raya.
		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, wisata religi maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
		Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
		Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
		Mendukung pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama dry port KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon.
		Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.
		Transformasi tata kelola
		Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital.
		Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Kota Cirebon, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Cirebon yang profesional dan bebas korupsi.
		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
		Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
		Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
		Penguatan integritas partai politik
		Implementasi Transformasi
		Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (revisi RTRW, revisi RDTR, standar pelayanan, dsb.).

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		Mendukung percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas re-searcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik,DUDI, masyarakat, baik dalam dan luarmnegeri. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional. Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan	Peningkatan kondusifitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Transformasi Sosial Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien. Transformasi tata kelola Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat, dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
		Implementasi Transformasi
		Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
		Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.
	Stabilitas ekonomi makro daerah	Transformasi Sosial
		Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
		Transformasi ekonomi
		Fasilitasi akses pembiayaan kredit usaha pertanian.
		Pengembangan <i>closed loop</i> model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian
		Fasilitasi akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.
		Pengembangan <i>closed loop</i> model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.
		Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
		Penguatan pengendalian inflasi daerah.
		Implementasi Transformasi
		Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .
	Peningkatan kerjasama regional maupun internasional	Transformasi ekonomi
		Fasilitasi akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.
		Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global
		Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.
		Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)
		Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi
		Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
		Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya .
		Implementasi Transformasi
		Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan kerukunan umat beragama	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
		Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
		Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
	Ketahanan keluarga dan pengarusutamaan gender	Transformasi Sosial
		Peningkatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan
		Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .
		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
		Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun <i>reskilling</i> .
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
		Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.
		Transformasi ekonomi
		Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, pada kawasan perkotaan Cirebon.
		Transformasi tata kelola
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat, dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Transformasi sosial
		Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.
		Transformasi ekonomi
		Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, pada kawasan perkotaan Cirebon.
		Mendukung penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon.
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.
		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
		Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.
		Peningkatan upaya pelestarian ekosistem alami.
		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
		Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .
		Implementasi Transformasi
		Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (revisi RTRW, revisi RDTR, standar pelayanan, dsb.).
		Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
	Ketahanan pangan, air dan energi	Transformasi sosial
		Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
		Transformasi ekonomi
		Peningkatan produktivitas dan distribusi produk pangan sebagai upaya penguatan ketahanan pangan.
		Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.
		Fasilitasi akses pembiayaan kredit usaha pertanian.
		Pengembangan <i>closed loop</i> model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian
		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan -pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui <i>digital marketplace/platform</i> .
		Fasilitasi akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.
		Pengembangan <i>closed loop</i> model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan. Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. Mendukung penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.) Percepatan pemenuhan kualitas infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (<i>green & grey infrastructure</i>) pada kawasan perkotaan Fasilitasi percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. <i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i>, terutama pada kawasan perkotaan. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Cirebon Raya. Peningkatan produktivitas BUMD. Mendukung pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
	Ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
		Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
		Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
		Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.
		Peningkatan upaya pelestarian ekosistem alami.
		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
		Implementasi Transformasi
		Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
		Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (revisi RTRW, revisi RDTR, standar pelayanan, dsb.).
		Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas re-searcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik,DUDI, masyarakat, baik dalam dan luarmnegeri.
		Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
		Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.

5.2.3 Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kota Cirebon mengacu kepada IUP RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 ditetapkan untuk mengukur keberhasilan arah pembangunan dan sasaran pokok yang akan dicapai sebagai penjabaran visi dan misi Kota Cirebon. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel V-4 Indikator Utama Pembangunan RPPJD Kota Cirebon Tahun 2025-2045

Arah Pem- angunan	Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045				
		Baseline 2025	Tahap 1 Target 2029	Tahap 2 Target 2034	Tahap 3 Target 2039	Tahap 4 Sasaran 2045
CEJ 1	Pemerataan pelayanan kesehatan					
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,49	75,53	75,58	76,21	78,81
2	Kesehatan Ibu dan Anak:					
	a) Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (jumlah)	10	6	4	2	1
	b) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	17,43	13,61	9,99	7,02	4,59
3	Penanganan Tuberkulosis:					
	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)*	91	91	92	95	98
	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)*	91	91	92	95	98
	c. Angka kejadian tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	451/100.000	267/100.000	65/100.000	65/100.000	65/100.000
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100	100	100	100	100
CEJ 2	Pemerataan pendidikan yang berkualitas					
5	Hasil pembelajaran:					
	a). Capaian standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:					
	i) Literasi Membaca					
	SD	85,48	87,48	89,98	92,48	95,48
	SMP	85,43	87,43	89,93	92,43	95,43
	ii) Numerasi					
	SD	78,73	80,73	83,23	85,73	88,73
	SMP	79,51	81,51	84,01	86,51	89,51
	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:					
	i) Literasi Membaca					
	SD	85,48	87,48	89,98	92,48	95,48
	SMP	85,43	87,43	89,93	92,43	95,43

Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045				
		Baseline 2025	Tahap 1 Target 2029	Tahap 2 Target 2034	Tahap 3 Target 2039	Tahap 4 Sasaran 2045
	ii) Numerasi					
	SD	78,73	80,73	83,23	85,73	88,73
	SMP	79,51	81,51	84,01	86,51	89,51
	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,19	13,23	13,28	13,33	14,49
CEJ 3	Pemenuhan layanan kesejahteraan sosial					
8	Tingkat kemiskinan (%)	7,58 – 8,37	6,30 - 7,05	4,66 - 5,37	3,02 - 3,69	0,12 - 0,76
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota (%)	19,6	20,4	21,4	22,4	23,4
10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	2,24	3,24	4,74	5,99	7,49
CEJ 4	Penguatan ekonomi lokal dan ekonomi kreatif					
A	Rasio PDRB Sektor Strategis:					
11	a) Rasio PDRB industri pengolahan (%)	10,34	10,26	10,01	9,94	9,83
	b) Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran (%)	28,31	28,51	28,63	28,87	29,23
	c) Kontribusi PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan (%)	14,47	15,15	15,28	15,86	16,41
	d) Kontribusi PDRB sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (%)	11,84	12,07	12,30	12,49	12,68
12	Pengembangan Pariwisata					
	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	6,06	6,24	6,57	6,79	7,05
	b) Jumlah Tamu Wisatawan Domestik (Ribuan Orang)	3.130	3.500	4.500	5.500	6.500
	c) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)	40	50	75	125	200
13	Kontribusi PDRB sektor Ekonomi Kreatif (%)	18,52	18,64	18,79	18,89	19,21
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:					
	a) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota (%)	99,77	99,79	99,81	99,83	99,85
	b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	5,29	6,21	8,44	10,36	14,42
	c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	2,31	2,35	2,4	2,45	2,5
	d) <i>Return on Asset (RoA)</i> BUMD (%)					
B	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja					
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,57 – 7,16	5,89 - 6,52	5,38 - 6,17	4,96 - 5,87	4,45 - 5,52

Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045				
		Baseline 2025	Tahap 1 Target 2029	Tahap 2 Target 2034	Tahap 3 Target 2039	Tahap 4 Sasaran 2045
16	a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	55,81	55,97	56,17	56,37	56,57
	b) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota (Juta/TK)	104,85	105,57	106,47	107,37	108,27
17	Tingkat penguasaan IPTEK:					
	Indeks Inovasi Daerah	43,5	45,5	48	50,5	53,5
CEJ 5	Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru					
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau :					
	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	71,71	72,63	73,94	76,28	79,11
CEJ 6	Transformasi digital					
19	Peningkatan kinerja informasi publik dan statistik					
	a) Indeks Pembangunan Statistik	2,79	3,39	3,99	4,49	5
	b) Indeks keterbukaan informasi publik	91	93	94	95	96
CEJ 7	Peningkatan ekosistem perdagangan dan jasa berorientasi ekspor					
20	Indeks Harga Konsumen (IHK)	105-115	105-115	108-118	111-121	114-124
21	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24,34	24,62	24,84	25,05	25,38
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	1,71	1,75	2	2,25	2,5
CEJ 8	Penguatan pusat pelayanan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah					
23	Kota dan kelurahan Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan					
	a) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	80,87	88,05	91,75	95,45	100
	b) Presentase kelurahan swasembada (%)	40,91	50	68,18	77,27	90,91
CEJ 9	Tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas					
24	Indeks Reformasi Hukum	77,23	80,03	83,53	87,03	91,23
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	432	536	571	610	645
26	Indeks Pelayanan Publik	3,82	3,9	4	4,1	4,22
27	Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI)	70,27	73,38	77,27	81,15	85,81

Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045				
		Baseline 2025	Tahap 1 Target 2029	Tahap 2 Target 2034	Tahap 3 Target 2039	Tahap 4 Sasaran 2045
CEJ 10	Peningkatan kondusivitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat					
28	Kinerja ketentramanan dan ketertiban umum daerah					
	a) Persentase Penegakan Peraturan Daerah	61	71	84	100	100
	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	80	83	86	88	90
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	68,76	70,05	71,66	73,27	74,58
30	Kinerja Kesatuan Bangsa dan Demokrasi Kota Cirebon					
	a) Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat	71	72	73	74	75
	b) Tingkat partisipasi penduduk dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada	83,44	84	85	86	87
	c) Tingkat Pemahaman Netralitas ASN	77,1	78	79	80	81
CEJ11	Stabilitas ekonomi makro daerah					
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,775	0,811	0,856	0,901	0,946
32	Tingkat Inflasi (%)	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5
33	Total Kredit/PDRB (%)	100	100	100	100	100
CEJ12	Peningkatan kerjasama regional maupun internasional					
35	Jumlah Kerjasama Kota Kembar/Bersaudara (Sister City)	1	1	1	1	1
CEJ13	Peningkatan kerukunan umat beragama					
37	Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	62,63	63,87	65,31	67,99	70,54
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,99 – 75,02	76,98 - 77,08	78,97 - 79,14	80,95 - 81,20	82,94 - 83,26
CEJ14	Ketahanan keluarga, dan pengarusutamaan gender					
39	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	61,54	63,45	64,95	66,45	68,25
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	405	397	387	377	365
CEJ15	Peningkatan kualitas lingkungan hidup					
42	Kualitas Lingkungan Hidup:					
	a. Indeks kualitas lingkungan hidup	52,99	54	55,26	56,53	58,04
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	25,43	46,93	67,18	82,06	96,93
	c. Pengelolaan Sampah					

Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045				
		Baseline 2025	Tahap 1 Target 2029	Tahap 2 Target 2034	Tahap 3 Target 2039	Tahap 4 Sasaran 2045
	i. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	86,51	93,1	100	100	100
	ii. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	90,9	95,37	100	100	100
CEJ16	Ketahanan pangan, air dan enegi					
43	Ketahanan energi, air, dan pangan:					
	a, Ketahanan Energi					
	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1.595,30	1.812,94	2.136,35	2.519,323	3.073,404
	b, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	4,93	3,78	2,63	1,49	0,34
	c, Ketahanan Air					
	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,63	0,9	1,18	1,45	1,72
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	33,97	47,18	63,69	80,19	100
CEJ 17	Ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim					
44	Indeks Resiko Bencana	125,06-124,84	120,18-119,96	118,96-113,87	112,87-107,78	106,78-101,69
45	Intensitas Emisi GRK Kumulatif (Ton Co2eq)	8.381,49	46.302,61	179.489,68	404.703	866.261,31

Tabel V-5. Perumusan Sasaran Pokok Kota Cirebon Tahun 2025—2045

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
			Baseline 2025	Target 2045	
CEJ 1. Pemerataan pelayanan Kesehatan	Peningkatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75.49	78.81	Terwujudnya pemerataan pelayanan kesehatan
		2. Kesehatan Ibu dan Anak:			
		a. Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (jumlah)	10	1	
		b. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	17,43	4.59	
	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal				
	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	3. Penanganan Tuberkulosis:			
	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap melalui kearifan lokal	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*	91	98	
	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)*	91	98	
	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan	c. Angka kejadian tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	451/100.000	65/100.000	
	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100	100	
	Penguatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan				
	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas				
	Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .				
	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.				
	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.				

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
			Baseline 2025	Target 2045	
CEJ 2. Pemerataan pendidikan yang berkualitas	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	5. Hasil pembelajaran:			Terwujudnya pemerataan pendidikan yang berkualitas
	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan pendidikan kesetaraan	a) Capaian standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:			
	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	i) Literasi Membaca			
		SD	85.48	95.48	
		SMP	85.43	95.43	
	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, dasar, dan kesetaraan yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah	ii) Numerasi			
		SD	78.73	88.73	
		SMP	79.51	89.51	
	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:			
	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	i) Literasi Membaca			
	Penguatan pendidikan vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	SD	85.48	95.48	
	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik	SMP	85.43	95.43	
	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	ii) Numerasi			
		SD	78.73	88.73	
		SMP	79.51	89.51	

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
			Baseline 2025	Target 2045	
	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan				
	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan				
	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan				
	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung upaya pelayanan pendidikan yang berkualitas				
	Peningkatan akses pendidikan menengah dan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>).				
	Penyelenggaraan pendidikan dasar terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan ber-taraf global.				
	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh ber-basis digital dan TIK				
	Fasilitasi penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama				
CEJ 3. Penguatan perlindungan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan	8. Tingkat kemiskinan (%)	7.58 - 8.37	0.12 – 0.76	Meningkatnya penguatan perlindungan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial
	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion	9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota (%)	19.6	23.40	
		10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	2.24	7.49	

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
			Baseline 2025	Target 2045	
	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun <i>reskilling</i>. Pengembangan/peningkatan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi wilayah Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien. Efektivitas fasilitasi bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat				

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
			Baseline 2025	Target 2045	
	Fasilitasi penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, dan rentan Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.				
CEJ 4. Penguatan produktivitas ekonomi lokal dan ekonomi kreatif	Peningkatan produktivitas dan distribusi produk pangan sebagai upaya penguatan ketahanan pangan.	A. Rasio PDRB Sektor Strategis:			Meningkatnya produktivitas ekonomi lokal dan ekonomi kreatif
	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	11. a) Rasio PDRB industri pengolahan (%)	10.34	9.83	
	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	b) Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran (%)	28.31	29.23	
		c) Kontribusi PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan (%)	14.47	16.41	

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
			Baseline 2025	Target 2045	
	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.	d) Kontribusi PDRB sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (%)	11.84	12.68	
	Fasilitasi akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	12. Pengembangan Pariwisata			
	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	a). Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	6:06	7:05	
	Pengembangan <i>closed loop</i> model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	b). Jumlah Tamu Wisatawan Domestik (Ribu Orang)	3.130	6.500	
	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	c). Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	40	200	
		13. Kontribusi PDRB sektor Ekonomi Kreatif (%)	18.52	19.21	
		14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:			
		a) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota (%)	99.77	99.85	
		b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	5.29	12.42	
		c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	2.31	2.5	

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
			Baseline 2025	Target 2045	
	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui <i>digital marketplace/platform</i> .	d) <i>Return on Assets</i> (RoA) BUMD (%)			
	Fasilitasi akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	B. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota (Juta/TK)			
	Pengembangan <i>closed loop</i> model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.	15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.57 – 7.16	4.45 - 5.52	
	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	55.81	56.57	
	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif	17. Tingkat penguasaan IPTEK: Indeks Inovasi Daerah	43.5	53.5	
	Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.				
	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.				

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
			Baseline 2025	Target 2045	
	Mendukung penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. <i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i>, terutama pada kawasan perkotaan. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Cirebon Raya. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, wisata religi maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.				

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
			Baseline 2025	Target 2045	
	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tata-ran global				
	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.				
	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.				
	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.				
	Peningkatan produktivitas BUMD.				
	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik,DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.				
	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .				

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
			Baseline 2025	Target 2045	
CEJ 5. Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru	Mendukung penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>off-setting</i> , dan pajak karbon.	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau :	71.71	79.11	Meningkatnya penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru
	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah			
	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.				
CEJ 6. Peningkatan transformasi digital	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.	19. Peningkatan kinerja Informasi Publik dan Statistik:	2.79	5	Terwujudnya transformasi digital
		a. Indeks Pembangunan Statistik			
		b. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	91	96	

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
			Baseline 2025	Target 2045	
CEJ 7. Peningkatan ekosistem perdagangan dan jasa berorientasi ekspor	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.	20. Indeks Harga Konsumen (IHK)	105-115	114-124	Meningkatnya peningkatan ekosistem perdagangan dan jasa berorientasi ekspor
	Mendukung penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)	21. Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24.34	25.38	
	Mendukung pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa.	22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	1.71	2.50	
	Penguatan pengelolaan jalan kota.				
	Mendukung pembangunan Jalan Tol Trans Jawa yang melintasi Kota Cirebon untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas:				
	- Cirebon-Indramayu; dan				
	- Cirebon-Kuningan.				
	Mendukung pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan.				
	Mendukung pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama dry port KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon.				
	Mendukung peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat)				

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
			Baseline 2025	Target 2045	
	Mendukung pengembangan kereta api cepat (HST/High Speed Train) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya. Mendukung optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan kualitas pelayanan Pelabuhan Cirebon terhadap Pelabuhan Patimban. Mendukung pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpun Peningkatan sarana & prasarana yang terintegrasi dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif, terutama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati). Mendukung pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang.				
CEJ 8. Penguatan pusat pelayanan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	23. Kota dan kelurahan Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Meningkatnya penguatan pusat pelayanan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah
	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, pada kawasan perkotaan Cirebon.	a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	80.87	100	
	Percepatan pemenuhan kualitas infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan	b. Presentase kelurahan swasembada (%)	40.91	90.91	

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
			Baseline 2025	Target 2045	
	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.				
	Mendukung peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan.				
	Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan				
	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.				
	Fasilitasi percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.				
	Mendukung percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas				

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
			Baseline 2025	Target 2045	
CEJ 9. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat, dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	24. Indeks Reformasi Hukum	77.23	91.23	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas
	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	432	645	
	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	26. Indeks Pelayanan Publik	3.82	4.22	
	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Kota Cirebon, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Cirebon yang profesional dan bebas korupsi.	27. Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI)	70.27	85.81	
	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital				
	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.				
	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.				
	Penguatan integritas partai politik				
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.				
	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota				
	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.				

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
			Baseline 2025	Target 2045	
	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. Mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria.				
CEJ 10. Peningkatan kondusifitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	68,76	74,58	Meningkatnya kondusifitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		30. Kinerja Kesatuan Bangsa dan Demokrasi Kota Cirebon:			
		a) Persentase Organisasi Masyarakat Aktif	71	75	
		b) Tingkat partisipasi penduduk dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada	83,44	87	
		c) Tingkat Pemahaman Netralitas ASN	77,1	81	
CEJ 11. Stabilitas ekonomi makro daerah	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,775	0,946	Terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah
		32. Tingkat Inflasi (%)	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	
		33. Total Kredit/PDRB (%)	100	100	

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
			Baseline 2025	Target 2045	
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.				
CEJ 12. Peningkatan kerjasama regional maupun internasional	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)	35. Jumlah Kerjasama Kota Kembar/Bersaudara (Sister City)	1	1	Meningkatnya kerjasama regional maupun internasional
	Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.				
CEJ 13. Penguatan kerukunan umat beragama	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	37. Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	62.63	70.54	Terwujudnya penguatan kerukunan umat beragama
	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74.99 - 75.02	82.94 - 83.26	
CEJ 14. Ketahanan keluarga, dan pengarusutamaan gender	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	39. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	61.54	68.25	Terwujudnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	405	365	

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
			Baseline 2025	Target 2045	
	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.				
CEJ 15. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.	42. Kualitas Lingkungan Hidup: a. Indeks kualitas lingkungan hidup b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) c. Pengelolaan Sampah i. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) ii. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	52.99	58.04	Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas
	Peningkatan upaya pelestarian ekosistem alami.		25.43	96.93	
	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.		86.51	100	
	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (revisi RTRW, revisi RDTR, standar pelayanan, dsb.).		90.90	100	
CEJ 16. Peningkatan ketahanan pangan, air dan enegi	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	43. Ketahanan energi, air, dan pangan: a. Ketahanan Energi - Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) b. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) c. Ketahanan Air	1.595,303	3.073,404	Terwujudnya ketahanan pangan, air dan enegi
	Mendukung pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran		4.93	0.34	
			0.63		

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
			Baseline 2025	Target 2045	
	pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)* - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	33.97	1.72 100	
CEJ 17. Peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	44. Indeks Resiko Bencana	125.06-124.84	106.78-101.69	Terwujudnya ketahanan bencana dan perubahan iklim
	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	45. Intensitas Emisi GRK Kumulatif (Ton Co2eq)	8.381,49	866.261,31	

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
			Baseline 2025	Target 2045	
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.				
	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (<i>green & grey infrastructure</i>) pada kawasan perkotaan				

BAB VI PENUTUP

6.1 Pelaksanaan

Disusunnya RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045 diharapkan agar arah kebijakan, sasaran pokok, dan target pembangunan jangka panjang dapat diturunkan ke dalam RPJMD serta dioperasionalkan dalam RKPD. Untuk merealisasikan RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045 yang penuh tantangan dan dinamika pembangunan, maka digunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu:

- A. Prinsip perencanaan kegiatan mengacu kepada prinsip perencanaan yang cerdas atau *SMART Planning*, yaitu program terpilih harus diyakini argumentatif dan memiliki kekhususan (*Specific*), terukur (*Measurable*), Ketercapaian (*Achievable*), ketersediaan sumber daya (*Resources Availability*), dan waktu (*Time*).
- B. Prinsip administrasi perencanaan, yaitu menggunakan *Shewhart Cycle* yang dikenal dengan Siklus PDCA dengan tahapan: Rencanakan (*Plan*), Kerjakan apa yang telah direncanakan (*Do*), periksa atau monitor pelaksanaan (*Check*), dan aksi tindak lanjut (*Action*). Untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan pada level perangkat daerah, maka digunakan pembagian peran perangkat daerah untuk melaksanakan RPJPD berdasarkan misi pembangunan, dengan membagi peran perangkat daerah setiap bidang urusan pada setiap misi pembangunan.
- C. Prinsip pelaksanaan program menggunakan prinsip akuntabilitas (*Accountability*) yang memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu:
 1. Taat dan sesuai aturan (*Compliance with Regulation*);
 2. Sesuai dengan norma profesionalisme (*Adherence with Norm Professionalism*); dan
 3. Berorientasi pada hasil yang berkualitas (*Quality Result Driven*)
- D. Prinsip dukungan kebijakan keuangan mengikuti kebutuhan program prioritas (*Money Follow Program*).
- E. Prinsip pengendalian untuk sukses pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan memerankan:
 1. Desk monitoring dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian kualitas implementasi kegiatan dan ketaatan waktu serta output; dan
 2. Desk akuntabilitas untuk kepentingan pendampingan (*counseling partner*) dan pengendalian ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran atau prinsip E3K (efesien, ekonomis, efektif dan ketaatan terhadap ketentuan).

Setiap perangkat daerah dapat merumuskan berbagai dokumen perencanaan sektoral yang dapat mengacu pada RPJPD ini. Dokumen RPJPD ini juga dapat menjadi acuan penyelarasan terhadap dokumen perencanaan pembangunan spasial yang termuat dalam dokumen RTRW beserta turunannya. Hal ini dimaksudkan untuk keselarasan perwujudan ruang yang sesuai dengan arah kebijakan RPJPD.

Pada pelaksanaannya juga diperlukan monitoring yang harus dilakukan secara rutin dan berkala. Selain itu, evaluasi dan perubahan dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam dalam 5 (lima) tahun untuk mengetahui pencapaian target pembangunan dan melakukan penyesuaian sesuai dengan dinamika yang terjadi.

Pelaksanaan semua kebijakan dalam RPJPD ini harus melibatkan multi-pihak baik pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat di Kota Cirebon.

6.2 Pembiayaan

RPJPD Kota Cirebon ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan dukungan sumber pembiayaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sumber pembiayaan pembangunan yang dapat digunakan, antara lain bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Cirebon. Selain itu, dimungkinkan untuk pembiayaan pembangunan dilakukan dengan menggunakan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Guna mengoptimalkan pemanfaatan barang produksi dalam negeri maka menjadi penting dalam pelaksanaan pembangunan agar memanfaatkan produk local dari Kota Cirebon khususnya. Hal ini untuk mewujudkan peningkatan dampak berganda dan nilai tambah dari hasil produk ekonomi Kota Cirebon. Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025 2045 sangat tergantung pada komitmen antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Kota Cirebon. Untuk itu perlu sinergi dan kerjasama guna mewujudkan visi pembangunan Kota Cirebon Tahun 2045: “Kota Cirebon Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

6.3 Proses Pelaksanaan Manajemen Risiko

Dalam implementasi dokumen RPJPD Kota Cirebon untuk setiap tahapannya baik jangka menengah maupun jangka pendek, harus diantisipasi melalui manajemen risiko untuk mitigasi hambatan atau kegagalan dalam pelaksanaannya. Strategi penanganan risiko terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu menerima risiko, transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko. Manajemen risiko terhadap dokumen RPJPD adalah untuk mengoptimalkan hasil dengan mengelola risiko secara maksimal. Capaian pada rencana pembangunan sangat bergantung pada proses mengantisipasi risiko yang telah dianalisis dari risiko yang telah teridentifikasi secara maksimal dengan mengendalikan risiko dan memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini telah tertuang dalam Penilaian Risiko Pasal 13 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Manajemen risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko di Pemerintah Daerah Kota Cirebon dilaksanakan sebelum penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan mengacu pada 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. Proses pelaksanaan pengendalian untuk Strategi, Implementasi dan Integrasi risiko disesuaikan pada Standar Nasional Indonesia ISO 31000 yang ditetapkan pada tahun 2018 oleh Badan Standar Nasional yang merupakan pedoman baku yang berlaku di Indonesia.

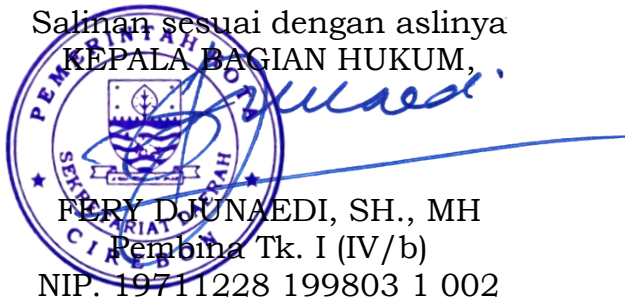
Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002